



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah memiliki peran penting untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, berdaya guna, dan berhasil guna;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan



- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut RTRW, adalah arahan kebijakan, strategi, dan rencana pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sleman untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
5. Bupati adalah Bupati Sleman.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kabupaten Sleman.



Pasal 2

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan RTRW.

Pasal 3

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJMD.

BAB II SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
 - d. BAB IV VISI DAN MISI DAERAH;
 - e. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK; dan
 - f. BAB VI PENUTUP.
- (2) Rincian sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 16 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA : (5, 27/2024)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah tidak terlepas dari perencanaan pembangunan daerah yang telah dilakukan dan ditetapkan sebelumnya. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Tahapan perencanaan daerah tersebut meliputi tahapan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimulai dari penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah memuat gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun. Rencana pembangunan jangka panjang daerah dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima tahun), khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok rencana pembangunan jangka panjang daerah. Arah kebijakan dan sasaran pokok rencana pembangunan jangka panjang daerah menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.



Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 208



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan, baik nasional maupun daerah, diperlukan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran. Dalam menyusun perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkewajiban memedomani dan mengacu perencanaan pembangunan nasional dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum dalam perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Adapun RPJPN merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional.

RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi dan rencana tata ruang wilayah. RPJPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJPD bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin tercipta integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menjamin tercapai penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, serta berkelanjutan.

RPJPD Kabupaten Sleman disusun dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada proses yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif diimplementasikan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik internal pemerintah daerah, maupun masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD. Pendekatan politis dilaksanakan dengan pembahasan substansi RPJPD dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas diterjemahkan melalui penyelarasan perencanaan mulai dari bawah, provinsi, hingga nasional. Pendekatan tersebut



menjadi landasan, agar perencanaan pembangunan dapat disusun secara adaptif dan komprehensif.

RPJPD Kabupaten Sleman merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan holistik-tematik, yaitu dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pembangunan daerah pada dasarnya memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun tidak dipungkiri, pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas, di sisi lain berpotensi menimbulkan dampak penurunan, baik secara kuantitas maupun kualitas terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup. Penyusunan RPJPD Kabupaten Sleman telah mengintegrasikan isu-isu pembangunan berkelanjutan yang termuat dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045. Kabupaten Sleman juga berkomitmen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan menuju masa depan yang inklusif, berkelanjutan dan tangguh dengan menyelaraskan pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial dan perlindungan lingkungan hidup.

Selama dua dekade terakhir ini, Kabupaten Sleman dalam perencanaan pembangunan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025. Untuk menjamin sinkronisasi, konsistensi, integrasi, dan kesinambungan capaian pembangunan di Kabupaten Sleman, penyusunan RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 memperhatikan rekomendasi hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025. Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 menjadi rujukan awal dalam perumusan dan perancangan RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 dan 6856);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012



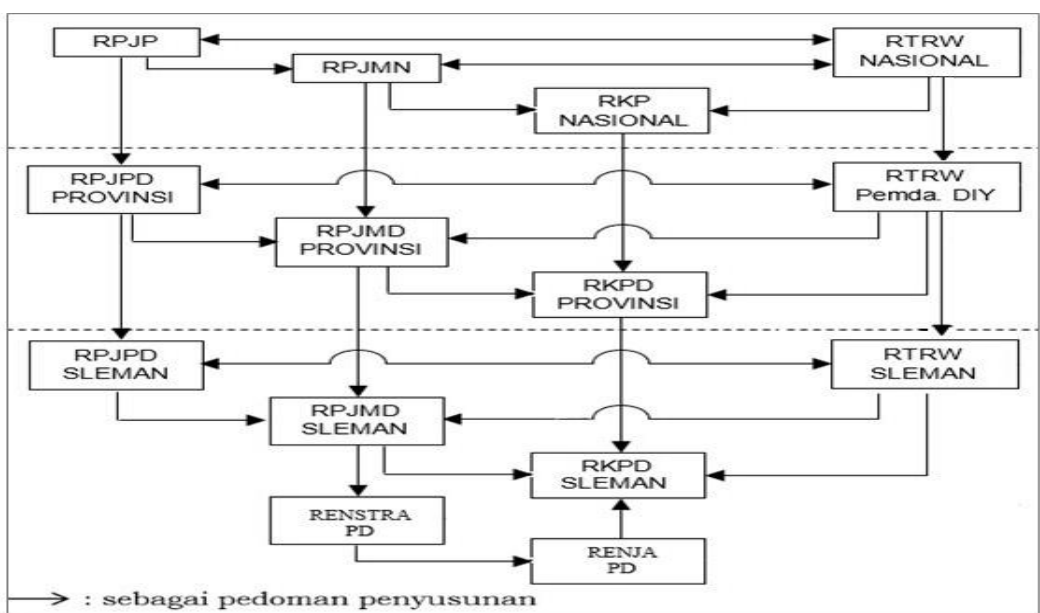
- Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 dan 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dan Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021/ Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
 9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 10);
 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023-2043 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1 dan 157);



- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2 dan 158);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 13 dan 182).

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan daerah memiliki keterkaitan dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional. RPJPD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang menjadi acuan dan pedoman kerangka pembangunan di daerah. Seperti tercantum dalam bagan, penyusunan RPJPD Kabupaten Sleman harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi dalam rangka penyelarasan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan. Selain itu, penyusunan RPJPD Kabupaten Sleman juga harus berpedoman pada rencana tata ruang wilayah sebagai wujud penyelarasan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.



Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, diolah, 2024

Gambar 1. 1. Kedudukan RPJPD Kabupaten Sleman Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Selanjutnya RPJPD Kabupaten Sleman akan dijadikan pedoman dalam perumusan visi dan misi Bupati dalam RPJMD Kabupaten Sleman untuk periode 5 (lima) tahunan.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Sleman dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. RPJPD juga sebagai pedoman penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman dengan periode 5 (lima) tahunan.

RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 disusun dengan tujuan memberikan arah kebijakan dan sasaran strategis pembangunan serta acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita sesuai dengan visi, misi, dan arah



pembangunan yang telah ditetapkan bersama, melalui koordinasi antarpelaku pembangunan daerah, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah daerah dan pusat serta optimalisasi partisipasi masyarakat untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan;
- BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- BAB III Permasalahan dan Isu Strategis;
- BAB IV Visi dan Misi Daerah;
- BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
- BAB VI Penutup



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografi Wilayah

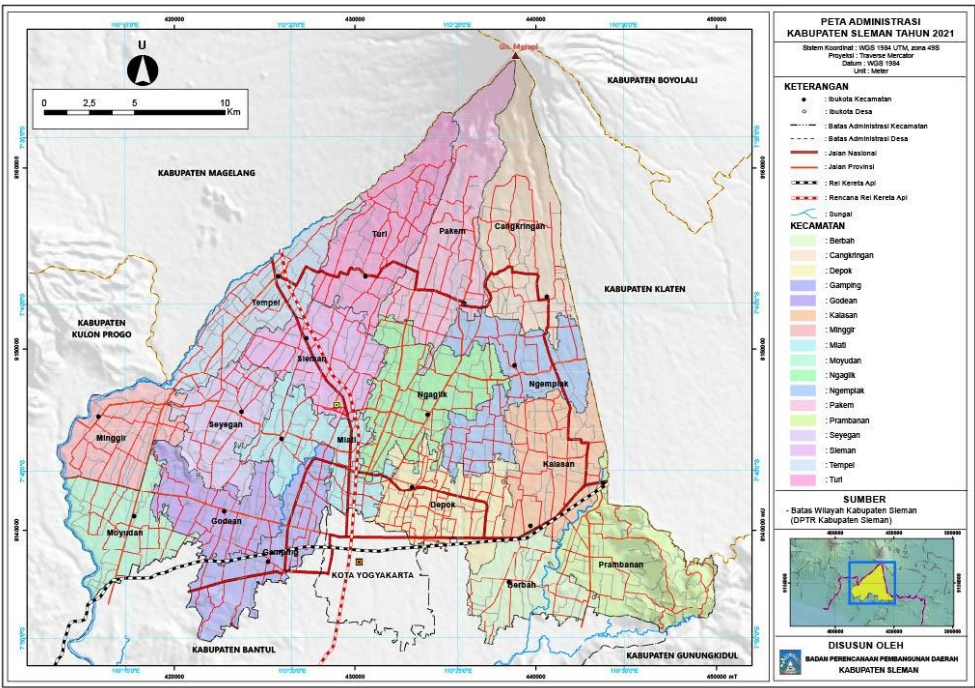
A. Gambaran Geografi Wilayah Kabupaten Sleman

1. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi Wilayah

Kabupaten Sleman secara geografis terletak pada 110°13'00" sampai dengan 110°33'00" Bujur Timur dan 7°34'51" sampai dengan 7°47'30" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah seluas 574,82 km². Kabupaten Sleman memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
- Sebelah Selatan : Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
- Sebelah Timur : Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kapanewon, 86 kalurahan, dan 1.212 padukuhan. Kapanewon dengan wilayah paling luas adalah Cangkringan (4.799 Ha), dan yang paling sempit adalah Berbah (2.299 Ha), sedangkan kapanewon dengan padukuhan terbanyak adalah Tempel (98 padukuhan), dan kapanewon dengan padukuhan paling sedikit adalah Turi (54 padukuhan). Adapun kapanewon dengan kalurahan terbanyak adalah Tempel (8 kalurahan), dan kapanewon dengan kalurahan paling sedikit adalah Depok (3 kalurahan).



Sumber: DPTK Kabupaten Sleman Tahun 2021

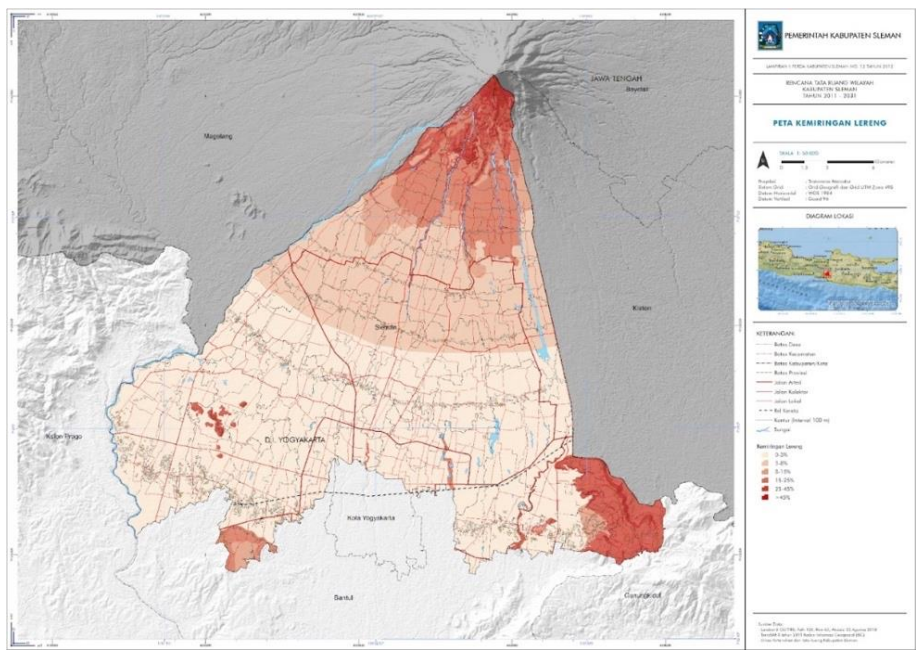
Gambar 2. 1. Peta Administrasi Kabupaten Sleman

2. Kondisi Geografis Wilayah

Kondisi geografis Kabupaten Sleman secara umum terbagi menjadi klasifikasi dua wilayah dataran, yaitu dataran rendah landai dengan dominasi persawahan di Kabupaten Sleman bagian selatan, dan dataran tinggi tanah kering dengan dominasi perkebunan serta



yang tersebar di Kapanewon Godean, Gamping, Berbah, Prambanan, Turi, Pakem dan Cangkringan.

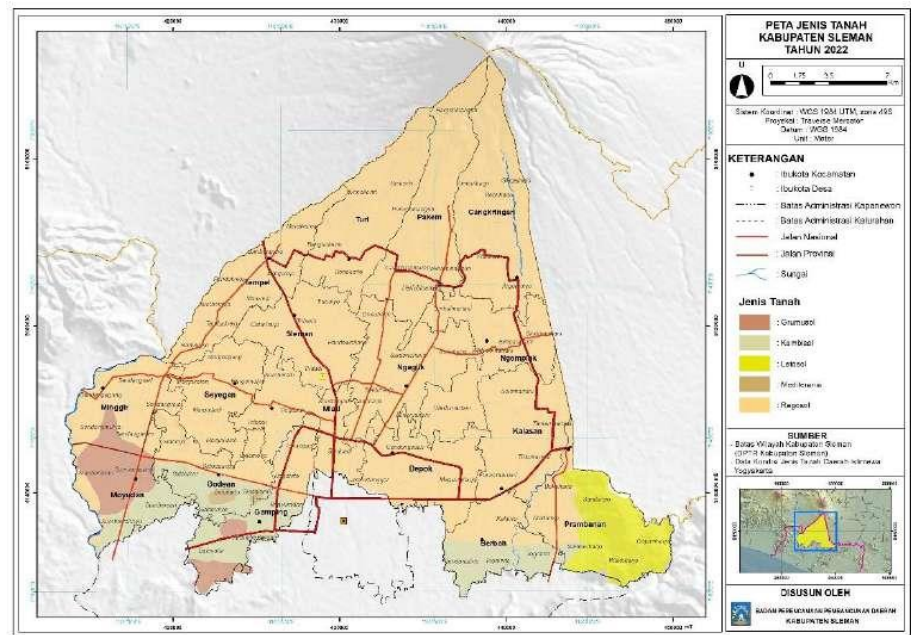


Sumber: DPTR Kabupaten Sleman Tahun 2021

Gambar 2. 3. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Sleman

4. Kondisi Geologi Wilayah

Kondisi geologi Kabupaten Sleman didominasi dari keberadaan Gunungapi Merapi. Formasi geologi dapat dibedakan menjadi endapan vulkanik, sedimen, dan batuan terobosan, dengan endapan vulkanik mewakili lebih dari 90% luas wilayah. Material vulkanik Gunungapi Merapi yang berfungsi sebagai lapisan pembawa air tanah (akuifer) yang sudah terurai menjadi material pasir vulkanik, yang sebagian besar merupakan bagian dari endapan vulkanik Merapi Muda. Material vulkanik Merapi Muda ini dibedakan menjadi 2 unit formasi geologi yaitu Formasi Sleman (lebih didominasi oleh endapan piroklastik halus dan tufa) di bagian bawah dan Formasi Yogyakarta (lebih didominasi oleh pasir vulkanik berbutir kasar hingga pasir berkerikil) di bagian atas.



Sumber: DPTR Kabupaten Sleman Tahun 2021

Gambar 2. 4. Peta Jenis Tanah Kabupaten Sleman

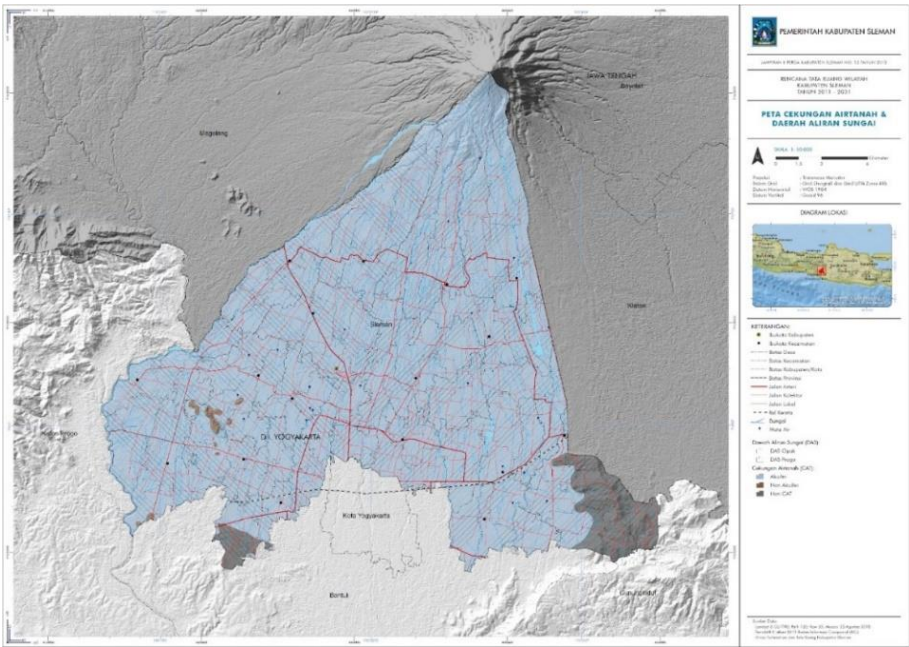
Kabupaten Sleman terdiri dari beberapa jenis tanah yang menjadi pembentuk wilayah, diantaranya jenis tanah latosol, regosol, grumusol,



mediteran, dan kombisol. Jenis tanah yang mendominasi adalah jenis tanah regosol yang tersebar pada 47.106 Ha atau 81,95% dari luas wilayah Kabupaten Sleman dan jenis tanah pembentuk yang paling sedikit adalah jenis tanah mediteran yang hanya seluas 289 Ha atau hanya sekitar 0,50% dari luas wilayah Kabupaten Sleman.

5. Kondisi Hidrologi Wilayah

Wilayah Kabupaten Sleman berada pada wilayah yang dilalui oleh 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Opak dan DAS Progo. Selain itu wilayah Kabupaten Sleman juga terdapat Cekungan Air Tanah (CAT) yang terbagi ke dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu CAT Akuifer, CAT Non Akuifer dan Non CAT.



Sumber: DPTR Kabupaten Sleman Tahun 2021

Gambar 2. 5. Peta Cekungan Air Tanah dan DAS Kabupaten Sleman

Wilayah Kabupaten Sleman memiliki empat jalur mata air (*springbelt*) terdiri dari jalur mata air Bebeng, mata air Sleman-Cangkringan, mata air Ngaglik, dan mata air Yogyakarta. Semua mata air tersebut dipengaruhi oleh ekosistem Gunungapi Merapi di bagian hulu yang mengalir ke daerah lebih rendah di bagian hilir di selatan. Sampai saat ini, mata air di Kabupaten Sleman sebanyak 364 titik yang dimanfaatkan masyarakat di sekitarnya sebagai sumber air bersih maupun irigasi kawasan pertanian Sumber mata air ini mengalir ke sejumlah sungai utama yaitu Sungai Boyong, Kuning, Gendol dan Krasak. Terdapat pula anak-anak sungai yang mengalir ke arah Selatan dan bermuara di Samudera Indonesia.

6. Kondisi Klimatologi Wilayah

Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Yogyakarta, kondisi iklim di sebagian besar wilayah Kabupaten Sleman termasuk tropis basah. Pada tahun 2023, jumlah hari hujan terbanyak dalam satu bulan adalah 24 hari dengan curah hujan paling tinggi adalah 365,10 mm/bulan pada bulan Februari, sedangkan curah hujan paling rendah pada bulan September sebesar 0,90 mm/bulan. Kecepatan angin maksimum sebesar 25 m/detik pada bulan Maret. Rata-rata kelembaban nisbi udara tertinggi 100% pada bulan Januari dan terendah 45% pada bulan Juli dan Desember, sedangkan temperatur udara tertinggi 35,6°C pada bulan Oktober dan terendah 18,20 °C pada bulan Juli.



B. Penggunaan Lahan

Perubahan lahan di Kabupaten Sleman selama periode tahun 2016-2022 didominasi oleh perubahan lahan untuk pekarangan dan diikuti penggunaan lahan sawah. Jumlah luasan penggunaan lahan sawah terjadi penurunan dari luas 20.854,22 Ha pada tahun 2016 menjadi 18.560,11 Ha pada tahun 2022. Adapun peningkatan perubahan penggunaan lahan terjadi pada penggunaan lahan pekarangan dari 21.160,32 Ha pada tahun 2016 menjadi 24.649,95 Ha pada tahun 2022. Tren perubahan lahan di Kabupaten Sleman pada tahun 2016 hingga tahun 2022 sebagaimana tertera dalam Tabel 2.1 di bawah.

Tabel 2. 1. Tren Penggunaan Lahan Kabupaten Sleman (Ha)

No	Penggunaan lahan	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Hutan	1.742,23	1.742,23	1.742,23	1.742,23	1.742,23	1.742,23	1.742,23
2	Pekarangan	21.160,32	22.554,86	23.628,43	24.335,42	24.472,13	24.527,66	24.649,95
3	Sawah	20.854,22	19.110,04	18.764,78	18.645,98	18.595,75	18.569,97	18.560,11
4	Semak	1.392,03	1.725,02	1.323,30	1.212,99	1.182,53	1.444,47	1.525,80
5	Perkebunan	8.353,11	8.259,29	7.869,35	7.439,02	7.387,03	7.298,51	7.217,18
6	Ladang	5.722,32	5.090,56	4.153,91	4.106,36	4.102,32	3.899,56	3.787,13
Jumlah		57.482,00	57.482,00	57.482,00	57.482,00	57.482,00	57.482,00	57.482,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Sleman, 2017- 2023

Perubahan penggunaan lahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain urbanisasi. Hal ini terjadi karena Kabupaten Sleman merupakan salah satu wilayah penyangga Kota Yogyakarta yang memiliki pertumbuhan penduduk yang pesat. Peningkatan jumlah penduduk ini menyebabkan kebutuhan akan lahan pemukiman semakin meningkat

Kabupaten Sleman juga memiliki potensi pengembangan industri dan sektor jasa yang cukup potensial. Hal ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan akan lahan industri dan sektor jasa tersebut, berpengaruh terhadap konversi lahan pertanian dan perkebunan menjadi lahan terbangun. Luasan lahan berdasarkan jenis penggunaannya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 2. Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten Sleman Tahun 2022

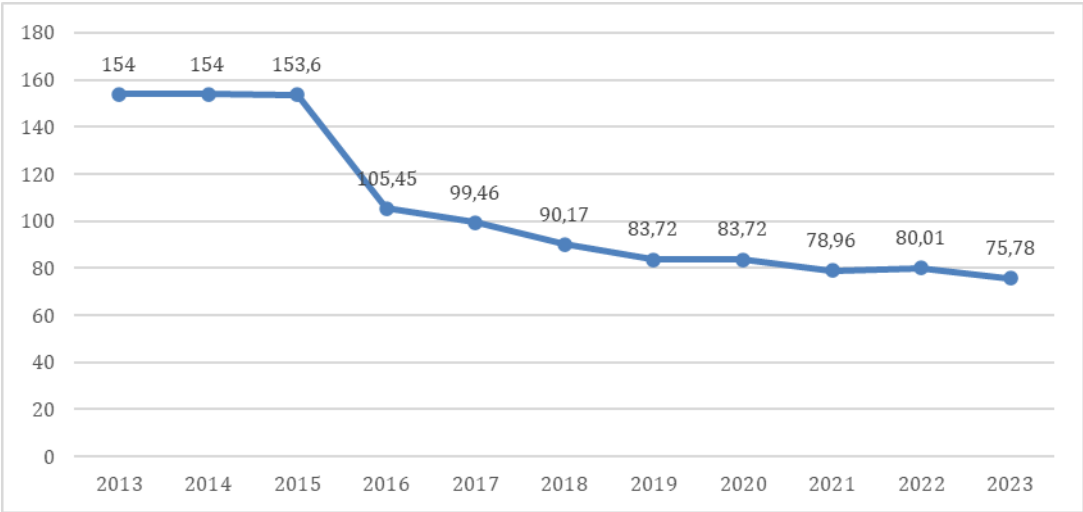
No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Bandara	178,41	0,31
2	Candi	48,67	0,08
3	Danau/Waduk	17,15	0,03
4	Gedung	25,11	0,04
5	Hutan	1.602,27	2,79
6	Industri	82,65	0,14
7	Kebun/ Perkebunan	9.229,94	16,09
8	Kolam Air Tawar	205,65	0,36
9	Lapangan	251,65	0,44
10	Makam	14,33	0,02
11	Permukiman	21.472,30	37,42
12	Peternakan	84,22	0,15
13	Rumput/ Tanah Kosong	395,71	0,69
14	Sawah Irigasi	20.902,96	36,43
15	Sawah Tadah Hujan	428,85	0,75
16	Semak/ Belukar	273,12	0,48
17	Sungai	678,54	1,18
18	Tanah Berbatu	195,74	0,34
19	Tegalan/ Ladang	1.288,68	2,25

Sumber: DPTR Kabupaten Sleman, 2023



C. Indeks Risiko Bencana

Kabupaten Sleman merupakan wilayah dengan nilai indeks risiko bencana yang tinggi sedang. Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan adalah membentuk sistem ruang mitigasi bencana terintegrasi dengan sistem peringatan dini, menerapkan desain bangunan sesuai karakteristik wilayah rawan bencana, serta melakukan pemeliharaan dan operasional infrastruktur agar berfungsi optimal pada saat terjadi bencana. Indeks risiko bencana pada tahun 2023 sebesar 75,78, dengan tren menurun setiap tahunnya. Adapun indeks risiko bencana tahun 2013-2023, disajikan dalam Grafik 2.1 di bawah.



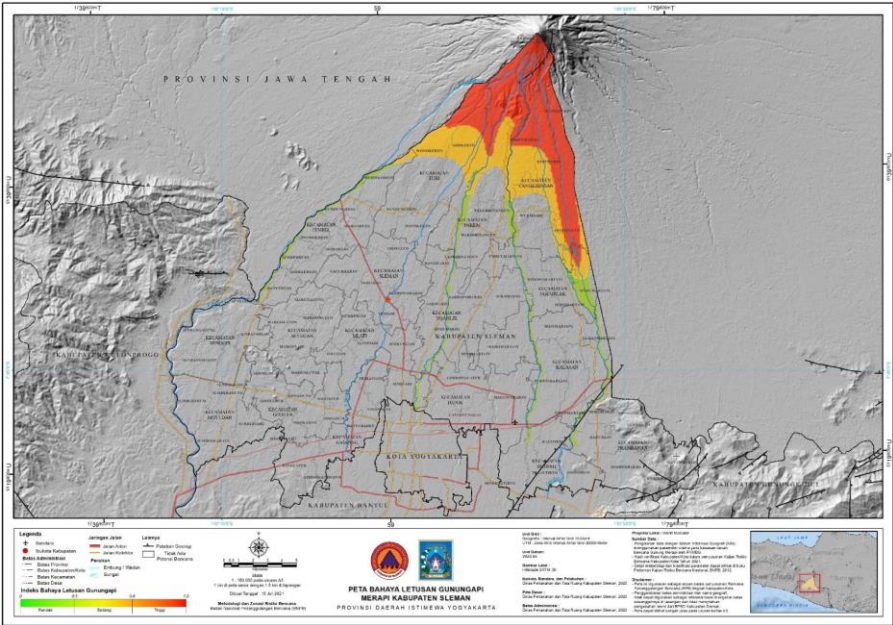
Sumber: BNPB, 2014-2024

Grafik 2. 1. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sleman Tahun 2013-2023

Berdasarkan kajian risiko bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, risiko bencana yang teridentifikasi di wilayah Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Risiko Bencana Letusan Gunungapi Merapi

Risiko bencana letusan gunungapi terdapat pada wilayah yang berada pada Kawasan Rawan Bencana Gunungapi seluas 9.148 Ha, yang tersebar di 11 (sebelas) kapanewon, dengan risiko rendah seluas 1.328 Ha, risiko sedang seluas 3.253 Ha dan risiko tinggi seluas 4.567 Ha. Kelas risiko sedang dan tinggi terdapat di Kapanewon Cangkringan, Pakem, Turi dan Ngemplak.



Sumber: BNPB, BPBD Kabupaten Sleman, 2021

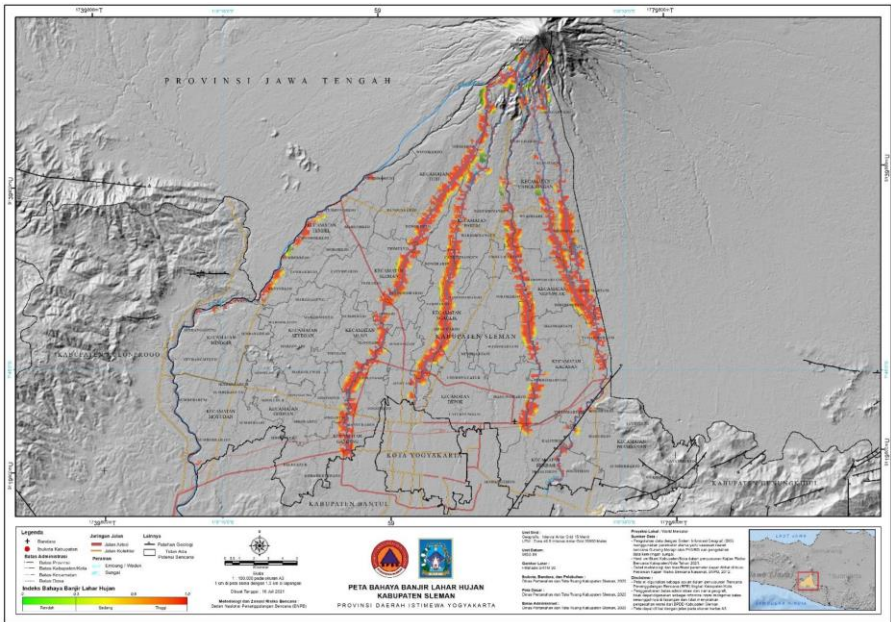


Gambar 2. 6. Peta Bahaya Letusan Gunungapi Merapi



2. Risiko Bencana Banjir Lahar Hujan

Risiko bencana banjir lahar hujan terdapat pada wilayah sekitar sungai yang berhulu di Gunungapi Merapi seluas kurang lebih 6.545 Ha. Risiko bencana banjir lahar hujan terdapat di 16 kapanewon, dengan risiko rendah seluas 163 Ha, risiko sedang seluas 660 Ha dan risiko tinggi seluas 6.545 Ha. Risiko bencana ini terdapat di wilayah sungai yang berhulu di Gunungapi Merapi. Penanganan bencana banjir lahar hujan dilakukan dengan mengedukasi masyarakat dan memaksimalkan fungsi *early warning system*.

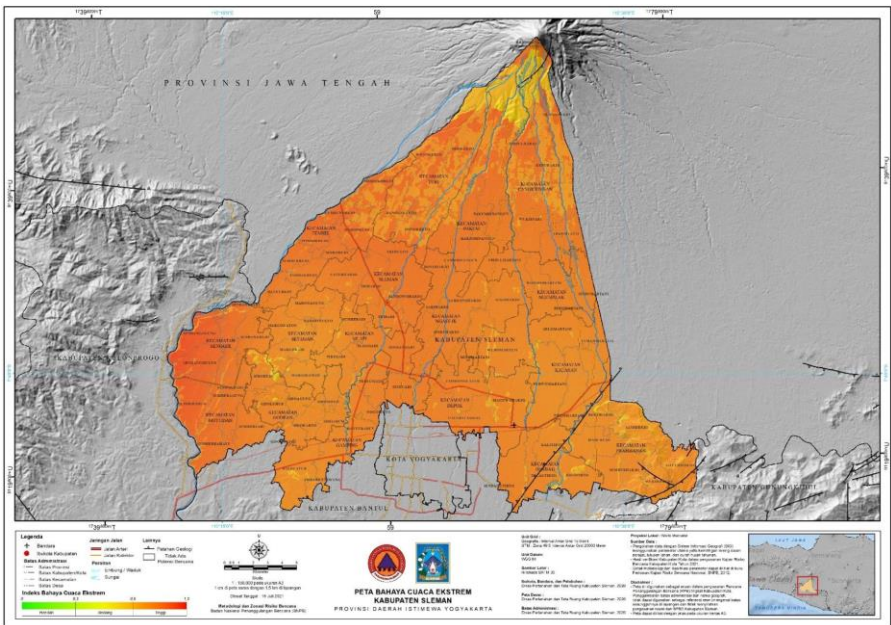


Sumber: BNPB, BPBD Kabupaten Sleman, 2021

Gambar 2. 7. Peta Bahaya Banjir Lahan

3. Risiko Bencana Cuaca Ekstrem

Risiko bencana cuaca ekstrem terdapat pada wilayah Kabupaten Sleman seluas 56.058 Ha. Risiko bencana ini disebabkan oleh kondisi meteorologis. Wilayah dengan kelas risiko sedang seluas 1.157 Ha, sedangkan risiko tinggi seluas 54.901 Ha, yang tersebar di 17 kapanewon. Adapun perbedaan kelas risiko disebabkan oleh faktor kesiapsiagaan berdasarkan kondisi masyarakat dan respons terhadap bencana dan kerentanan wilayah. Wilayah yang penduduknya padat atau memiliki lahan produktif yang luas memiliki kerentanan yang lebih tinggi.



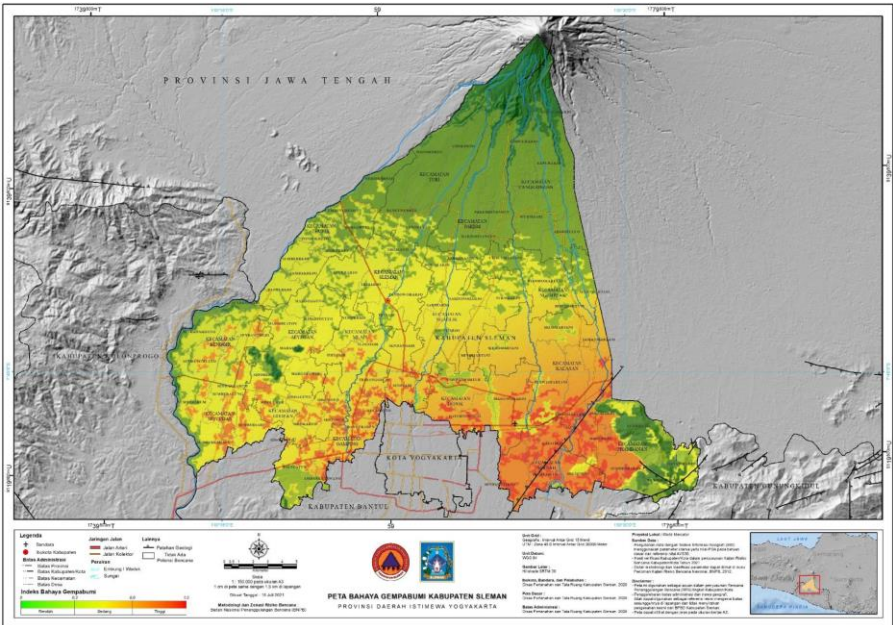
Sumber: BNPB, BPBD Kabupaten Sleman, 2021



Gambar 2. 8. Peta Bahaya Cuaca Ekstrem

4. Risiko Bencana Gempa Bumi

Risiko bencana gempa bumi terdapat di semua wilayah kapanewon di Kabupaten Sleman. Wilayah dengan kelas risiko rendah seluas 21.234 Ha, sedangkan risiko sedang seluas 26.269 Ha. Wilayah dengan kelas risiko tinggi terdapat di 12 kapanewon, seluas 10.677 Ha. Risiko bencana yang berada di sekitar patahan Sesar Opak terdapat di wilayah Kapanewon Prambanan, Berbah dan Kalasan.

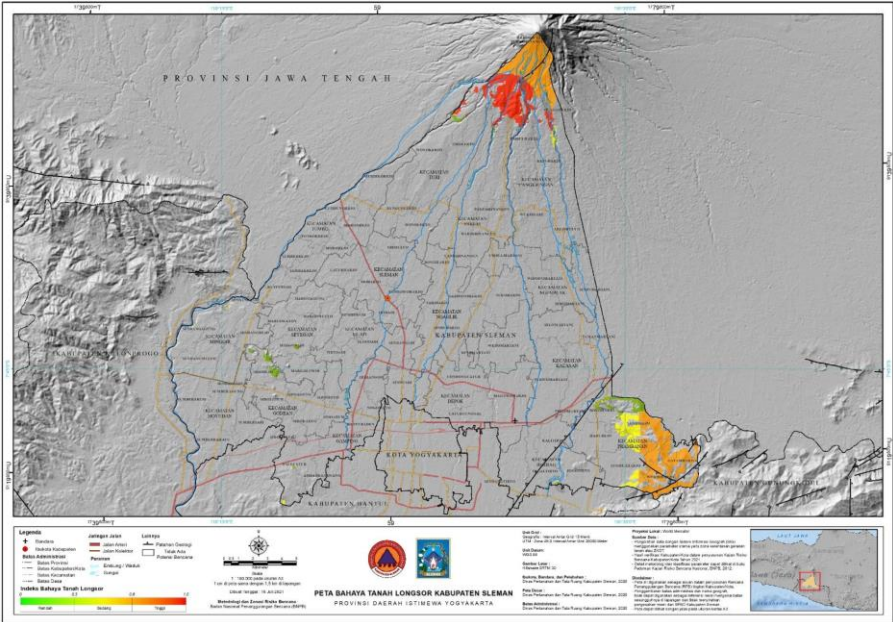


Sumber: BNPB, BPBD Kabupaten Sleman, 2021

Gambar 2. 9. Peta Bahaya Gempa Bumi

5. Risiko Bencana Tanah Longsor

Risiko bencana tanah longsor seluas 3.386 Ha tersebar di 9 kapanewon. Risiko bencana ini terdapat pada wilayah dengan kemiringan lereng yang tinggi dan topografi berbukit hingga bergunung. Risiko bencana dengan kelas risiko tinggi terdapat di wilayah Kapanewon Turi, Pakem, Cangkringan, Prambanan dan Minggir.



Sumber: BNPB, BPBD Kabupaten Sleman, 2021

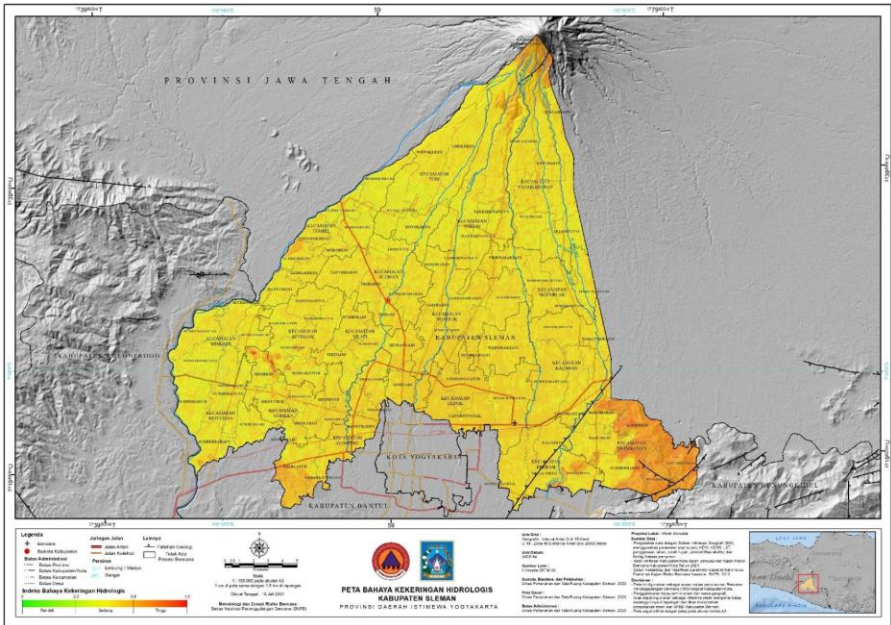
Gambar 2. 10. Peta Bahaya Tanah Longsor

6. Risiko Bencana Kekeringan Hidrologis

Risiko bencana kekeringan hidrologis terdapat pada wilayah Kabupaten Sleman seluas 57.207 Ha, meliputi 86 kalurahan. Sebagian besar wilayah Kapanewon Prambanan dan sebagian kecil Kapanewon



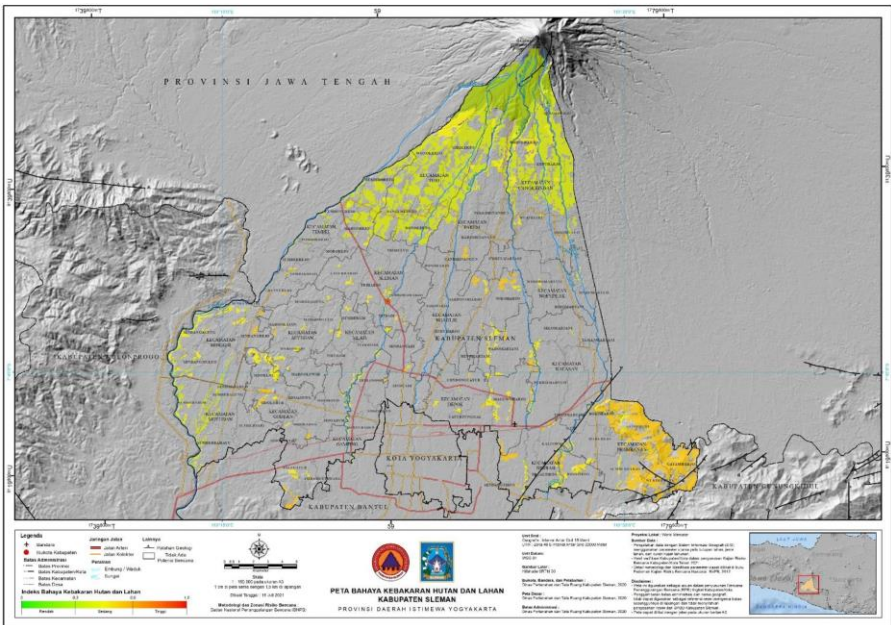
Pakem, Cangkringan, Gamping, Berbah, Godean, Seyegan, Tempel, Moyudan dan Turi memiliki tingkat ancaman yang tinggi, sedangkan kapanewon lainnya memiliki risiko sedang. Oleh karena itu, perlu kegiatan penguatan kapasitas untuk mengurangi risiko bencana kekeringan hidrologis, antara lain dengan pembangunan waduk atau embung, sumur bor, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, penyusunan rencana *kontijensi* bencana kekeringan dan sosialisasi edukasi terkait bencana kekeringan.



Sumber: BNPB, BPBD Kabupaten Sleman, 2021

Gambar 2. 11. Peta Bahaya Kekeringan Hidrologis

7. Risiko Bencana Kebakaran Hutan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sleman, seluas kurang lebih 10.290 Ha. Kelas risiko rendah berada di wilayah Kapanewon Turi, Pakem dan Cangkringan dengan luas 1.565 Ha. Sisanya merupakan kelas risiko sedang dengan dominasi tutupan lahan vegetasi berupa hutan, kebun campuran, tegalan dan semak belukar yang tersebar di semua wilayah kapanewon. Meskipun kebakaran hutan dan lahan ini jarang terjadi, penguatan kapasitas daerah dan masyarakat tetap perlu diperhatikan.



Sumber: BNPB, BPBD Kabupaten Sleman, 2021

Gambar 2. 12. Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan

D. Perubahan Iklim

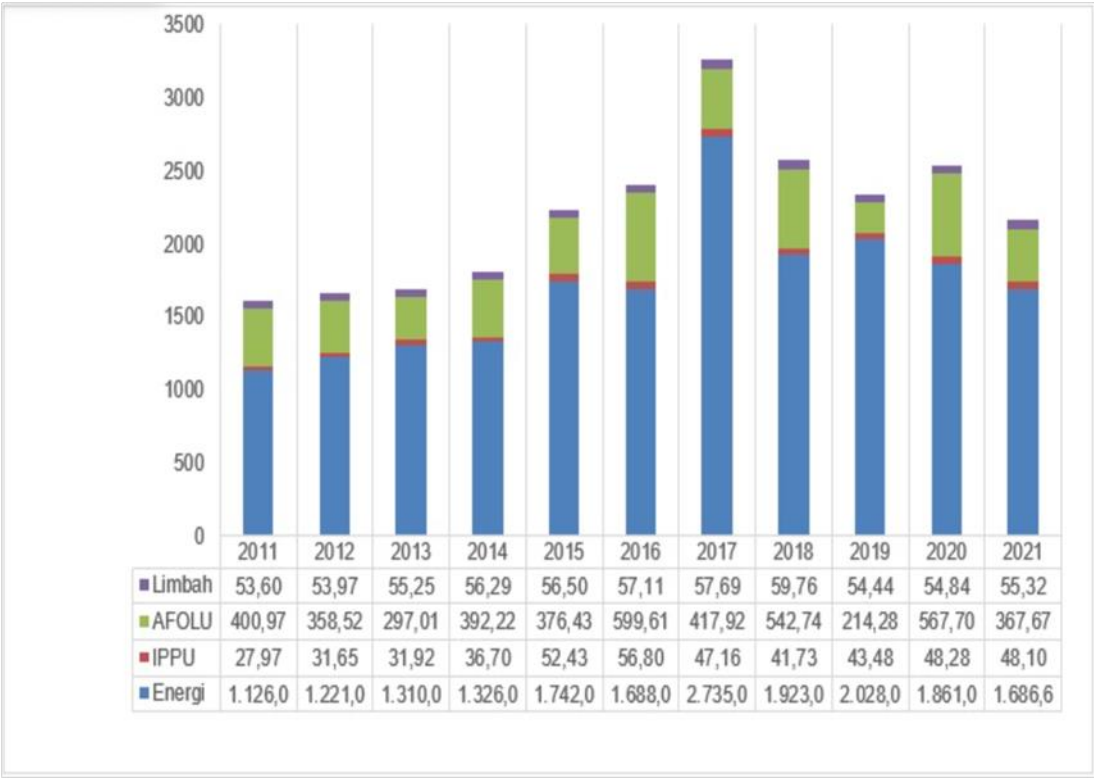


Perubahan iklim menjadi salah satu isu lingkungan yang dihadapi dunia pada saat ini, termasuk wilayah di Indonesia, tak terkecuali Kabupaten Sleman. Fenomena yang dirasakan karena perubahan iklim, antara lain terjadinya peningkatan suhu rata-rata, peningkatan intensitas curah hujan dan bergesernya musim hujan. Pada dasarnya perubahan iklim merupakan dampak dari pemanasan global (*global warming*), yaitu fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca (*greenhouse effect*) yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca.

Inventarisasi gas rumah kaca menjadi alat kunci dalam memahami hubungan antara aktivitas manusia dan perubahan iklim, melalui identifikasi dan pengukuran emisi gas rumah kaca yang berasal dari sektor-sektor kritis, seperti energi, transportasi, dan industri, sehingga dapat menggambarkan kerangka kerja dalam penentuan kebijakan mitigasi dan adaptasi yang lebih efektif. Berdasarkan kontribusi sektor-sektor tertentu terhadap emisi gas rumah kaca, pemerintah daerah dapat mengarahkan upaya mitigasi dan membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya menuju lingkungan yang berkelanjutan.

1. Kondisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Sleman

Perhitungan emisi gas rumah kaca Kabupaten Sleman mencakup CO₂, CH₄ dan N₂O. Emisi CO₂ atau emisi karbon memiliki kontribusi paling besar dan tumbuh signifikan sepanjang periode inventarisasi. Emisi ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya. Pada tahun 2021, jumlah emisi bersih (*net emission*) gas rumah kaca di Kabupaten Sleman sebesar 2.157,75 Gg CO₂e.



Sumber: DLH Kabupaten Sleman, 2023
Keterangan:
AFOLU: Agriculture, forestry and other land used (pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya)
IPPU: Industrial processes and production use (proses industri dan penggunaan produk)

Grafik 2. 2. Perkembangan Emisi Gas Rumah Kaca Agregat di Kabupaten Sleman Tahun 2011-2021 (Gg CO₂e)

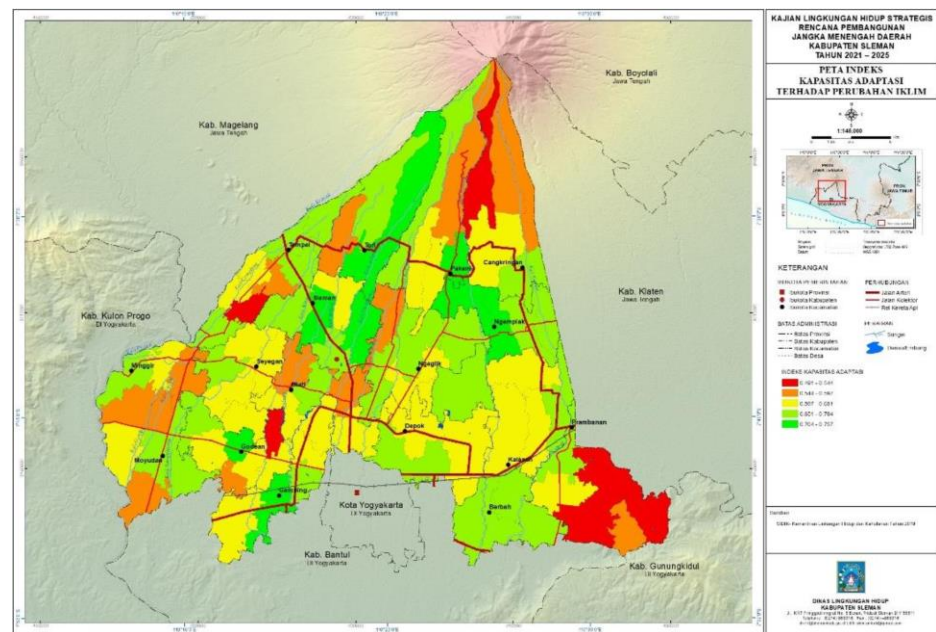
Berdasarkan tabel di atas, perkembangan emisi gas rumah kaca cenderung fluktuatif. Penyumbang emisi terbesar berasal dari sektor



energi. Penyumbang emisi sektor energi terbesar berasal dari subsektor transportasi dan listrik. Terkait dengan transportasi, terutama kendaraan bermotor khususnya yang menggunakan bahan bakar fosil, emisi dari mesin dan knalpot yang dilepaskan berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca, terlebih dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. Terkait dengan penggunaan listrik, konsumsi listrik juga semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini berbanding lurus dengan penambahan jumlah penduduk/rumah tangga serta peningkatan jumlah industri dan bisnis, serta fasilitas publik.

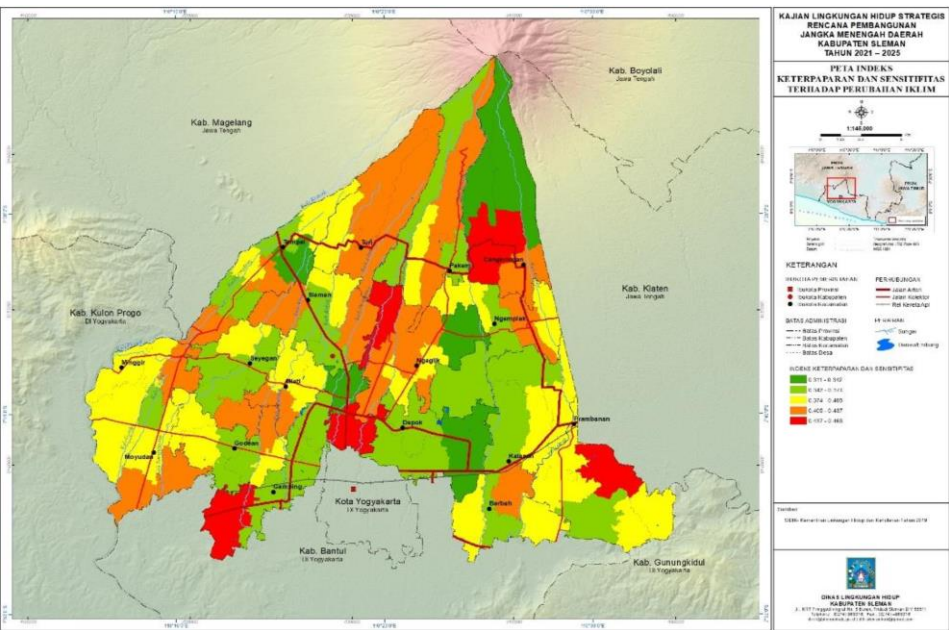
2. Indeks Kerentanan Perubahan Iklim

Nilai risiko dari dampak perubahan iklim dipengaruhi oleh indeks kerentanan dan peluang kemunculannya. Tinggi rendahnya indeks kerentanan ditentukan oleh kemampuan adaptasi, yang ditunjukkan dengan indeks kapasitas adaptasi, serta tingkat keterpaparan, tingkat sensitivitas, yang ditunjukkan dengan indeks keterpaparan dan sensitivitas. Gambaran masing-masing kerentanan kalurahan tahun 2019, dapat dilihat pada gambar di bawah.



Sumber: DLH Kabupaten Sleman, 2020

Gambar 2. 13. Indeks Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim



Sumber: DLH Kabupaten Sleman, 2020



Gambar 2. 14. Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas Terhadap Perubahan Iklim

Berdasarkan gambar di atas, semua kalurahan di Kabupaten Sleman mempunyai nilai indeks kapasitas adaptasi di atas 0,25. Hal ini mengindikasikan wilayah tersebut mempunyai kapasitas adaptasi yang baik terhadap perubahan iklim, sehingga lebih siap dalam mengantisipasi terjadinya dampak dari perubahan iklim. Adapun nilai indeks keterpaparan dan sensitivitas, semua kalurahan berada di bawah 0,5, yang mengindikasikan bahwa kalurahan sensitif terhadap perubahan iklim, meskipun dalam level sedang. Berdasarkan nilai kedua indeks tersebut, semua kalurahan di wilayah Kabupaten Sleman agak rentan terhadap perubahan iklim.

E. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi sebuah elemen yang penting untuk dipertimbangkan dalam pembangunan, terutama pada jangka panjang. Daya dukung dan daya tampung ini digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan suatu wilayah. Penjabaran kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan dibagi menjadi daya dukung pangan, daya dukung air dan daya dukung lahan bangunan.

Daya dukung pangan menggambarkan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung pangan bagi kehidupan. Perlindungan lahan pertanian dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Daya dukung air menggambarkan kemampuan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air domestik, kebutuhan pangan dan lainnya, sedangkan daya dukung lahan bangunan menggambarkan kemampuan lingkungan hidup dalam penyediaan lahan permukiman penduduk untuk bertempat tinggal secara layak.

1. Daya Dukung Pangan

Analisis daya dukung merupakan perbandingan antara aspek ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*). Perhitungan daya dukung pangan (beras) Kabupaten Sleman menggunakan data jumlah penduduk tahun 2022. Sementara untuk proses perhitungan ketersediaan bahan pangan data yang digunakan adalah rerata produksi padi (gabah kering giling) selama 3 tahun terakhir (2016-2018) yang kemudian dikonversi menjadi beras dengan angka konversi gabah kering giling ke beras sebesar 62,74%. Perhitungan kebutuhan bahan pangan dihasilkan dari hasil kali antara konsumsi beras Kabupaten Sleman perkapita/hari yakni 300 gr dengan jumlah penduduk selama satu tahun pada tiap wilayah.

Tabel 2. 3. Kebutuhan dan Ketersediaan Bahan Pangan Kabupaten Sleman Tahun 2022

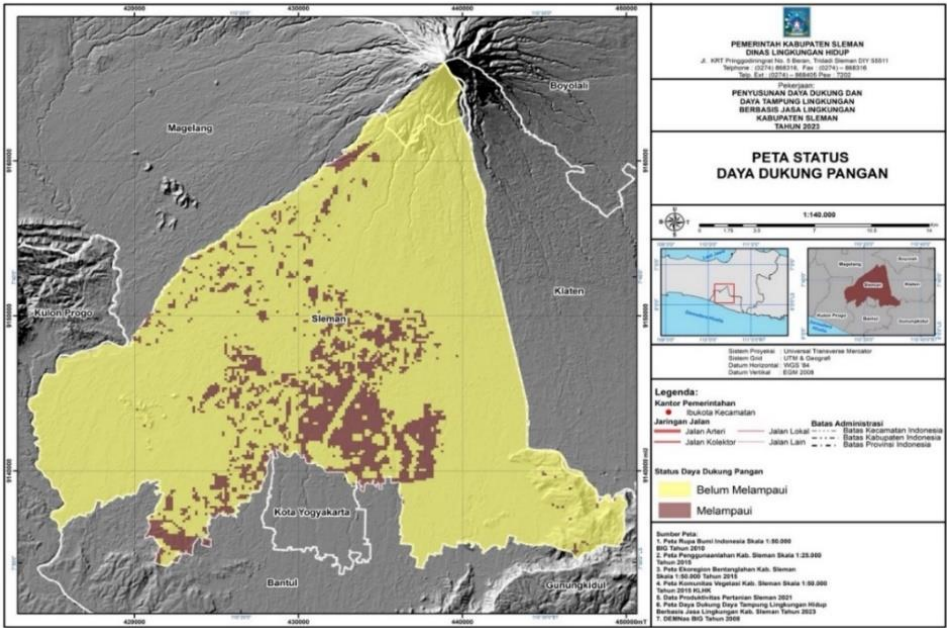
No	Kapanewon	Kebutuhan (kg/th)	Ketersediaan (kg/th)	Ambang Batas Penduduk (jiwa)	Selisih (kg/th)	Status
1	Gamping	7.517.525	11.339.800	156.909	3.822.275	Belum Terlampaui
2	Godean	5.278.312	13.369.680	184.996	8.091.368	Belum Terlampaui
3	Moyudan	2.445.761	13.626.980	188.557	11.181.219	Belum Terlampaui
4	Minggir	2.345.812	14.258.760	197.298	11.912.948	Belum Terlampaui
5	Seyegan	3.755.655	12.530.820	173.389	8.775.165	Belum Terlampaui
6	Mlati	7.278.095	9.065.020	125.433	1.786.925	Belum Terlampaui
7	Depok	9.484.859	4.708.280	65.148	-4.776.579	Terlampaui
8	Berbah	4.334.466	11.815.960	163.497	7.481.494	Belum Terlampaui



No	Kapanewon	Kebutuhan (kg/th)	Ketersediaan (kg/th)	Ambang Batas Penduduk (jiwa)	Selisih (kg/th)	Status
9	Prambanan	3.892.390	11.802.940	163.317	7.910.550	Belum Terlampaui
10	Kalasan	6.313.290	13.713.780	189.758	7.400.490	Belum Terlampaui
11	Ngemplak	4.955.988	17.622.260	243.839	12.666.272	Belum Terlampaui
12	Ngaglik	13.974.105	14.371.600	198.860	397.495	Belum Terlampaui
13	Sleman	5.273.686	12.339.240	170.738	7.065.554	Belum Terlampaui
14	Tempel	3.914.432	9.319.840	128.959	5.405.408	Belum Terlampaui
15	Turi	2.672.545	3.755.960	51.971	1.083.415	Belum Terlampaui
16	Pakem	2.721.399	13.758.420	190.375	11.037.021	Belum Terlampaui
17	Cangkringan	2.275.638	12.499.820	172.960	10.224.182	Belum Terlampaui
	Total	88.433.958	199.899.160	2.766.005	111.465.202	Belum Terlampaui

Sumber: DLH Kabupaten Sleman, 2023

Berdasarkan tabel di atas, secara umum kebutuhan bahan pangan Kabupaten Sleman cukup tinggi di wilayah perkotaan, seperti Kapanewon Depok, Gamping, Mlati dan Ngaglik. Total kebutuhan pangan Kabupaten Sleman adalah 88.433.958 kg per tahun. Tingginya kebutuhan akan pangan dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan faktor kedekatan dengan pusat Kota Yogyakarta. Persebaran ketersediaan bahan pangan dalam sistem *grid* terbesar terdapat di wilayah timur. Wilayah tersebut didominasi oleh *ekoregion* dataran *fluvio vulkan* material piroklastik yang berpotensi untuk pengembangan lahan pertanian. Hal ini menyebabkan kelas lahan persawahan sering ditemui di *ekoregion* tersebut, sehingga memiliki ketersediaan pangan yang cukup besar. Secara spasial, status daya dukung pangan Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Gambar 2.15 berikut ini.



Sumber: DLH Kabupaten Sleman, 2023

Gambar 2. 15. Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Sleman

2. Daya Dukung Air

Air termasuk dalam kategori sumber daya alam yang dapat diperbarui. Meskipun demikian, air perlu dilestarikan, karena rentan terhadap degradasi lingkungan, antara lain kekeringan ketika musim kemarau, atau tanah longsor dan banjir ketika musim penghujan. Pelestarian sumber daya air dapat dilakukan dengan menghemat pemakaian air, mengendalikan pencemaran air, menjaga ketersediaan air, serta melakukan konservasi air tanah.



Konservasi air tanah ini dilakukan untuk memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah. Air hujan yang jatuh di atas suatu wilayah sebagian akan mengalami infiltrasi dan sebagian lain akan menjadi air limpuhan (*run-off*). Air yang mengalami infiltrasi akan mengisi kembali (*recharge*) cadangan air tanah, yang nantinya akan keluar berupa mata air yang mengisi kembali air permukaan. Air limpuhan akan mencari tempat yang lebih memungkinkan untuk meresap atau akan bergabung dengan air permukaan.

Semakin sempit daerah resapan, dengan asumsi curah hujan tetap, semakin banyak pula air limpuhan yang masuk ke badan air permukaan. Untuk saat ini, secara kualitas air yang berada di badan air permukaan tidak memenuhi kualitas layak konsumsi. Air tanahlah yang memenuhi syarat kualitas layak konsumsi. Namun, daerah resapan yang semakin menyempit, dalam jangka panjang akan mengurangi cadangan air tanah. Hak air terhadap daerah resapan inilah yang seringkali diabaikan manusia demi kepentingannya.

Secara umum kesesuaian guna lahan di dalam perencanaan ada tiga jenis, yaitu kawasan lindung, kawasan penyangga (*buffering*), dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya dimanfaatkan sebagai tempat manusia beraktivitas, yang artinya mengubah tutupan lahan menjadi lahan terbangun. Hal ini mengakibatkan kemampuan kawasan budidaya sebagai daerah resapan air jauh berkurang, sehingga fungsi daerah resapan air bergeser pada kawasan penyangga dan kawasan lindung. Kawasan penyangga (*buffering*) adalah kawasan peralihan, kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Daya dukung air ditinjau dari ketersediaan air (*water supply*) dan kebutuhan air (*water demand*), yang dihitung melalui ketersediaan air dengan pendekatan limpasan air dan potensi air tanah yang dibandingkan dengan total kebutuhan air, yang terdiri dari kebutuhan air domestik dan non domestik. Ketersediaan air dan kebutuhan air Kabupaten Sleman ditampilkan dalam bentuk neraca air pada Tabel 2.4 berikut ini.

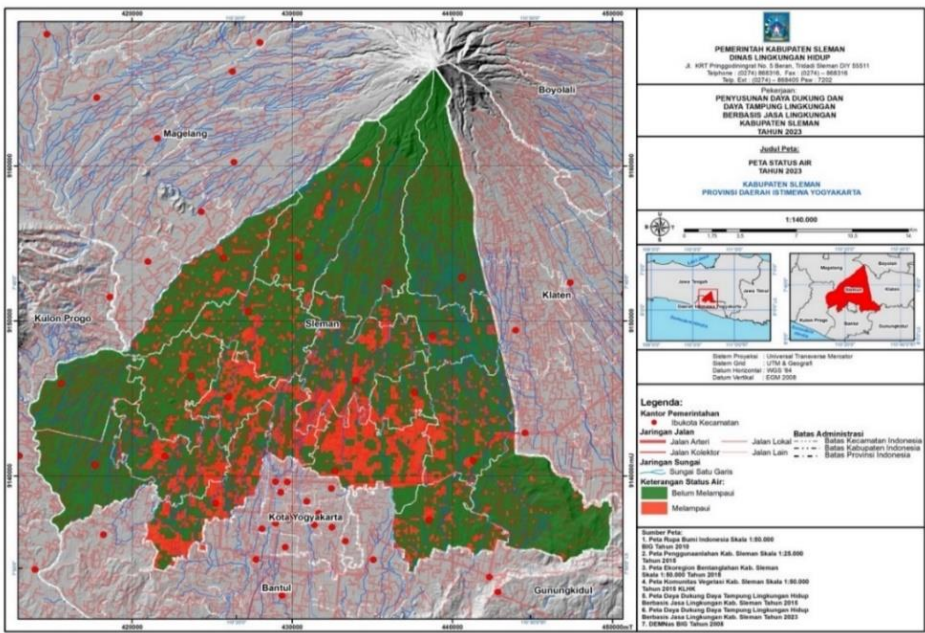
Tabel 2. 4. Neraca Air Kabupaten Sleman Tahun 2022

No	Kapanewon	Ketersediaan Air (m ³ /th)	Kebutuhan Total (m ³ /th)	Selisih	Status
1	Gamping	98.260.163,72	86.880.096,38	11.380.067,35	Surplus
2	Godean	103.689.103,28	64.622.262,64	39.066.840,64	Surplus
3	Moyudan	104.149.466,88	36.260.881,07	67.888.585,81	Surplus
4	Minggir	109.989.023,02	33.753.404,04	76.235.618,98	Surplus
5	Seyegan	93.326.140,87	47.910.127,72	45.416.013,15	Surplus
6	Mlati	91.359.232,66	84.003.706,20	7.355.526,46	Surplus
7	Depok	82.426.307,86	106.265.371,76	-23.839.063,90	Defisit
8	Berbah	100.865.201,61	53.283.406,97	47.581.794,63	Surplus
9	Prambanan	150.153.436,94	57.524.856,02	92.628.580,92	Surplus
10	Kalasan	134.798.122,31	76.720.241,09	58.077.881,22	Surplus
11	Ngemplak	124.177.930,39	62.626.638,59	61.551.291,80	Surplus
12	Ngaglik	135.871.229,20	91.211.790,08	44.659.439,11	Surplus
13	Sleman	113.799.984,76	63.918.398,96	49.881.585,80	Surplus
14	Tempel	126.622.109,50	52.177.899,36	74.444.210,14	Surplus
15	Turi	134.340.551,99	45.991.595,72	88.348.956,27	Surplus
16	Pakem	179.666.491,71	39.910.523,69	139.755.968,02	Surplus
17	Cangkringan	204.911.858,25	41.773.206,54	163.138.651,71	Surplus
Kabupaten Sleman		2.088.406.354,94	1.044.834.406,81	1.043.571.948,13	Surplus

Sumber: DLH Kabupaten Sleman, 2023



Dari hasil perhitungan neraca air tersebut, diketahui bahwa status daya dukung air yang mengalami defisit berada di wilayah Kapanewon Depok. Kapanewon lain di Kabupaten Sleman masih memiliki status daya dukung air yang mencukupi, yaitu ketersediaan air yang berada di permukaan maupun cadangan air tanah secara umum. Secara spasial, persebaran status air Kabupaten Sleman dengan menggunakan metode *grid* dapat dilihat pada peta berikut:



Sumber: DLH Kabupaten Sleman, 2023

Gambar 2. 16. Peta Status Air Kabupaten Sleman Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah, kebutuhan air untuk hidup layak per tahun adalah 1.600 m³ per kapita. Berdasarkan proyeksi tersebut, sebelum tahun 2040, ada potensi defisit air yang perlu mendapat perhatian serius, yang menandakan bahwa kebutuhan air melebihi kapasitas daya dukung yang ada. Peningkatan jumlah penduduk yang tinggi, diiringi dengan kebutuhan air per kapita yang tetap stabil, menjadi faktor utama dalam menggambarkan defisit air ini.

Tabel 2. 5. Proyeksi Status Daya Dukung Air Kabupaten Sleman

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk	Kebutuhan Air Hidup Layak (m3/kapita/tahun)	Status
2025	1.179.382	1.887.011.200	Surplus
2030	1.230.418	1.968.668.800	Surplus
2035	1.277.021	1.963.233.600	Surplus
2040	1.319.284	2.110.854.400	Defisit
2045	1.354.875	2.167.800.000	Defisit

Sumber: DLH Kabupaten Sleman, 2023

Oleh karena itu, perencanaan dan implementasi tindakan yang tepat perlu dilakukan. Upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air, perlindungan terhadap sumber daya air, dan penyesuaian kebijakan terkait dapat menjadi solusi untuk mengatasi defisit air yang terjadi. Langkah-langkah ini perlu didukung oleh kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai keseimbangan yang berkelanjutan antara kebutuhan air dan daya dukung air.

3. Daya Dukung Lahan Bangunan

Daya dukung lahan dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu permukiman (bangunan) untuk perkotaan dan pertanian untuk perdesaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007,



maka koefisien luas lahan terbangun maksimal Kabupaten Sleman menggunakan asumsi 50%. Berdasarkan hasil analisis secara spasial menggunakan data penggunaan lahan, status daya dukung permukiman Kabupaten Sleman lebih dari 1, atau masih belum melampaui daya dukung lahan bangunan di Kabupaten Sleman.



F. Jasa Ekosistem Air dan Pangan

1. Hasil Kerentanan Daya Dukung Daya Tampung Jasa Lingkungan Penyedia Pangan

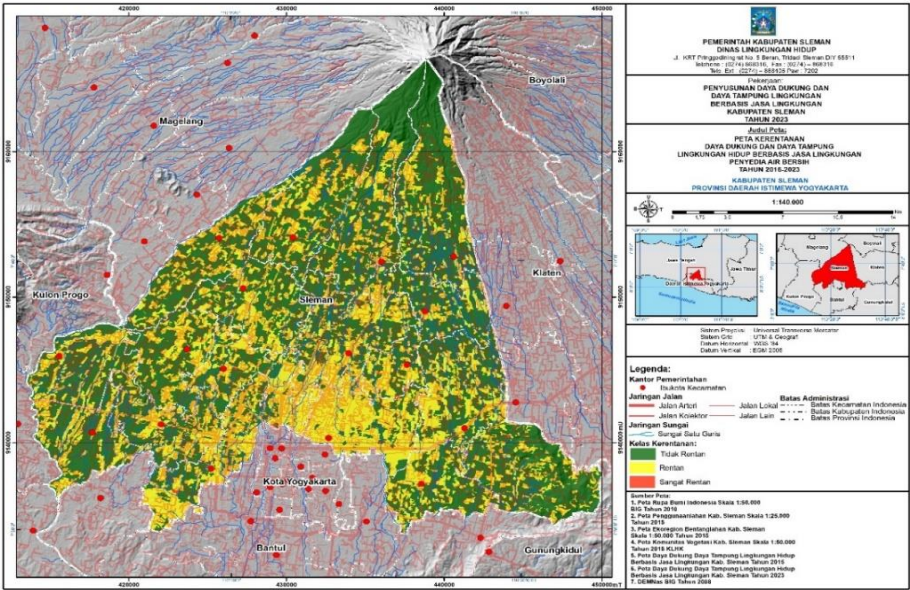
Kerentanan jasa lingkungan penyedia pangan di Kabupaten Sleman secara umum berada pada tingkatan tidak rentan. Hal ini dibuktikan dengan luas lahan dengan tingkat jasa lingkungan penyedia pangan tidak rentan seluas 57.175,07 Ha. Adapun luas lahan sangat rentan seluas 138,84 Ha. Hal ini menunjukkan kondisi persawahan, kesuburan tanah dan lainnya, masih cukup terjaga.

Kerentanan jasa lingkungan penyedia pangan berdasarkan kelas kerentanan di Kabupaten Sleman sangat bervariasi. Kelas tidak rentan paling luas terdapat di Kapanewon Cangkringan, dengan luas 4.821,18 Ha. Adapun kelas sangat rentan jasa lingkungan penyedia pangan paling besar terdapat di Kapanewon Depok seluas 19,83 Ha.

2. Hasil Kerentanan Daya Dukung Daya Tampung Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih

Tingkat kerentanan jasa lingkungan penyedia air bersih di Kabupaten Sleman tahun 2016-2023 secara umum berada pada tingkatan tidak rentan. Hal ini dibuktikan dengan luas lahan dengan tingkat jasa lingkungan penyedia air bersih tidak rentan seluas 33.815,87 Ha, luas rentan 23.354,92 Ha dan luas sangat rentan seluas 143,12 Ha.

Wilayah tidak rentan paling luas terdapat di Kapanewon Cangkringan dengan luas 3.766,36 Ha. Selanjutnya, kelas rentan paling besar di Kapanewon Depok seluas 2.608,37 Ha. Adapun kelas sangat rentan paling besar terdapat di Kapanewon Ngaglik seluas 23,74 Ha. Secara lebih detail dapat diamati pada gambar di bawah ini.



Sumber: DLH Kabupaten Sleman, 2023

Gambar 2. 17. Kerentanan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Penyedia Air Bersih Kabupaten Sleman Tahun 2016-2023

G. Penggambaran Hasil Analisis Jasa Lingkungan Kabupaten Sleman

Tingginya persentase tetap pada level penyediaan pangan (99,72%) dan air bersih (99,70%) menunjukkan jasa lingkungan pangan dan air di Kabupaten Sleman selama kurun waktu 2016 hingga 2023 cenderung stabil. Dalam konteks ini, dapat diasumsikan bahwa sistem pertanian dan manajemen sumber daya air di Kabupaten Sleman telah berjalan cukup



efisien untuk mempertahankan tingkat produksi dan distribusi yang memadai. Hasil analisis kecenderungan penyedia pangan di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2. 6. Kecenderungan Penyedia Pangan (P1) Kabupaten Sleman

Kategori		Tahun 2023 (%)					Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Tahun 2016 (%)	Sangat Rendah	9,04	0	0	0	0	9,04
	Rendah	0	42,11	0	0,04	0	42,14
	Sedang	0	0	8,41	0	0	8,41
	Tinggi	0	0,01	0	1,72	0	1,72
	Sangat Tinggi	0,01	0,23	0	0	38,44	38,68
Grand Total		9,05	42,34	8,41	1,75	38,44	100,00

Sumber: DLH Kabupaten Sleman, 2023

Dari hasil analisis tren penyediaan pangan dan air bersih di Kabupaten Sleman, dapat disimpulkan bahwa mayoritas indikator menunjukkan tingkat perubahan jasa lingkungan dari tahun 2016 hingga tahun 2023 adalah tetap. Persentase yang menunjukkan penurunan dalam penyedia pangan dan air bersih masing-masing sebesar 0,24% dan 0,26% memang ada, namun angka tersebut sangat kecil, sehingga tidak cukup signifikan untuk dijadikan isu strategis dalam kajian lingkungan hidup Sleman. Penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan iklim, perubahan pola konsumsi, atau perubahan kebijakan pertanian. Berikut ini adalah hasil analisis kecenderungan penyedia air bersih di Kabupaten Sleman.

Tabel 2. 7. Kecenderungan Penyedia Air Bersih (P2) Kabupaten Sleman

Kategori		Tahun 2023 (%)					Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Tahun 2016 (%)	Sangat Rendah	36,61	0	0,01	0	0,04	36,65
	Rendah	0	4,14	0	0	0	4,14
	Sedang	0,24	0	42,68	0	0	42,92
	Tinggi	0,01	0	0,01	0,47	0	0,49
	Sangat Tinggi	0,01	0	0	0	15,8	15,8
Grand Total		36,85	4,15	42,7	0,47	15,83	100

Sumber: DLH Kabupaten Sleman, 2023

Tabel 2. 8. Persentase Penyedia Pangan (P1) dan Penyedia Air Bersih (P2)

Keterangan	Persentase Penyedia Pangan (P1) (%)	Persentase Penyedia Air Bersih (P2) (%)
Menurun	0,24	0,26
Tetap	99,72	99,70
Meningkat	0,04	0,04

Sumber: DLH Kabupaten Sleman, 2023

Meskipun penyediaan pangan dan air bersih cenderung tetap, namun kondisi ini tidak boleh diabaikan sepenuhnya. Pengawasan yang cermat tetap diperlukan untuk memastikan bahwa penurunan tersebut tidak menjadi tren yang lebih signifikan di masa depan. Meskipun kecenderungan jasa lingkungan tidak menjadi isu strategis saat ini, perlu dilakukan pemantauan terus-menerus dan langkah-langkah pencegahan proaktif untuk menjaga keberlanjutan jasa lingkungan di Kabupaten Sleman, termasuk investasi dalam teknologi pertanian yang berkelanjutan, kebijakan pelestarian lingkungan, dan manajemen sumber daya air yang bijaksana untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang.



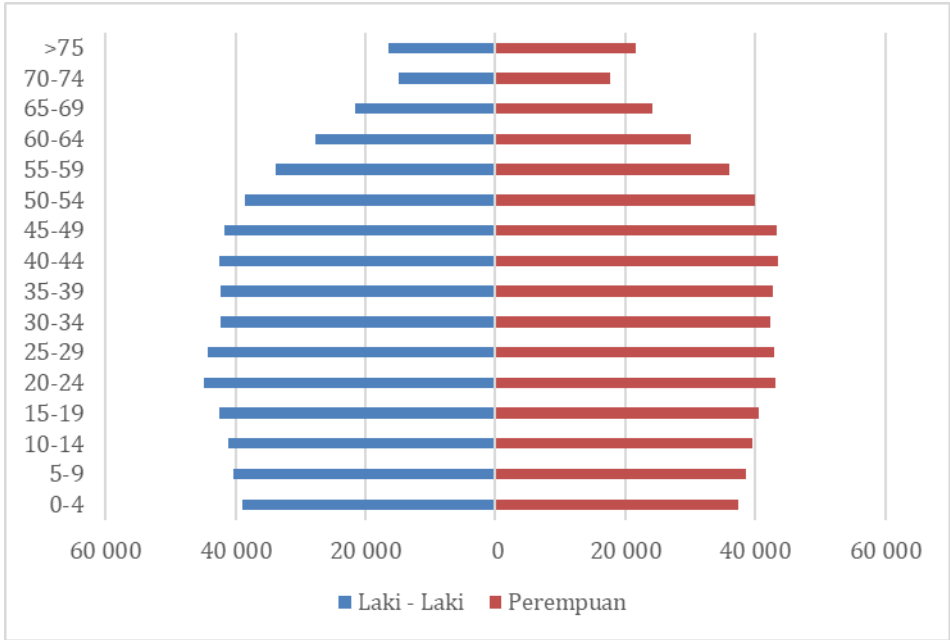
2.1.2. **Aspek Demografi Wilayah**

Keberhasilan pembangunan daerah tidak lepas dari kebijakan kependudukan yang berdampak terhadap dinamika penduduk suatu daerah. Kebijakan kependudukan pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia secara menyeluruh. Secara umum kebijakan kependudukan didasarkan pada kondisi demografis daerah.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, dalam rentang waktu 10 tahun antara tahun 2013 hingga tahun 2023 terjadi dinamika pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman. Jumlah penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2013 adalah sebesar 1.141.733 jiwa dan terjadi kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Sleman pada tahun 2023 menjadi 1.157.292 jiwa.

Berdasarkan data tersebut, rasio jumlah penduduk Kabupaten Sleman pada rentang waktu tahun 2013 hingga tahun 2019 didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Adapun pada tahun 2020-2023, penduduk didominasi perempuan dan pada tahun 2023, jumlah perempuan sebanyak 583.536 jiwa, sementara jumlah penduduk laki-laki sebanyak 573.756 jiwa.

Dalam menyusun kebijakan kependudukan perlu mempertimbangkan komposisi penduduk menurut kelompok usia, di mana ada perbedaan perlakuan terhadap kelompok usia produktif dan non produktif. Di samping itu, kelompok usia dapat dibedakan menjadi kelompok prakerja (usia muda atau 1000 hari pertama kehidupan sampai dengan usia sekolah pendidikan dasar), kelompok kerja (usia produktif) dan kelompok pasca kerja (usia lanjut/pensiun). Berikut adalah penggambaran komposisi penduduk Kabupaten Sleman.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2024

Grafik 2. 3. Komposisi Penduduk Menurut Umur di Kabupaten Sleman Tahun 2023 (jiwa)

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa proporsi penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2023 didominasi kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebesar 69,56%, sementara itu penduduk kelompok usia muda (0-14 tahun) sebesar 20,39%, dan kelompok usia lanjut (di atas 64 tahun) sebesar 10,05%, yang juga disebut penduduk non produktif.

Berdasarkan data tersebut, angka ketergantungan sebesar 43,75, yang proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih dari 50% dari total populasi berpotensi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, atau



disebut dengan bonus demografi. Selama beberapa tahun terakhir, kondisi tersebut telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Sleman yang dimulai dari usia dini melalui berbagai program dan kegiatan terkait secara menyeluruh.

Kepadatan penduduk Kabupaten Sleman tahun 2023 sebesar 2.013 jiwa/km² dengan kepadatan tertinggi berada di wilayah administrasi Kapanewon Depok, sebesar 3.795 jiwa/km² yang tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2. 9. Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2023

No	Kapanewon	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Gamping	105.805	29,25	3.617,26
2	Godean	73.673	26,84	2.744,90
3	Moyudan	34.200	27,62	1.238,23
4	Minggir	32.746	27,27	1.200,81
5	Seyegan	52.791	26,63	1.982,39
6	Mlati	103.926	28,52	3.643,97
7	Depok	134.916	35,55	3.795,11
8	Berbah	61.179	22,99	2.611,11
9	Prambanan	54.679	41,35	1.322,35
10	Kalasan	88.654	35,84	2.473,60
11	Ngemplak	69.767	35,71	1.953,71
12	Ngaglik	109.170	38,52	2.834,11
13	Sleman	74.232	31,32	2.370,11
14	Tempel	54.549	32,49	1.678,95
15	Turi	37.354	43,09	866,88
16	Pakem	37.848	43,84	863,32
17	Cangkringan	31.803	47,99	662,70

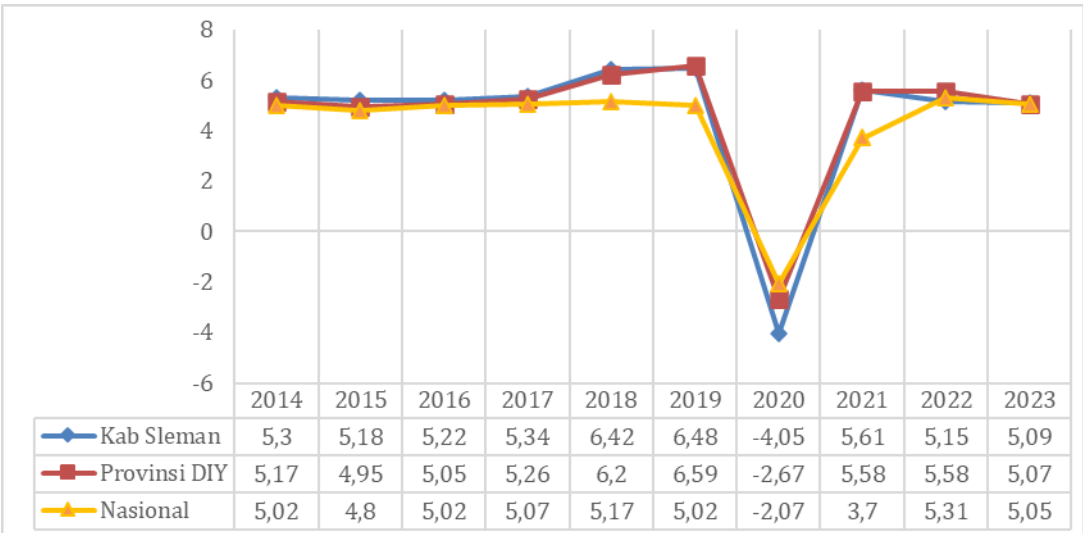
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2024

2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.1.Kesejahteraan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Secara konsep salah satu indikator kesejahteraan ekonomi masyarakat yang cukup penting adalah pertumbuhan ekonomi, yang diukur dengan pertumbuhan produk domestik regional bruto, baik secara nasional maupun secara regional (daerah) provinsi maupun kabupaten/kota, yang disebut dengan produk domestik regional bruto. Grafik di bawah menunjukkan bagaimana gambaran perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nasional selama sepuluh tahun terakhir.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2015-2024



Grafik 2. 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sleman, Produk Domestik Regional Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Produk Domestik Bruto Nasional Tahun 2014-2023 (%)

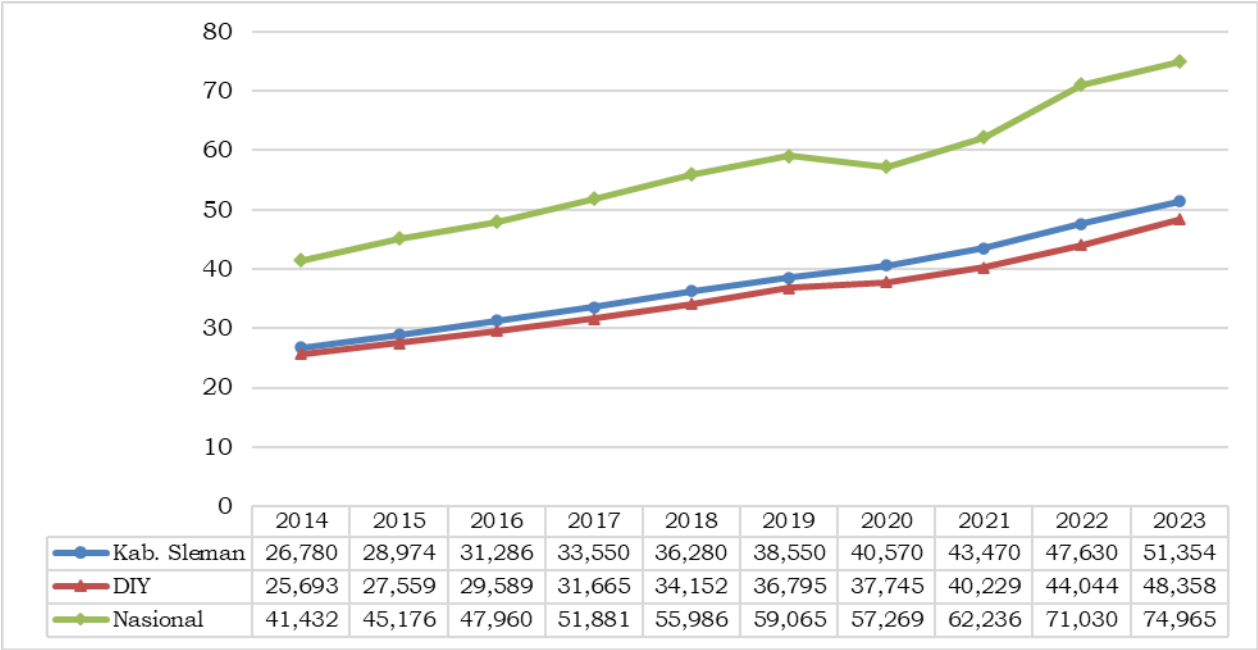
Grafik di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman selama sepuluh tahun terakhir, selalu di atas pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun pertumbuhan ekonomi Nasional. Namun pada tahun 2020, pada saat Covid-19, pertumbuhan ekonomi Sleman terkontraksi lebih besar dari pertumbuhan ekonomi Provinsi maupun pertumbuhan ekonomi Nasional.

Berdasarkan kondisi di atas, maka dapat dinyatakan bahwa masyarakat Kabupaten Sleman mengalami peningkatan kesejahteraan yang cukup baik dan stabil. Namun pertumbuhan ekonomi tahun 2023 mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya, dimana tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Sleman mencapai 5,15%, sedangkan pada tahun 2023 Kabupaten Sleman hanya tumbuh 5,09%.

Meskipun pertumbuhan ekonomi tahun 2023 melebihi pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tumbuh 5,07%, dan Nasional, yang tumbuh 5,05%, namun nilai ini masih jauh di bawah pertumbuhan pada masa sebelum krisis, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman mencapai 6,48%. Hal ini menandakan bahwa tahun 2023, Kabupaten Sleman belum benar-benar pulih dari kondisi krisis.

B. Pendapatan Per Kapita

Selain pertumbuhan ekonomi, indikator kesejahteraan masyarakat yang sering digunakan adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah jumlah produk domestik regional bruto dibagi dengan jumlah penduduk. Perkembangan produk domestik regional bruto per kapita per tahun atas dasar harga berlaku Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nasional ditunjukkan dalam grafik berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2015-2024

Grafik 2. 5. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2014-2023 (Rp Juta)

Selama periode 10 tahun terakhir, nilai produk domestik regional bruto per kapita Kabupaten Sleman selalu di atas Daerah Istimewa Yogyakarta, namun di bawah Nasional. Pada tahun 2023, produk domestik regional bruto per kapita Kabupaten Sleman sebesar Rp51,354 juta per



tahun, Daerah Istimewa Yogyakarta Rp48,358 juta, sementara Nasional sudah mencapai Rp74,965 juta.

Selain itu, berdasarkan grafik di atas, produk domestik regional bruto per kapita Kabupaten Sleman memiliki tren positif dengan laju pertumbuhan 7,68% atau 7,99% tanpa menghitung periode pandemi. Jika angka pertumbuhan ini konstan dan tingkat kurs 15.000/US\$, maka diperkirakan pada tahun 2040 Kabupaten Sleman sudah mampu mencapai tingkat kemakmuran yang tinggi berdasarkan indikator UNDP (*United Nation Development Program*), dari indikator pendapatan per kapita.

Meskipun produk domestik regional bruto per kapita di Kabupaten Sleman meningkat secara konsisten, namun gap dengan rata-rata produk domestik regional bruto per kapita Nasional cukup tinggi. Oleh karena itu, untuk mengejar produk domestik regional bruto per kapita Nasional diperlukan upaya yang serius dan berkesinambungan.

C. Struktur Produk Domestik Regional Bruto Sektoral

Indikator kesejahteraan ekonomi lainnya adalah karakter dari produk domestik regional bruto berdasarkan kontribusi sektoral. Berikut adalah struktur produk domestik regional bruto Kabupaten Sleman berdasarkan kontribusi sektoral selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 10. Struktur Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sleman Tahun 2018-2023 (%)

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,42	7,17	8,00	7,65	7,96	8,06
B	Pertambangan dan Penggalian	0,38	0,38	0,37	0,33	0,32	0,33
C	Industri Pengolahan	13,19	13,09	13,40	13,06	12,59	12,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi	11,79	12,57	11,03	11,64	11,52	11,29
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,84	7,78	7,85	7,58	7,72	7,68
H	Transportasi dan Pergudangan	7,68	7,04	4,39	3,86	4,19	4,42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,16	10,39	8,87	9,14	9,89	10,26
J	Informasi dan Komunikasi	7,95	7,88	9,81	10,83	10,47	10,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,25	3,32	3,45	3,44	3,60	3,71
L	Real Estate	7,73	7,80	8,39	8,00	7,70	7,54
M,N	Jasa Perusahaan	1,66	1,68	1,53	1,56	1,58	1,64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,82	6,65	7,01	6,68	6,46	6,19
P	Jasa Pendidikan	9,38	9,48	10,63	10,68	10,20	10,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,32	2,35	3,08	3,06	2,98	3,09
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,26	2,25	2,03	2,33	2,66	2,73
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2019-2024

Dari tabel di atas, penyumbang tertinggi dan konsisten selama lima tahun terakhir adalah sektor industri pengolahan, dengan kontribusi pada kisaran 12,44% sampai dengan 13,40%, selanjutnya diikuti oleh sektor konstruksi yang berkontribusi pada kisaran 11%. Namun, konstruksi ini pada dasarnya bersifat temporer (selama proses pembangunan fisik), sehingga tidak bisa menjadi sumber kesejahteraan yang berkesinambungan atau kontinu. Sektor selanjutnya adalah sektor akomodasi dan makan minum dengan kontribusi pada kisaran 10%. Sektor ini pada dasarnya merepresentasikan sektor pariwisata, baik pariwisata konvensional, maupun pariwisata MICE (*Meeting, Incentives, Conventions, dan Exhibitions*).

Selain tiga sektor di atas, sektor yang memiliki kontribusi di atas 10% adalah sektor informasi dan komunikasi serta sektor jasa pendidikan. Namun sektor informasi dan komunikasi merupakan sektor yang sangat padat teknologi serta berskala besar dan terpusat, sehingga pemerintah



kurang mampu melakukan intervensi. Demikian juga dengan jasa pendidikan, jasa pendidikan yang memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) tinggi terhadap perekonomian daerah adalah pendidikan tinggi, yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Sektor lain yang cukup penting untuk diperhatikan adalah sektor pertanian, dimana sektor ini merupakan sektor penopang utama ketahanan pangan. Selain itu, sektor pertanian juga merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, bahkan menjadi sumber penghidupan masyarakat desa, yang pada umumnya berpenghasilan rendah. Kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Sleman berada pada kisaran 7-8%. Angka ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan sumber kesejahteraan bagi perekonomian Kabupaten Sleman.

Selain kontribusi, pertumbuhan sektoral juga harus diperhatikan. Sektor dengan kontribusi tinggi namun pertumbuhan rendah, maka tidak bisa menjadi tumpuan di masa mendatang. Demikian juga sebaliknya, sektor dengan kontribusi rendah, namun jika memiliki pertumbuhan tinggi, perlu menjadi prioritas karena potensial untuk menjadi tumpuan di masa datang. Pertumbuhan sektoral produk domestik regional bruto Kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 11. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Sektoral Kabupaten Sleman Tahun 2018-2023 (%)

No	Kategori Produk Domestik Regional Bruto Non Migas	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,53	1,67	5,18	1,31	5,86	0,24
B	Pertambangan dan Penggalian	8,93	5,78	-8,77	-5,32	1,65	3,04
C	Industri Pengolahan	5,60	5,96	-3,78	1,02	1,56	3,64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,27	5,83	-1,26	2,26	6,81	7,73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,28	7,98	0,51	6,52	3,23	2,86
F	Konstruksi	13,08	12,45	-16,22	11,11	5,56	7,7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,03	5,25	-5,12	1,14	5,24	4,01
H	Transportasi dan Pergudangan	8,07	-1,62	-36,40	-7,50	13,3	7,58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,79	9,10	-18,08	8,06	12,01	8,81
J	Informasi dan Komunikasi	6,17	7,89	19,99	16,92	3,85	4,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,17	8,72	-0,05	1,88	5,81	10,01
L	Real Estate	5,10	5,96	1,36	0,90	2,77	3,52
M,N	Jasa Perusahaan	5,52	7,03	-14,12	7,88	7,27	8,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,11	3,25	-2,02	-0,38	2,58	2,14
P	Jasa Pendidikan	6,00	6,82	5,52	5,36	1,42	3,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,07	6,93	20,02	4,21	3,39	6,18
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,85	5,83	-14,74	20,67	21,84	6,72
Produk Domestik Regional Bruto		6,42	6,48	-4,05	5,61	5,15	5,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2019-2024

Dari sektor-sektor yang memiliki kontribusi tinggi, hanya sektor akomodasi dan makan minum yang mempunyai pertumbuhan tinggi, yaitu pada kisaran 8-11% pada masa setelah pandemi. Namun sektor ini yang paling merosot pada saat pandemi. Sektor industri memiliki pertumbuhan sekitar 3%. Sektor pertanian, yang memiliki peranan cukup strategis, hanya memiliki pertumbuhan pada kisaran 2%, meskipun pada tahun 2022, sektor pertanian mampu tumbuh hampir mencapai 6%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian pada dasarnya memiliki potensi yang baik dan bisa menjadi tumpuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Sleman.

D. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Sleman Terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan karakter pendapatan per kapita, dan struktur produk domestik regional bruto yang sudah diuraikan terdahulu, Kabupaten



Sleman memiliki peranan yang cukup strategis dalam pembentukan produk domestik regional bruto Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan 5 kabupaten/kota, kontribusi rata-rata per kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 20%. Namun Kabupaten Sleman selalu memiliki kontribusi di atas 33%, jauh di atas rata-rata tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman merupakan wilayah potensial dibanding wilayah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut adalah kontribusi produk domestik regional bruto Kabupaten Sleman terhadap pembentukan produk domestik regional bruto Daerah Istimewa Yogyakarta, baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku, selama sepuluh tahun terakhir.

Tabel 2. 12. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sleman Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2023

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta (Rp Milyar)		Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sleman (Rp Milyar)		Kontribusi (%)	
	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Berlaku
2014	79.516,07	92.873,39	26.713,07	30.912,24	33,59	33,28
2015	83.513,80	101.413,85	28.098,01	33.826,51	33,64	33,35
2016	87.752,01	110.033,63	29.563,38	36.932,84	33,69	33,57
2017	92.373,85	119.228,92	31.140,59	40.047,86	33,71	33,59
2018	98.063,18	129.913,79	33.139,20	43.793,25	33,79	33,71
2019	104.485,46	141.047,69	35.286,51	47.467,98	33,77	33,65
2020	101.698,52	138.117,84	33.857,33	45.654,72	33,29	33,05
2021	107.372,56	149.413,65	35.755,93	49.403,24	33,30	33,06
2022	112.901,32	165.718,44	37.596,42	54.702,46	33,30	33,01
2023	118.626,84	180.689,95	39.508,68	59.431,54	33,31	32,89

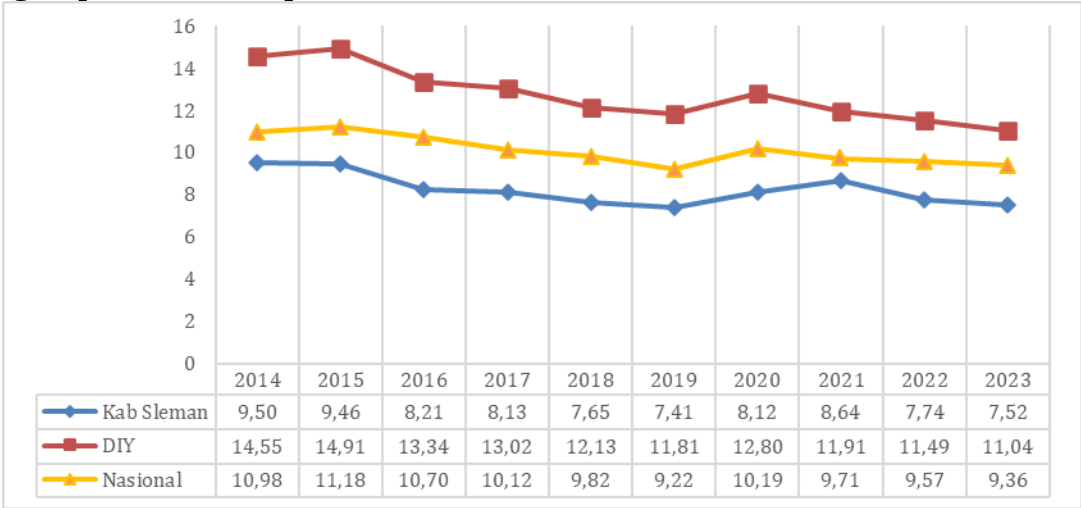
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2015-2024

E. Kemiskinan

Indikator kesejahteraan ekonomi berikutnya adalah kemiskinan. Indikator kemiskinan diukur dengan persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin. Bagian berikut akan menguraikan dua indikator tersebut di Kabupaten Sleman.

1. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin mencerminkan proporsi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terhadap jumlah total penduduk yang ada di wilayah tersebut. Persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman terus menurun dan berada di bawah angka provinsi maupun nasional.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2015-2024



Grafik 2. 6. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2014 – 2023 (%)

Dari grafik di atas, persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman terus menurun dan berada di bawah angka Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun Nasional, kecuali tahun 2020 dan tahun 2021. Akibat pandemi Covid-19 selama dua tahun tersebut, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, angka kemiskinan Kabupaten Sleman semakin menurun, namun belum kembali seperti kondisi tahun 2019, sebelum pandemi Covid-19. Selain itu, angka penurunannya juga semakin kecil, dimana pada masa sebelum pandemi, penurunan pada kisaran 0,5% per tahun, sementara tahun 2023 hanya menurun 0,22% menjadi 7,52%.

2. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin memberikan gambaran jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Penduduk miskin Kabupaten Sleman tahun 2023 berjumlah 97.500 jiwa dari 1.157.292 jiwa penduduk.

Tabel 2. 13. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional Tahun 2014-2023 (Ribuan Jiwa)

Tahun	Kabupaten Sleman	Daerah Istimewa Yogyakarta	Nasional
2014	110,84	532,59	28.593
2015	110,96	550,23	28.510
2016	96,36	494,90	27.760
2017	96,73	466,33	26.580
2018	87,32	460,10	25.670
2019	90,17	448,47	24.790
2020	99,78	475,72	27.550
2021	108,93	506,45	26.500
2022	98,92	454,76	26.360
2023	97,50	448,47	25.900

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2015-2023

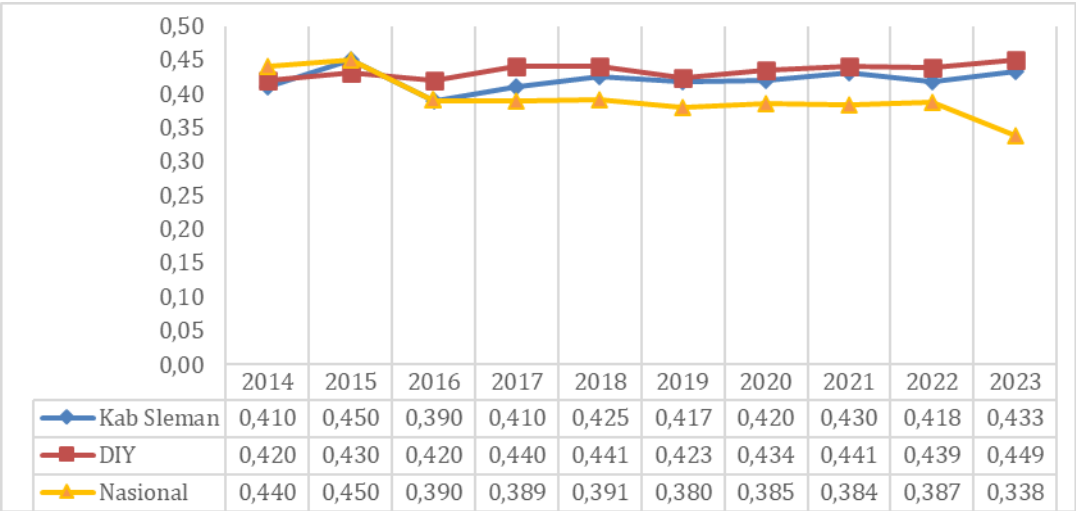
Pada tahun 2023, kontribusi jumlah penduduk miskin Kabupaten Sleman terhadap jumlah penduduk miskin Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 21,74% dan terhadap nasional sebesar 0,38%.

F. Ketimpangan (Indeks Gini)

Indeks gini, sering disebut juga sebagai gini ratio, adalah metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam masyarakat. Angka indeks gini antara 0 dan 1, di mana 0 mengindikasikan distribusi yang sempurna merata (setiap orang memiliki pendapatan yang sama), sedangkan 1 mengindikasikan distribusi yang sangat tidak merata (satu orang memiliki seluruh pendapatan atau kekayaan).

Dalam konteks sosio-ekonomi, indeks gini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pendapatan atau kekayaan terdistribusi di antara individu atau rumah tangga dalam suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi indeks gini, semakin besar ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, indeks gini sering digunakan sebagai indikator ketimpangan sosial dan menjadi perhatian dalam perencanaan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Grafik berikut menunjukkan Indeks gini Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nasional.





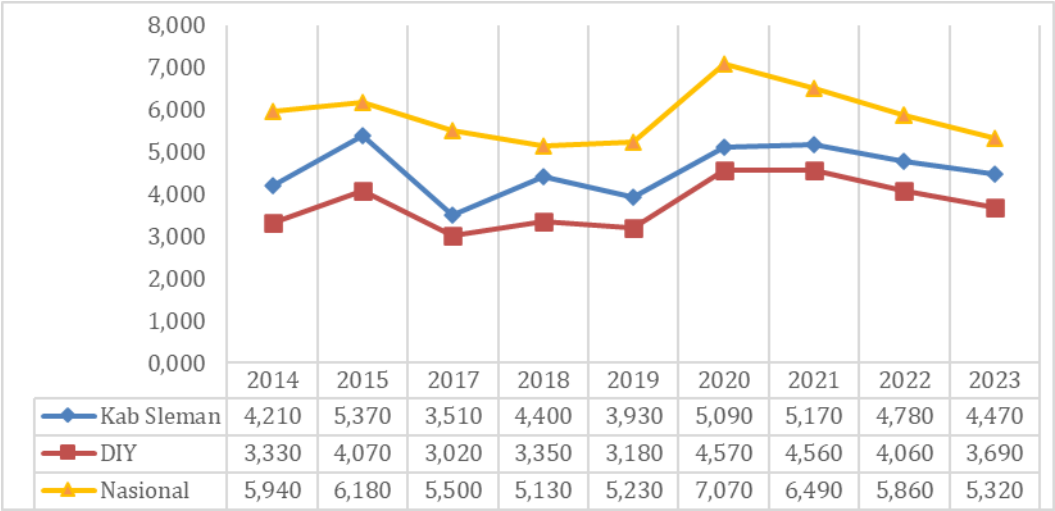
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2024

Grafik 2. 7. Indeks Gini Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2014 – 2023

Dari grafik di atas, indeks gini di Kabupaten Sleman berada di bawah Daerah Istimewa Yogyakarta, namun relatif lebih tinggi dibandingkan dengan indeks gini nasional. Nilai indeks ini menandakan bahwa ketimpangan di Kabupaten Sleman masih terjadi dan lebih parah dibandingkan ketimpangan nasional. Beberapa alasan kesenjangan ini dapat dilihat dari rendahnya upah minimum yang berlaku di Sleman dibandingkan dengan tingginya animo masyarakat berpenghasilan tinggi dari luar Sleman untuk bermukim di Sleman. Meskipun secara angka ketimpangan di Kabupaten Sleman masih tergolong pada kategori sedang (yakni pada interval 0,3-0,5) tetapi jarak untuk mencapai kategori ketimpangan rendah relatif jauh dan membutuhkan pengupayaan ekstra.

G. Ketenagakerjaan

Salah satu indikator kesejahteraan dari bidang ketenagakerjaan adalah tingkat pengangguran. Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin rendah kesejahteraan, demikian pula sebaliknya. Meskipun tidak semua pengangguran merupakan orang yang sedang mencari pekerjaan maupun yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Yang telah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja maupun yang sedang mempersiapkan usaha pun disebut pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sleman selama 10 tahun terakhir tersaji dalam grafik berikut ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2015-2024

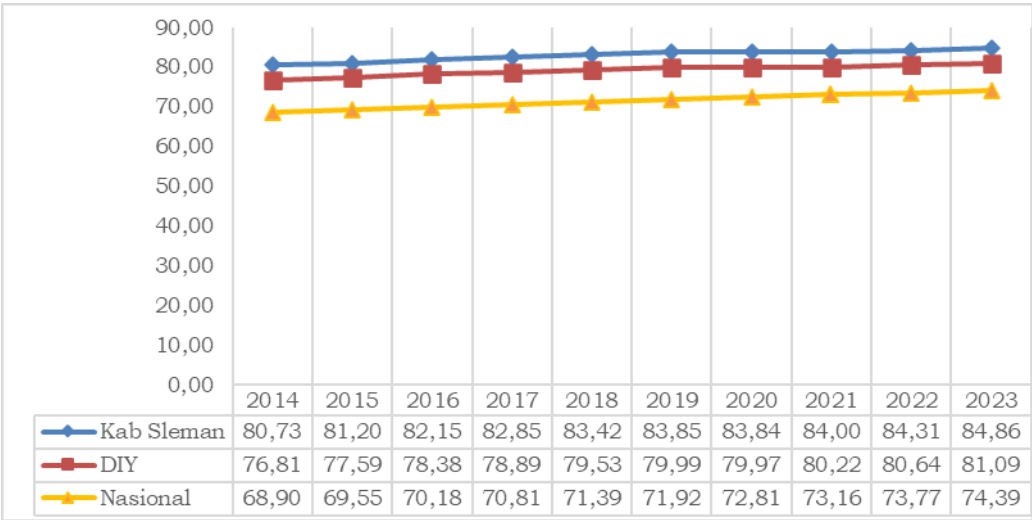


Grafik 2. 8. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional Tahun 2014-2023 (%)

Dari grafik di atas, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sleman selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan fluktuasi, meningkat pada tahun 2020 sebagai dampak Covid-19, kemudian mengalami penurunan dan tahun 2023 menjadi 4,47%. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sleman cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun masih lebih rendah dibandingkan nasional. Kondisi ini justru terbalik dengan tingkat kemiskinan, dimana tingkat kemiskinan Kabupaten Sleman justru paling rendah bila dibandingkan nasional maupun Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional 2023, pengangguran tertinggi merupakan lulusan SMA (5,55%), SMP (5,13%) dan universitas (5,03%). Hal ini menandakan bahwa pengangguran di Kabupaten Sleman merupakan pengangguran terdidik.

H. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia merupakan suatu gambaran bagaimana kinerja pemerintah dalam membangun dengan meningkatkan kualitas hidup manusia. Indeks pembangunan manusia terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari usia harapan hidup (UHH), sedangkan pendidikan ada dua komponen yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah). Nilai indeks pembangunan manusia Kabupaten Sleman dengan kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional tersaji dalam grafik berikut ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2015-2024

Grafik 2. 9. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional Tahun 2014-2023

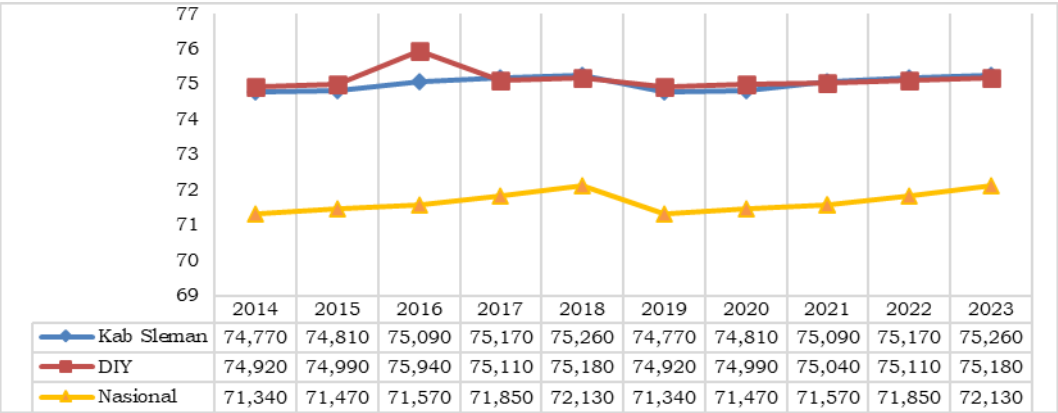
Dari grafik di atas, nilai indeks pembangunan manusia Kabupaten Sleman pada rentang waktu tahun 2014 hingga tahun 2023 selalu mengalami peningkatan. Nilai indeks pembangunan manusia Kabupaten Sleman merupakan yang tertinggi kedua di Daerah Istimewa Yogyakarta setelah Kota Yogyakarta, yang mencapai 88,61 pada tahun 2023. Nilai indeks pembangunan manusia Kabupaten Sleman juga cenderung lebih tinggi dibandingkan nilai indeks pembangunan manusia Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Nasional.

Dari nilai indeks pembangunan manusia di atas, jika ditelusuri kinerja dari unsur pembentuknya, maka dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Usia Harapan Hidup



Usia harapan hidup adalah estimasi rata-rata tahun yang diharapkan seseorang dapat hidup pada saat lahir, berdasarkan pada angka harapan hidup pada saat itu dan faktor-faktor demografis yang mempengaruhi tingkat mortalitas di masyarakat. Usia harapan hidup dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perawatan kesehatan, gaya hidup, lingkungan, akses terhadap sumber daya, dan faktor-faktor genetik. Berikut adalah kondisi usia harapan hidup Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nasional.



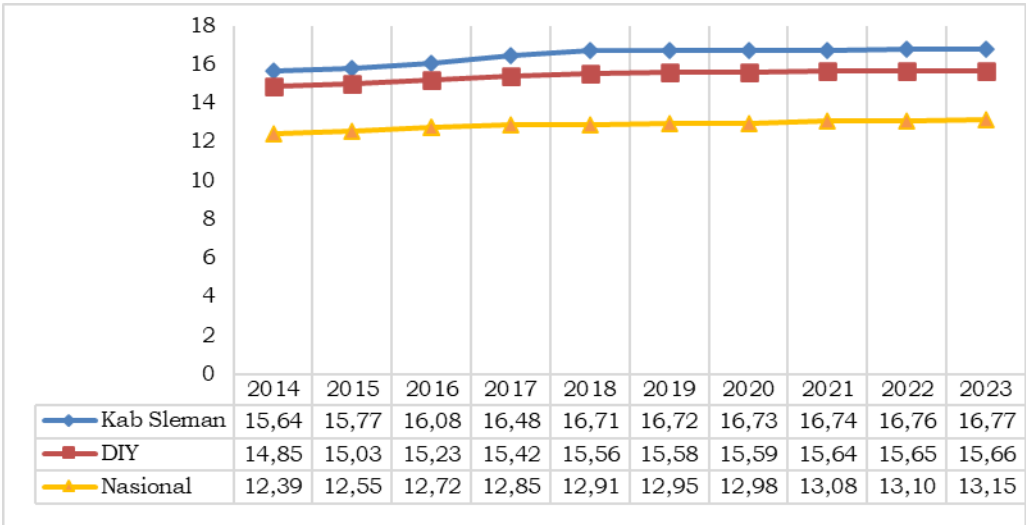
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2015-2024

Grafik 2. 10. Usia Harapan Hidup di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional Tahun 2014-2023 (Tahun)

Dari grafik di atas, usia harapan hidup Kabupaten Sleman hampir sama dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan jauh di atas Nasional. Usia harapan hidup Sleman meningkat secara konsisten, dimana pada tahun 2014 sebesar 74,770 tahun dan pada tahun 2023 sebesar 75,260 tahun. Bertambahnya angka usia harapan hidup di Kabupaten Sleman, di satu sisi menunjukkan adanya kualitas kesehatan yang lebih baik, kesejahteraan yang baik, namun di sisi lain tentu menambah usia tidak produktif dan angka ketergantungan. Bertambahnya angka ketergantungan akan menimbulkan beban keluarga menjadi bertambah berat.

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah adalah estimasi rata-rata jumlah tahun yang diharapkan seseorang akan menghabiskan di sekolah selama hidupnya. Harapan lama sekolah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pendidikan, infrastruktur pendidikan, tingkat partisipasi dalam pendidikan, dan kondisi sosio-ekonomi.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2015-2023

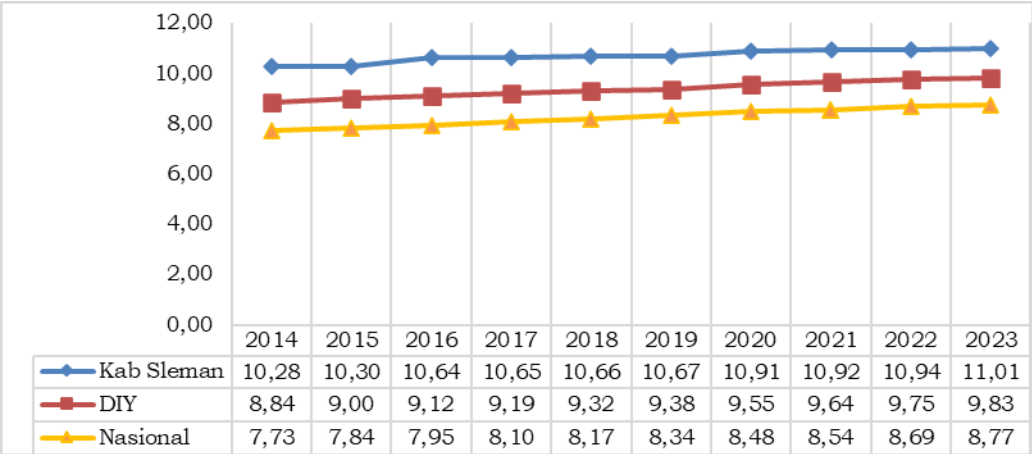


Grafik 2. 11. Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional Tahun 2014-2023 (Tahun)

Berdasarkan grafik di atas, harapan lama sekolah Kabupaten Sleman selalu meningkat dan relatif lebih tinggi dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat kesadaran penduduk untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

3. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah statistik yang mengukur jumlah tahun sekolah yang dihabiskan oleh individu dalam masyarakat. Semakin tinggi Rata-rata lama sekolah, semakin tinggi tingkat pendidikan rata-rata dalam populasi, yang biasanya dikaitkan dengan kemajuan sosial, ekonomi, dan pembangunan manusia yang lebih tinggi.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2015-2024

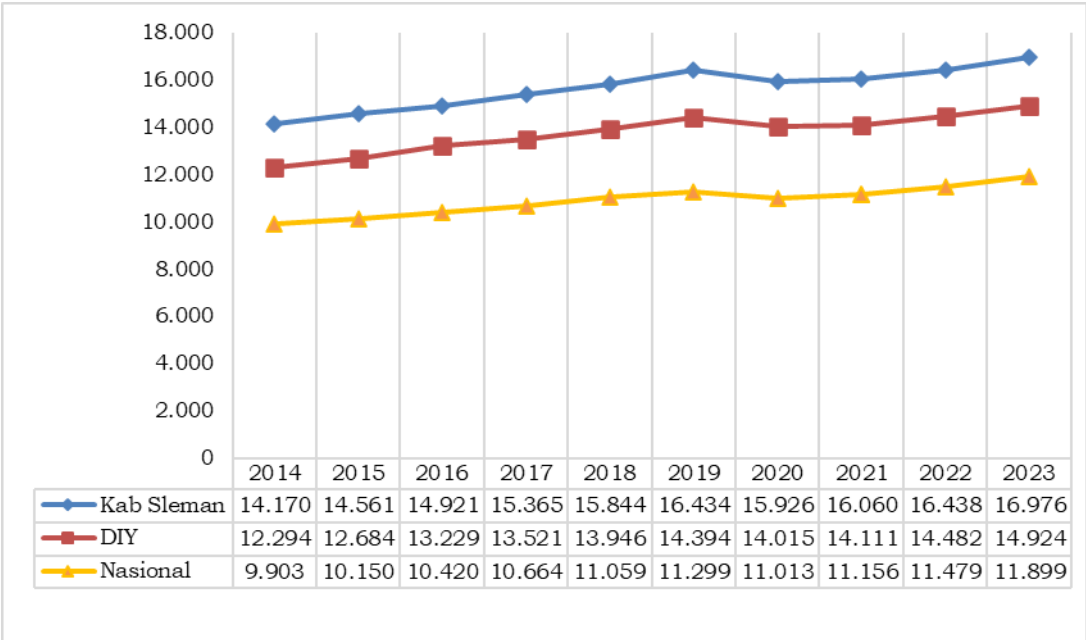
Grafik 2. 12. Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Nasional Tahun 2014-2023 (Tahun)

Berdasarkan Grafik 2.11 dan Grafik 2.12 di atas, terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan di berbagai jenjang sudah lumayan bagus, namun pencapaian lama sekolah masih belum optimal. Pada tahun 2014, harapan lama sekolah Kabupaten Sleman sebesar 15,64 tahun dan rata-rata lama sekolah sebesar 10,28 tahun, sehingga ada selisih 5,36 tahun. Pada tahun 2023, harapan lama sekolah sebesar 16,77 tahun dan rata-rata lama sekolah sebesar 11,01 tahun, dengan selisih 5,76 tahun.

4. Pengeluaran Riil Per Kapita

Pengeluaran riil per kapita adalah ukuran statistik yang menggambarkan jumlah rata-rata pengeluaran riil yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam suatu periode waktu tertentu. Pengeluaran riil mengacu pada pengeluaran yang terdiri dari pengeluaran untuk konsumsi baik untuk pangan maupun non pangan. Pengeluaran ini dapat menggambarkan bagaimana tingkat kualitas kehidupan. Angka pengeluaran riil per kapita Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nasional tersaji dalam grafik di bawah ini.





Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2015-2024

Grafik 2. 13. Pengeluaran Riil per Kapita Penduduk Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional Tahun 2014-2023 (Rp Ribu)

Pengeluaran riil per kapita di Kabupaten Sleman cenderung meningkat, kecuali pada tahun 2020-2021, sebagai dampak pandemi Covid-19. Angka pengeluaran riil per kapita di Kabupaten Sleman juga terus berada pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Nasional. Hal ini menunjukkan potensi tingkat daya beli yang relatif kuat dalam masyarakat Kabupaten Sleman, yang dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi lokal serta kesejahteraan penduduknya.

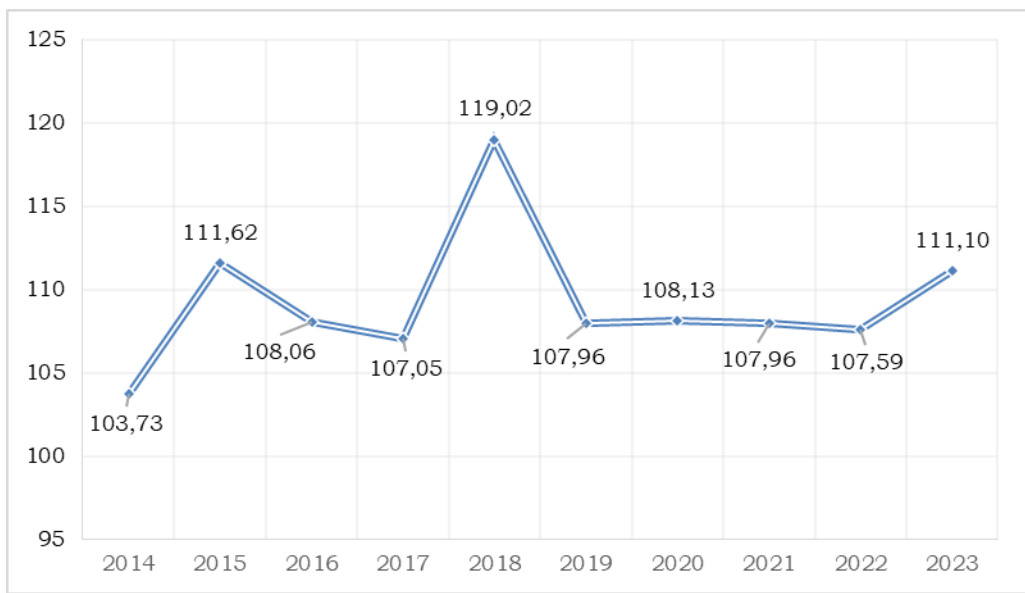
I. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai tukar petani menggambarkan tingkat kesejahteraan petani. Nilai tukar petani merupakan nilai tukar (*term of trade*) antara barang/produk pertanian dengan barang-barang konsumsi dan faktor produksi yang dibutuhkan petani yang dinyatakan dalam persen. Apabila harga produk pertanian yang dihasilkan petani naik dengan persentase lebih besar dari persentase kenaikan barang dan jasa yang dibayar petani, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka nilai tukar petani naik dan dengan sendirinya pendapatan petani naik relatif lebih besar dari kenaikan pengeluaran atau terjadi surplus.

Secara konseptual, hubungan antara nilai tukar petani dan pertambahan pendapatan petani sangat erat. Karena pendapatan petani sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan, maka nilai tukar petani merupakan indikator yang relevan untuk menunjukkan perkembangan tingkat kesejahteraan petani.

Nilai tukar petani Kabupaten Sleman memiliki nilai yang masih marginal. Dengan tingkat pertumbuhan nilai tukar petani yang berfluktuasi, dan tertinggi pada tahun 2018 namun menurun kembali pada tahun berikutnya, nilai tukar petani masih belum banyak bisa menyejahterakan pelaku pertanian.





Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2015-2019; Dinas Kominfo Kab Sleman, 2020-2024

Grafik 2. 14. Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Sleman Tahun 2014-2023

Besaran nilai tukar petani di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa belum sepenuhnya menyejahterakan karena belum berada pada margin yang rendah. Jika dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain, memiliki margin 10% belum dipandang sebagai sektor yang menguntungkan, sehingga kegiatan pertanian masih dianggap sebagai kegiatan yang tradisional dalam kacamata tingkat kesejahteraan. Perkembangan sektor pertanian juga bersaing *head to head* dengan perkembangan perkotaan, dimana nilai tambah dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pertanian. Kondisi ini tentu akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan kegiatan pertanian.

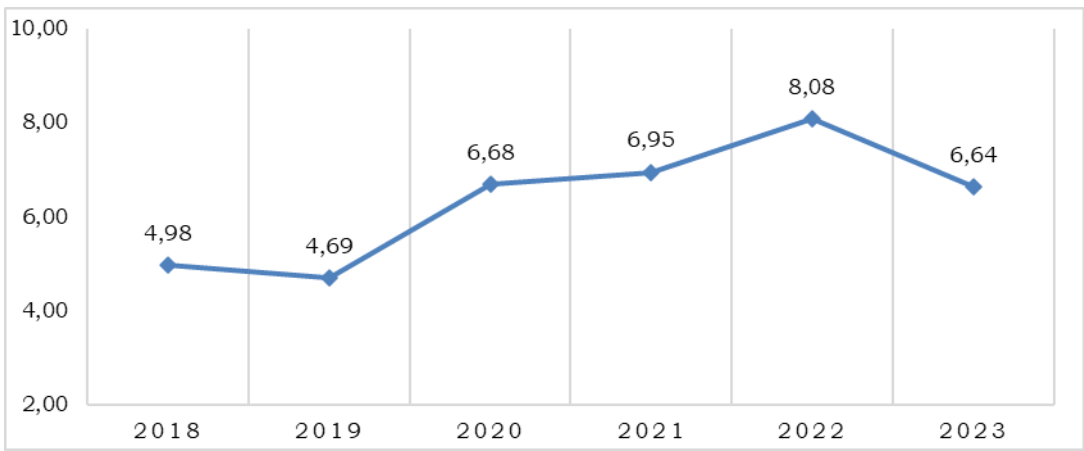
J. Ketahanan Pangan

1. Angka Prevalensi Ketidacukupan Pangan (*Prevalence of Undernourishment (PoU)*)

Prevalensi ketidacukupan pangan adalah ukuran statistik yang menggambarkan proporsi populasi yang mengalami kekurangan pangan atau ketidacukupan gizi dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam konteks ini, ketidacukupan pangan mengacu pada keadaan dimana seseorang atau rumah tangga tidak memiliki akses yang memadai atau stabil terhadap makanan yang mencukupi dari segi kualitas maupun kuantitas untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil pengolahan data, *prevalence of undernourishment* di Kabupaten Sleman terus merangkak naik dari 4,98% pada tahun 2018 dan terendah 4,69% pada tahun 2019, menjadi 6,64% pada tahun 2023. Prevalensi ketidacukupan pangan di Kabupaten Sleman yang terus meningkat dari tahun ke tahun memberikan gambaran kasar bahwa pemenuhan gizi pangan di masyarakat masih bermasalah.





Sumber: Badan Pangan Nasional, 2019-2023

Grafik 2. 15. Prevalensi Ketidacukupan Pangan Kabupaten Sleman Tahun 2018-2023 (%)

2. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks ketahanan pangan adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi dan memantau tingkat ketahanan pangan masyarakat atau wilayah terhadap risiko pangan dan kerawanan pangan. Indeks ini mencakup berbagai dimensi yang mencerminkan akses, ketersediaan dan penggunaan pangan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan manusia

Tabel 2. 14. Perbandingan Skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Sleman dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 -2023

Tahun	Kabupaten Sleman		Skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Daerah Istimewa Yogyakarta
	Skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Peringkat	
2018	83,43	11	N/A
2019	83,34	40	83,63
2020	82,30	86	80,67
2021	83,39	59	81,43
2022	83,16	70	80,80
2023	83,16	94	83,17

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2019-2023

Berdasarkan data pada tabel di atas, skor indeks ketahanan pangan Kabupaten Sleman terus menurun peringkatnya dalam rentang waktu tahun 2018 hingga tahun 2023, meskipun angkanya relatif tidak berubah, berkisar dari angka 82 hingga 83. Sampai dengan tahun 2022, skor indeks ketahanan pangan Kabupaten Sleman masih berada di atas skor indeks ketahanan pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun pada tahun 2023, skor indeks ketahanan pangan Kabupaten Sleman lebih rendah 0,1 poin dari indeks ketahanan pangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Aspek-aspek pembentuk indeks ketahanan pangan terdiri dari aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan. Perkembangan aspek-aspek pembentuk IKP Kabupaten Sleman tahun 2019-2023 disajikan dalam Tabel 2.15 di bawah.



Tabel 2. 15. Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sleman Tahun 2019-2023

Nilai Indeks	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Aspek Ketersediaan	71,74	66,16	70,95	72,18	66,51
Aspek Keterjangkauan	90,34	90,38	88,71	90,01	90,17
Aspek Pemanfaatan	86,78	88,34	88,72	86,27	90,4
Komposit Indeks Ketahanan Pangan	83,34	82,3	83,39	83,16	83,16

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

2.2.2.Kesejahteraan Sosial

Beberapa indikator atau parameter yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan sosial di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

A. Gambaran Kesehatan Keluarga

Kesehatan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia masyarakat. Kondisi kesehatan yang baik akan memberikan fondasi fisik bagi masyarakat untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Untuk itulah pembangunan kesehatan menjadi kebutuhan mendasar yang penting untuk dioptimalkan dalam rangka mengatasi masalah kesehatan dan mewujudkan sumber daya manusia masyarakat yang tangguh. Sebagai kelompok sosial terkecil yang menjadi basis kehidupan masyarakat, kesehatan keluarga yang didefinisikan melalui Indeks keluarga sehat merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kesehatan masyarakat secara umum. Jika ditinjau secara sistem, indeks keluarga sehat ini terdiri atas 12 indikator keluarga sehat yang meliputi kesehatan fisik, mental, sosial dan lingkungan (Kementerian Kesehatan RI, 2016), dengan rincian sebagai berikut:

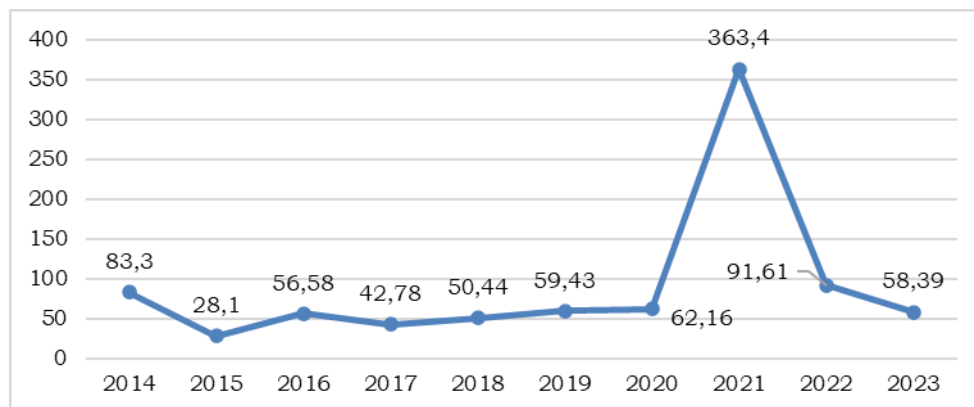
- 1) Keluarga mengikuti program keluarga berencana;
- 2) Ibu melaksanakan persalinan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
- 3) Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
- 4) Bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan;
- 5) Balita dipantau pertumbuhannya setiap bulan;
- 6) Penderita tuberkulosis paru berobat secara standar;
- 7) Penderita hipertensi berobat secara teratur;
- 8) Penderita gangguan jiwa berat mendapat pengobatan dan tidak ditelantarkan;
- 9) Tidak ada anggota keluarga yang merokok;
- 10) Keluarga mempunyai akses terhadap air bersih;
- 11) Keluarga mempunyai akses dan menggunakan jamban sehat; dan
- 12) Keluarga menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional.

Banyak permasalahan kesehatan yang dalam jangka panjang membutuhkan kebijakan penanganan secara berkelanjutan. *Stunting*, prevalensi gizi buruk dan angka kematian ibu dan bayi merupakan indikator dasar di bidang kesehatan yang akan dibahas pada bab ini.

1. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu (AKI) merupakan indikator yang penting untuk diperhatikan dalam pembangunan kesehatan. Parameter perhitungan AKI adalah terkait jangka waktu kematian perempuan saat hamil hingga 42 hari sejak terminasi kehamilan dan kematian yang disebabkan oleh kehamilan maupun pengelolaannya, dengan perhitungan angka kematian dihitung per 100.000 kelahiran hidup.





Sumber: Dinkes Kabupaten Sleman, 2015-2024

Grafik 2. 16. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Sleman Tahun 2014-2023

Angka kematian ibu mengalami dinamika yang bervariasi dari tahun 2014 hingga tahun 2023. Pada tahun 2021, dengan adanya pandemi Covid-19, kondisi fasilitas kesehatan (faskes) tidak cukup memadai untuk memberikan pertolongan dan perawatan secara intensif, diperparah dengan kondisi tenaga kesehatan baik dokter maupun paramedis juga terbatas sebagai dampak tekanan kerja yang sangat keras dan berisiko. Kondisi ini mengurangi kapasitas pelayanan yang baik dan memadai untuk pasien Covid-19, termasuk ibu hamil yang menderita Covid-19. Keterlambatan penanganan serta kurang optimalnya perawatan menyebabkan banyak ibu hamil tidak tertolong, sehingga angka kematian ibu meningkat tajam.

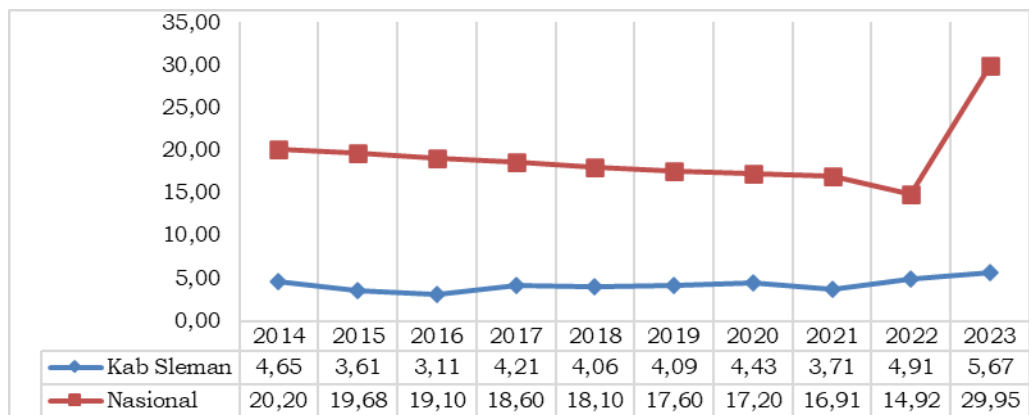
Menilik target penurunan angka kematian ibu pada tingkat nasional hingga tahun 2030 menjadi 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup, kondisi di Kabupaten Sleman optimis dapat tercapai. Namun demikian, tetap diperlukan upaya-upaya untuk mencapai keselamatan ibu yang lebih baik. Upaya tersebut dapat diarahkan pada upaya pelengkapan dan peningkatan kemudahan dalam pelayanan kesehatan, peningkatan pemahaman masyarakat terkait kesehatan keluarga dan penguatan asupan gizi dan pangan secara umum.

Kondisi kesehatan ibu hendaknya menjadi perhatian penting dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, agar dapat menekan angka kematian ibu. Masalah angka kematian ibu merupakan efek domino dari kondisi kesehatan wanita yang berlangsung secara simultan dalam perjalanan dan siklus hidup yang panjang dan berkesinambungan. Kondisi kesehatan yang kurang baik pada masa kecil, tumbuh remaja hingga dewasa dapat terakumulasi menjadi kondisi yang kurang baik pada saat memasuki pernikahan, sehingga proses reproduksi menjadi terganggu. Oleh karena itu, peningkatan kondisi kesehatan pranikah juga harus dilakukan, terutama pada kesehatan remaja pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar pada saat memasuki jenjang perkawinan sudah siap dengan kesehatan yang baik, terutama siap dengan reproduksi yang memadai.

2. Angka Kematian Bayi

Salah satu indikator kesehatan yang dapat menjelaskan tinggi-rendahnya kinerja pemerintah dalam bidang kesehatan adalah angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Di Kabupaten Sleman, angka kematian bayi juga telah menjadi perhatian penting dalam pembangunan di bidang kesehatan. Upaya yang terstruktur baik pada level kebijakan, maupun teknis operasional pelayanan kesehatan terus ditingkatkan. Namun, masih terdapat masalah dalam penurunan angka kematian bayi ini. Perkembangan angka kematian bayi yang terjadi di Kabupaten Sleman tersaji pada grafik berikut.





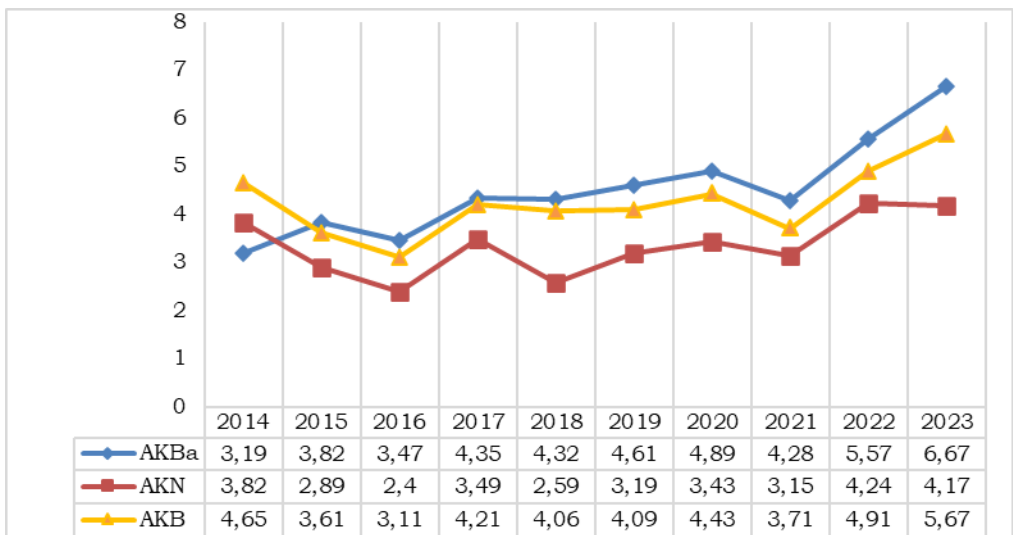
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015-2024

Grafik 2. 17. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Sleman dan Nasional Tahun 2014-2023

Berdasarkan grafik di atas, angka kematian bayi Kabupaten Sleman lebih rendah dari angka kematian bayi nasional, yang artinya kondisi Kabupaten Sleman lebih baik dari nasional. Namun, kecenderungan angka kematian bayi nasional memiliki konsistensi penurunan yang relatif lebih stabil dibandingkan dengan Kabupaten Sleman yang fluktuatif dari tahun 2014-2022. Angka kematian bayi Nasional meningkat tajam pada tahun 2023, mencapai 19,3, sedangkan angka kematian bayi Kabupaten Sleman sebesar 5,67.

Rendahnya angka kematian bayi Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa upaya perbaikan yang dilakukan Kabupaten Sleman telah membuahkan hasil, meskipun masih perlu dioptimalkan. Harapannya, angka kematian bayi terus-menerus turun secara konsisten. Penurunan angka kematian bayi membutuhkan pengendalian yang lebih intensif, agar dapat memperoleh hasil yang optimal. Selain itu, identifikasi penyebab terjadinya kematian bayi penting untuk dilakukan, agar dapat mengembangkan usaha preventif yang tepat.

Selain angka kematian bayi, kinerja pelayanan kesehatan bayi baru lahir dan balita juga menjadi perhatian pemerintah. Hal ini tercermin dalam angka kematian balita dan angka kematian neonatal. Angka-angka ini memberikan gambaran kualitas pelayanan kesehatan pada usia tumbuh kembang anak yang lebih rinci.



Sumber: Dinkes Kabupaten Sleman, 2024

Grafik 2. 18. Angka Kematian Bayi, Balita dan Neonatal di Kabupaten Sleman Tahun 2014-2023

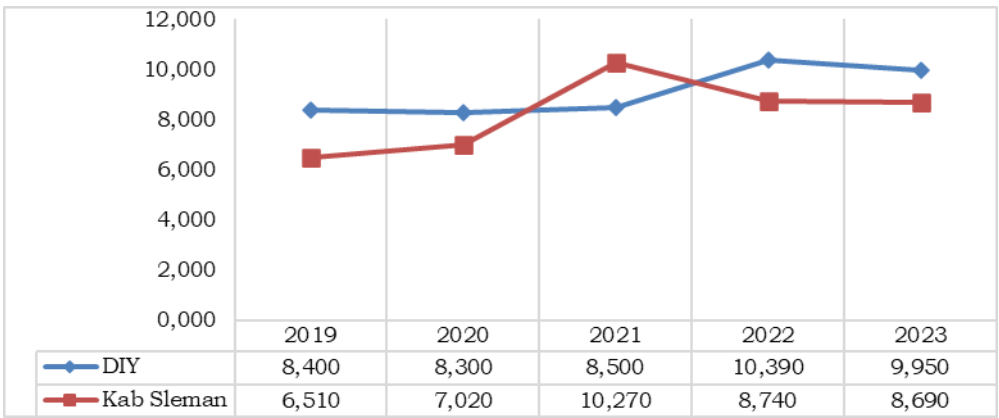
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 sebesar 4,91 dan pada tahun 2023 sebesar 5,67. Kecenderungan angka kematian bayi yang meningkat merupakan



efek dari kondisi gizi buruk maupun kualitas kesehatan yang masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam memeriksakan dan melakukan pemantauan kesehatan bayi, di samping upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang perlu lebih intensif.

3. Gizi Buruk dan Stunting

Ketersediaan gizi dalam keluarga merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam pembentukan fisik dan kesehatan sumber daya manusia yang baik, terutama bagi kelompok usia balita yang sedang mengalami masa tumbuh-kembang emas. Bersumber dari Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta, prevalensi ketidakcukupan gizi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019-2023 berfluktuasi dari angka 8,3% hingga 10,39%. Adapun kondisi Kabupaten Sleman cenderung lebih baik meski tidak sepenuhnya, yakni dengan kisaran fluktuasi 6,51% hingga 10,27%. Pada tahun 2021, prevalensi ketidakcukupan gizi di Kabupaten Sleman lebih rendah dibandingkan Daerah Istimewa Yogyakarta. Angka ini berbanding lurus dengan persentase penduduk miskin yang juga mengalami lonjakan besar pada tahun 2021.



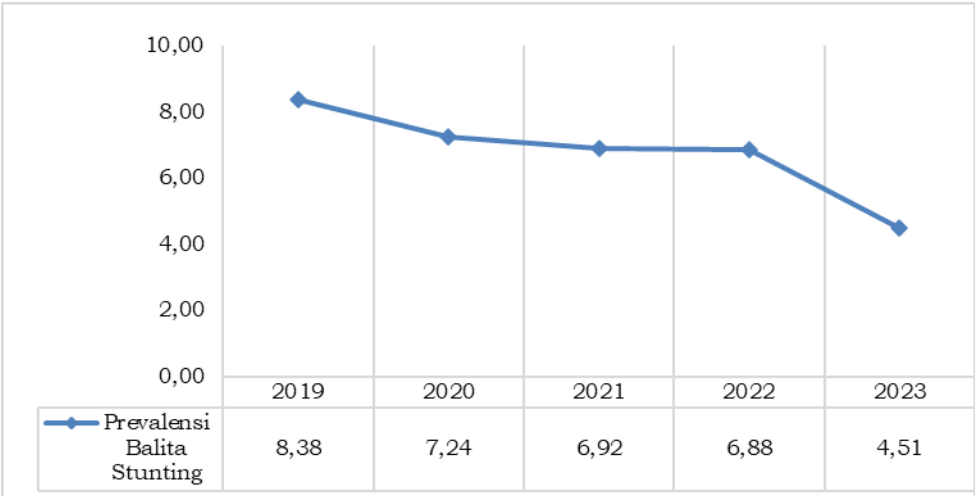
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024

Grafik 2. 19. Prevalensi Ketidakcukupan Gizi pada Anak di Kabupaten Sleman dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2023

Prevalensi *stunting* adalah indikator yang menggambarkan pembangunan sumber daya manusia dari sisi penyediaan gizi. *Stunting* merupakan permasalahan kesehatan yang memiliki dampak buruk pada tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental maupun intelektual. Pengendalian *stunting* sangat diperlukan, agar tumbuh generasi yang berkualitas, baik dari segi kesehatan jasmani rohani, memiliki kecerdasan dan kondisi mental yang kuat.

Mengingat ketersediaan data *stunting* masih relatif terbatas, data yang digunakan berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu melalui aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan. Secara umum, kondisi prevalensi *stunting* di Kabupaten Sleman pada lima tahun terakhir mengalami penurunan.



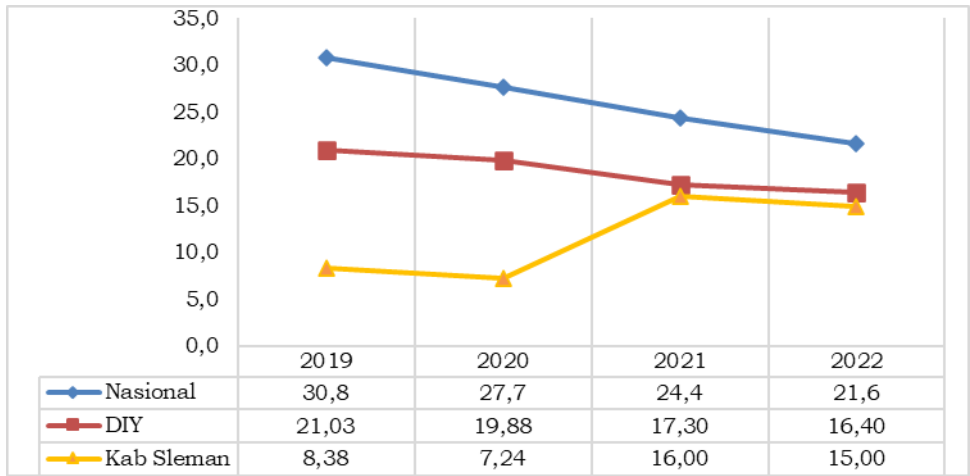


Sumber: BKKBN, 2020-2024

Grafik 2. 20. Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Sleman Tahun 2019-2023 (%)

Berdasarkan aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, prevalensi *stunting* tahun 2023 adalah 4,51% dengan rentang 2,37% (Kapanewon Berbah yang terendah) hingga 8,69% (Kapanewon Pakem yang tertinggi).

Adapun berdasarkan sumber Survei Status Gizi Indonesia, prevalensi *stunting* di Kabupaten Sleman mengalami penurunan, yakni pada tahun 2021 sebesar 16% dan tahun 2022 sebesar 15%. Jika dibandingkan dengan Nasional dan Daerah Istimewa Yogyakarta, prevalensi *stunting* Kabupaten Sleman jauh lebih rendah, yang masing-masing sebesar 21,6% dan 16,4%.



Sumber: Kemenkes, 2020-2023

Grafik 2. 21. Prevalensi Stunting Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional Tahun 2019-2022

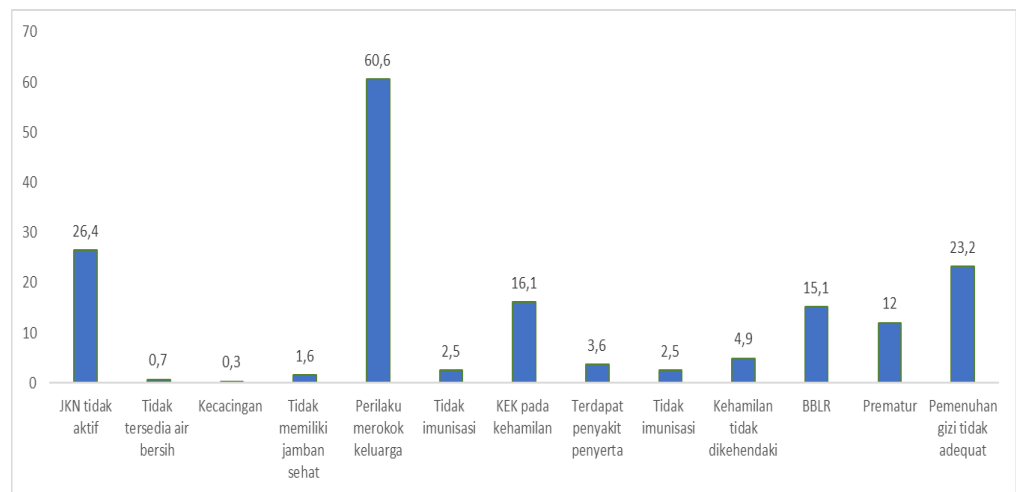
Peningkatan prevalensi *stunting* di Kabupaten Sleman pada tahun 2021 perlu menjadi perhatian serius, karena Daerah Istimewa Yogyakarta dan nasional justru mengalami penurunan. Selain itu, prevalensi *stunting* di Kabupaten Sleman pada tahun-tahun sebelumnya jauh lebih baik. Hal ini terjadi karena pandemi Covid-19 yang mewabah pada tahun 2020-2021 sangat berpengaruh pada kondisi kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, pandemi Covid-19 juga menimbulkan efek domino di bidang kesehatan itu sendiri.

Salah satu target *sustainable development goals* pada tahun 2025 adalah permasalahan *stunting* dapat diselesaikan, maka intervensi terhadap permasalahan gizi buruk perlu terus ditekankan. Upaya preventif dilakukan melalui pengukuran pada kadar CO dalam paru melalui *CO analyzer*, *skrining* pada usia anak sekolah, komunikasi



informasi edukasi pada media cetak dan elektronik, pembentukan *agent of change* pada setiap kapanewon dan inovasi Gas Bro (gerakan keluarga bebas asap rokok) yang digagas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Selain itu, dilaksanakan pelatihan pemberian makanan pada bayi dan anak bagi seluruh kader di kapanewon dan kalurahan serta kelas ibu hamil, ibu bayi di bawah tiga tahun dan balita.

Upaya kuratif dilakukan dengan pelayanan kesehatan di puskesmas melalui upaya berhenti merokok, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita melalui pemberian telur fungsional dan beras fortifikasi dan pemberian suplementasi gizi (tablet dan sirup Fe) pada sasaran dengan masalah gizi untuk menekan angka kekurangan energi kronis pada kehamilan, bayi berat badan lahir rendah dan prematur, serta perluasan jaminan kesehatan nasional.



Sumber: Dinkes Kabupaten Sleman, 2023

Grafik 2. 22. Determinan Stunting di Kabupaten Sleman Tahun 2023

Jika ditinjau dari grafik determinan *stunting*, terlihat bahwa faktor risiko kejadian *stunting* pada keluarga yang paling besar adalah masalah pola hidup sehat, sedangkan determinan terkait sarana dan prasarana sanitasi (air bersih, jamban, dan lain-lain) cenderung rendah. Berdasarkan hal tersebut, diasumsikan bahwa pengetahuan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), termasuk pemenuhan gizi serta kepedulian aktif tentang kesehatan belum baik.

Faktor risiko *stunting* terbesar adalah perilaku merokok keluarga. Membangun kesadaran untuk berhenti merokok membutuhkan solusi yang terintegrasi antara masyarakat dan pemerintah. Pendidikan dan pola asuh dalam keluarga serta kesepakatan dan ketaatan keluarga merupakan hal yang penting untuk membentengi perilaku merokok. Faktor lainnya yang menjadi determinan *stunting* adalah kesadaran masyarakat untuk mengurus dan mengajukan pengaktifan jaminan kesehatan nasional. Hal ini tentu perlu diimbangi dengan pelayanan administrasi yang responsif dan efisien.

Hal penting lain yang kurang mendapat perhatian dalam keluarga adalah pengetahuan tentang gizi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi tentang gizi yang lengkap dalam pendidikan keluarga, masyarakat maupun pendidikan formal, sehingga penerapan gizi yang memenuhi kesehatan belum diterapkan optimal. Pengetahuan gizi yang kurang memadai, menjadikan mudah untuk mengonsumsi makanan cepat saji yang secara umum hanya ada karbohidrat dan protein, tidak dilengkapi sayur-mayur, buah dan susu. Jika hal ini membudaya di kalangan anak-anak, maka akan tumbuh dewasa dengan pola makan yang salah. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, maka ketika



memasuki kehidupan berumah tangga, akan berisiko melahirkan anak yang *stunting*.

Masalah *stunting* ini merupakan masalah yang terjadi akibat proses panjang dengan banyak faktor yang terkait. Kondisi kesehatan orang tua dan pemenuhan gizi orang tua jauh sebelumnya perlu dipersiapkan, agar tidak berisiko melahirkan bayi yang *stunting*. Di samping itu pola makan, pola dan gaya hidup dalam rumah tangga juga perlu diperhatikan. Upaya menjauhkan diri dari berbagai faktor atau determinan *stunting* ini perlu dilakukan secara serius.

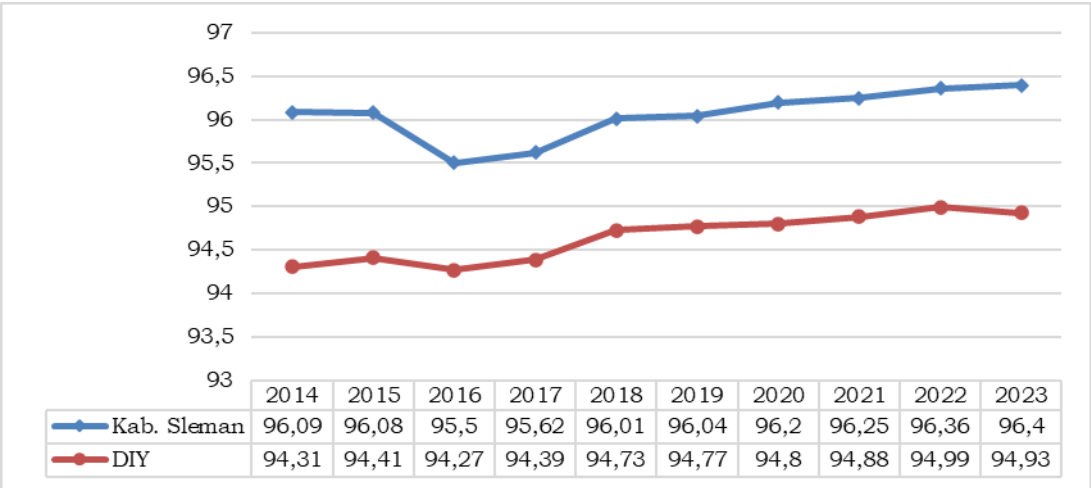
B. Indeks Pembangunan Gender

Gender merujuk pada sistem yang membagi individu ke dalam dua kategori yang jelas, yaitu laki-laki dan perempuan. Ini menciptakan harapan tertentu terkait peran, perilaku, dan identitas yang dianggap sesuai dengan jenis kelamin yang diberikan, serta norma sosial yang mengatur interaksi di antara keduanya. Pembangunan gender dalam paradigma ini bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Hal ini melibatkan usaha untuk memberikan akses yang setara terhadap sumber daya, kesempatan, dan kekuasaan bagi kedua jenis kelamin, dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan yang muncul dalam konteks biner gender.

Pembangunan yang berwawasan gender adalah pendekatan pembangunan yang memperhitungkan perbedaan gender dan bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender serta mengurangi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini mengakui bahwa gender merupakan faktor penting dalam menentukan akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan kekuasaan dalam masyarakat. Pembangunan yang berwawasan gender memperhatikan peran, kebutuhan, dan kontribusi laki-laki dan perempuan dalam setiap tahap proses pembangunan, dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi. Dengan memperhitungkan perspektif gender dalam pembangunan, tujuan kesetaraan gender dapat diintegrasikan ke dalam semua aspek kebijakan dan praktik pembangunan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi semua anggota masyarakat.

Indeks pembangunan gender adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi nilai indeks, semakin kecil kesenjangan gender atau dengan kata lain nilai indeks pembangunan manusia perempuan mendekati indeks pembangunan manusia laki-laki. Berdasarkan komponen pembentuk indeks pembangunan manusia tersebut, nantinya dapat dilihat area mana yang masih terdapat kesenjangan gender, yang nantinya dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mencapai kesetaraan gender.





Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015-2024

Grafik 2. 23. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sleman dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2023

Kabupaten Sleman telah melaksanakan pembangunan dengan wawasan gender dari waktu ke waktu. Capaian indeks pembangunan gender yang diperoleh Kabupaten Sleman sudah lebih baik dibandingkan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinamika indeks pembangunan gender yang sempat menurun pada tahun 2016, kembali meningkat secara perlahan hingga tahun 2023. Pada tahun 2023 indeks pembangunan gender Kabupaten Sleman mencapai 96,40. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Sleman semakin dekat dengan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki, bahkan mengindikasikan telah terjadi kesetaraan gender dalam konteks sosial, budaya, ekonomi dan politik, meski belum sepenuhnya optimal.

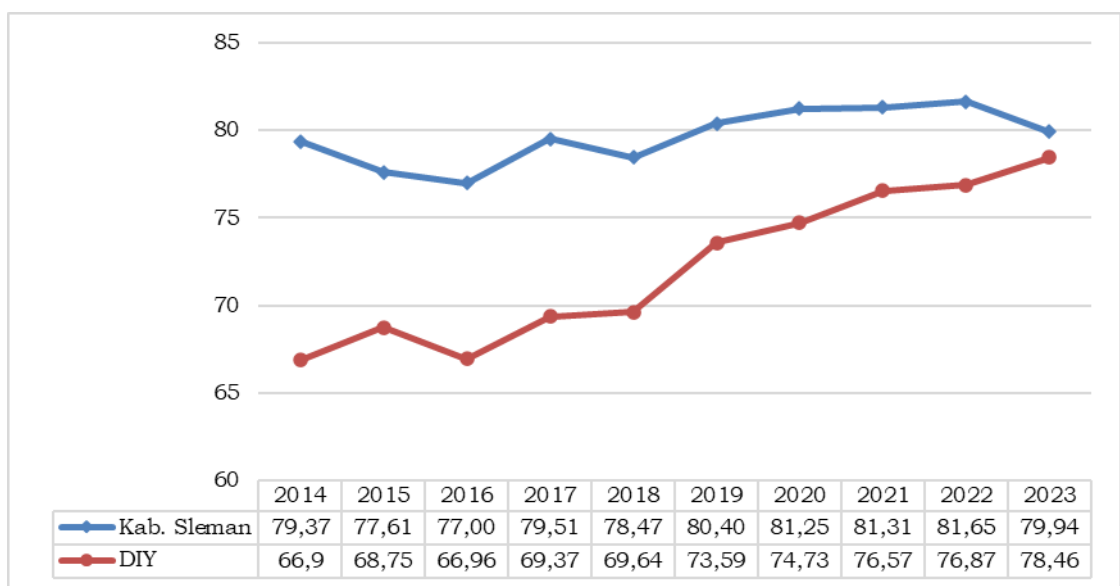
Hal yang perlu dilakukan untuk optimalisasi kesetaraan gender adalah meningkatkan kapasitas pengembangan diri perempuan dan partisipasi perempuan melalui penyediaan program dan peningkatan partisipasi. Selain itu, pengarusutamaan kesadaran gender perlu dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari, serta adanya perhatian terhadap hak-hak dan kesetaraan peran dalam pembangunan. Yang tidak kalah penting adalah kepedulian terhadap urgensi pembangunan gender ini untuk menciptakan sumber daya manusia yang jauh lebih kuat dan berdaya.

C. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks pemberdayaan gender merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian keadilan dan kesetaraan gender, didasarkan pada partisipasi dalam bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik. Indikator komposit yang diukur mencakup keterlibatan perempuan dalam parlemen, posisi peran sebagai seorang tenaga yang profesional serta distribusi pendapatan perempuan. Pembentukan keberdayaan perempuan ditujukan untuk memperoleh posisi relatif yang setara dengan laki-laki. Indeks pemberdayaan gender memberikan gambaran tentang bagaimana posisi perempuan dalam upaya mengusahakan kesetaraan dengan laki-laki.

Kabupaten Sleman telah melaksanakan banyak pengupayaan terkait dengan pemberdayaan gender. Capaian indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Sleman dibandingkan dengan capaian provinsi dapat dilihat pada grafik berikut.





Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015-2024

Grafik 2. 24. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Sleman dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2023

Indeks pemberdayaan gender Kabupaten Sleman terus bertumbuh secara konsisten meski mengalami beberapa penurunan seperti pada tahun 2016 dan 2018, dengan posisi selalu berada di atas Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2023, indeks pemberdayaan gender Kabupaten Sleman mencapai 79,94, menurun dari tahun 2022 (81,65). Angka indeks pemberdayaan gender yang lumayan tinggi menunjukkan bahwa adanya independensi dan peningkatan kontrol atas diri sendiri.

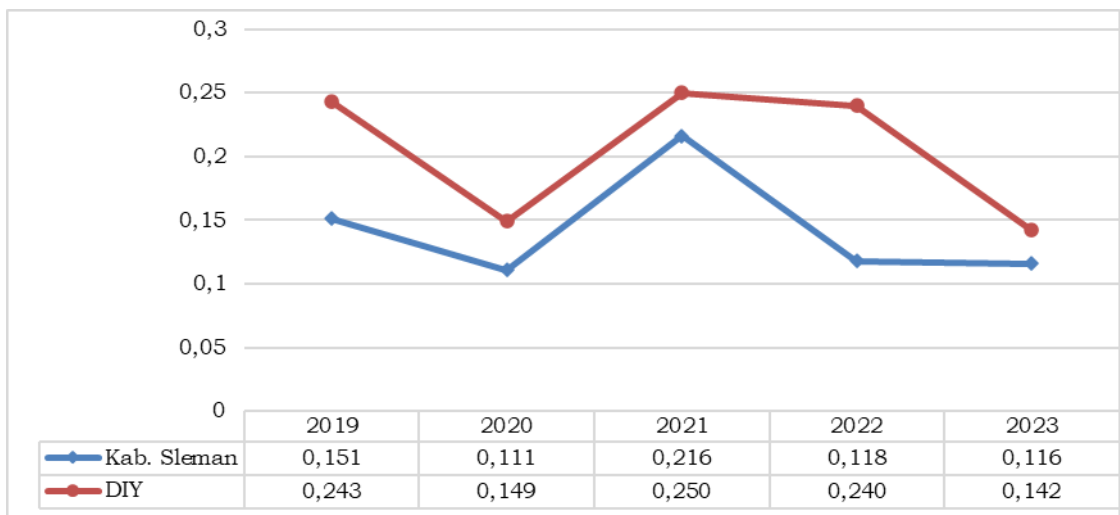
Secara umum kinerja pemberdayaan gender telah meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa poin yang perlu ditingkatkan adalah terkait peran perempuan dalam parlemen, kekerasan terhadap perempuan serta ketersediaan data proporsi penghasilan perempuan dibandingkan laki-laki. Keterwakilan perempuan dalam parlemen juga masih perlu ditingkatkan, untuk mencapai angka 30%, dan yang terpenting bukan hanya sekedar tentang kuantitas, namun lebih pada bagaimana dengan kuantitas tersebut bisa mempengaruhi proses politik melalui partisipasi dalam proses perumusan kebijakan daerah.

Kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sleman sudah berada pada angka yang baik, yakni 0,06% pada tahun 2022 dan menyentuh 0,04% pada tahun 2019. Harapannya angka kekerasan ini terus menurun dan mendekati 0, bahkan tidak ada kekerasan sama sekali. Pemberdayaan perempuan merupakan salah upaya preventif kekerasan pada perempuan dengan meningkatkan kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Adapun terkait data proporsi penghasilan perempuan, data ini menjadi evaluator tambahan, dimana kesetaraan penghasilan perempuan dan laki-laki, sehingga dapat digunakan untuk menjadi penentu berbagai keputusan pembagian peran perempuan dalam keluarga dan juga memastikan terjadinya keadilan dalam kesejahteraan keluarga.

D. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks ketimpangan gender (IKG) merupakan pengukuran terhadap perbedaan antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan tiga dimensi, antara lain dimensi kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan serta dimensi pasar tenaga kerja.





Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020-2024

Grafik 2. 25. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Sleman dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2023

Indeks ketimpangan gender Kabupaten Sleman tahun 2019-2023 berkisar pada angka 0,1-0,2. Nilai indeks ketimpangan gender Kabupaten Sleman ini relatif lebih unggul jika dibandingkan dengan indeks ketimpangan gender Daerah Istimewa Yogyakarta maupun indeks ketimpangan gender nasional. Pada tahun 2023, indeks ketimpangan gender Kabupaten Sleman lebih baik dari tahun sebelumnya, menjadi 0,116, lebih baik dari indeks ketimpangan gender Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencapai 0,142 dan indeks ketimpangan gender nasional (0,447). Hal ini merupakan wujud dari perbaikan pada semua dimensi, baik dimensi kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan dan dimensi pasar tenaga kerja, dalam memberikan kesetaraan gender. indeks ketimpangan gender Kabupaten Sleman yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan antara laki-laki dan wanita relatif sempit, atau dekat, artinya tidak ada perbedaan yang mencolok terkait pemenuhan kesehatan reproduksi, akses terhadap pemberdayaan maupun dalam memperoleh peluang kerja.

E. Indeks Pembangunan Pemuda

Pemuda merupakan tulang punggung bangsa, sehingga pembangunan pemuda merupakan hal strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah. Prioritas pembangunan pemuda dilakukan seiring dengan upaya pencapaian sumber daya manusia unggul untuk menuju Indonesia maju. Pemuda yang tangguh dengan pendidikan yang tinggi, kecakapan tinggi, keuletan dan motivasi yang kuat, akan dapat menjadi sumber daya manusia yang siap membangun.

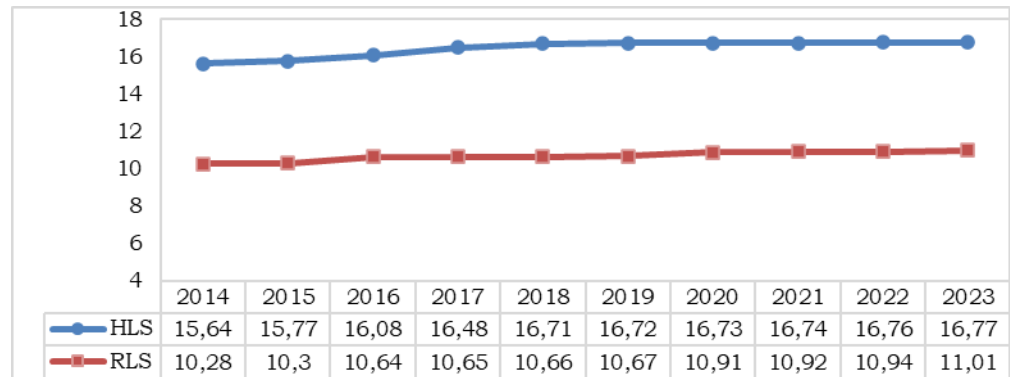
Kabupaten Sleman telah melakukan upaya pembangunan kepemudaan yang dapat mendorong pencapaian generasi muda yang memiliki kapasitas dan berkarakter baik. Pada umumnya keberhasilan pembangunan kepemudaan diukur dengan menggunakan indeks pembangunan pemuda. Pengukuran tersebut mencakup 5 (lima) dimensi atau domain yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan dan lapangan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.

Untuk domain pendidikan, pada grafik sebelumnya, Grafik 2.11, terlihat harapan lama sekolah Kabupaten Sleman, lebih tinggi dari harapan lama sekolah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nasional. Hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Sleman mempunyai optimisme yang tinggi dalam merencanakan lama sekolah bagi warganya. harapan lama sekolah ditetapkan pada angka yang tinggi dapat memberikan dorongan terhadap pembentukan kinerja pelayanan pendidikan yang optimis. Selain itu,



sinergitas dengan berbagai lembaga diperlukan untuk dapat mencapai target harapan lama sekolah yang ditetapkan.

Merujuk pada Grafik 2.12, terlihat bahwa rata-rata lama sekolah Kabupaten Sleman cenderung meningkat dan lebih tinggi dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional. Dalam satu dasawarsa, yakni tahun 2014-2023, rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan sebesar 0,73 tahun lama sekolah. rata-rata lama sekolah sebesar 11,01 tahun menunjukkan pencapaian jenjang pendidikan kelas 12 atau kelas II (dua) SMA/ sederajat. Berdasarkan data ini diketahui bahwa ada kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, meskipun masih di bawah 12 tahun. Besarnya rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa program wajib belajar 12 tahun masih perlu digalakkan. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menuntaskan wajib belajar 12 tahun ini membutuhkan kerja optimal antar *stakeholder* bersama dengan masyarakat secara luas.



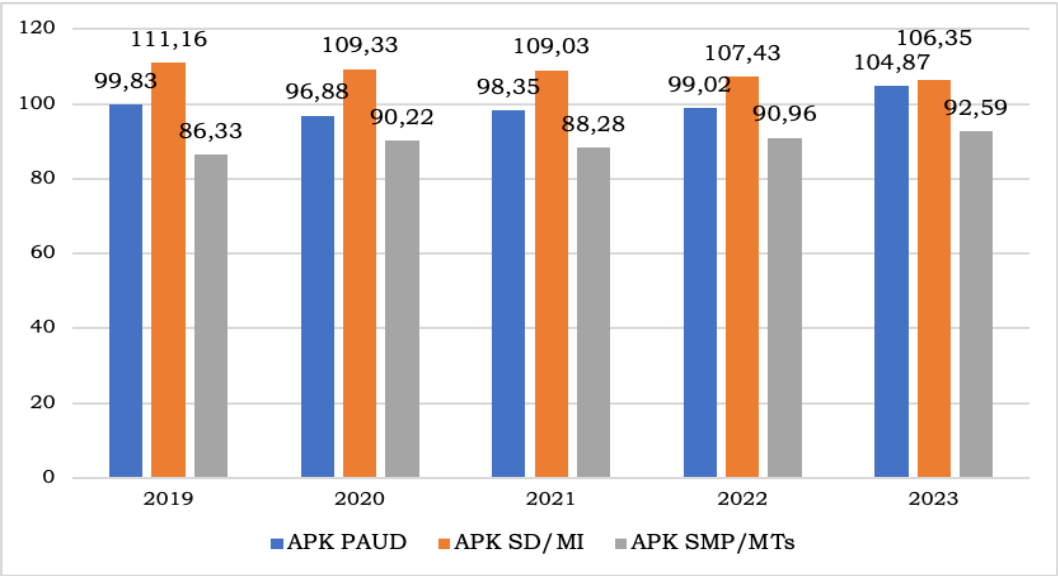
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2015-2024

Grafik 2. 26. Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Sleman Tahun 2014-2023 (Tahun)

Dilihat dari perbandingan antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, masih ada gap atau kesenjangan yang cukup lebar antara harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Dari tahun ke tahun, selisih antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah berkisar pada angka lima tahun lebih, dan pada tahun 2023, harapan lama sekolah sebesar 16,77 dan rata-rata lama sekolah sebesar 11,01 dengan selisih 5,76 tahun. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa intervensi pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu.

Kesadaran masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan lama sekolah akan mengantarkan pada terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas. Namun di sisi lain, masih dijumpai masalah putus sekolah di Kabupaten Sleman. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian lama sekolah masih belum optimal.



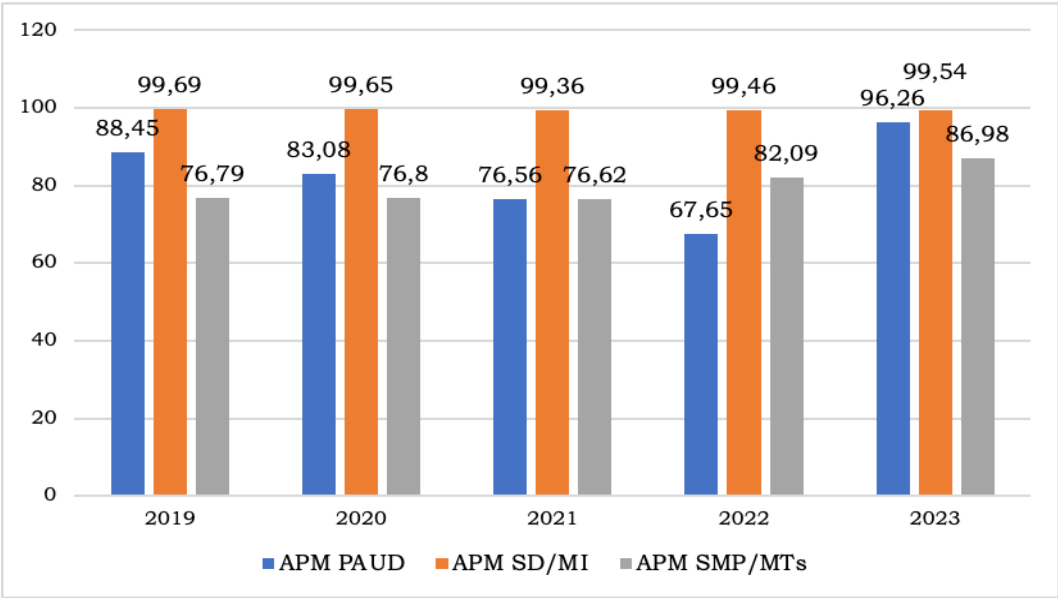


Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, 2024; Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024

Grafik 2. 27. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar PAUD, SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Sleman Tahun 2019-2023

Perkembangan angka partisipasi kasar pada jenjang PAUD dan jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Sleman disajikan pada gambar di atas. Pada tahun 2023, angka partisipasi kasar jenjang PAUD mencapai lebih dari 100%. Adapun angka partisipasi kasar jenjang SD/MI selama 5 (lima) tahun ke belakang menunjukkan angka di atas 100%. Angka partisipasi kasar bisa mencapai lebih dari 100% menunjukkan bahwa jumlah murid yang bersekolah pada jenjang SD/MI, baik anak yang berusia pada jenjang pendidikan tersebut maupun di luar usia jenjang pendidikan, lebih banyak daripada jumlah penduduk usia SD/MI.

Selanjutnya, angka partisipasi murni pada semua jenjang, baik PAUD, SD/MI dan SMP/MTs cenderung meningkat, meskipun pada rentang tahun 2019-2023, angka partisipasi murni SD/MI masih berada di bawah angka 100%. Makin tinggi angka partisipasi murni berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi pada jenjang pendidikan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena terdapat anak yang di luar usia jenjang pendidikan tersebut. Selain itu, angka tersebut juga mencerminkan adanya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar.

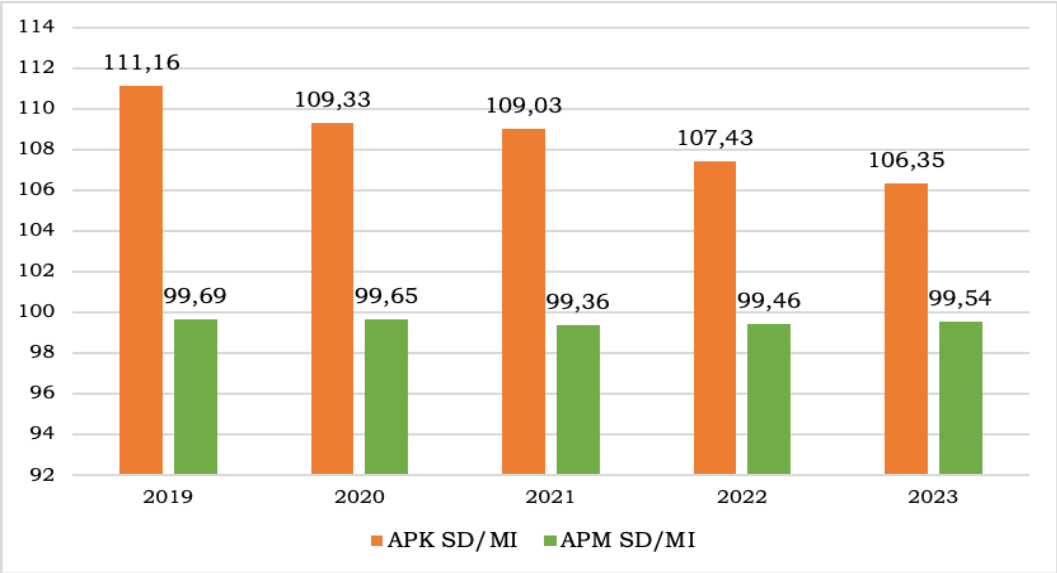


Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, 2024; Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024

Grafik 2. 28. Perkembangan Angka Partisipasi Murni PAUD, SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Sleman Tahun 2019-2023



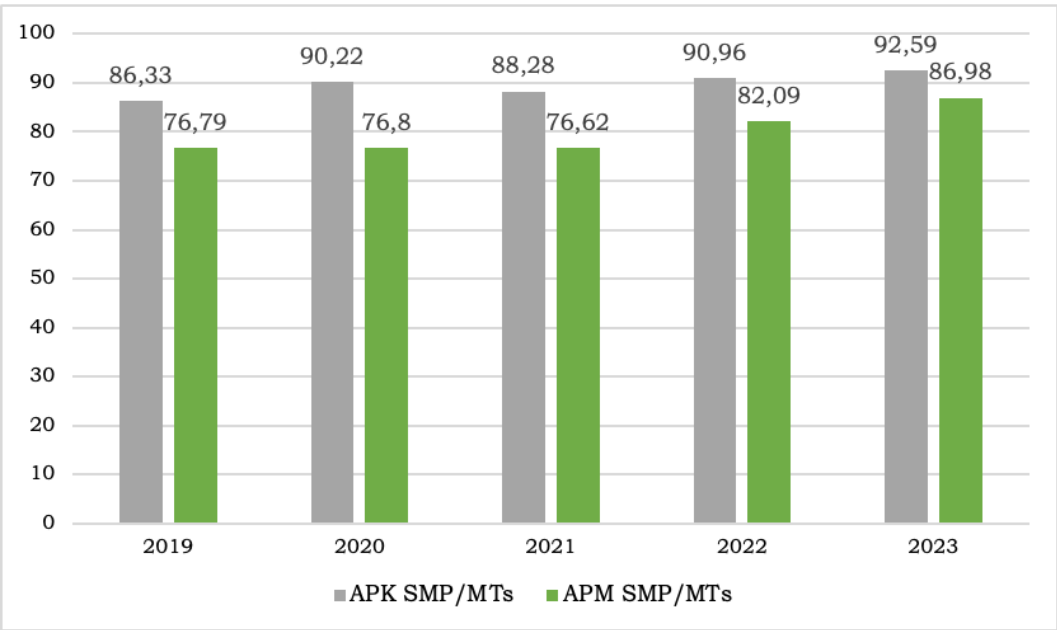
Untuk dapat melihat realisasi antara angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni serta gap yang terjadi, maka perlu disandingkan antara angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni SD/MI serta angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni dari SMP/MTs.



Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024

Grafik 2. 29. Perbandingan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD/MI di Kabupaten Sleman Tahun 2019-2023

Pada tahun 2019 hingga 2024 masih terdapat gap antara angka partisipasi kasar dengan angka partisipasi murni SD/MI, meskipun gap tersebut semakin turun. Hal ini artinya penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memberikan dukungan kepada generasi muda untuk selalu menekuni pendidikan tingkat dasar secara tuntas. angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni SMP/MTs juga terdapat kesenjangan. Dan terlihat bahwa kesenjangan antara angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan SD/MI relatif lebih lebar dibandingkan dengan jenjang pendidikan SMP/MTs. Hal tersebut perlu menjadi perhatian, karena kedua jenjang ini merupakan jenjang pendidikan wajib yang harus ditempuh secara tuntas.



Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024

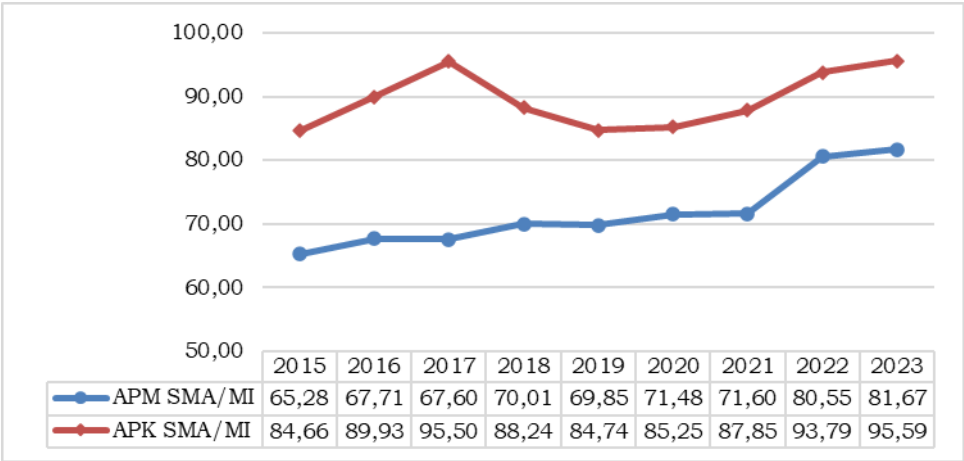
Grafik 2. 30. Perbandingan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SMP/MTs di Kabupaten Sleman Tahun 2019-2023

Oleh karena itu, dukungan moril dan materiil dalam menuntaskan pendidikan anak pada jenjang menengah pertama perlu ditingkatkan.



Peran orang tua dalam mendorong, memfasilitasi dan memonitor perkembangan studi juga perlu ditingkatkan. Adapun pemerintah perlu meningkatkan akses, meringankan beban biaya dan memfasilitasi untuk optimalisasi pendidikan SMP ini.

Selanjutnya, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat merupakan wujud keberhasilan pembangunan bidang pendidikan. Pencapaian wajib belajar 12 tahun ditunjukkan oleh angka partisipasi murni SMA dan sederajat tersebut. angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni di Kabupaten Sleman menunjukkan peningkatan yang relatif baik.



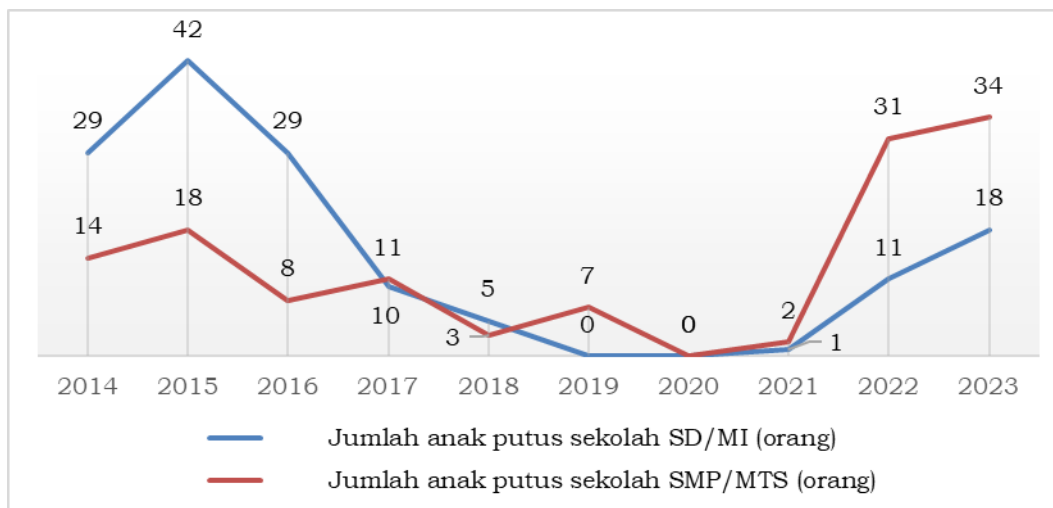
Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024

Grafik 2. 31. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SMA/MA di Kabupaten Sleman Tahun 2015-2023

Pada tahun 2017 tampak adanya kesenjangan yang cukup lebar antara angka partisipasi kasar dengan angka partisipasi murni yakni dengan angka partisipasi kasar sebesar 95,50% dan angka partisipasi murni sebesar 67,60% sehingga ada selisih 27,90%. Dalam perjalanan waktu, kesenjangan antara angka partisipasi kasar dengan angka partisipasi murni semakin pendek. Pada tahun 2022, angka partisipasi kasar sebesar 93,79% dan angka partisipasi murni sebesar 80,22%, sehingga ada kesenjangan sebesar 13,24%. Pada tahun 2023 angka partisipasi kasar SMA dan sederajat adalah 95,59 dan angka partisipasi murni sebesar 81,67%, sehingga ada selisih 13,92%. Dari data antar waktu ini terlihat nyata adanya peningkatan realisasi angka partisipasi murni yang semakin baik, yang menggambarkan pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat, khususnya pada jenjang pendidikan menengah meningkat secara signifikan.

Guna melengkapi analisis tentang angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni serta harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah secara agregat, disajikan juga kecenderungan angka putus sekolah di Kabupaten Sleman. Besar kecilnya angka putus sekolah dapat mengkonfirmasi kondisi pendidikan yang berlangsung. Data angka putus sekolah di Kabupaten Sleman selama satu dasawarsa dapat dilihat pada grafik di bawah ini.





Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2015-2024

Grafik 2. 32. Angka Putus Sekolah di Kabupaten Sleman Tahun 2014-2023

Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI dalam satu dasawarsa menunjukkan fluktuasi, dan melonjak secara ekstrem pada tahun 2015. Namun berhasil dikendalikan, sehingga pada tahun 2016 berada pada posisi seperti tahun 2014, yaitu 29 orang. Pada tahun 2017 menurun tajam menjadi 10 orang anak dan semakin bagus pada tahun 2018 menjadi 5 orang anak saja. Angka putus sekolah berhasil mencapai nol pada tahun 2019-2020. Pada tahun 2021 terdapat 1 orang anak dan tahun 2022-2023 kembali naik. Hal ini terjadi sebagai dampak Covid-19.

Angka putus sekolah pada jenjang SMP/MTs pada satu dasawarsa memiliki kecenderungan fluktuatif. Pada tahun 2014 terdapat 14 anak putus sekolah, meningkat pada tahun 2015 menjadi 18 orang anak, selanjutnya menurun menjadi 8 anak, namun 2017 naik kembali menjadi 11 orang anak, tahun 2018 turun drastis menjadi 3 orang anak, namun tahun 2019 naik kembali menjadi 7 orang anak. Angka putus sekolah Kabupaten Sleman mencapai nol pada tahun 2020, merupakan capaian yang sangat bagus. Pada tahun 2021 seiring dengan munculnya Covid-19 menjadi pemicu adanya angka putus sekolah, sebanyak 2 orang anak, dan dampak tersebut semakin besar pada tahun 2022 menjadi 31 orang anak, dan masih belum terkendali pada tahun 2023 menjadi 34 orang anak.

Angka putus sekolah menjadi pengurang dari hasil perwujudan program wajib belajar 12 tahun yang semestinya diharapkan semakin baik. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan upaya yang lebih kuat untuk mengurangi angka putus sekolah sehingga pendidikan yang tuntas dapat terpenuhi. Pada saat pandemi Covid-19, proses belajar mengajar dilaksanakan daring (dalam jaringan, *online*). Kondisi ini juga menimbulkan permasalahan lain terkait dengan kemampuan siswa untuk belajar secara efektif. Hal ini menimbulkan tekanan psikologis terhadap siswa, yang akhirnya mendorong anak untuk putus sekolah. Sementara untuk pemulihan kondisi normal, untuk membawa kembali siswa bersekolah secara luring (luar jaringan, *offline*) pada tahun 2023-2024, membutuhkan waktu dan motivasi yang lebih kuat lagi. Berdasarkan hal tersebut, dampak Covid-19 terhadap sektor pendidikan membutuhkan pendekatan dan kerja sama pemerintah dan masyarakat secara komprehensif.

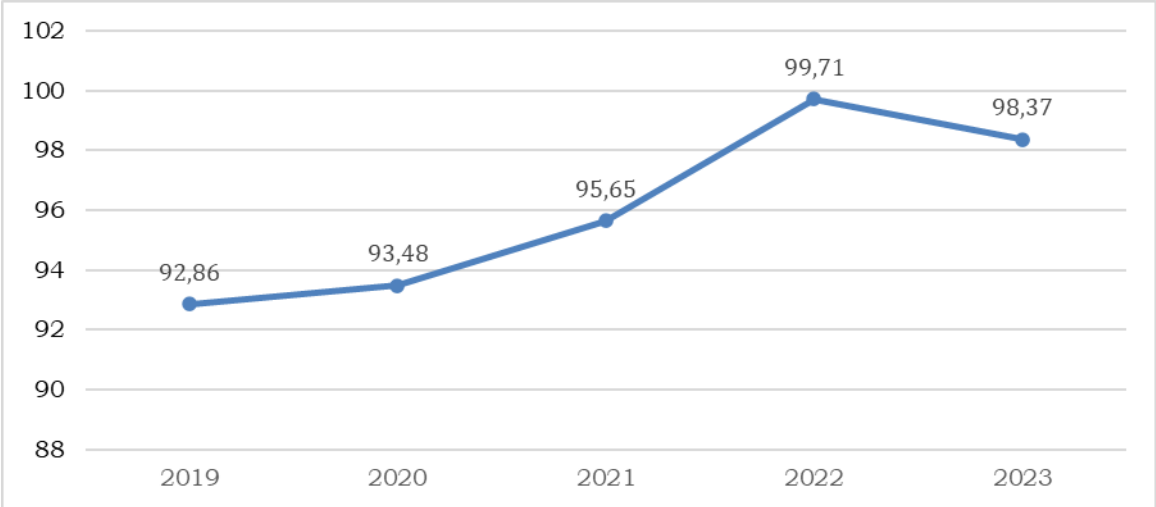
Selanjutnya, dalam rangka peningkatan rata-rata lama sekolah, Kabupaten Sleman mendorong keberlanjutan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Adapun keberlanjutan studi ke jenjang perguruan tinggi secara bertahap dapat dicapai dengan memberikan motivasi kepada para siswa SMA dan sederajat melalui pendampingan siswa SMA dan sederajat secara masif untuk melanjutkan pendidikannya. Di samping itu, dibutuhkan juga informasi yang jelas mengenai pendidikan tinggi tersebut,



baik melalui jalur formal di sekolah-sekolah maupun secara informal melalui media sosial.

Selain pendidikan, bagian penting dari peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah perawatan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Pembangunan kesehatan itu bersifat sangat luas, serta membutuhkan pendekatan preventif dan kuratif. Dewasa ini seiring dengan mulai diperkenalkan paradigma dari rumah sakit menuju rumah sehat, maka upaya-upaya preventif tersebut menguat. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan upaya preventif diperlukan pembinaan kepada pemuda.

Secara umum pencapaian indikator kepemudaan dan olahraga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada persentase organisasi pemuda yang aktif (%), pada grafik di bawah.



Sumber: Dinas Pendidikan, 2019-2024

Grafik 2. 33. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif di Kabupaten Sleman Tahun 2019-2023 (%)

Pembinaan yang dilakukan kepada pemuda ini mencakup kepemimpinan melalui organisasi, peluang ekonomi melalui kewirausahaan, profesionalisme melalui sertifikasi, kesehatan dan olahraga melalui pembinaan atlet, pembentukan prestasi di bidang olahraga serta pencapaian prestasi olahraga. Indikator tersebut bersifat komposit yang mampu menunjukkan tentang kondisi indeks Pembangunan pemuda secara komprehensif.

Tabel 2. 16. Penghitungan Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sleman Tahun 2023

No Domain	Domain	No	Indikator	Nilai Indikator	Indeks Domain	IPP
1	Pendidikan	X1	Rata-rata lama sekolah	12,1	83,33	66,67
		X2	APK Sekolah Menengah	92,375		
		X3	APK Perguruan Tinggi	68,5		
2	Kesehatan dan Kesejahteraan	X4	Angka kesakitan pemuda	8,02	60,00	
		X5	Persentase korban kejahatan	0,51		
		X6	Persentase pemuda yang merokok	23,21		
		X7	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	27,6		
3	Lapangan dan Kesempatan Kerja	X8	Persentase pemuda wirausaha kerah putih	1,02	70,00	
		X9	Tingkat pengangguran terbuka	7,49		
4	Partisipasi dan Kepemimpinan	X10	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	72,89	50,00	



No Domain	Domain	No	Indikator	Nilai Indikator	Indeks Domain	IPP
5	Gender dan Diskriminasi	X11	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi	11,32	70,00	
		X12	Persentase pemuda yang memberikan saran / pendapat dalam rapat	9,8		
		X13	Angka perkawinan usia anak	9,2		
		X14	Persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas	68,31		
		X15	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	38,15		

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2023

F. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)

Indeks pembangunan olahraga menggambarkan tentang kondisi budaya berolahraga. Penghitungan indeks pembangunan olahraga menggunakan 9 dimensi.

Tabel 2. 17. Indeks Pembangunan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2021-2023

Tahun	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Olahraga	0,331	0,343	0,421

Sumber; Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, 2023

Berdasarkan tabel di atas, pembangunan olahraga di Kabupaten Sleman pada tahun 2021-2023 cenderung meningkat, meskipun masih belum optimal. Untuk itu ke depan peningkatan pembinaan dan upaya motivasi untuk pemuda terlibat dalam pengembangan olahraga baik untuk kepentingan kesehatan maupun prestasi perlu ditingkatkan. Dalam rangka meningkatkan pengembangan olahraga ini diperlukan dukungan realisasi indeks pembangunan olahraga secara utuh menyeluruh.

Tabel 2. 18. Indeks Pembangunan Olahraga Menurut Dimensi Tahun 2021-2023

No	Dimensi	2021	2022	2023
1	Sumber daya manusia olahraga	0,124	0,187	0,238
2	Ruang terbuka	0,084	0,382	0,494
3	Literasi fisik	0,497	0,553	0,722
4	Kebugaran	0,154	0,134	0,159
5	Partisipasi	0,253	0,160	0,377
6	Kesehatan	0,418	0,417	0,542
7	Perkembangan personal	0,526	0,516	0,531
8	Ekonomi	0,507	0,395	0,344
9	Performa	0,413	0,347	0,347
	Indeks Pembangunan Olahraga	0,331	0,343	0,421

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Dilihat dari dimensi pembentuk indeks pembangunan olahraga, sebagian besar dimensi mempunyai skor kategori rendah. Adapun indeks pembangunan olahraga masing-masing kapanewon di wilayah Kabupaten Sleman cenderung meningkat, meskipun ada beberapa indikator yang belum optimal. Berdasarkan hal tersebut, perlu langkah besar untuk merumuskan intervensi kebijakan dan program aksi yang lebih konkret untuk pengembangan selanjutnya.

Tabel 2. 19. Indeks Pembangunan Olahraga per Kapanewon Tahun 2022-2023

No	Kapanewon	Tahun
----	-----------	-------

		2022	2023
1	Kapanewon Gamping	0,312	0,408
2	Kapanewon Godean	0,370	0,484
3	Kapanewon Moyudan	0,280	0,373
4	Kapanewon Minggir	0,279	0,415
5	Kapanewon Seyegan	0,251	0,404
6	Kapanewon Mlati	0,375	0,421
7	Kapanewon Depok	0,406	0,440
8	Kapanewon Berbah	0,348	0,375
9	Kapanewon Prambanan	0,354	0,376
10	Kapanewon Kalasan	0,345	0,407
11	Kapanewon Ngemplak	0,310	0,366
12	Kapanewon Ngaglik	0,351	0,397
13	Kapanewon Sleman	0,406	0,505
14	Kapanewon Tempel	0,338	0,457
15	Kapanewon Turi	0,306	0,363
16	Kapanewon Pakem	0,403	0,472
17	Kapanewon Cangkringan	0,404	0,494
	Kabupaten Sleman	0,343	0,421

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, Sleman, 2023

Dengan adanya olahraga yang baik, maka akan terjadi kebugaran dan kesehatan yang lebih baik. Untuk itu pengembangan olahraga dan peningkatan pembinaan olahraga penting dilakukan, agar terbentuk sumber daya manusia unggul siap kerja.

G. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks pembangunan kebudayaan merupakan instrumen yang digunakan untuk mendapatkan gambaran dan cakupan pembangunan kebudayaan, yang terdiri atas 7 indikator meliputi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Pengukuran rutin baru dilakukan pada tingkat nasional dan provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota yang sudah melakukan pengukuran baru sebagian kecil. Kabupaten Sleman termasuk salah satu pemerintah daerah yang belum melakukan pengukuran indeks pembangunan kebudayaan. Oleh karena itu, indeks pembangunan kebudayaan di Kabupaten Sleman digambarkan melalui data-data terkait kebudayaan.

Secara luas, kebudayaan masih dianggap sekadar bagian dari gaya hidup, hiburan, atau kegiatan sampingan yang tidak memengaruhi apa pun. Kenyataannya, banyak sekali aspek kebudayaan yang menjadi penopang perekonomian, baik disadari maupun tidak. Kebudayaan merupakan hal yang penting dan berpengaruh dalam perekonomian, yang memiliki alur serupa dengan produk ekonomi. Oleh karena itu, suatu wilayah dapat memanfaatkan peluang ini untuk menjadikan kebudayaan sebagai amunisi dalam pembangunan ekonomi.

Budaya diartikan sebagai kumpulan kebiasaan, keterampilan, tradisi, adat istiadat, agama, kepercayaan. Adapun warisan budaya merupakan identitas diri dari masyarakat, yang diwariskan dari generasi sebelumnya dan dilestarikan oleh generasi yang akan datang, baik berupa benda, tak benda dan museum.

Terkait warisan budaya yang bersifat kebendaan, Kabupaten Sleman memiliki komitmen dalam memperjelas tentang status legal formal kekayaan cagar budaya. Oleh karena itu, setiap tahun dilaksanakan identifikasi dan inventarisasi, yang kemudian dilanjutkan dengan proses-proses penetapan cagar budaya secara hukum. Objek cagar budaya ini



ditetapkan secara hierarki, dari tingkat bupati, gubernur hingga tingkat nasional melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya.

Cagar budaya yang dimaksud adalah sebagai kelompok bangunan bersejarah serta lingkungan di sekitarnya yang memiliki nilai sejarah, nilai sosial budaya, pada masa lalu, yang dapat dipelajari pada masa sekarang dan yang akan datang, yang menambah khazanah kebudayaan yang memberikan manfaat pada pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dengan adanya penetapan cagar budaya melalui keputusan Bupati, maka cakupan pelestarian dan pengembangan obyek menjadi bertambah setiap tahunnya. Hal ini menjadi sebuah pengayaan tersendiri bagi Kabupaten Sleman. Untuk perkembangan cagar budaya yang ada di Kabupaten Sleman, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 20. Jumlah Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten Sleman Tahun 2017-2023 (Objek)

No	Tahun	Jumlah Per Tahun	Jumlah Akumulasi
1	2017	25	25
2	2018	26	51
3	2019	25	76
4	2020	29	105
5	2021	48	153
6	2022	25	178
7	2023	26	204

Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman, 2022

Adapun sebaran cagar budaya yang telah teridentifikasi di 17 kapanewon tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 21. Jumlah Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2023 (Objek)

No	Kapanewon	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Gamping	-	3	10	13	13	13
2	Godean	-	2	2	2	2	2
3	Moyudan	-	1	1	1	1	1
4	Minggir	-	1	1	1	1	1
5	Seyegan	1	1	2	2	3	3
6	Mlati	1	3	4	5	5	8
7	Depok	5	13	14	23	23	23
8	Berbah	7	9	9	10	11	12
9	Prambanan	9	9	14	17	27	43
10	Kalasan	6	6	10	19	22	26
11	Ngemplak	3	4	4	4	8	8
12	Ngaglik	5	5	7	7	9	9
13	Sleman	5	6	9	15	16	16
14	Tempel	5	5	5	5	6	7
15	Turi	1	2	3	3	3	3
16	Pakem	2	4	7	23	25	25
17	Cangkringan	1	2	3	3	3	3
	Jumlah	51	76	105	153	178	204

Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman Tahun 2024

Data jumlah bangunan cagar budaya di Kabupaten Sleman sejak tahun 2017-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah.



**Tabel 2. 22. Bangunan Cagar Budaya Kabupaten Sleman
Tahun 2017-2023**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Bangunan Cagar Budaya	20	29	38	47	62	97	123

Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman, 2024

Pada tahun 2017 telah teridentifikasi 20 buah bangunan cagar budaya, meningkat menjadi 123 pada tahun 2023. Secara intrinsik, bangunan cagar budaya adalah elemen yang utuh memberikan gambaran mengenai masa lampau serta dapat memberi gambaran sistem budaya yang berlaku di masa itu. Ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang tersusun dan terbangun dari khazanah budaya cagar budaya menjadi bahan pembelajaran. Arsitektur bangunan, estetika, fungsi, maupun identitas benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya memberikan kekayaan intelektual. Di sisi lain, menunjukkan tingginya peradaban yang dicapai oleh para leluhur, serta keberhasilan dalam membangun sistem budaya dari jaman ke jaman. Bangunan cagar budaya juga dapat dikembangkan sebagai tempat wisata sejarah.

Selain warisan budaya benda, warisan budaya tak benda juga perlu dilestarikan oleh subjek-subjek pelaku sejarah. Dengan adanya pelaku sejarah, maka informasi secara autentik mengenai kejadian atau peristiwa sejarah serta benda-benda bersejarah dapat dirunut dengan lebih lengkap dan jelas. Sejak tahun 2018-2021, jumlah pelaku sejarah berjumlah 7 (tujuh) orang. Pelaku sejarah ini sebagai penutur dan sumber sejarah yang dapat memberikan keterangan, informasi, maupun bukti-bukti sejarah untuk memperjelas ilustrasi sejarah, keterangan waktu kejadian, lokasi kejadian dan pelaku dalam sejarah tersebut. Ilustrasi sejarah akan lebih detail dan lengkap saat dituangkan dalam sebuah rekaman baik berbentuk tulisan, suara, maupun video untuk nantinya menjadi sebuah rekaman yang tidak lekang oleh usia.

Warisan budaya lainnya adalah museum. Jumlah museum di Kabupaten Sleman tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 23. Data Jumlah Museum di Kabupaten Sleman

No	Nama Museum	Lokasi
A	Museum Pendidikan	
1	Museum Pendidikan Indonesia	Kampus UNY Karangmalang, Depok
2	Museum Paleoantropologi	Kompleks Fakultas Kedokteran UGM
3	Museum UGM	Kompleks <i>Boulevard</i> , Bulaksumur, Depok
4	Museum Gunungapi Merapi	Jalan Kaliurang, Dusun Banteng, Kalurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem
5	Museum Mini Sisa Hartaku	Kinahrejo
6	Museum Water of Life (air)	<i>Jogja Bay Waterpark</i> , Jalan Utara Stadion Maguwoharjo, Depok
7	Museum Geoteknologi Mineral	Jalan Tambakbayan, Babarsari
8	Museum Gempa “Profesor Sarwidi”	Boyong, Kaliurang
9	Museum Bakalan Gunung Api Merapi	Bakalan, Argomulyo, Cangkringan, Sleman
10	Museum Peta	Kompleks Bulaksumur, UGM
B	Museum Perjuangan	



No	Nama Museum	Lokasi
1	Museum Monumen Jogja Kembali	Ringroad Utara, Jongkang, Sariharjo, Ngaglik
2	Museum Pancasila Sakti	Pandega, Kentungan
3	Museum Pergerakan Wanita	Jalan Laksda Adisucipto
4	Museum Dirgantara Mandala TNI AU	Pangkalan Udara TNI AU
5	Museum Plataran	Gatak 1, Selomartani, Kalasan, Sleman
C	Museum Seni Budaya	
1	Museum Ullen Sentalu	Boyong, Kaliurang
2	Museum Lukis Affandi	Laksda Adisucipto
3	Museum Serat Holistik	Jalan Marto Suharjo Nomor 123, Palagan Km 10,5, Bantarjo, Donoharjo, Ngaglik, Sleman
4	Museum Situs Kimpulan	Dusun Kimpulan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman
5	Museum TWC Prambanan	Taman Wisata Candi Prambanan, Jalan Raya Jogja-Solo Km 16, Prambanan

Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman Tahun 2022

Sesuai klasifikasinya, museum dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu museum pendidikan, museum perjuangan dan museum seni budaya. Ada 10 jenis museum pendidikan yang tersebar di seluruh Kabupaten Sleman. Letak museum pendidikan terintegrasi dengan pusat-pusat pembelajaran, meskipun ada beberapa yang berada di luar lingkungan lembaga pendidikan. Museum perjuangan terkait langsung dengan peristiwa-peristiwa bersejarah yang dialami rakyat Indonesia, terutama pada jaman penjajahan Belanda maupun Jepang.

Jumlah museum di Kabupaten Sleman ini merupakan yang terbanyak se-Indonesia sehingga pengembangan museum bukan hanya menjadi indikator pemajuan kebudayaan, namun dapat digunakan sebagai bahan melakukan riset dan penelitian serta pariwisata budaya dengan mengusung nilai-nilai pelajaran sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pejuang, memvisualisasikan proses perjuangan merebut kemerdekaan, dan sekaligus menjadi ajang mewariskan semangat nasionalisme dan patriotisme bagi generasi muda.

Dalam rangka meningkatkan kebudayaan daerah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Kabupaten Sleman melaksanakan upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan yang meliputi obyek, yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Upaya pemajuan kebudayaan yang telah dilakukan oleh Kabupaten Sleman disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 24. Kinerja Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Sleman Tahun 2018-2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kegiatan)	28	288	393	399	436	1.204
2	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya (obyek)	800	800	800	800	800	800
3	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (obyek)	245	270	290	153	178	203
4	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	30,62	33,75	36,25	19,13	22,30	25,38
5	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (unit)	2	1	1	1	2	2

Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman, 2019-2024

Capaian kinerja pemajuan kebudayaan mengalami fluktuasi dalam realisasinya, kecuali pada indikator jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya realisasinya tetap karena jumlah tersebut adalah seluruh benda, situs dan kawasan cagar budaya yang telah diidentifikasi dan menjadi dasar pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya. Penyelenggaraan festival seni dan budaya terus meningkat realisasinya. Maraknya penyelenggaraan festival seni dan budaya diharapkan membawa dampak pelestarian, pengembangan dan pembinaan seni dan budaya sekaligus mengenalkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan festival ini tidak semata menjadi pertunjukan bagi masyarakat dan wisatawan namun diiringi dengan terinternalisasinya nilai-nilai budaya lokal.

Seiring dengan peningkatan penyelenggaraan festival seni dan budaya perlu menjadi perhatian terkait dengan persebaran, merata di seluruh wilayah Kabupaten Sleman, menjangkau berbagai kalangan dan lokasi. Selain upaya pelestarian, penyelenggaraan festival seni dan budaya diharapkan akan membawa dampak lebih luas, yaitu peningkatan ekonomi baik bagi pelaku seni maupun masyarakat. Untuk itu ke depannya diperlukan strategi dalam penyelenggaraannya seperti strategi pendanaan pertunjukan seni yang inklusif, yang dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat termasuk kelompok masyarakat tertinggal dan berkebutuhan khusus. Pendanaan untuk setiap festival seyogyanya disertai dengan pendanaan untuk promosi dan edukasi bagi masyarakat agar mampu mengapresiasi pertunjukan tersebut, dan membuat kegiatan seni pertunjukan yang *iconic* dengan *branding* berskala nasional dan internasional.

Kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam aspek pelestarian warisan budaya dan pemajuan kebudayaan serta cagar budaya seperti tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 25. Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pelestarian warisan budaya (%)	36,25	48,33	48,50	49,68
2	Jumlah pelestarian rincian objek pemajuan kebudayaan dan cagar	-	62	71	137



No	Uraian	2020	2021	2022	2023
	budaya (rincian objek)				

Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman, 2021-2024

Sebagai pembanding dalam perhitungan *baseline* dan target indeks pembangunan kebudayaan Kabupaten Sleman, maka disajikan indeks pembangunan kebudayaan nasional dan indeks pembangunan kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut:

Tabel 2. 26. Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	53,74	55,91	54,65	51,9	55,13
Daerah Istimewa Yogyakarta	73,29	73,98	71,74	64,22	66,52

Sumber: Kemendikbud, 2022

Berdasarkan tabel di atas, indeks pembangunan kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta selalu lebih tinggi dari Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional. Daerah Istimewa Yogyakarta dengan segala keistimewaannya, memiliki potensi pembangunan budaya yang lebih tinggi dibandingkan Nasional. Pada tahun 2022, indeks pembangunan kebudayaan Nasional melonjak dari 51,9 pada tahun 2021 menjadi 55,13. Adapun indeks pembangunan kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 66,52, setelah berada pada angka tertinggi, 73,98 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, indeks pembangunan kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta turun dan terus turun menjadi 64,22 pada tahun 2021. Penurunan ini terjadi pada aspek ekspresi budaya.

Berdasarkan hal di atas, Kabupaten Sleman seharusnya juga memiliki pembangunan kebudayaan yang relatif baik. Dari 7 indikator penyusun indeks pembangunan kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Sleman telah berupaya untuk memberikan dukungan kepada 4 indikator, yakni warisan budaya, ekonomi budaya, pendidikan budaya dan ekspresi budaya, meskipun belum diikuti dengan pendataan yang bersifat formal. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Sleman, terutama jika melihat posisi dan peran Kabupaten Sleman terhadap pembangunan kebudayaan ini.

H. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah aspek penting dalam sistem perlindungan sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja. Selain itu, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari upaya untuk memastikan kesejahteraan tenaga kerja dan mendukung stabilitas ekonomi individu dan keluarga. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 27. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Penduduk Bekerja (jiwa)	Jumlah Peserta Jamsostek (jiwa)	Cakupan (%)
1	2019	663.509	89.386	13,47
2	2020	667.823	97.075	14,54
3	2021	701.123	112.830	16,09
4	2022	665.512	143.364	21,54
5	2023	627.667	189.418	30,18

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, Diolah, 2024



Berdasarkan data pada tabel di atas, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman tahun 2019-2023 memiliki tren meningkat, dimana pada tahun 2019 jumlah peserta jamsostek sebanyak 89.386 jiwa (13,47% dari jumlah penduduk bekerja) dan pada tahun 2023 menjadi 189.418 jiwa (30,18% dari jumlah penduduk bekerja).

2.3. Aspek Daya Saing Wilayah

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

A. Sektor Unggulan Penopang Daerah

Berdasarkan Tabel 2.10 Struktur Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sleman, pada halaman sebelumnya, sektor yang merupakan penyumbang tertinggi selama lima tahun terakhir adalah sektor industri pengolahan, dengan kontribusi pada kisaran 12,44-13,40%, sektor konstruksi yang berkontribusi pada kisaran 11%, dan sektor akomodasi dan makan minum dengan kontribusi pada kisaran 10%. Ditinjau secara kualitatif, sektor industri pengolahan, sektor akomodasi makan minum dan sektor jasa pendidikan akan terus berkembang dengan kuat. Tiga sektor tersebut akan menjadi tonggak daya saing utama dari sektor unggulan daerah.

Dari sisi perkembangan kuantitatif, perkembangan jasa pendidikan memiliki tingkat pertumbuhan yang relatif stabil. Sektor industri pengolahan mempunyai pertumbuhan positif, namun kontribusi sektor terhadap produk domestik regional bruto terus menurun. Oleh karena itu, industri pengolahan yang berbasis volume rendah namun memiliki nilai tambah tinggi perlu diperkuat, terutama pada produk-produk bernilai budaya. Sektor lain yang terus mengalami peningkatan adalah sektor jasa pendidikan. Kontribusi sektor akomodasi makan minum pun terus meningkat, selama masih tersedia daya dukung dan daya tampung serta perkembangan objek destinasi pariwisata yang memadai.

Selain sektor di atas, terdapat potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Sleman. Data rinci dari kinerja ekonomi kreatif di Kabupaten Sleman belum sepenuhnya terpetakan, tetapi secara kualitatif, Kabupaten Sleman memiliki modal dasar yang besar serta potensi pengembangan ekonomi kreatif. Besarnya sektor jasa pendidikan sebagai sumber dasar dari pengembangan industri kreatif menjadi sebuah modal besar yang tidak boleh dilewatkan. Besarnya sektor akomodasi makan dan minum sebagai representasi sektor pariwisata juga memberikan kesempatan besar bagi potensi ekonomi kreatif.

Pada tahun 2020, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman telah melakukan pendataan dan menghasilkan direktori usaha kreatif di Kabupaten Sleman dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 2. 28. Data Pelaku Usaha Kreatif di Kabupaten Sleman Tahun 2020

No	Sub Sektor	Jumlah Pelaku
1	Kriya	29
2	Kuliner	41
3	Fashion	21
4	Desain Komunikasi Visual	2
5	Desain Interior	3
6	Aplikasi	1
7	Pengembang Permainan	1
8	Musik	5
9	Seni Pertunjukan	12
10	Seni Rupa	3
11	Desain Produk	13
12	Periklanan	2



No	Sub Sektor	Jumlah Pelaku
13	Film, Animasi, dan Video	2
Jumlah		135

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, 2020

Berdasarkan data yang dihimpun, subsektor kuliner merupakan sektor yang paling dominan dalam sebaran ekonomi kreatif di Kabupaten Sleman. Adapun subsektor arsitektur, penerbitan, televisi radio, dan fotografi pada tahun 2020 belum terdata. Hal ini menunjukkan bahwa basis data pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Sleman perlu dimutakhirkan.

Kabupaten Sleman memiliki potensi pengembangan di hampir semua subsektor ekonomi kreatif. Bahkan pada beberapa subsektor terbukti telah menghasilkan tidak hanya pelaku namun juga pengakuan baik nasional maupun internasional seperti pada subsektor kriya, seni pertunjukan, dan film animasi video. Potensi seluruh subsektor akan lebih berkembang optimal, jika seluruh *stakeholder* mampu secara aktif menggerakkan para pelaku ekonomi kreatif melalui program dan kegiatannya, seperti mengkolaborasikan seni pertunjukan dengan pariwisata berkualitas.

B. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

Produk domestik regional bruto per kapita menunjukkan kapasitas daya beli masyarakat atau pasar. Produk domestik regional bruto per kapita Kabupaten Sleman memiliki tren positif dengan laju pertumbuhan 7,68% atau 7,99% tanpa menghitung periode pandemi. Seperti telah diuraikan pada poin kesejahteraan ekonomi masyarakat, selama periode 10 tahun terakhir, nilai produk domestik regional bruto per kapita Kabupaten Sleman selalu di atas Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun di bawah produk domestik regional bruto per kapita nasional. Pada tahun 2023, produk domestik regional bruto per kapita Kabupaten Sleman sebesar Rp51,354 juta per tahun, Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp48,358 juta, sementara Indonesia sudah mencapai Rp74,965 juta.

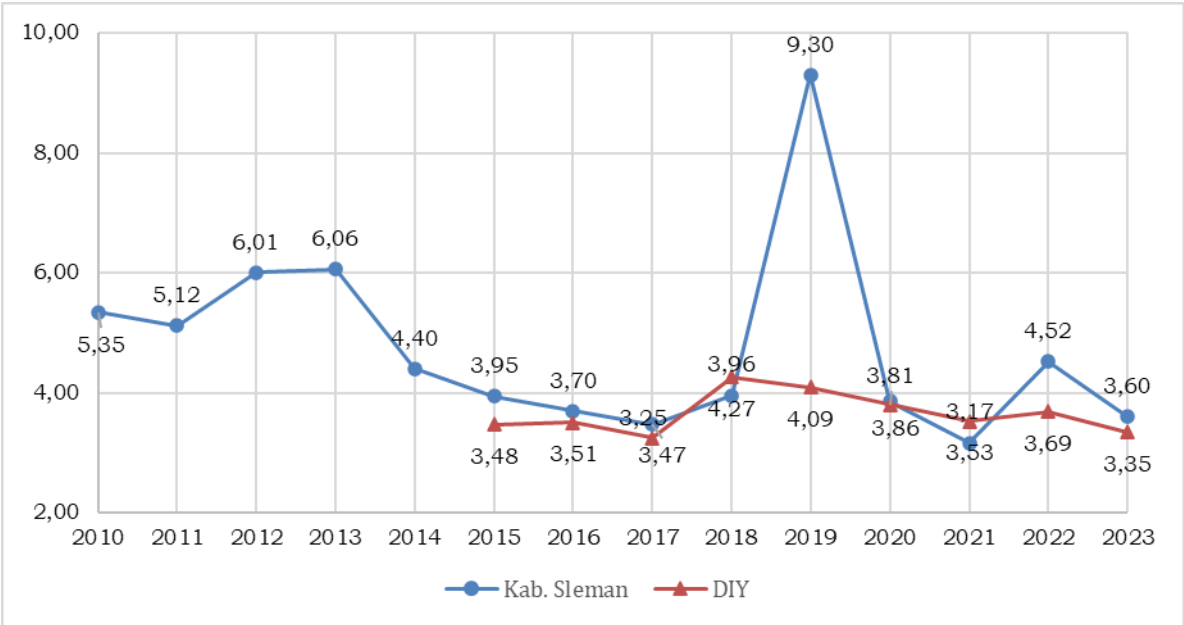
Potensi produk domestik regional bruto per kapita dan pertumbuhannya ini dapat menjadi faktor pendorong bagi perkembangan nilai tambah setempat dan juga menjadi faktor penarik bagi investasi untuk pembangunan daerah. Sebagai representasi daya beli, produk domestik regional bruto per kapita yang tinggi menjadi daya tarik bagi investor untuk bisa mengembangkan produk atau jasa.

C. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kewirausahaan dalam suatu wilayah atau populasi. Ini mengacu pada proporsi individu atau unit bisnis yang terlibat dalam kegiatan kewirausahaan dibandingkan dengan total populasi atau total unit bisnis dalam wilayah tersebut.

Rasio kewirausahaan di Kabupaten Sleman relatif menurun dari tahun ke tahun, dari 5,35% pada tahun 2010, menjadi 3,60% pada tahun 2023. Pada periode 2010-2013, memang terjadi peningkatan, namun terjadi penurunan kembali pada tahun 2014 dan berfluktuasi sampai tahun 2023. Pada tahun 2023 rasio kewirausahaan di Kabupaten Sleman sedikit lebih tinggi dari rasio kewirausahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta (3,35%). Angka ini masih jauh dari target negara maju pada tahun 2045 yang sebesar 8%.





Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011-2024

Grafik 2. 34. Rasio Kewirausahaan Kabupaten Sleman dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2023 (%)

D. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Proporsi jumlah industri kecil dan menengah dalam perekonomian suatu daerah merupakan indikator penting yang mencerminkan struktur dan dinamika sektor industri daerah tersebut. Industri kecil dan menengah memainkan peran krusial dalam perekonomian, baik dari segi penciptaan lapangan kerja, penyebaran kekayaan, maupun kontribusinya terhadap inovasi dan pengembangan ekonomi lokal. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, data industri dibedakan menjadi industri kecil dan industri menengah besar, sehingga jumlah industri kecil dan menengah tidak terdata. Jumlah dan proporsi industri kecil di Kabupaten Sleman rentang waktu tahun 2019 hingga tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2. 29. Jumlah Industri Kecil dan Menengah Besar di Kabupaten Sleman Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Industri Kecil (Unit)	Jumlah Industri Menengah Besar (Unit)	Jumlah Total Industri (Unit)	Proporsi Industri Kecil (%)
1	2019	770	208	24.488	3,14
2	2020	1.284	212	23.257	5,52
3	2021	493	212	22.327	2,21
4	2022	528	218	23.275	2,27
5	2023	614	220	23.859	2,57

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2024; data diolah,2024

Berdasarkan data di atas, jumlah industri kecil di Kabupaten Sleman cenderung menurun tahun 2019 berjumlah 770 unit usaha menjadi 614 unit usaha pada tahun 2023. Sementara jumlah industri menengah besar di Kabupaten Sleman memiliki kecenderungan meningkat dimana pada tahun 2019 jumlah industri menengah besar sebanyak 208 unit usaha, sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 220 unit usaha. Proporsi industri kecil terhadap jumlah total industri di Kabupaten Sleman mempunyai kecenderungan meningkat. Proporsi industri kecil pada tahun 2019 sebesar 3,14%, meningkat menjadi 5,52% pada tahun 2020 karena adanya bantuan Pemerintah Pusat untuk usaha mikro kecil dan menengah pada masa pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, pasca pandemi Covid-19, proporsi industri kecil mengalami penurunan menjadi 2,21%. Kemudian, meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 2,57%.



E. Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Koperasi

Seperti diketahui, usaha mikro kecil dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian yang mendominasi sebagian besar investasi. Meskipun dari segi nilai investasi sedikit, namun investasi usaha mikro kecil dan menengah dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dari usaha besar. Uraian berikut akan menjelaskan bagaimana perkembangan kinerja usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi terutama dalam kaitannya dengan mendorong investasi di tingkat mikro.

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kinerja usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, baik dari sisi jumlah usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja, maupun volume usaha. Pada tahun 2021 jumlah usaha mikro kecil dan menengah mengalami kenaikan cukup signifikan menjadi 90.441 usaha, sedangkan volume usaha dan jumlah tenaga kerja meningkat lebih dari 10%. Lonjakan jumlah usaha mikro kecil dan menengah tersebut dikarenakan adanya program dari pemerintah pusat (Bantuan Presiden/Banpres) untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi Covid-19. Salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan Presiden tersebut adalah kepemilikan ijin usaha. Kebijakan tersebut mendorong masyarakat untuk mendaftarkan ijin usahanya, sehingga pada tahun tersebut terjadi lonjakan jumlah usaha mikro kecil dan menengah. Kondisi ini didukung dengan diberlakukannya perijinan *online single submission risk based approach*, sehingga lebih mudah dan cepat.

Pada tahun sebelumnya (tahun 2018-2020), pendataan usaha mikro kecil dan menengah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah bersama dengan kapanewon dan kalurahan. Sejak tahun 2021 sampai sekarang, pendataan usaha mikro kecil dan menengah dilakukan melalui 2 arah, pemerintah turun ke bawah serta masyarakat secara sadar dan mandiri mendaftarkan usahanya. Pada tahun 2023, jumlah usaha meningkat signifikan karena adanya *updating* data usaha mikro kecil dan menengah bersama kapanewon dan kalurahan.

Tabel 2. 30. Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2018-2023

No	Keterangan	Jumlah					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (unit)	36.653	41.852	68.382	90.441	90.564	109.938
2	Usaha Mikro (unit)	35.682	40.887	67.414	90.419	90.542	109.759
3	Usaha Kecil (unit)	942	933	936	19	19	168
4	Usaha Menengah (unit)	29	32	31	3	3	11
5	Volume Usaha (Rp triliun)	4,200	6,090	2,960	3,288	3,287	3,297
6	Tenaga Kerja (Orang)	77.566	79.055	65.582	73.371	73.393	318.691

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2019-2023

2. Koperasi

Pada tahun 2021 jumlah koperasi, anggota koperasi, volume usaha koperasi di Kabupaten Sleman meningkat dari tahun 2020. Namun jumlah tenaga kerja, simpanan anggota dan sisa hasil usaha (SHU) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19, sehingga terdapat pengurangan tenaga kerja dan sebagian



dirumahkan sementara. Adapun, koperasi yang bergerak di sektor simpan pinjam mengalami permasalahan kredit macet.

Tabel 2. 31. Kinerja Koperasi Kabupaten Sleman Tahun 2018-2023

No	Keterangan	Jumlah					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Koperasi (unit)	444	415	407	421	419	422
2	Anggota Koperasi (orang)	292.008	229.913	226.850	235.133	186.893	183.025
3	Tenaga Kerja (orang)	2.891	2.132	1.795	1.758	1.391	1.232
4	Volume Usaha (Rp milyar)	1.912	1.728	1.322	1.523	1.248	1.407
5	Simpanan anggota (Rp milyar)	365	366	509	424	376	346,35
6	Sisa Hasil Usaha (Rp milyar)	65	25	34	26	22	21,78

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2019-2023

Volume usaha koperasi terhadap produk domestik regional bruto merupakan indikator penting yang mencerminkan kontribusi sektor koperasi terhadap perekonomian regional. Koperasi, sebagai bentuk organisasi ekonomi yang berorientasi pada anggotanya dan berbasis pada prinsip kerja sama, memainkan peran signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Volume usaha koperasi mengacu pada total nilai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh koperasi dalam suatu periode waktu tertentu, termasuk omzet penjualan, pendapatan, dan hasil usaha.

Tabel 2. 32. Volume Usaha Koperasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2018-2023

No	Tahun	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Rp Milyar)	Volume Usaha Koperasi (Rp Milyar)	Rasio (%)
1	2018	43.779	1.912	4,37
2	2019	47.468	1.728	3,64
3	2020	45.655	1.322	2,90
4	2021	49.403	1.523	3,08
5	2022	54.702	1.248	2,28
6	2023	59.431	1.407	2,37

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2024, Diolah, 2024

Berdasarkan data di atas, rasio volume usaha koperasi di Kabupaten Sleman pada rentang waktu tahun 2018 hingga tahun 2023 memiliki tren dinamis di mana pada rentang waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 volume usaha koperasi cenderung menurun, sedangkan pada rentang waktu tahun 2022 sampai tahun 2023 mengalami tren peningkatan. Hal ini juga merepresentasikan dari besaran rasio volume usaha koperasi terhadap produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku.

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Tingkat Pendidikan Penduduk (di atas 15 Tahun)

Tingkat pendidikan penduduk usia produktif memberikan gambaran mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada di Kabupaten Sleman. Pendidikan memberikan akses kepada pengetahuan dan informasi yang dapat membuka pintu wawasan dan pemahaman, terutama berkaitan dengan dunia kerja. Untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai memang tidak harus berpendidikan tinggi, namun akan berpeluang lebih besar saat

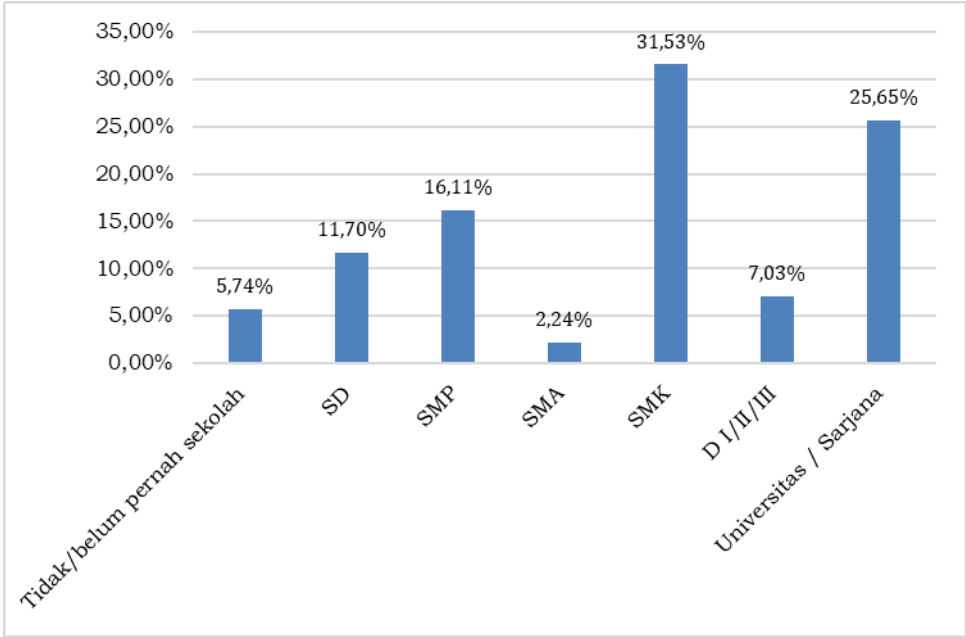


mempunyai ketrampilan atau memiliki spesialisasi yang bisa memberikan daya saing tersendiri. Tingkat pendidikan usia produktif di Kabupaten Sleman tahun 2023 dapat digambarkan melalui tabel berikut dibawah.

Tabel 2. 33. Tingkat Pendidikan Tertinggi Penduduk Usia Produktif di Kabupaten Sleman Tahun 2023

No	Pendidikan Tertinggi	Angkatan Kerja					Bukan Angkatan Kerja	
		Bekerja (jiwa)	% Terhadap Penduduk Di Atas 15 Tahun	Pengangguran (jiwa)	% Terhadap Penduduk Di Atas 15 tahun	Total (jiwa)	Jumlah (jiwa)	% Terhadap Penduduk Di Atas 15 Tahun
1	Tidak/belum pernah sekolah	31.805	3,48	4.395	0,48	36.200	24.511	2,68
2	SD	64.819	7,09	3.955	0,43	68.774	30.416	3,33
3	SMP	89.227	9,76	3.425	0,37	92.652	61.558	6,73
4	SMA	12.401	1,36	8.659	0,95	21.060	95.461	10,44
5	SMK	174.672	19,10	7.965	0,87	182.637	62.415	6,83
6	D I/II/III	38.930	4,26	583	0,06	39.513	14.037	1,53
7	Universitas / Sarjana	142.058	15,53	4.413	0,48	146.471	38.764	4,24
Jumlah		553.912	60,57	33.395	3,65	587.308	327.162	35,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman Tahun, 2024

Grafik 2. 35. Tingkat Pendidikan Tertinggi Penduduk Bekerja Usia Produktif di Kabupaten Tahun 2023

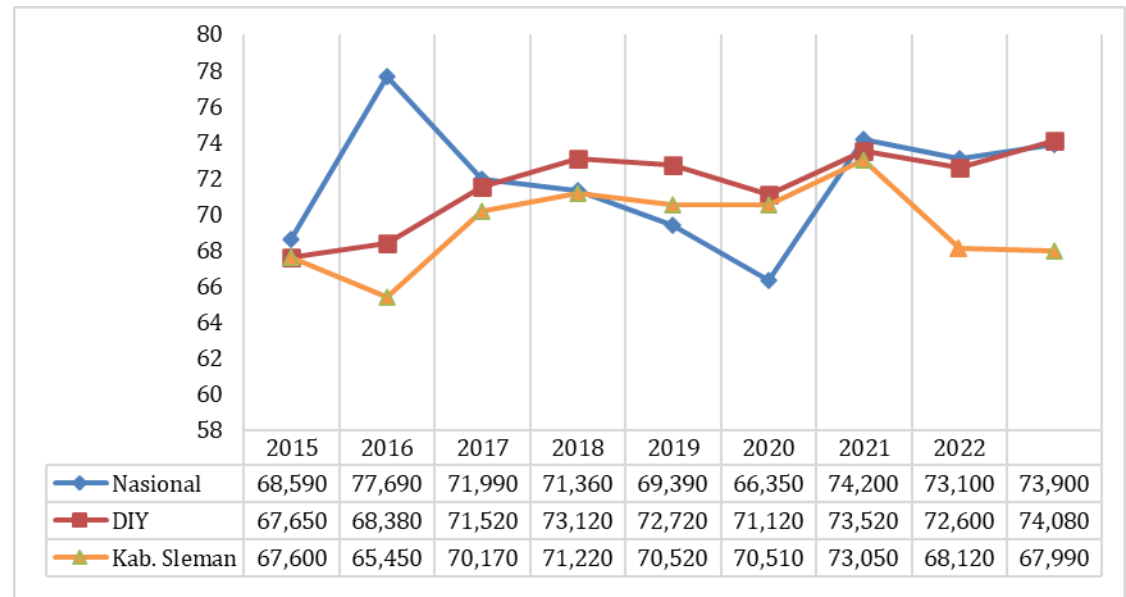
Tingkat pendidikan penduduk usia produktif di Kabupaten Sleman didominasi oleh lulusan SMK dan universitas. Rendahnya tingkat SMA yang bekerja menunjukkan adanya minat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi. Adapun tingkat pendidikan SD dan SMP masih cukup besar di angka 11,7% dan 16,11% dari total penduduk usia produktif. Angka ini sebagian berasal dari penduduk usia tua yang belum mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan lebih tinggi. Dengan berjalannya waktu, angkatan kerja dengan pendidikan rendah diharapkan akan semakin berkurang, terutama dengan diterapkannya wajib belajar 12 tahun.

B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Total

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah ukuran statistik yang menggambarkan proporsi angkatan kerja dalam masyarakat. Dengan



kata lain, tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan pasar tenaga kerja yang merupakan faktor penting dalam membentuk pembangunan suatu daerah baik dari sisi ekonomi maupun sosial. tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Sleman berada pada angka yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Nasional. tingkat partisipasi angkatan kerja yang berada pada tingkat yang rendah menandakan bahwa partisipasi masyarakat untuk bekerja cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional. tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Sleman rentang waktu tahun 2014 hingga tahun 2023 digambarkan melalui grafik di bawah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2024

Grafik 2. 36. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2015-2023 (%)

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Secara khusus, partisipasi angkatan kerja perempuan mendorong adanya peningkatan kesetaraan gender, yang artinya kesempatan perempuan dalam mendukung tumbuhnya aktivitas perekonomian di suatu daerah diharapkan meningkat seiring juga dengan peningkatan partisipasi perempuan di dunia politik. Perhitungan tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu dengan membagi jumlah angkatan kerja perempuan dengan jumlah penduduk perempuan usia >15 tahun dikali 100%.

Dinamika yang terjadi di masyarakat saat ini adalah semakin besar peran wanita dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Partisipasi di sektor ekonomi ini menunjukkan persamaan hak perempuan tanpa memandang gendernya. Oleh karena itu, nilai tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait kesetaraan gender. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik, pada tahun 2017 hingga tahun 2021, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Sleman menunjukkan tren peningkatan, tertinggi pada tahun 2021 mencapai 64,47%. Capaian tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Sleman pada tahun 2017-2023 disajikan dalam tabel berikut.



**Tabel 2. 34. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Sleman Tahun 2017- 2023**

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Angkatan Kerja Perempuan (jiwa)	Penduduk Usia Kerja Perempuan (jiwa)
2017	61,57	288.412	468.413
2018	62,39	294.736	472.442
2019	61,22	292.478	477.750
2020	62,66	311.604	497.327
2021	64,47	325.381	504.710
2022	59,73	305.829	511.982
2023	60,14	291.959	468.880

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Peningkatan ini mencerminkan bahwa semakin banyak perempuan yang menjadi angkatan kerja selama periode tersebut. Pada tahun 2023, nilai tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami peningkatan ke angka 60,14 persen dari tahun 2022 sebesar 59,73 persen. Penurunan pada tahun 2022 ini disebabkan adanya peningkatan jumlah bukan angkatan kerja lebih besar dibanding peningkatan jumlah angkatan kerja seiring dengan bertambahnya jumlah mahasiswa dan pensiunan yang bermukim di wilayah Sleman, khususnya yang berjenis kelamin perempuan.

C. Angka Ketergantungan Penduduk (*Dependency Ratio*)

Angka ketergantungan penduduk (*dependency ratio*) adalah jumlah penduduk tidak produktif (usia 0-14 tahun dan >65 tahun) dibagi jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, *dependency ratio* penduduk di Kabupaten Sleman cenderung mengalami meningkat, pada tahun 2014 sebesar 41,12% menjadi 43,75% pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa akan ada kemungkinan peningkatan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif. Namun di sisi lain dengan meningkatnya jumlah penduduk pada rentang waktu tahun 65 tahun mengindikasikan adanya peningkatan umur harapan hidup di Kabupaten Sleman.

2.3.3. Daya Saing Fasilitas atau Infrastruktur Wilayah

A. Rasio Konektivitas

Konektivitas adalah suatu instrumen penting dalam sistem transportasi di suatu wilayah untuk mendukung masyarakat berkegiatan, seperti berdagang, berwisata, bekerja dan kegiatan lainnya. Konektivitas sebagai satu kesatuan jaringan transportasi yang mengacu pada kerapatan sambungan infrastruktur jalan di suatu wilayah. Semakin tinggi konektivitas suatu wilayah, maka semakin mudah perjalanan masyarakat dalam berkegiatan sehingga waktu tempuh perjalanan akan semakin cepat dan efisien. Selain itu, semakin tingginya konektivitas suatu wilayah juga akan mempengaruhi pemilihan dan alternatif jalan yang akan ditempuh. Konektivitas akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan hubungan sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

Pada tahun 2023, panjang jalan nasional sebesar 82,76 km, jalan provinsi 122,55 km, dan jalan kabupaten 699,5 km. Adapun rasio konektivitas di Kabupaten Sleman sejak tahun 2021 sampai 2023 sebesar



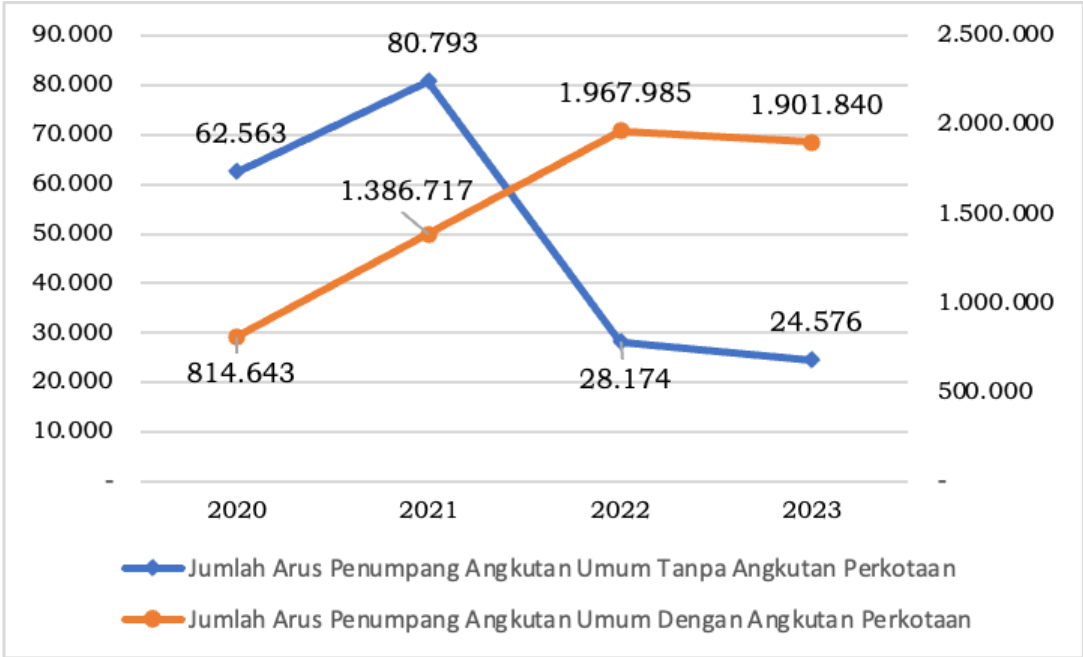
50% atau 0,5, yang merupakan perbandingan trayek yang dilayani dibagi dengan kebutuhan trayek di Kabupaten Sleman, dengan nilai maksimal 100% atau 1. Angka ini masih sesuai dengan target Renstra Kementerian Perhubungan yang menetapkan rasio konektivitas wilayah kabupaten sebesar 0,5 pada tahun 2026.

Rasio tersebut cukup baik artinya hampir semua kawasan di Kabupaten Sleman memiliki akses jalan yang saling terkoneksi. Namun demikian, konektivitas ini masih belum merata. Hal ini tercermin bahwa masih ada pusat permukiman yang belum mendapatkan akses jalan yang memadai, terutama di wilayah perbukitan.

B. Kinerja Transportasi

Kinerja transportasi menggambarkan bagaimana transportasi dalam suatu wilayah dapat melayani masyarakat untuk berkegiatan. Sampai saat ini terdapat 1 (satu) bandara di Kabupaten Sleman, yaitu Bandara Adisutjipto Yogyakarta, 2 (dua), yaitu Stasiun Patukan dan Stasiun Maguwo, serta 5 (lima) terminal bis. Terminal yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman merupakan terminal tipe C, yaitu Terminal Condong Catur, Terminal Prambanan, Terminal Pakem, dan Terminal Gamping. Adapun Terminal Jombor merupakan terminal tipe B yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Capaian kinerja transportasi di Kabupaten Sleman salah satunya digambarkan dari jumlah arus penumpang angkutan umum, dimana jumlah arus penumpang angkutan umum tanpa angkutan perkotaan pada tahun 2023 mencapai 24.576 penumpang dan jumlah arus penumpang angkutan umum dengan angkutan perkotaan mencapai 1.901.840 penumpang. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2022, dimana jumlah arus penumpang angkutan umum tanpa angkutan perkotaan di tahun 2022 mencapai 28.174 penumpang dan jumlah arus penumpang angkutan umum dengan angkutan perkotaan mencapai 1.967.985 penumpang. Penurunan ini disebabkan karena adanya pengalihan atau pengurangan jumlah armada trayek perkotaan dan penurunan jumlah penumpang pada masa lebaran natal dan tahun baru.



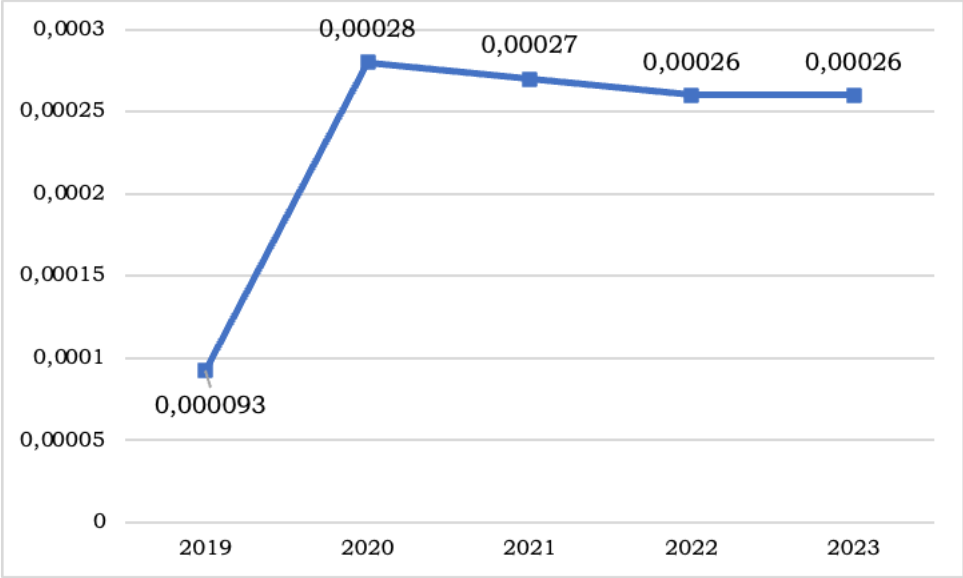
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, 2024

Grafik 2. 37. Jumlah Arus Penumpang di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2023 (penumpang)

Pada tahun 2023, pengajuan izin trayek angkutan umum di Dinas Perhubungan hanya sedikit karena masa berlaku izin trayek adalah selama



lima tahun. Rasio izin trayek ini merupakan perbandingan antara jumlah izin trayek dibagi dengan jumlah penduduk.



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, 2024

Grafik 2. 38. Rasio Izin Trayek di Kabupaten Sleman Tahun 2019-2023

Sementara untuk jumlah kendaraan angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) sebanyak 3.904 kendaraan dan pedesaan sebanyak 2.607 kendaraan. Adapun jumlah uji kir angkutan umum pada tahun 2023 sebanyak 2.497 kendaraan, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 2.248 kendaraan.

Tabel 2. 35. Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Sleman Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	a. Jumlah arus penumpang angkutan umum (tanpa angkutan perkotaan, penumpang)	406.394	62.563	80.793	28.174	24.576
	b. Jumlah arus penumpang angkutan umum (dengan angkutan perkotaan, penumpang)	-	814.643	1.386.717	1.967.985	1.901.840
2	Rasio izin trayek (%)	0,000093	0,00028	0,00027	0,00026	0,00026
3	Jumlah uji kir angkutan umum (kendaraan)	3.222	2.021	1.904	2.248	2.497
4	Jumlah bandara (unit)	1	1	1	1	1
5	Jumlah terminal bis (unit)	4	4	4	4	4
6	a. Persentase layanan angkutan darat tanpa angkutan perkotaan (%)	6,00	27,58	12,86	24,61	26,49
	b. Persentase layanan angkutan darat dengan angkutan perkotaan (%)	-	4,80	3,39	1,56	1,61



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, 2024

Perlengkapan jalan, khususnya rambu-rambu lalu lintas dipasang sesuai kondisi di lapangan. Sebagai contoh, pada daerah rawan kemacetan dan kecelakaan dilakukan penambahan pemasangan rambu lalu lintas. Pada tahun 2022, pemasangan rambu sejumlah 54 unit.

Kondisi lainnya adalah terjadinya ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah kendaraan dan pertumbuhan kapasitas jalan. Pertumbuhan rata-rata panjang jalan kurang dari 1% per tahun, sementara pertumbuhan kendaraan bermotor adalah 2% hingga 5% per tahun. Hal ini dapat mengakibatkan kapasitas jalan akan terlampaui, menyebabkan kemacetan lalu lintas yang semakin parah.

C. **Infrastruktur Pertanian**

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 3 (tiga) daerah irigasi (DI) yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat dengan luas 12.460 Ha dan 41 daerah irigasi kewenangan provinsi dengan luas 13.987 Ha. Salah satu indikator peningkatan fungsi irigasi adalah semakin luasnya daerah irigasi terlayani air irigasi dan panjang saluran irigasi dengan kondisi baik.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki lahan pertanian, terutama lahan sawah yang cukup besar. Saluran irigasi menjadi salah satu infrastruktur pertanian yang sangat vital untuk membantu petani mendapatkan air. Luas daerah irigasi yang ada di Kabupaten Sleman dari tahun 2019-2023 sebesar 21.832 Ha dengan daerah irigasi pemerintah seluas 16.091 Ha dan daerah irigasi kecil/desa seluas 5.741 Ha.

Tabel 2. 36. Data infrastruktur irigasi di Kabupaten Sleman

No	Sarana/Prasarana Irigasi	Unit	2019	2020	2021	2022	2023
A.	Saluran Irigasi						
	Teknis	m	1.323.124	1.323.124	1.323.124	1.323.124	1.323.124
	Primer	m	256.683	256.683	256.683	256.683	256.683
	Sekunder	m	398.907	398.907	398.907	398.907	398.907
	Tersier	m	667.533	667.533	667.533	667.533	667.533
B.	Kondisi saluran irigasi kewenangan Kabupaten (Primer + Sekunder)						
	Baik	m	446.148	458.224	467.816	504.708	532.955
	Sedang	m	156.278	139.767	130.657	106.360	86.666
	Rusak	m	53.164	57.599	57.117	44.522	35.969
	Total panjang saluran irigasi	m	655.590	655.590	655.590	655.590	655.590
C.	Luas Irigasi						
	Daerah Irigasi Pemerintah	Ha	16.091	16.091	16.091	16.091	16.091
	Daerah Irigasi Kecil/Desa	Ha	5.741	5.741	5.741	5.741	5.741
	Luas area irigasi	Ha	21.832	21.832	21.832	21.832	21.832

Sumber: DPUPKP Kabupaten Sleman, 2023

Panjang saluran irigasi di Kabupaten Sleman dari tahun 2019 hingga 2023, tidak ada perubahan. Total panjang saluran irigasi yaitu 1.323.124 m, yang terdiri dari saluran primer 256.683 m, sekunder 398.907 m, dan tersier 667.533 m. Panjang saluran yang menjadi kewenangan Kabupaten Sleman (kategori saluran primer dan sekunder) adalah 655.590 m. Kondisi saluran irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Sleman mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir dari 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, kondisi saluran irigasi dengan kategori baik 68,05% (446.148 m), sedang 23,84% (156.278 m) dan rusak 8,11% (53.164



m). Kondisi saluran irigasi pada tahun 2023 naik dengan kategori baik 81,29% (532.955 m), sedang 13,22% (86.666 m) dan rusak 5,49% (35.969 m). Pada tahun 2023 masih terdapat saluran irigasi yang membutuhkan rehabilitasi terutama saluran irigasi dengan kondisi rusak berat.

Tabel 2. 37. Kondisi Bendung di Kabupaten Sleman Tahun 2019-2023 (Buah)

No	Kondisi Bendung	2019	2020	2021	2022	2023
1	Baik	574	578	527	536	537
2	Rusak Sedang	130	120	130	129	129
3	Rusak Ringan	122	129	143	136	136
4	Rusak Berat	49	48	75	74	73
Total		875	875	875	875	875

Sumber: DPUPKP Kabupaten Sleman, 2023

Kinerja saluran pengairan irigasi di Kabupaten Sleman ditunjang oleh bendung yang berfungsi untuk menaikkan muka air. Jumlah bendung sejak tahun 2019, tidak ada perubahan, yaitu sebanyak 875 buah, yang terdiri dari 303 bendung teknis/permanen, 175 bendung semi teknis/semi permanen, dan 397 bendung sederhana.

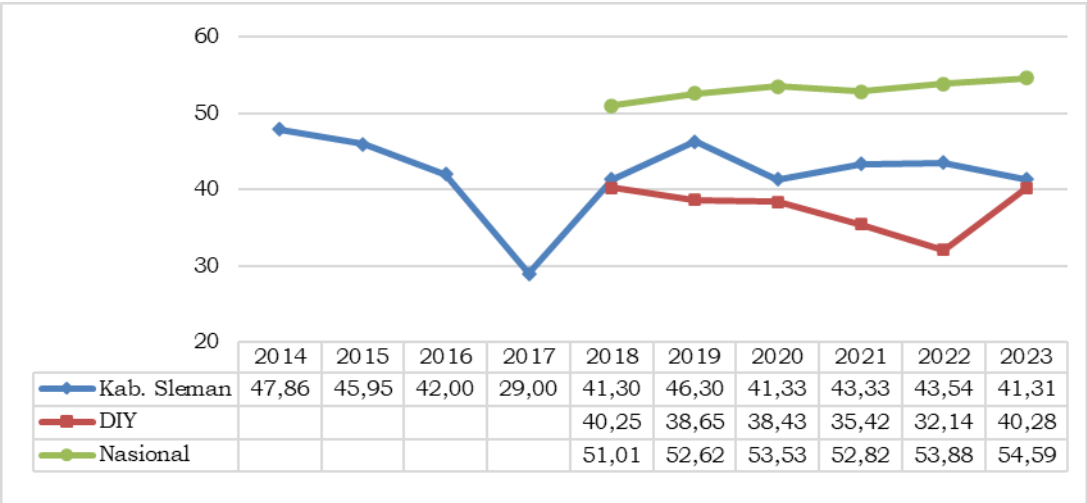
D. Prasarana Permukiman

1.

Kondisi Lingkungan

a. Indeks Kualitas Air

Indeks kualitas air menunjukkan tingkatan kualitas air permukaan terutama 11 sungai yang ada di Kabupaten Sleman. Nilai IKA Kabupaten Sleman dari tahun 2014-2017 terlihat cukup fluktuatif. Nilai indeks kualitas air lima tahun terakhir (tahun 2018-2023) menunjukkan nilai yang relatif lebih stabil. Nilai indeks kualitas air terendah terjadi pada tahun 2017 dengan nilai 29,00, dan indeks kualitas air tertinggi pada tahun 2014 dengan nilai 47,86. Adapun nilai indeks kualitas air pada tahun 2023 sebesar 41,31 lebih rendah dibandingkan dengan indeks kualitas air tahun 2022 yaitu 43,54. Nilai indeks kualitas air Kabupaten Sleman pada tahun 2023 ini berada di atas nilai indeks kualitas air Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu 40,28, akan tetapi lebih rendah dari indeks kualitas air Nasional sebesar 54,59. Berdasarkan nilai indeks kualitas air ini, maka sungai - sungai di Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk juga Kabupaten Sleman masuk dalam kategori kurang.



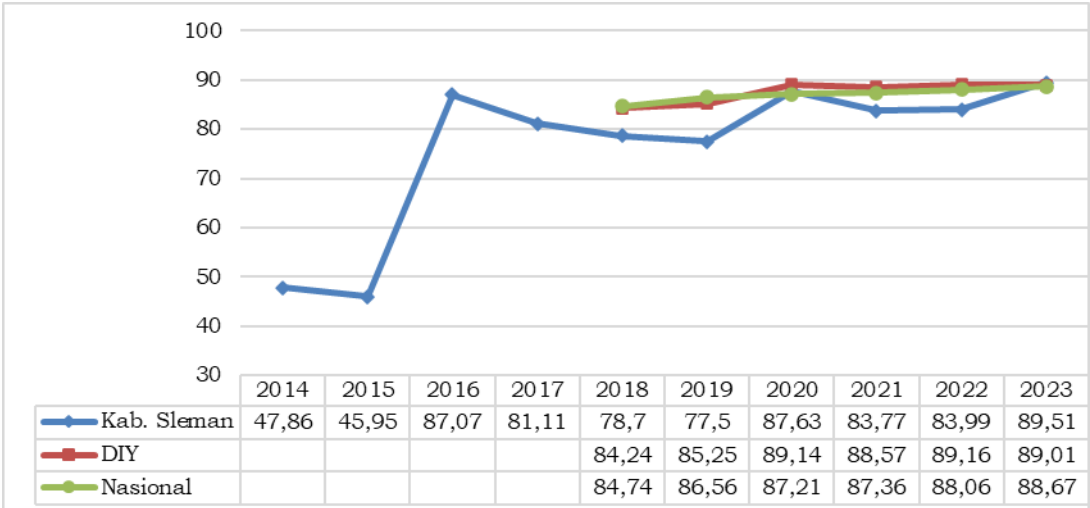
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, 2015-2024, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019-2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019-2024

Grafik 2. 39. Indeks Kualitas Air Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional Tahun 2014-2023

b. Indeks Kualitas Udara



Indeks kualitas udara menggambarkan tingkat kualitas udara ambien pada suatu daerah. indeks kualitas udara Kabupaten Sleman tahun 2014 dan 2015 berada pada nilai sangat rendah. hal ini disebabkan oleh perbedaan metode perhitungan. nilai indeks kualitas udara pada tahun 2023 adalah 89,51 yang menggambarkan kualitas udara dalam kategori baik. nilai indeks kualitas udara Kabupaten Sleman pada tahun 2023 lebih tinggi dari pada nilai indeks kualitas udara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional dengan nilai masing-masing 89,01 dan 88,67.

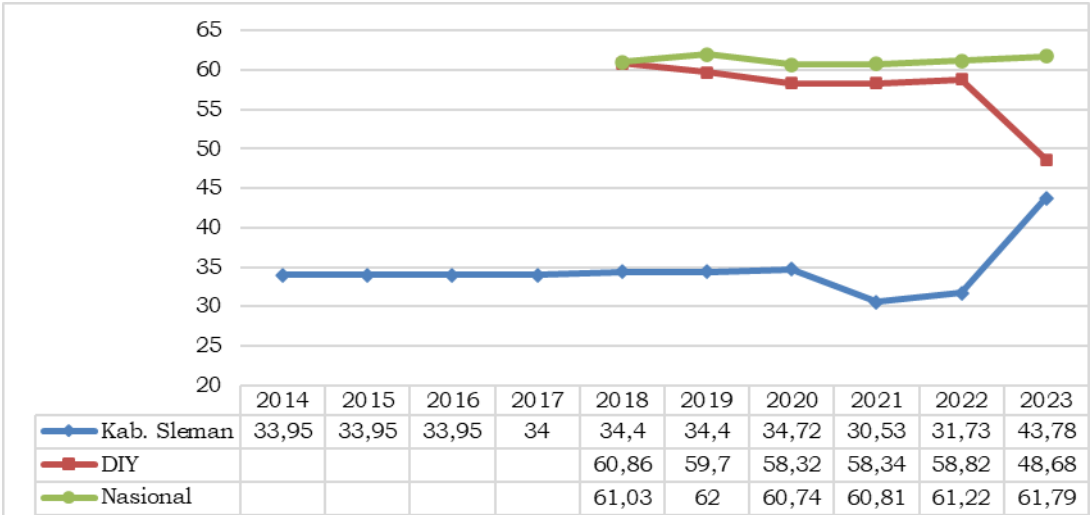


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, 2015-2024, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019-2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019-2024

Grafik 2. 40. Indeks Kualitas Udara Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional Tahun 2014-2023

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Vegetasi atau lahan hijau merupakan area yang sangat penting untuk menunjang lingkungan hidup yang lebih berkualitas. Indeks kualitas tutupan lahan di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dari tahun 2014 dengan nilai 33,95 menjadi 43,78 pada tahun 2023, termasuk pada kategori kurang. Peningkatan nilai pada tahun 2023 bersumber dari penambahan jenis-jenis tutupan lahan yang mendukung indeks kualitas tutupan lahan, antara lain tutupan lahan berupa ruang terbuka hijau atau ruang-ruang yang memiliki fungsi lindung seperti sempadan sungai dan sempadan embung. nilai indeks kualitas tutupan lahan Kabupaten Sleman masih lebih rendah dibandingkan indeks kualitas tutupan lahan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional dengan nilai berturut-turut sebesar 48,68 dan 61,79.



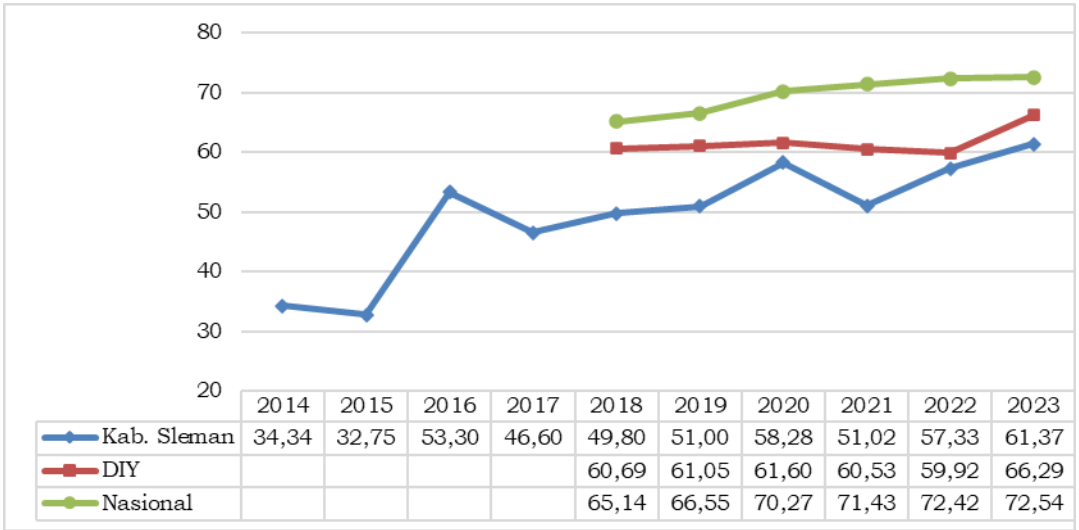
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, 2015-2024, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019-2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019-2024



Grafik 2. 41. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional Tahun 2014-2023

d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sleman mengalami kenaikan dari tahun 2014 hingga tahun 2023. Nilai indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2023 meningkat sebesar 4 poin dari tahun 2022 menjadi 61,37. Kenaikan nilai indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Sleman menunjukkan peningkatan kualitas lingkungan dan juga kualitas hidup masyarakatnya. Nilai indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Sleman masih di bawah nilai indeks kualitas lingkungan hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional yang masing-masing nilainya pada tahun 2023 sebesar 66,29 dan 72,54. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu memperhatikan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan nilai kualitas lingkungan hidup yang masih berada pada kategori sedang, dengan meningkatkan nilai indeks kualitas air dan indeks kualitas tutupan lahan di Kabupaten Sleman.



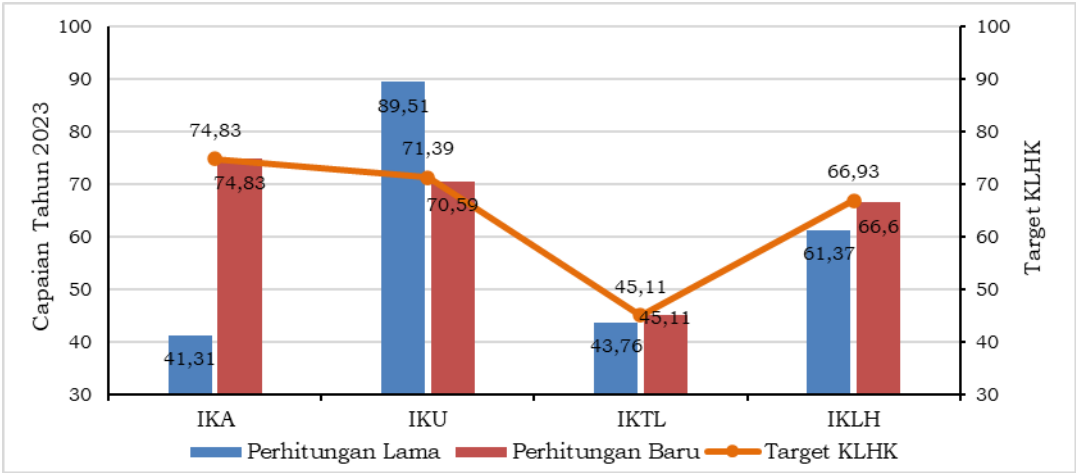
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, 2015-2024, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019-2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019-2024

Grafik 2. 42. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional Tahun 2014-2023

Pada tahun 2023, perhitungan indeks kualitas lingkungan menggunakan aturan dan rumusan yang terbaru berdasarkan arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk nilai indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas tutupan lahan, dan indeks kualitas lingkungan hidup disajikan pada Grafik 2.43. Nilai indeks kualitas air, indeks kualitas tutupan lahan, dan indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Sleman lebih tinggi dari hasil perhitungan menggunakan rumus lama. indeks kualitas udara Kabupaten Sleman tahun 2023 dengan perhitungan baru justru lebih rendah, dari 89,51 menjadi 70,59.

Jika dibandingkan dengan nilai indeks kualitas lingkungan hidup yang menjadi target dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hanya nilai indeks kualitas udara yang telah melampaui target, sedangkan indeks kualitas air, indeks kualitas lahan dan indeks kualitas lingkungan hidup masih berada di bawah target Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, perbedaan indeks tersebut dengan target Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak terlalu jauh.





Sumber: DLH Kabupaten Sleman, 2024

Grafik 2. 43. Perbandingan Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Rumus Lama dan Baru Tahun 2023

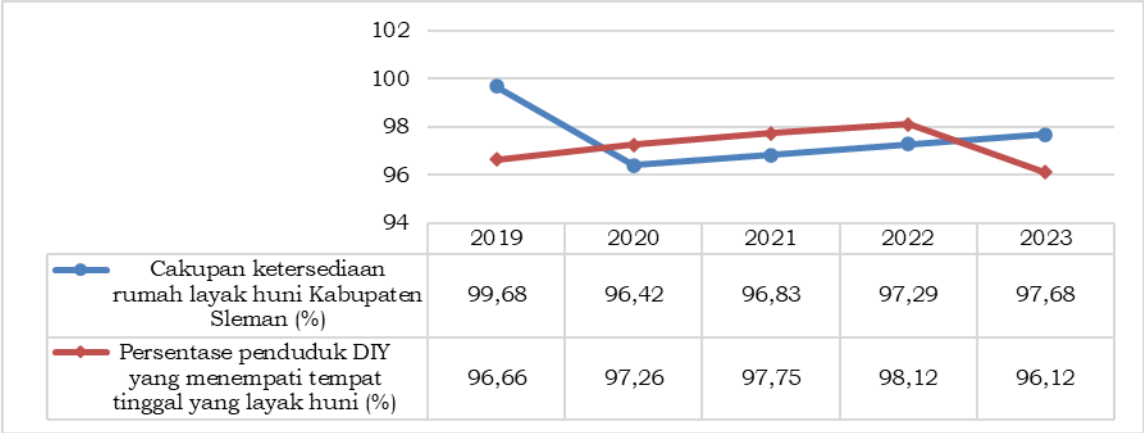
2. Ruang Terbuka Hijau

Kabupaten Sleman memiliki luas wilayah perkotaan sebesar 12.590 Ha. Pada tahun 2023, ruang terbuka hijau publik yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sleman seluas 843,56 Ha, sehingga proporsi ruang terbuka hijau publik mencapai 6,7%. Angka ini masih di bawah target proporsi yang disyaratkan sebesar 20% (2.518 Ha). Berdasarkan standar ruang terbuka hijau, baik Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan SNI Perencanaan Lingkungan Perumahan, ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Sleman belum memadai, masih diperlukan 13,3% ruang terbuka hijau publik atau seluas 1.674,44 Ha.

3. Akses Hunian Layak

Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan nasional adalah tersedianya rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan pada setiap daerah. Indikator yang mendekati tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut adalah rumah layak huni. Pada tahun 2019, cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Sleman mencapai angka yang cukup tinggi, sekitar 99,68%.

Pada tahun 2020, angka ini mengalami penurunan hingga mencapai 96,42% dikarenakan terjadi perubahan kriteria. Pada tahun-tahun berikutnya, berdasarkan kriteria baru tersebut, angka ini kembali meningkat secara bertahap, hingga pada tahun 2023 mencapai angka 97,68%. Apabila dibandingkan dengan indikator rumah layak huni di Daerah Istimewa Yogyakarta, angka cakupan di Kabupaten Sleman pada tahun 2023 lebih tinggi dengan selisih 1,56%.

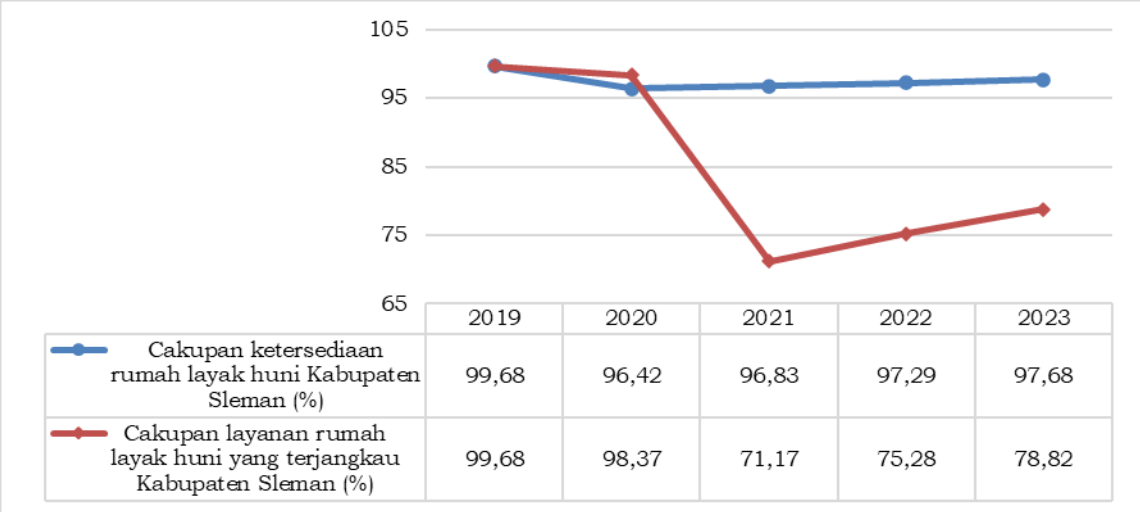


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman, 2020-2024; Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024

Grafik 2. 44. Gambaran Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Sleman dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2023



Jika ditinjau dari keterjangkauan, cakupan layanan rumah layak huni dan terjangkau di Kabupaten Sleman cenderung masih cukup rendah dibandingkan ketersediaan rumah layak huni. Pada tahun 2019 dan 2020, angka cakupan ini cukup tinggi pada angka lebih dari 98%, tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan karena terjadi perubahan kriteria, seperti halnya pada indikator rumah layak huni. Dengan angka rumah layak huni dan terjangkau yang selisih hingga sekitar 20%. Angka ini mencerminkan adanya pembangunan perumahan yang relatif tidak sesuai dengan cerminan permintaan pasar secara dominan. Oleh karena itu, seharusnya terjadi pembinaan dan pengarahan dari sisi suplai rumah layak huni supaya penyediaan rumah layak huni tepat sasaran dan terjangkau oleh masyarakat.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman, 2020-2024; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024

Grafik 2. 45. Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Layak Huni Terjangkau Kabupaten Sleman Tahun 2019-2023

Tabel 2. 38. Data Akses Hunian Layak Kabupaten Sleman 2020-2023

Uraian	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Jumlah Bangunan Fungsi Hunian (unit)	306.348	307.347	308.129	309.071
Jumlah Rehabilitasi Tidak Layak Huni (unit)	10.656	9.738	8.351	7.157
Jumlah Hunian Layak (unit)	295.692	297.609	299.778	301.914
Persentase Hunian Layak (%)	96,42	96,83	97,29	97,68

Sumber: Dinas PUPKP, diolah, 2024

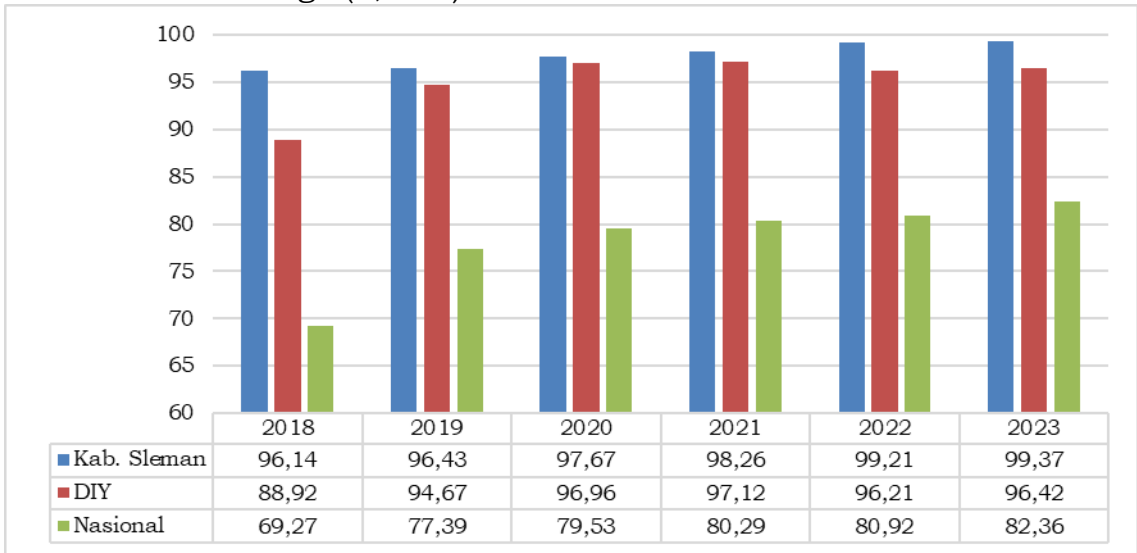
Jumlah unit hunian layak didapatkan dari jumlah bangunan dengan fungsi hunian dikurangi jumlah rehabilitasi tidak layak huni yang belum tertangani. Adapun persentasenya dihitung dari jumlah hunian layak dibagi dengan jumlah bangunan fungsi hunian pada tahun berkenaan.

4. Akses Sanitasi Aman

Pada umumnya rumah di Kabupaten Sleman banyak yang menggunakan sistem individu dengan menggunakan tangki septik yang berpotensi menyebabkan pencemaran air tanah. Akses sanitasi layak di Kabupaten Sleman pada tahun 2023 mencapai angka 99,37%. Cakupan akses sanitasi layak merupakan cakupan masyarakat yang menggunakan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, baik yang merupakan fasilitas privat rumah tangga sendiri ataupun fasilitas publik. Capaian akses sanitasi layak ini melampaui capaian Daerah Istimewa Yogyakarta (96,42%) dan nasional (82,36%). Adapun target nasional 100%. Jumlah ini merupakan total perhitungan antara akses



layak tidak termasuk aman serta akses aman. Akses layak tidak termasuk aman sebesar 73,22%, yang terdiri dari individu dengan jamban keluarga dan tangki septik individu layak sebesar 265.723 kartu keluarga (70,31%) serta berupa jamban bersama, dan tangki septik komunal sebesar 10.979 kartu keluarga (2,91%). Jumlah jamban keluarga dengan sanitasi belum layak tahun 2023 tercatat sebanyak 2.383 kartu keluarga (0,63%).



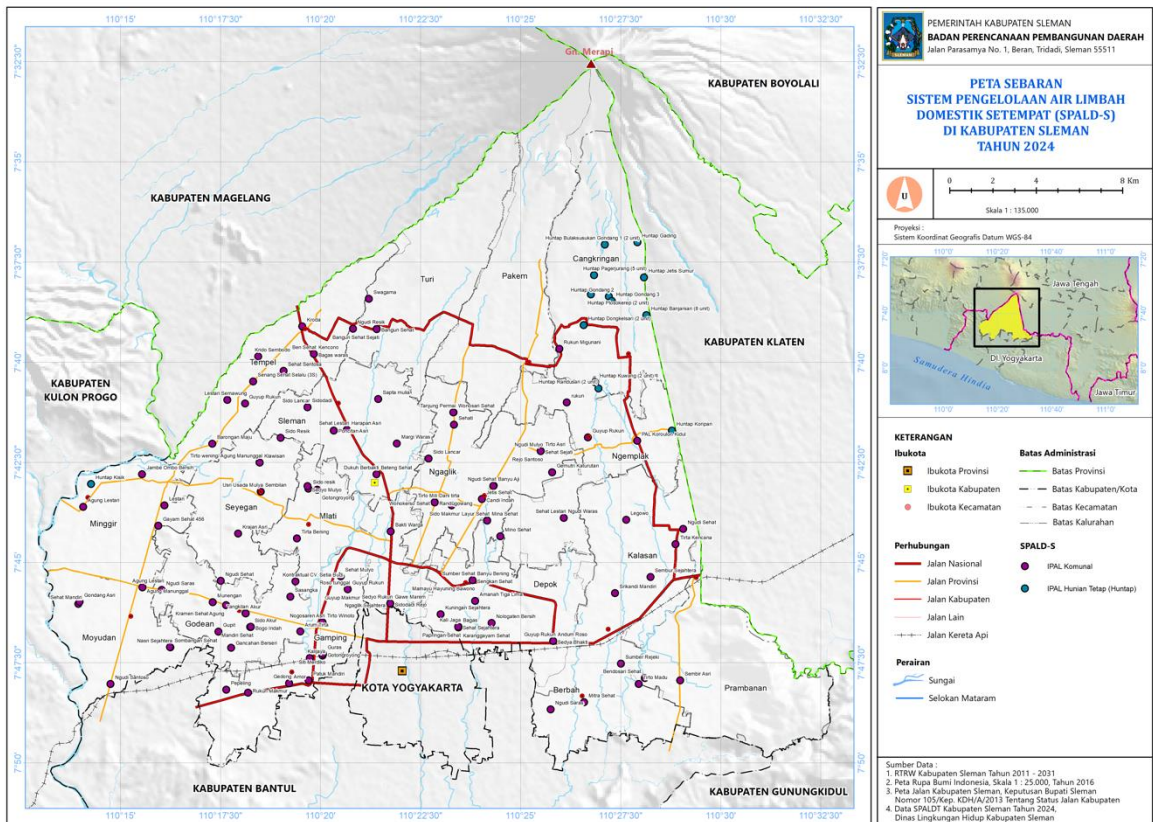
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, 2019-2024; Badan Pusat Statistik, 2019-2024

Grafik 2. 46. Persentase Akses Sanitasi Layak (Termasuk Aman) di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2018 – 2023 (%)

Sanitasi aman merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan kelayakan suatu rumah dengan tersedianya kloset leher angsa serta akses unit buangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau pengolahan air limbah baik sistem pengolahan air limbah domestik setempat, baik individu, komunal, maupun sistem pengolahan air limbah domestik terpusat. Sampai dengan tahun 2023, akses sanitasi aman dengan kriteria rumah tangga memiliki akses tangki septik aman, atau terlayani instalasi pengolahan air limbah sebesar 98.824 kartu keluarga (26,15%). Jumlah jamban keluarga dengan tangki septik aman sebanyak 81.233 kartu keluarga. Sistem pengolahan air limbah domestik setempat berbasis skala desa atau masyarakat yang berupa instalasi pengolahan air limbah komunal sebanyak 149 unit dengan jumlah pelayanan 11.584 kartu keluarga dan 29 unit di area hunian tetap (huntap) dengan jumlah pelayanan sebanyak 1.320 kartu keluarga. Adapun sistem pengolahan air limbah domestik terpusat skala kawasan/ permukiman terdapat 2 (dua) unit, yaitu instalasi pengolahan air limbah Depok dan instalasi pengolahan air limbah Berbah dengan tingkat pelayanan masing-masing 100 kartu keluarga dan 720 kartu keluarga, serta sistem pengolahan air limbah domestik terpusat skala perkotaan atau regional berupa jaringan pipa air limbah yang dilayani oleh instalasi pengolahan air limbah Sewon di wilayah Kapanewon Mlati, Depok, dan Ngaglik, dengan jumlah pelayanan sebanyak 3.867 kartu keluarga.

Berdasarkan topografi tanah yang cukup miring dan sebaran penduduk yang berpencar, maka instalasi pengolahan air limbah komunal merupakan sistem pengolahan air limbah yang paling tepat untuk Kabupaten Sleman, terutama saat terjadi penambahan rumah dengan jumlah yang cukup banyak di suatu kawasan.





Sumber: DLH Kabupaten Sleman, 2024

Gambar 2. 18. Sebaran Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat di Kabupaten Sleman Tahun 2023

Berdasarkan laporan *Evaluation Health Risk Analysis* (EHRA) Kabupaten Sleman Tahun 2023, indeks risiko sanitasi dengan kategori tinggi masih ditemukan di 17 kalurahan (19,76%) dari 86 kalurahan. Angka indeks risiko sanitasi ini dihitung dari faktor persentase tangki septik aman, pencemaran karena pembuangan isi tangki septik, dan pencemaran karena sistem pengolahan air limbah tidak aman. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menyusun perencanaan, strategi, dan alokasi pendanaan untuk capaian target sanitasi aman pada tahun-tahun mendatang.

Terkait dengan penyediaan sanitasi aman, maka diperlukan instalasi pengelolaan lumpur tinja. Instalasi pengelolaan lumpur tinja ini merupakan tempat untuk menampung dan mengolah hasil pengurusan lumpur tinja dari tangki septik masyarakat maupun instalasi pengolahan air limbah komunal agar tidak menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan. Pada saat ini, Kabupaten Sleman hanya memiliki 1 unit instalasi pengelolaan lumpur tinja, yaitu instalasi pengelolaan lumpur tinja Madurejo yang memiliki kapasitas 25 m³/hari dengan jumlah layanan 12 tangki/hari. Namun karena keterbatasan kapasitas instalasi pengelolaan lumpur tinja Madurejo, Kabupaten Sleman masih membuang sebagian besar lumpur tinja ke instalasi pengolahan air limbah Sewon dengan kapasitas sebesar 30 m³/hari dengan jumlah pelayanan 31 tangki/hari. Pada tahun 2024, kapasitas instalasi pengelolaan lumpur tinja Madurejo telah dinaikkan menjadi 100 m³/hari.

5. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman semakin meningkat setiap tahunnya. Jumlah timbulan sampah dari Kabupaten Sleman pada tahun 2023 sebesar 601,80 ton/hari. Pada tahun 2021, jumlah timbulan sampah mencapai 735,57 ton/hari, lebih besar dari tahun



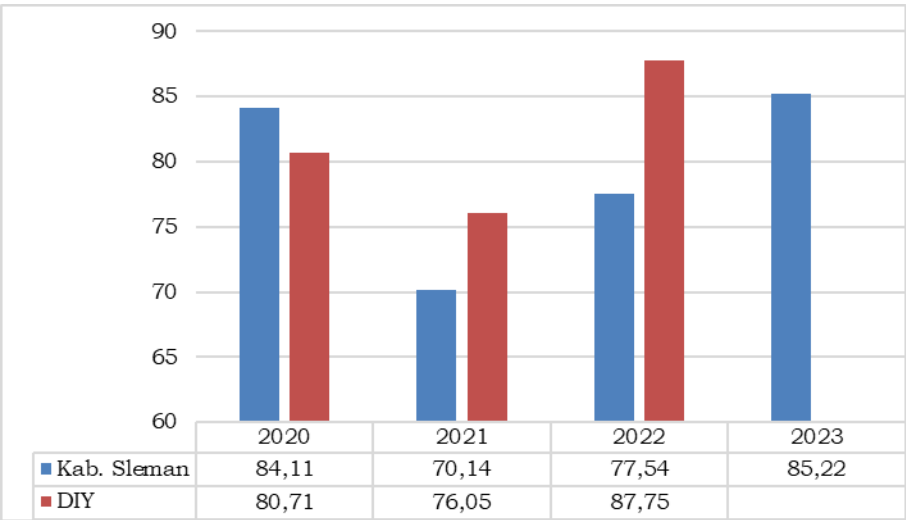
2022 dan 2023. Hal ini karena pada tahun 2021, estimasi timbulan sampah per orang menggunakan 0,65/orang/kg/hari, sedangkan tahun 2022 dan 2023 menggunakan 0,52/orang/kg/hari, dengan asumsi bahwa sejak tahun 2021 telah dilakukan pembatasan timbulan sampah. Pada tahun sebelumnya masih dihitung sebagai jumlah pengurangan sampah, sedangkan tahun berikutnya menjadi pengurang pada besaran estimasi timbulan sampah per orang.

Pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pada tahun 2023, penanganan sampah turun menjadi 43,57%. Hal ini karena adanya penutupan tempat pembuangan akhir Piyungan yang sudah *overload*. Adapun pengurangan sampah mengalami sedikit peningkatan menjadi 8,32%. Capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman ini masih cukup jauh untuk mencapai target 100% pengelolaan sampah pada tahun 2045.

Tabel 2. 39. Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Sleman Tahun 2019-2023

Tahun	Timbulan Sampah (ton/hari)	Penanganan		Pengurangan		Pengelolaan	
		ton/hari	%	ton/hari	%	ton/hari	%
2019	699,12	182,59	26,12	4,41	0,63	187,00	26,75
2020	701,95	234,34	33,38	75,20	10,71	309,54	44,10
2021	735,57	269,69	36,66	121,69	16,54	391,38	53,21
2022	596,73	331,99	55,63	49,23	8,25	381,22	63,89
2023	601,80	262,18	43,57	50,04	8,32	312,22	51,88

Sumber: Bappeda Kabupaten Sleman, 2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, 2021-2024

Grafik 2. 47. Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Sleman dan Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Tahun 2020-2023 (%)

Apabila dilihat dari proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah, Kabupaten Sleman pada tahun 2023, baru mencapai 85,22%, sedangkan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mencapai 87,75% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman masih lebih rendah dibandingkan dengan pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan analisis *environmental health risk assesment* terhadap 86 kalurahan di Kabupaten Sleman, terdapat 15 kalurahan (17,44%) masuk kategori berisiko tinggi dan 71 kalurahan (82,56%) masuk kategori sedang.

Dilihat dari sarana prasarana persampahan, sampai dengan tahun 2023, Kabupaten Sleman mempunyai 17 (tujuh belas) unit transfer depo serta 2 (dua) unit tempat pengolahan sampah terpadu,

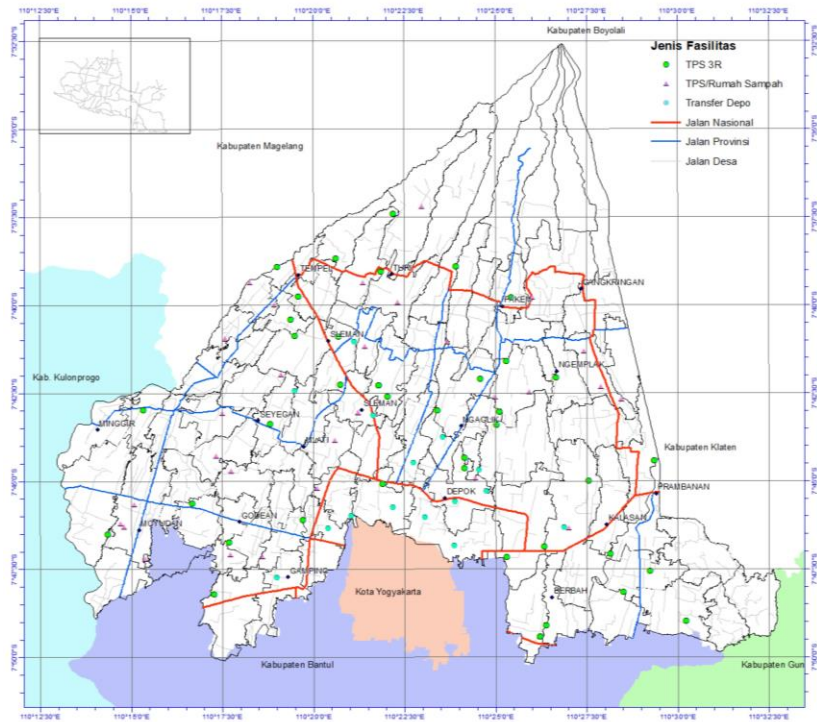


yaitu tempat pengolahan sampah terpadu Tamanmartani dan tempat pengolahan sampah terpadu Minggir, yang merupakan tempat pengolahan sampah terpadu dan menjadi lokasi pemrosesan akhir sampah. Pengelolaan sampah akan berjalan optimal dengan adanya peran serta masyarakat sebagai penghasil sampah melalui pengurangan sampah dan pemilahan sampah dari sumbernya. Pada tahun 2023, terdapat 41 tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce*, dan *recycle* (dengan 37 unit yang berada di wilayah perkotaan dan 4 unit yang berada di wilayah perdesaan), 303 bank sampah (dengan 224 unit berada di wilayah perkotaan dan 79 unit berada di wilayah perdesaan), serta 198 rumah kompos. Selain itu, sektor informal juga ikut mendukung dalam upaya pengurangan sampah, dalam hal ini pelapak. Adapun jumlah pelapak, sebagai sektor informal dalam upaya pengurangan sampah di Kabupaten Sleman berjumlah 25 unit, 22 unit berada di wilayah perkotaan dan 3 unit di wilayah perdesaan.

Tabel 2. 40. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sleman Tahun 2023

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Sampah Masuk	Sampah Terkelola	Residu
		Unit	Ton/Hari	Ton/Hari	Ton/Hari
1	Tempat pengelolaan sampah <i>reuse, reduce</i> , dan <i>recycle</i>	41	7,93	1,20	6,72
2	Bank Sampah	303	2,60	1,74	0,86
3	Pelapak	25	45,33	45,33	0,00
4	Rumah Kompos	198	0,77	0,71	0,06
5	Transfer Depo	17	133,66	62,39	71,27
6	Tempat pengolahan sampah terpadu	2	3,8	3,8	0,00
7	Container	17 Unit Kapasitas Total: 40,5 ton/hari			
8	Tempat Pembuangan Sampah	404 unit Kapasitas Total: 173,90 ton/hari			

Sumber: DLH Kabupaten Sleman, 2023



Sumber: DLH Kabupaten Sleman, 2023

Gambar 2. 19. Peta Sebaran Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce*, dan *Recycle*, Tempat Pembuangan Sampah/Rumah Sampah dan Transfer Depo di Kabupaten Sleman Tahun 2023



Peningkatan jumlah timbulan sampah di Kabupaten Sleman harus diimbangi dengan banyaknya jumlah unit pengelola sampah yang tersebar di seluruh wilayah. Jumlah unit pengelola sampah pada tahun 2023 mampu mengelola sampah sebesar 51,88% dari total timbulan sampah, atau sebesar 312,22 ton, sedangkan sisanya sebanyak 289,58 ton (48,12%) belum terkelola. Pada semester I tahun 2024, sampah yang tertangani di Kabupaten Sleman sebanyak 104,4 ton/hari. Untuk lebih detailnya, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 41. Capaian Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sleman Semester I Tahun 2024 (Ton/Hari)

No	Sarana	Kapasitas
1	Tempat pengolahan sampah terpadu Tamanmartani Kalasan 40 tph dan tempat pengolahan sampah terpadu Sendangsari Minggir 25 tph	65
2	Optimalisasi tempat pengelolaan sampah <i>reuse, reduce, dan recycle</i> Purwo Berhati	5
3	Optimalisasi 2 Transfer Depo – Panasan (7 tph), Kragilan (2 tph)	9
4	TPS Terintegrasi Sinduadi	5
5	Tempat pengelolaan sampah <i>reuse, reduce, dan recycle</i> BUMKal AMARTA Pandowoharjo (1000 pelanggan kartu keluarga)	2,2
6	19 tempat pengelolaan sampah <i>reuse, reduce, dan recycle</i> se-kabupaten Sleman	3
7	Tempat pengelolaan sampah <i>reuse, reduce, dan recycle</i> Ben Resik Gundengan Margorejo	1,5
8	Kalurahan Sumberharjo (Maggot)	1
9	Padukuhan Gondang, Sardonoarjo (Pengurangan Organik)	1
10	Padukuhan Nyamplung Balecatur (Maggot)	1
11	Tempat pengolahan sampah terpadu PIAT UGM (Sampah Daun/Organik)	3,7
12	Tempat Pembuangan Sampah Bakti BUMI Indonesia Turi	7
	TOTAL	104,4

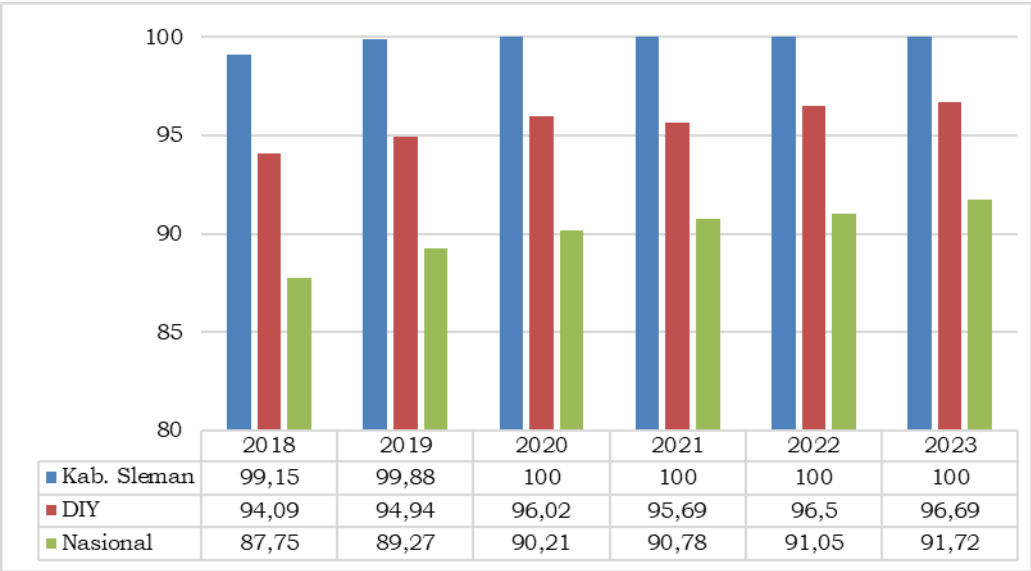
Sumber: DLH Kabupaten Sleman, 2024

Untuk mencapai target pengelolaan sampah 100%, Pemerintah Kabupaten Sleman merencanakan pengembangan pengelolaan sampah dengan membangun sarana dan prasarana pengolahan sampah sampai tahun 2045 yaitu 4 tempat pengolahan sampah terpadu dengan kapasitas total 320-400 ton/hari, 86 tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, dan recycle* dengan program satu kalurahan minimal 1 tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, dan recycle*, dan 17 transfer depo umum.

6. Akses air minum

Sejak tahun 2020, capaian penduduk di Kabupaten Sleman terhubung dengan akses air minum telah mencapai 100%. Air bersih dapat berasal dari perusahaan daerah air minum/sistem penyediaan air minum perdesaan, mata air, sumur, air hujan dan akses lainnya.

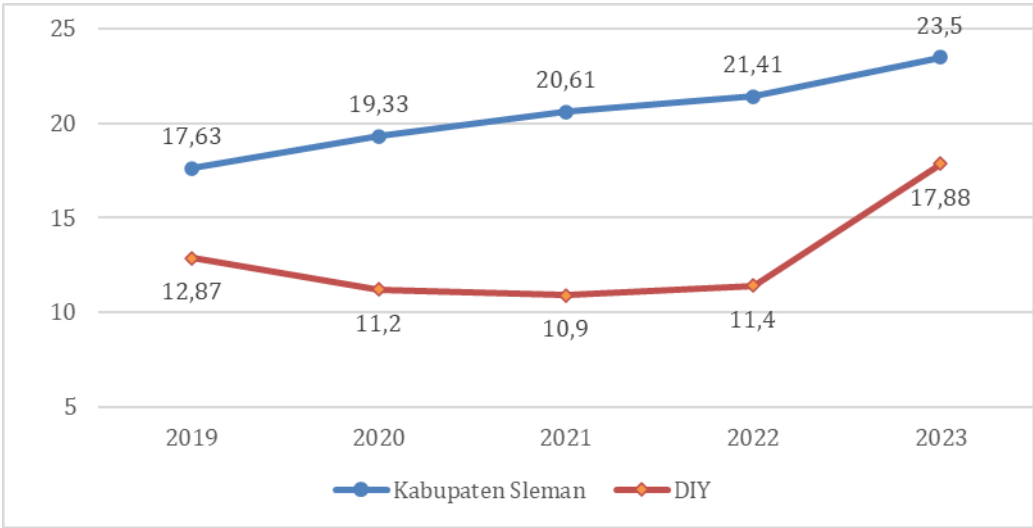
Capaian air minum di Kabupaten Sleman pada tahun 2023 untuk sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan telah melayani 90.489 SR (23,50%) dan sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan telah melayani 294.533 kartu keluarga (76,50%). Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perusahaan daerah air minum sebanyak 50.009 SR (12,99%), sedangkan dengan non-perusahaan daerah air minum atau sistem penyediaan air minum desa sebanyak 40.480 SR (10,51%).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019-2024

Grafik 2. 48. Akses Air Minum Layak di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2023 (%)

Persentase capaian air minum perpipaan Kabupaten Sleman ini lebih tinggi dibandingkan tingkat pelayanan di Daerah Istimewa Yogyakarta (12,19%), meskipun masih di bawah target *sustainable development goals* pada tahun 2030, yang sebesar 30,45%. Hal ini disebabkan oleh permukiman di Kabupaten Sleman tersebar dan terletak berjauhan, serta belum memiliki efisiensi dalam penyediaannya.



Sumber: DPUPKP Kabupaten Sleman Tahun 2019-2023

Grafik 2. 49. Cakupan Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Perpipaan di Kabupaten Sleman dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2023 (%)

Adapun jika dilihat dari indeks risiko sanitasi (Laporan EHRA Kabupaten Sleman 2023) untuk area berisiko sumber air pada kalurahan di Kabupaten Sleman relatif lebih aman karena hanya 3 kalurahan yang masuk kategori resiko sedang yaitu Sidokarto, Sidorejo, dan Tirtomartani dari 86 kalurahan. Hal ini menunjukkan akses air minum di kalurahan Kabupaten Sleman masih baik berdasarkan faktor sumber air terlindung berisiko tercemar, penggunaan sumber air tidak terlindungi tidak aman, dan mengalami kelangkaan air.

Dilihat dari sarana dan prasarana, pelayanan air bersih di Kabupaten Sleman telah dapat memenuhi kebutuhan air bersih di seluruh wilayah. Jumlah unit produksi air bersih perpipaan sebanyak 17 unit. Sumber air baku untuk suplai air bersih ini berasal dari air permukaan, seperti sungai, dan air non permukaan seperti sumur



dangkal, *deepwell*, sumur bor, bak pelepas tekanan (*reservoir*), mata air, dan lainnya. Jumlah sumber air baku mata air dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 42. Kondisi Sumber Air Baku Mata Air di Kabupaten Sleman Tahun 2019-2023

Sumber Air Baku	2019	2020	2021	2022	2023
Mata air (unit)	205	205	373	373	373
- Kondisi mata air baik	NA	NA	185	192	197
- Kondisi mata air sedang	NA	NA	148	142	144
- Kondisi mata air buruk	NA	NA	40	38	32

Sumber: DPUPKP Kabupaten Sleman, 2020-2024

Adapun sumber air baku dari sungai masih mengandalkan air dari Sungai Opak dengan debit berkisar antara 65,69-45,24 m³/detik. Sungai lainnya yang berpotensi sebagai sumber air baku (dengan acuan konsistensi debit air yang memadai atau lebih dari 20 m³/detik), yaitu Sungai Krasak, Sungai Boyong dan Sungai Kuning. Berdasarkan hal tersebut, sumber air baku di Kabupaten Sleman untuk meningkatkan ketersediaan air minum perpipaan, masih tersedia, baik berupa mata air maupun air sungai.

Selain unit produksi, juga terdapat sarana dua reservoir untuk menampung dan mengalirkan air bersih dari unit produksi, yaitu reservoir Kronggahan dan Guwo. Adapun total produksi air bersih melalui perpipaan di Kabupaten Sleman pada tahun 2023 sebesar 680 liter/detik, meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 580 liter/detik. Peningkatan produksi air baku ini karena telah beroperasinya sistem penyediaan air minum Regional Kartamantul yang menggunakan air baku dari Sungai Progo, yang melayani Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

Tabel 2. 43. Kapasitas Air Baku di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2018-2023 (liter/detik)

Tingkat	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Sleman	-	350	-	-	580	680
Daerah Istimewa Yogyakarta	400	800	820	880	900	920
Nasional	76.360	82.140	86.240	95.240	107.240	122.140

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Kapasitas sistem penyediaan air minum Regional Kartamantul berdasarkan perencanaan sekitar 700 liter/detik, sedangkan kapasitas operasi saat ini baru sekitar 400 liter/detik atau 57,14%. Kabupaten Sleman mendapatkan pasokan air bersih curah dari sistem penyediaan air minum Regional Kartamantul sebesar 150 liter/detik melalui reservoir Kronggahan (97 liter/detik) dan reservoir regional Guwo (53 liter/detik). Reservoir Kronggahan melayani sebagian Kapanewon Sleman, Depok, dan Ngaglik. Adapun reservoir regional Guwo melayani Kapanewon Godean dan Minggir. Dari alokasi 150 liter/detik, sampai dengan tahun 2023, perusahaan daerah air minum Sleman baru menyerap 67 liter/detik.

2.3.4.Daya Saing dan Iklim Investasi

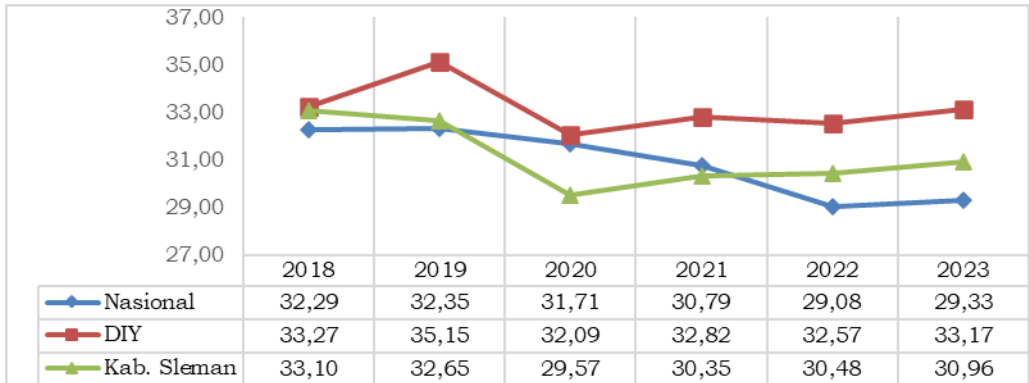
A. Gambaran Investasi Daerah

Indikator yang dapat digunakan untuk menilai pertumbuhan investasi adalah pembentukan modal tetap bruto dan nilai investasi.



1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto merupakan pengeluaran masyarakat untuk investasi, baik formal maupun informal. Pembentukan modal tetap bruto merupakan pembentuk produk domestik regional bruto dari sisi pengeluaran. Pembentukan modal tetap bruto merupakan cerminan kesediaan masyarakat untuk melakukan investasi.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2019-2024

Grafik 2. 50. Penanaman Modal Tetap Bruto Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2018-2023 (%)

Dari grafik di atas, bahwa proporsi pembentukan modal tetap bruto di Kabupaten Sleman pada tahun 2018 sebesar 33,10% dan pada tahun 2019 menurun menjadi 32,65%. Pada tahun 2020 turun lagi hingga mencapai 29,57%. Hal ini karena adanya *refocusing* anggaran dari pemerintah akibat pandemi Covid-19, sehingga banyak proyek konstruksi bangunan yang terhenti. Dan pada tahun selanjutnya mulai meningkat yang menunjukkan perekonomian mulai membaik.

2. Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing

Investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing merupakan investasi formal, atau investasi yang berizin. Dua jenis investasi ini sangat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah, baik dalam hal menghasilkan nilai tambah, maupun penyerapan tenaga kerja, dan menghasilkan *multiplier effect* yang luas. Investor mengincar wilayah yang memiliki daya saing tinggi, seperti kelembagaan, sosial politik, tenaga kerja dan infrastruktur wilayah.

Tabel 2. 44. Nilai Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri di Kabupaten Sleman Tahun 2014-2023

No	Tahun	Penanaman Modal Asing (Ribu USD)		Penanaman Modal Dalam Negeri (Juta Rp)	
		Nilai Penanaman Modal Asing	Pertumbuhan	Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri	Pertumbuhan
1	2014	231.963,75		1.945.866,87	
2	2015	233.546,00	1.582,24	3.159.444,38	1.213.577,51
3	2016	233.587,77	41,78	3.370.880,92	211.436,54
4	2017	235.340,00	1.752,23	3.893.330,00	522.449,08
5	2018	193.830,92	-41.509,08	5.584.259,95	1.690.929,95
6	2019	209.380,60	15.549,68	6.475.060,00	890.800,05
7	2020	214.463,80	5.083,20	7.034.606,00	559.546,00
8	2021	224.937,20	10.473,40	8.802.775,00	1.768.169,00
9	2022	242.632,20	17.695,00	9.895.541,00	1.092.766,00



No	Tahun	Penanaman Modal Asing (Ribu USD)		Penanaman Modal Dalam Negeri (Juta Rp)	
		Nilai Penanaman Modal Asing	Pertumbuhan	Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri	Pertumbuhan
10	2023	258.533,00	15.900,80	13.308.196,46	3.412.655,46

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Sleman, 2024

Penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Sleman terus mengalami peningkatan. Hal ini menggambarkan besarnya ketertarikan investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sleman. Sementara untuk penanaman modal asing, meskipun animonya ada, namun tidak setinggi animo penanaman modal dalam negeri. pada tahun 2018, nilai penanaman modal asing negatif dikarenakan tutupnya salah satu perusahaan besar di Kabupaten Sleman yaitu PT GE Lighting.

B. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks daya saing daerah digunakan untuk mengukur besarnya kapasitas wilayah tersebut dalam menciptakan nilai tambah, sehingga menjadi patokan investor dalam menentukan investasi. Skor ini menjelaskan posisi relatif suatu daerah terhadap daerah lainnya. Wilayah yang memiliki daya saing tinggi berpotensi mendapat banyak investor dari pada yang kurang memiliki daya saing. Oleh karena itu, indeks daya saing daerah menjadi salah satu indikator kemajuan wilayah. indeks daya saing daerah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nasional tahun 2023 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 45. Profil Daya Saing Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2023

Tingkat	Lingkungan pendukung				SDM		Pasar				Ekosistem Inovasi		Skor Indeks Daya Saing Daerah
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Nasional	4,30	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44
Daerah Istimewa Yogyakarta	4,81	2,48	4,46	3,38	4,18	4,42	3,04	4,02	2,61	4,25	4,00	4,48	3,84
Kabupaten Sleman	4,72	2,51	4,90	3,49	4,23	4,54	4,59	3,69	2,78	4,69	3,02	4,84	4,00

Keterangan :

Pilar 1 : Institusi

Pilar 2 : Infrastruktur

Pilar 3 : Adopsi TIK

Pilar 4 : Stabilitas Ekonomi Makro

Pilar 5 : Kesehatan

Pilar 6 : Keterampilan

Pilar 7 : Pasar Produk

Pilar 8 : Pasar Tenaga Kerja

Pilar 9 : Sistem Keuangan

Pilar 10 : Ukuran Pasar

Pilar 11 : Dinamisme Bisnis

Pilar 12 : Kapabilitas Inovasi

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

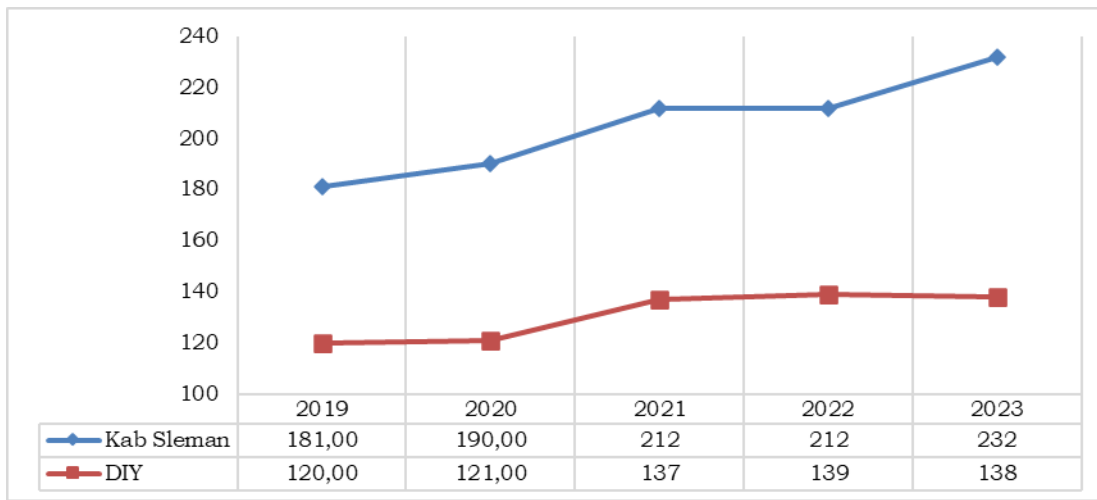
Berdasarkan tabel di atas, skor indeks daya saing daerah Kabupaten Sleman lebih tinggi dibanding indeks daya saing Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional. Dilihat dari komposit penilaian, Kabupaten Sleman tertinggal dari Daerah Istimewa Yogyakarta pada pilar 1, 8 dan 11 yakni terkait institusi, pasar tenaga kerja dan dinamisme bisnis. Pilar infrastruktur Kabupaten Sleman dan Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum cenderung lebih rendah dibanding Nasional.

C. Derajat Keamanan

Keamanan merupakan variabel penting yang dipertimbangkan oleh investor untuk menempatkan modalnya. Oleh karena itu, derajat keamanan suatu wilayah menjadi indikator penting dalam menarik investor untuk mau menempatkan modal di suatu wilayah. Selain itu, kondisi aman dan stabil menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan perkembangan sosial. Kondusivitas atau keamanan suatu daerah menjadi modal utama dalam meningkatkan daya saing daerah. Tingkat kondusivitas daerah dapat dilihat dari angka kejahatan per

100.000 penduduk (*crime rate*) suatu daerah. Semakin besar angka kejahatan menunjukkan semakin banyaknya kejahatan yang terjadi, sekaligus merupakan salah satu indikasi semakin tidak amannya suatu wilayah.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, angka kejahatan di Kabupaten Sleman pada 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat dan selalu lebih besar dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan tiga tahun terakhir tertinggi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.



Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020-2024

Grafik 2. 51. Angka Kejahatan Per 100.000 Penduduk (*Crime Rate*) Kabupaten Sleman Tahun 2019-2023

Kabupaten Sleman merupakan wilayah urban yang memiliki masyarakat multikultur, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan banyak perguruan tinggi. Oleh karena itu, Kabupaten Sleman rawan terjadi gesekan kepentingan, tindak pidana kriminalitas dan potensi konflik, terlebih di beberapa polsek wilayah urban seperti Depok, Mlati, Ngemplak, Gamping, Ngaglik, dan Kalasan, jumlah tindak pidana cenderung lebih tinggi dari wilayah kapanewon yang lainnya. Wilayah urban tersebut memiliki beberapa perguruan tinggi, pusat perbelanjaan, perkantoran, perumahan, fasilitas pendidikan hingga area komersial yang memiliki potensi kerawanan kriminalitas. Jumlah tindak pidana dan penyelesaian per wilayah kepolisian di Kabupaten Sleman ditunjukkan pada tabel berikut.



**Tabel 2. 46. Data Jumlah Tindak Pidana dan Penyelesaian Per Wilayah Kepolisian di Kabupaten Sleman
Tahun 2016-2023 (Kasus)**

No	Wilayah Kepolisian	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
1	Resor Sleman	831	243	646	218	656	304	596	418	507	314	475	256	610	445	713	272
2	Sektor Depok Barat	73	43	98	64	82	58	100	41	104	50	78	61	110	81	46	31
3	Sektor Depok Timur	87	63	54	33	93	49	67	37	53	41	54	37	96	76	90	55
4	Sektor Bulak Sumur	92	65	46	25	50	33	52	23	22	16	39	21	30	27	37	24
5	Sektor Mlati	178	176	71	118	95	80	51	70	149	121	152	116	119	98	37	53
6	Sektor Tempel	31	14	47	27	51	18	32	17	46	21	15	11	18	15	16	7
7	Sektor Sleman	56	20	47	43	78	38	62	44	58	46	56	30	54	30	23	9
8	Sektor Seyegan	26	9	36	9	48	14	36	11	23	13	15	12	24	22	23	15
9	Sektor Ngaglik	134	59	103	72	137	72	78	41	83	34	106	55	134	105	45	51
10	Sektor Turi	43	16	25	13	23	15	23	12	12	10	15	11	24	16	18	14
11	Sektor Pakem	49	15	35	17	61	23	74	38	47	21	45	21	62	33	38	20
12	Sektor Kalasan	102	40	108	42	69	34	36	17	43	31	51	28	74	27	29	22
13	Sektor Prambanan	35	9	45	22	28	17	37	11	23	12	8	9	24	14	33	14
14	Sektor Berbah	100	19	57	34	76	23	44	21	27	12	55	30	60	30	32	18
15	Sektor Ngemplak	54	21	76	31	86	48	65	25	61	40	45	31	91	57	46	31
16	Sektor Cangkringan	56	10	32	8	27	13	29	11	16	12	19	13	18	12	18	8
17	Sektor Godean	56	37	76	34	123	69	106	33	68	48	68	61	73	60	39	29
18	Sektor Gamping	125	61	133	69	113	63	45	27	42	27	46	30	45	22	34	23
19	Sektor Moyudan	20	10	21	14	26	13	25	14	22	14	22	21	30	25	19	16
20	Sektor Minggir	19	7	19	14	17	13	17	9	18	9	10	4	34	28	14	10

Keterangan:

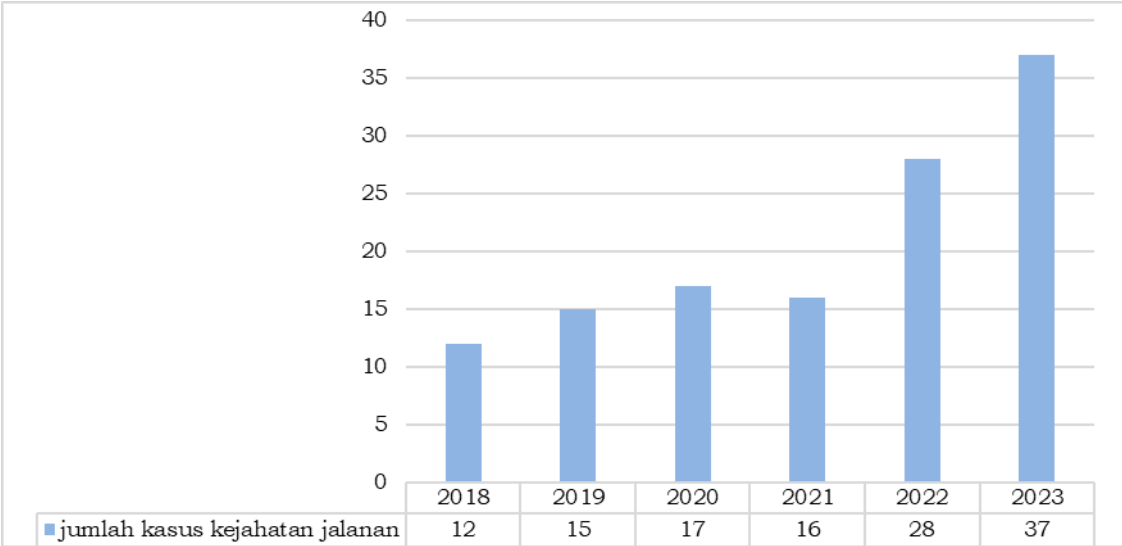
L : Jumlah tindak pidana yang dilaporkan (kasus)

S : Jumlah tindak pidana yang diselesaikan (kasus)

Sumber: Kepolisian Resor Sleman, 2024



Kasus kejahatan jalanan yang cenderung meningkat menjadi salah satu penyebab angka kejahatan di Kabupaten Sleman meningkat, bahkan meningkat tajam pasca pandemi Covid-19. Faktor ekonomi menjadi alasan utama meningkatnya angka kejahatan jalanan ini.



Sumber: Kepolisian Resor Sleman, 2023

Grafik 2. 52. Data Kasus Kejahatan Jalanan di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2023

Pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Bupati juga sering terjadi di Kabupaten Sleman. Pelanggaran ini didominasi oleh pelanggaran perizinan tempat usaha, pertambangan pasir ilegal, prostitusi berkedok salon dan spa, reklame ilegal, pemondokan tidak berizin serta penjualan minuman keras tidak berizin. Hal ini akan memicu adanya tindak kriminalitas di Kabupaten Sleman. Keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sleman yang belum kondusif akan berdampak pada iklim investasi dan iklim usaha di masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk mengurangi angka kriminalitas dan kejahatan jalanan yaitu:

- 1) Mengefektifkan patroli wilayah (patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat) sehari 3 (tiga) sif selama 12 bulan atau 1.095 kali, terutama pada jam-jam rawan terjadinya kejahatan jalanan dan di wilayah yang rawan terjadi kriminalitas;
- 2) Melakukan operasi penanganan kerawanan, khususnya di daerah rawan terjadi kejahatan jalanan dan mengantisipasi adanya kejahatan jalanan
- 3) Melakukan operasi vandalisme/antisipasi tawuran pelajar, terutama pada jam sekolah atau di tempat berkumpulnya pelajar, baik secara mandiri atau bekerja sama dengan Dinas Pendidikan; serta
- 4) Memberikan edukasi tentang keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum (kantrantibum) dan pengeledahan tas untuk antisipasi tawuran antar siswa dan kejahatan jalanan.

Upaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, perlu dilakukan secara preventif maupun kuratif terhadap kejadian kriminalitas. Kenakalan remaja merupakan salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas di Kabupaten Sleman. Karena itu, selain mendorong upaya peningkatan kualitas pendidikan akademis dan non-akademis melalui lembaga pendidikan, Pemerintah Kabupaten Sleman juga berupaya menekan angka kriminalitas melalui program-program yang dapat meningkatkan keharmonisan mulai dari lingkungan keluarga. Hal ini terkait dengan peran pentingnya pendidikan anak mulai dari lingkungan keluarga sendiri sampai ke masyarakat.



Selain itu, perlu dilakukan peningkatan fungsi perlindungan masyarakat (linmas) di tingkat kalurahan, tidak hanya untuk kegiatan sosial, namun juga untuk kegiatan yang bersifat trantibum. Bersama dengan kalurahan membangun pos keamanan lingkungan (poskamling) membentuk regu keamanan lingkungan. Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan institusi vertikal, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, TNI, BPOM, dan lainnya melakukan upaya penertiban dan sosialisasi terkait berbagai peraturan daerah dan peraturan bupati agar tidak terjadi pelanggaran yang mengganggu keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sleman.

D. Total Kredit Terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Kondisi perekonomian dipengaruhi oleh tingkat konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi, dan net ekspor. Salah satu faktor yang mendorong perkembangan konsumsi adalah kredit. Penyaluran kredit ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa. Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka ada peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Nilai kredit dan rasio kredit di Kabupaten Sleman tahun 2018 hingga tahun 2023 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 47. Total Kredit Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sleman Tahun 2018 - 2023

No	Tahun	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Rp Miliar)	Kredit (Rp Miliar)	Rasio (%)
1	2018	43.779	15.691	35,84
2	2019	47.468	17.453	36,77
3	2020	45.655	17.592	38,53
4	2021	49.403	18.331	37,11
5	2022	54.702	20.380	37,26
6	2023	59.431	22.086	37,16

Sumber: Bank Indonesia, 2024; Badan Pusat Statistik, 2024; diolah, 2024

Dari tabel di atas, rasio kredit bank terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten Sleman mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018, total kredit terhadap produk domestik regional bruto hanya sebesar 35,84% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 37,16%.

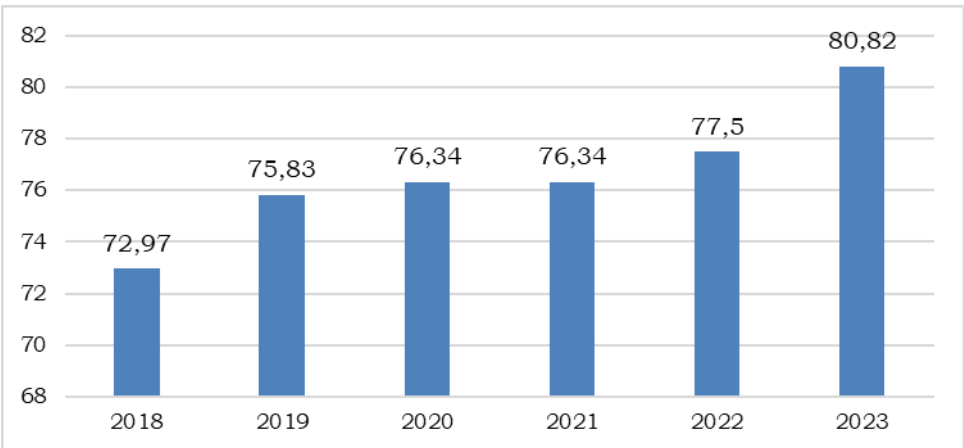
2.4. Aspek Pelayanan Umum

A. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai evaluasi pelaksanaan tata kelola pemerintahan di instansi pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Nilai indeks reformasi birokrasi Kabupaten Sleman tahun 2023 atas pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2022 adalah 80,82 dengan kategori “A”. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan. Hasil evaluasi ini tidak dapat diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria



penilaian, serta penilaian lebih ditekankan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif.



Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2019-2024

Grafik 2. 53. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sleman Tahun 2018-2023

Beberapa faktor pengungkit naiknya nilai reformasi birokrasi dari komponen reformasi birokrasi general, antara lain capaian indikator kinerja makro, opini Badan Pemeriksa Keuangan yang sudah meraih wajar tanpa pengecualian selama 13 tahun, dan tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan. Ketiga variabel tersebut telah memenuhi nilai maksimal menjadi kontributor tertinggi dalam penilaian reformasi birokrasi. Variabel lain yang masih perlu ditingkatkan adalah nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kualitas kebijakan, capaian indikator kinerja non makro, implementasi rencana aksi pembangunan reformasi birokrasi general, pengendalian internal pemerintah, penilaian integritas dan kualitas pelayanan publik. Beberapa variabel yang perlu ditingkatkan pada komponen reformasi birokrasi tematik, terutama terkait capaian dampak pembangunan yaitu pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi dan digitalisasi administrasi pemerintah fokus penanganan *stunting*. Sementara penggunaan produk dalam negeri mendapatkan nilai maksimal dan menjadi kontributor tertinggi dalam pencapaian reformasi birokrasi tematik.

B. Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik berbentuk barang publik maupun jasa publik, yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari capaian indeks pelayanan publik. Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa indeks pelayanan publik di Kabupaten Sleman menurun, dari 4,6 pada tahun 2022 menjadi 4,54 pada tahun 2023. Pada tahun 2023, Kabupaten Sleman menghitung kembali indeks pelayanan publik dengan ruang lingkup unit kerja yang lebih luas, hasilnya menunjukkan lebih rendah, berada pada angka 2,44 dengan predikat cukup. Kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sleman masih belum optimal.

Hal ini disebabkan karena profesionalitas sumber daya manusia masih belum optimal dikarenakan budaya pelayanan instansi, *core value* aparatur sipil negara berAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif), kode etik, dan kode



perilaku pelaksana belum terinternalisasi pada unit pelayanan publik, belum semua unit pelayanan publik menerapkan sistem informasi pelayanan publik, inovasi pelayanan publik belum seluruhnya terdokumentasi dalam keputusan bupati dan kurangnya inklusivitas sarana prasarana pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat kelompok rentan.



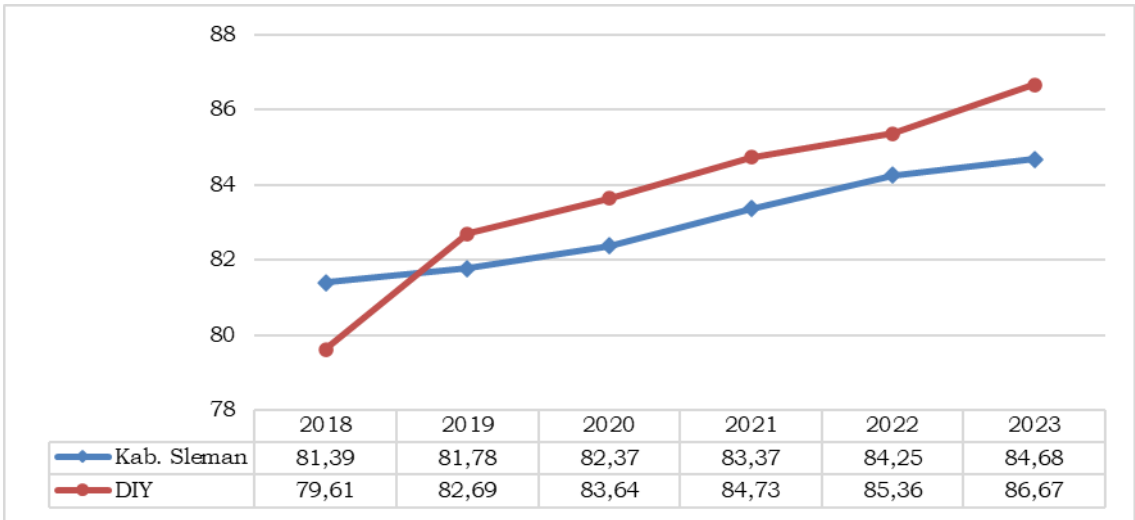
Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2024

Grafik 2. 54. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sleman Tahun 2022-2023

Kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sleman juga dapat ditunjukkan dengan hasil survei kepuasan masyarakat yang berupa indeks kepuasan masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Sleman menunjukkan tren yang positif walaupun peningkatannya tidak signifikan. Pada tahun 2023, indeks kepuasan masyarakat mencapai angka 84,68, lebih tinggi dari tahun sebelumnya, meskipun angka ini masih lebih rendah daripada Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi ini menegaskan kembali bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sleman belum optimal.

Dilihat dari kondisi layanan publik, ada beberapa faktor yang menyebabkan pelayanan publik kurang optimal yaitu pengelolaan LAPOR Sleman sebagai wadah pengaduan masyarakat terhadap layanan publik belum optimal; belum semua unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman menerapkan sistem informasi pelayanan publik; sebagian besar unit pelayanan publik belum menginternalisasi dan mempublikasikan secara elektronik dan non elektronik *core value* aparatur sipil negara berAKHLAK, kode etik, kode perilaku pelaksana dan budaya pelayanan instansi; sarana dan prasarana yang inklusif terkait dengan standar kelayakan masih perlu ditingkatkan; serta kualitas pelayanan publik di tingkat kapanewon sebagai garda depan pelayanan terhadap masyarakat belum optimal karena keterbatasan kompetensi sumber daya manusia pelayanan.





Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Sleman, 2019-2024

Grafik 2. 55. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sleman Tahun 2018-2023



C. Indeks Inovasi Daerah

Inovasi menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan suatu daerah, termasuk Kabupaten Sleman. Namun saat ini, inovasi masih banyak ditempatkan sebagai ilmu pengetahuan dan bukan sebagai suatu budaya yang terinternalisasi dalam kinerja organisasi maupun individu. Ekosistem inovasi sangat perlu untuk ditumbuhkembangkan agar inovasi benar-benar menjadi suatu kebutuhan dalam upaya pemecahan persoalan serta tantangan yang terjadi. Inovasi sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih efektif, tangkas dan adaptif.

Perkembangan inovasi suatu daerah dapat dilihat dari nilai indeks inovasi daerah. Indeks inovasi daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, ada 3 (tiga) bentuk inovasi daerah yang dinilai dalam indeks inovasi daerah yaitu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Skor indeks inovasi daerah Kabupaten Sleman tahun 2023 adalah 57,23 dengan predikat “Inovatif” dan menempati peringkat 54 untuk kluster kabupaten dari 415 kabupaten yang ada di Indonesia. Hasil ini menurun apabila dibandingkan tahun 2022 yang mencapai angka 58,31 dengan peringkat 37. Upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menciptakan ekosistem inovasi adalah pembinaan inovasi untuk mewujudkan budaya inovasi dan pemberian penghargaan inisiatif inovasi daerah. Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Sleman atas kreativitas dan inovasinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Penghargaan ini juga merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan kepada inventor atas inovasi yang telah dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan dorongan semangat kepada perangkat daerah agar terus berinovasi serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik di masa yang akan datang.

Tabel 2. 48. Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2023

Parameter	2020	2021	2022	2023
Peringkat Nasional	40	65	37	54
Skor IID	35,93	53,42	58,31	57,23
Kategori	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif

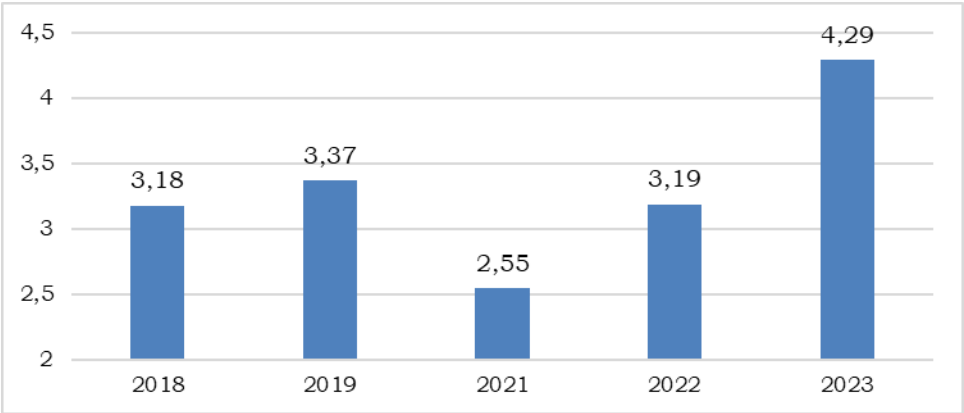
Sumber: Bappeda Kabupaten Sleman, 2024

D. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dapat dilihat dari capaian nilai sistem pemerintahan berbasis elektronik. secara umum capaian nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik Kabupaten Sleman dari tahun 2021-2023 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hasil capaian sistem pemerintahan berbasis elektronik Kabupaten Sleman tahun 2021-2023 tidak dapat diperbandingkan dengan nilai sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2018-2019 karena adanya perbedaan substansi aspek dan jumlah indikator pengukuran indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, pada tahun 2018-2019 pengukuran dilakukan pada 7 aspek dengan 37 indikator dan pada tahun 2021-2023 pengukuran dilakukan pada 8 aspek dengan 47 indikator.



Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Kabupaten Sleman mendapatkan nilai Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik 4,29 dengan predikat memuaskan, dan tertinggi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

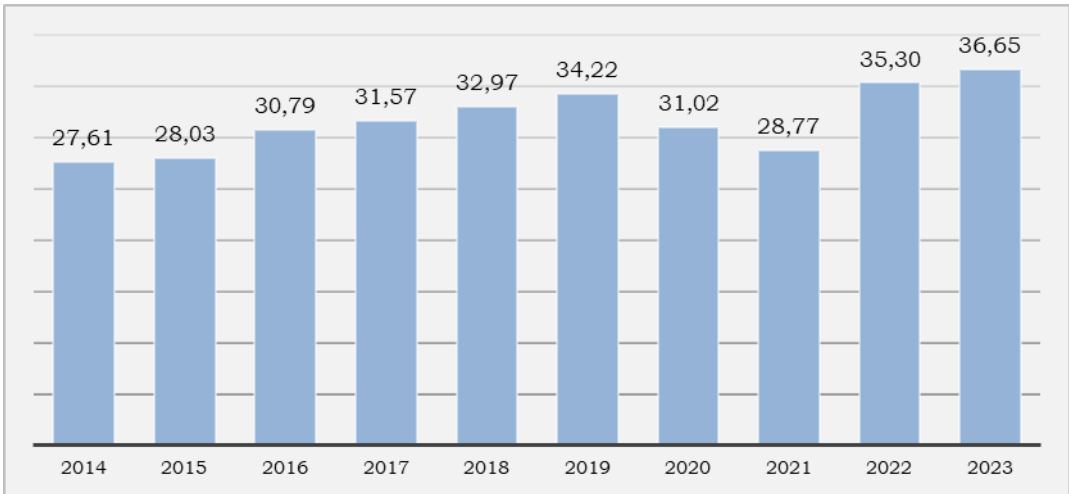


Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2019-2024

Grafik 2. 56. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sleman Tahun 2018-2023

E. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sleman dapat digambarkan melalui rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan rasio ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal terutama pemerintah pusat dan provinsi. Semakin tinggi tingkat kemandirian daerah menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah tingkat kemandirian keuangan suatu daerah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin tinggi.



Sumber: Bappeda Kabupaten Sleman, 2024

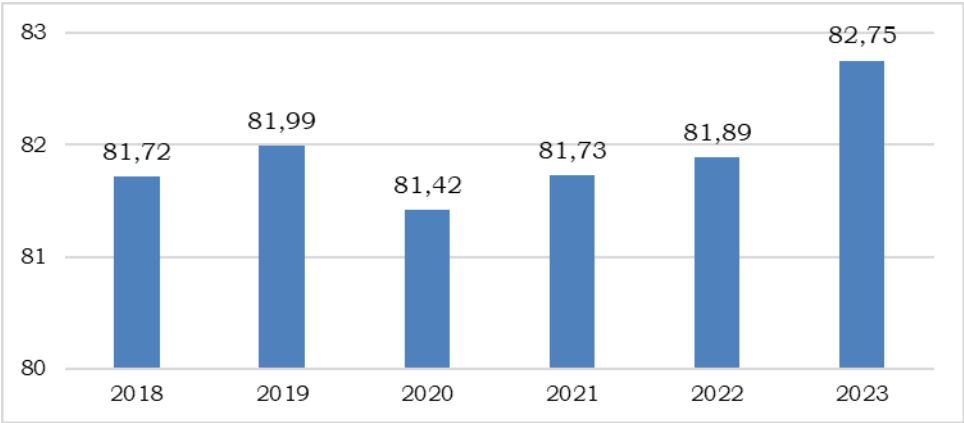
Grafik 2. 57. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014-2023 (%)

Perkembangan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir sangat fluktuatif dan termasuk kategori rendah. Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya upaya rasionalisasi retribusi daerah dengan menciptakan klasifikasi dan basis perpajakan yang diperbarui, intensifikasi pajak dan retribusi daerah belum optimal terutama dalam ekstensifikasi wajib pajak dan retribusi, adanya deviasi karena belum optimalnya pengintegrasian antara penganggaran program kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah dan pengelolaan aset daerah, termasuk aset kalurahan.



F. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas hasil evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi ini meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* dan *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.



Sumber: Bappeda Kabupaten Sleman, 2024

Grafik 2. 58. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2018-2023

Berdasarkan data di atas, nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sleman empat tahun terakhir menunjukkan tren yang positif dan masuk pada predikat “A”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “memuaskan”, yaitu instansi pemerintah dan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, meskipun masih ada beberapa catatan yang perlu ditingkatkan, baik pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Struktur organisasi yang masih terfragmentasi menyebabkan pohon kinerja yang disusun masih dibatasi oleh kewenangan/struktur yang ada, sehingga belum adaptif berdasarkan *critical success* dan *logical framework* yang lebih komprehensif. Dari segi pengukuran kinerja, penyusunan indikator kinerja pada level perangkat daerah belum sepenuhnya dilengkapi definisi operasional, formulasi perhitungan dan sumber data. Dari segi pelaporan kinerja, analisis terhadap kinerja pemerintah daerah masih perlu dielaborasi lebih dalam terhadap faktor penghambat dan pendukung keberhasilan kinerja pembangunan daerah serta *refocusing* program/ kegiatan.

Di sisi lain, hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah atas laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Sleman tahun 2022 mendapatkan skor 2,69 dengan status kinerja sedang. Skor ini diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro dan capaian indikator kinerja kunci baik indikator kinerja kunci *outcome* maupun *output*. Komponen penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang masih perlu ditingkatkan adalah evaluasi akuntabilitas kinerja dengan meningkatkan kualitas evaluasi internal dan tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sehingga hasil evaluasi dapat menjadi acuan untuk perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

G. Indeks Desa Membangun



Indeks desa membangun adalah indeks komposit yang di bentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa. Indeks ketahanan sosial terdiri dari aspek sosial termasuk kesehatan, pendidikan, modal sosial dan pelayanan dasar. Aspek ini mencerminkan bagaimana penduduk desa mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Indeks ketahanan ekonomi dinilai dari aspek ekonomi desa seperti pendapatan, pekerjaan, produktivitas dan akses terhadap pasar. Indeks ini menunjukkan kemampuan desa dalam mengembangkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja bagi warganya. Indeks ketahanan ekologi dinilai dari aspek lingkungan desa yang meliputi pengelolaan sumber daya alam, kualitas lingkungan hidup dan mitigasi risiko bencana. Aspek ini menggambarkan sejauh mana desa mampu menjaga kelestarian lingkungan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

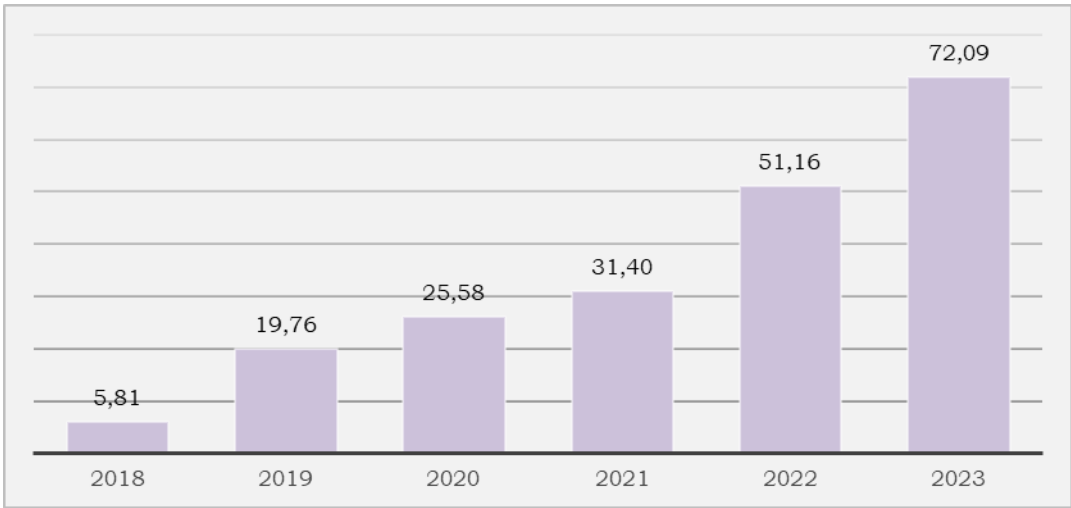
Ada lima status indeks desa membangun yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Kategori Desa Mandiri merupakan kategori tertinggi dalam indeks desa membangun. Desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Status indeks desa membangun di Kabupaten Sleman disajikan pada tabel yang ada di bawah ini.

Tabel 2. 49. Status Indeks Desa Membangun di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2023 (Desa)

No	Kategori Desa	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Mandiri	5	17	22	27	44	62
2	Maju	43	48	50	51	40	24
3	Berkembang	38	21	14	8	2	0
4	Tertinggal	0	0	0	0	0	0
5	Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0	0
Jumlah		86	86	86	86	86	86

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman, 2024

Perkembangan status desa tahun 2018-2023 cenderung positif. Pada tahun 2023 terdapat tambahan desa mandiri sejumlah 22 desa, sehingga menjadi 62 desa atau sebesar 72,09%.



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman, 2024

Grafik 2. 59. Persentase Desa Mandiri Kabupaten Sleman Tahun 2018-2023 (%)

Salah satu faktor yang mendorong peningkatan desa mandiri adalah penerapan sistem informasi desa berbasis web yang terstandar di semua



kalurahan di Kabupaten Sleman. Sistem informasi desa telah dilengkapi fitur yang lengkap meliputi profil kalurahan, Pemerintahan Kalurahan, Lembaga Masyarakat Desa, data desa dan fitur informasi pelayanan publik. Fitur informasi pelayanan publik terdiri dari beranda, berita, agenda, produk hukum, perencanaan dan penganggaran, laporan, panduan layanan publik, potensi dan produk usaha. Sistem informasi desa ini juga dilengkapi fitur statistik pengunjung. Sebagian besar kalurahan juga telah memiliki media sosial, seperti *facebook*, *twitter*, *youtube* dan *instagram*. Sistem informasi desa di Kabupaten Sleman tergolong lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat, pemutakhiran informasi secara berkala dan kecepatan (*response time*) dalam menanggapi permohonan layanan maupun pengaduan perlu ditingkatkan.

2.5. Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025

Bagian ini membahas mengenai capaian yang telah dilaksanakan dalam mengupayakan pencapaian target pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025, serta hambatan, faktor pendorong serta rekomendasi yang perlu dilakukan.

A. Capaian Kinerja RPJPD

Visi RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 adalah “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sleman yang sejahtera, demokratis dan berdaya saing”. Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan religius. Demokratis merupakan bentuk keterbukaan ruang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Adapun berdaya saing menunjukkan bahwa masyarakat memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dengan potensi yang ada.

Visi RPJPD ini masih cukup relevan untuk digunakan sebagai visi RPJPD selanjutnya, namun perlu menambahkan isu keberlanjutan lingkungan, pemerataan hasil pembangunan, dan peran teknologi informasi sebagai dasar rumusan visi.

Visi RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi, yaitu:

1) Misi I: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Misi ini digambarkan dengan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan pemerintah daerah. Target rata-rata IKM selama tahun perencanaan RPJPD adalah 85%.

2) Misi II: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Misi ini digambarkan dengan beberapa indikator, yaitu: pendapatan per kapita, yang ditargetkan meningkat dari US\$600 per tahun menjadi US\$2.500 per tahun; indeks gini yang diupayakan tetap pada posisi ketimpangan rendah seperti pada kondisi awal RPJPD (0,15); serta indeks williamson yang pada awal tahun perencanaan pada angka 0,03 diusahakan pada akhir tahun perencanaan tetap pada posisi pemerataan pembangunan yang sangat baik.

3) Misi III: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Misi ini digambarkan dengan indeks pembangunan manusia yang ditargetkan meningkat dari peringkat 30 menjadi peringkat 10 besar nasional.

4) Misi IV: Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis

Kondisi yang ingin diwujudkan pada akhir tahun perencanaan RPJPD pada misi ini tidak digambarkan dengan indikator kuantitatif seperti pada misi-misi sebelumnya. Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ini disesuaikan dengan indikator RPJMD pada masing-masing tahapannya.



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, muatan RPJPD selanjutnya adalah sasaran pokok dan arah kebijakan, yang menjadi acuan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visi misinya pada RPJMD periode lima tahun berkenaan. Namun, RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 belum memuat sasaran pokok dan arah kebijakan per tahapan lima tahunan, hanya memuat arah pembangunan pada setiap bidang/urusan pembangunan.

Meskipun demikian, RPJPD Kabupaten Sleman mempunyai target kinerja, kondisi yang ingin diwujudkan pada akhir periode RPJPD. Indikator tersebut berupa indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah daerah, indeks pembangunan manusia, pendapatan per kapita, indeks gini, serta indeks williamson. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan evaluasi pelaksanaan RPJPD pada akhir tahun perencanaan menggunakan kelima indikator kinerja tersebut dan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJPD (yang diubah menjadi data kuantitatif), serta evaluasi pelaksanaan RPJPD per tahapan dengan menggunakan hasil evaluasi RPJMD, termasuk misi yang tidak memiliki sandingan indikator.

Selain menggunakan indikator yang digunakan dalam RPJPD, berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2020, dalam rangka mengevaluasi RPJPD, data dan informasi terkait indikator makro pembangunan juga disajikan untuk memproyeksikan gambaran kondisi pada akhir tahun perencanaan RPJPD, seperti tercantum dalam tabel di bawah.

Tabel 2. 50. Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Sleman Tahun 2006-2023

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2006)	Capaian Tahun 2023	Pertumbuhan /Penurunan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	76,22	84,31	10,61
2	Angka Kemiskinan (%)	12,70	7,74	-39,06
3	Angka Pengangguran (%)	10,06	4,78	-52,49
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5	5,15	14,44
5	Pendapatan Per kapita (Rp juta)	8,491	47,628	460,92
6	Ketimpangan Pendapatan	0,33	0,418	26,67

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, diolah, 2024

B. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 bukan hanya berasal dari dalam (internal) Pemerintah Kabupaten Sleman, namun juga dari luar (eksternal) pemerintah, baik mitra pembangunan maupun kebijakan pemerintahan yang lebih tinggi.

Nilai indeks kepuasan masyarakat yang menjadi indikator Misi I, capaian pada setiap akhir tahun tahapan RPJPD mengalami peningkatan. Beberapa hal yang mendorong meningkatkan nilai indeks kepuasan masyarakat, sehingga pelayanan publik semakin baik adalah:

- 1) Sarana dan prasarana pelayanan publik semakin baik;
- 2) Informasi pelayanan publik semakin lengkap;
- 3) Budaya pelayanan prima aparat pelayanan publik semakin baik; serta
- 4) Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat, hampir seluruh unsur pelayanan mendapatkan hasil yang baik, kecuali unsur kepastian jadwal pelayanan, kecepatan pelayanan dan prosedur pelayanan



yang mendapatkan nilai yang cukup rendah. Penggunaan teknologi informasi membantu masyarakat lebih mudah, cepat dan akurat dalam mendapatkan layanan, sehingga mampu meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah. Namun, belum optimalnya kepatuhan/implementasi standar pelayanan mengakibatkan berbagai jenis mal administrasi.

Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, beberapa hal rekomendasi usulan tindak lanjut untuk periode berikutnya adalah:

- 1) Menciptakan berbagai inovasi untuk peningkatan pelayanan;
- 2) Meningkatkan kualitas kebijakan;
- 3) Meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara; serta
- 4) Mengoptimalkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pendapatan per kapita sebenarnya tidak dapat secara langsung digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, karena hanya memberikan indikator rata-rata pendapatan suatu wilayah. Terlebih jika ketimpangan pendapatan terjadi, maka rata-rata tersebut hanya semu semata. Faktor pendorong yang meningkatkan nilai pendapatan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat, peningkatan nilai investasi, dan peningkatan penggunaan teknologi. Selain itu, pemerintah harus mengoptimalkan dukungan bagi dunia usaha, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah. Hal lain yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, namun sampai saat ini sulit dipenuhi adalah menaikkan batas upah minimum regional baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Hal ini semakin memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin, memperlebar ketimpangan pendapatan. Masyarakat yang berpenghasilan bawah sulit untuk meningkatkan pendapatannya, sedangkan masyarakat berpenghasilan tinggi semakin besar pendapatannya.

Faktor penyebab ketimpangan pendapatan sangat kompleks. Pertama, ketimpangan dalam distribusi aset. Ketimpangan tersebut tidak hanya dalam hal kepemilikan lahan namun juga dalam sektor produktif seperti sektor pertanian. Berdasarkan data sensus pertanian, kepemilikan lahan petani di Kabupaten Sleman hanya mencapai rata-rata 0,1 Ha per petani. Lahan yang terbatas tentu tidak mencukupi bagi petani untuk memperoleh tingkat pendapatan yang layak. Sulitnya masyarakat asli daerah meningkatkan kepemilikan asetnya juga dipengaruhi oleh sifat '*nrimo ing pandum*' rasa penerimaan yang cukup kuat atas apa pun yang dimiliki saat ini. Selain itu, adanya kemudahan bagi penduduk luar daerah memiliki aset, baik rumah maupun tanah di wilayah Kabupaten Sleman. Kedua, lapangan usaha yang cenderung padat modal dibandingkan padat karya. Pertumbuhan sektor-sektor jasa, seperti telekomunikasi dan jasa keuangan (bank dan lembaga keuangan lainnya) cenderung menyerap sedikit tenaga kerja, padahal nilai pertumbuhan sektor lebih besar dari sektor produksi seperti manufaktur atau pertanian yang menyerap lebih banyak tenaga kerja. Hal ini berimplikasi negatif terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada, sehingga meningkatkan jumlah pengangguran di Kabupaten Sleman. Ketiga, akses yang cukup sulit bagi golongan menengah ke bawah terhadap permodalan atau sekadar kesempatan berusaha dibandingkan dengan banyaknya golongan pengusaha dalam skala besar memperoleh kesempatan permodalan dalam jumlah besar dengan hanya agunan kredibilitas atau nama baik perusahaannya.

Dukungan pemerintah melalui jaminan sosial memberikan napas lanjutan bagi golongan masyarakat tidak mampu, terutama dalam menyediakan ruang dalam memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Salah satu upaya lain dalam menekan ketimpangan juga dilakukan dari sisi



pemerintahan yang berupaya dijalankan lebih efektif, efisien, dan terbuka kepada masyarakat.

Upaya pengurangan ketimpangan pendapatan masyarakat akan lebih berhasil pada saat pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sektor *tradeable* seperti sektor pertanian, perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan mendapatkan dukungan lebih besar, sehingga terjadi peningkatan produktivitas dan kualitas pendapatan dari kelompok menengah ke bawah. Dukungan terhadap sektor *tradeable* tersebut perlu dilakukan secara konsisten serta harus didukung dengan penyiapan serta pemeliharaan sarana prasarana pendukung utama, seperti jaringan irigasi berkelanjutan, penggunaan teknologi tepat guna, intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pertanian, pengembangan teknologi dalam industri pengolahan, perluasan jaringan pemasaran, penguatan jaringan ekspor dan substitusi impor bahan baku, serta peningkatan kapasitas pelaku pada sektor-sektor tersebut, baik melalui pelatihan maupun metode pendampingan berkelanjutan lainnya, dukungan promosi bagi usaha mikro kecil dan menengah untuk naik kelas serta memperluas pasarnya.

Selain itu, strategi untuk meningkatkan pendapatan, namun juga mengurangi ketimpangan pendapatan, antara lain:

- 1) Adanya kebijakan secara bertahap untuk redistribusi kepemilikan aset bagi golongan tidak mampu yang juga dapat digunakan sebagai modal awal untuk berusaha.
- 2) Mendorong pertumbuhan sektor produksi atau padat karya (seperti pertanian dan industri) sehingga mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. Program petani milenial menjadi salah satu praktik baik yang dapat terus didorong dan difasilitasi oleh pemerintah daerah agar para generasi muda tidak hanya menunggu namun juga bisa menciptakan lapangan kerja bagi orang lain, bahkan mungkin dengan standar pengupahan yang lebih layak dibandingkan kondisi sebelumnya.
- 3) Mengupayakan percepatan pemutakhiran dan seleksi terpadu lebih ketat bagi masyarakat miskin, sehingga pada akhirnya dukungan dari pemerintah daerah dalam menumbuhkan tingkat pengeluaran per kapita bagi golongan tidak mampu lebih tepat sasaran dan memberikan efek lebih kuat. Hal ini bisa terjadi mengingat selama ini bantuan atau jaminan sosial sebagian besar justru banyak diterima golongan menengah yang tidak memberikan efek *multiplier* yang baik dalam menekan nilai indeks gini di Kabupaten Sleman.

Ketimpangan antar wilayah juga turut mewarnai dinamika pembangunan di Kabupaten Sleman, terutama antara perkotaan dengan perdesaan. Ketimpangan yang tinggi dapat memunculkan berbagai permasalahan, antara lain kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam. Dampak lainnya adalah peningkatan migrasi dari daerah yang miskin ke daerah yang maju, tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi rendah yang terlihat dalam bentuk kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat yang dapat berdampak pada tindak kriminalitas, konflik antar masyarakat, dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Hal tersebut terjadi karena kegiatan terkonsentrasi pada wilayah suburban/perbatasan dengan perkotaan, investasi tidak merata antar wilayah karena perbedaan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana serta terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang terampil. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan dukungan pengembangan pada sektor atau wilayah yang terpinggirkan. Selama ini, Pemerintah Kabupaten Sleman telah berupaya untuk meningkatkan konektivitas, baik teknologi informasi maupun komunikasi. Program peningkatan dan pemeliharaan jalan juga



menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kemudahan dan aksesibilitas transportasi. Pun demikian dengan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, tentu harus ada keselarasan dan keserasian antara kebijakan pengendalian penduduk, penguatan kualitas penduduk, dan penyebaran mobilitas penduduk serta kebijakan dalam pengembangan investasi dan penguatan produktivitas lahan.

Target indeks pembangunan manusia pada akhir tahun perencanaan RPJPD berada pada peringkat 10 besar. Pada tahun 2023, indeks pembangunan manusia Kabupaten Sleman sebesar 84,86, dan berada pada peringkat keenam. Posisi ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 yang menempati peringkat kelima. Faktor-faktor yang mendorong tercapainya indeks pembangunan manusia adalah:

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi;
- 2) Layanan kesehatan dan pendidikan relatif merata dan terjangkau, dengan sumber daya manusia bidang kesehatan maupun pendidikan semakin banyak, serta fasilitas sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan yang sangat representatif dan cukup secara kualitas dan kuantitas, termasuk program bidang pendidikan dan kesehatan banyak diluncurkan oleh pemerintah;
- 3) Konsistensi pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui sarana kesehatan dasar secara berjenjang dan perbaikan layanan jaminan kesehatan;
- 4) Partisipasi pihak swasta yang cukup tinggi dalam penyediaan sarana dan prasarana serta layanan di bidang pendidikan dan kesehatan; serta
- 5) Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga daya beli masyarakat juga meningkat.

Hal-hal yang berpotensi menghambat pencapaian peningkatan indeks pembangunan manusia adalah penerapan pola hidup bersih dan sehat yang mempengaruhi derajat tingkat kesehatan belum sepenuhnya dilakukan semua masyarakat, masih adanya anak putus sekolah dan tidak sekolah, serta rendahnya kontribusi pendapatan perempuan dalam keluarga.

Terkait Misi IV Meningkatkan Kehidupan Bermasyarakat yang Demokratis, pemerintah harus mulai berbenah diri untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan pemilu, termasuk sosialisasi dalam rangka peningkatan partisipasi melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih. Selain partisipasi dalam politik, Kabupaten Sleman juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan perumusan kebijakan publik. Salah satunya adalah kehadiran masyarakat atau wakil dari komponen masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) untuk merumuskan program kerja pemerintah daerah. Kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah melalui partisipasi masyarakat ini sangat penting karena berkaitan dengan terpenuhinya prinsip *good governance* yang lainnya. Maka dari itu, dibutuhkan komitmen yang kuat antara masyarakat dan pemerintah agar bisa melakukan kerja sama yang baik.

Terkait dengan ketertiban dan ketenteraman, masyarakat Sleman merupakan masyarakat yang majemuk, frekuensi mobilitas penduduk dari luar daerah yang memiliki latar belakang budaya, agama dan adat-istiadat yang cukup tinggi potensinya menimbulkan gesekan baik dengan antar pendatang maupun dengan penduduk asli, sehingga rawan akan potensi konflik.

Perkembangan media sosial cukup masif telah menggantikan surat kabar, majalah, radio dan televisi sebagai sarana menyampaikan informasi



yang lebih interaktif. Dampak positifnya adalah penyebaran informasi dan umpan balik yang didapat lebih cepat untuk diterima. Namun dampak negatif juga perlu diawasi, dimana informasi yang diterima dapat berupa informasi negatif, yang berpotensi mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Secara garis besar, gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Sleman masih didominasi oleh pelanggaran perda dan unjuk rasa. Berbagai gangguan keamanan dan ketertiban tersebut diatasi dengan berbagai upaya preventif dan persuasif sehingga permasalahan dapat dilokalisasi dan situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Upaya tersebut antara lain:

- 1) Sinergi yang baik antara pimpinan daerah, pejabat instansi terkait, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan serta respons yang tepat dalam menyelesaikan potensi konflik SARA;
- 2) Adanya komitmen seluruh pihak untuk melaksanakan regulasi; serta
- 3) Pelibatan pemerintah desa dalam mendukung pencegahan konflik sosial melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Dengan adanya regulasi Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Reksa Desa, maka pemerintah desa mempunyai pedoman yang jelas dalam memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan.

C. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada capaian kinerja serta faktor pendorong dan penghambat, kesimpulan yang diambil adalah sebagai berikut:

- a. Indikator yang telah melampaui target RPJPD pada tahun evaluasi adalah pendapatan per kapita dan indeks pembangunan manusia;
- b. Indeks kepuasan masyarakat semakin meningkat, hanya saja pada belum mencapai target RPJPD, namun berdasarkan proyeksi pada akhir tahun perencanaan RPJPD (tahun 2025), target akan tercapai;
- c. Nilai indeks gini dan indeks williamson menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan, meskipun masih berada pada tingkat moderat; serta
- d. Kebijakan yang diambil pada RPJMD dalam setiap periode RPJPD belum sepenuhnya berpedoman pada kebijakan dan target RPJPD.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi, ada beberapa hal yang direkomendasikan untuk perencanaan RPJPD berikutnya antara lain, sebagai berikut:

- a. Sistematisa RPJPD selanjutnya harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 atau peraturan yang berlaku lainnya, yang paling sedikit memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, visi dan misi daerah, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah, serta penutup. Sasaran pokok dengan indikator kinerja dilakukan dalam tahapan lima tahunan secara lebih definitif, berdasarkan arah kebijakan pembangunan.
- b. Dalam penyusunan dokumen RPJPD selanjutnya, isu keberlanjutan lingkungan, pemerataan hasil pembangunan, dan peran teknologi informasi perlu dimasukkan sebagai rumusan pembahasan visi dan misi dengan merujuk pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman.



- c. Hal yang berkaitan dengan indikator pada RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025:
- 1) Indikator indeks kepuasan masyarakat terlalu mikro untuk menggambarkan kondisi tata pemerintahan yang baik. Penilaian responden yang merupakan pihak eksternal yang mendapatkan pelayanan, cenderung subyektif. Meskipun tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, namun tata pemerintahan yang baik mencakup 8 (delapan) karakteristik, yaitu partisipasi, kerangka hukum yang adil, transparansi, responsif, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektif dan efisiensi, akuntabilitas, serta mempunyai visi strategis, sehingga diperlukan indikator lain yang dapat menggambarkan kedelapan karakteristik tata pemerintahan yang baik.
 - 2) Pendapatan per kapita sebenarnya tidak dapat secara langsung digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, karena hanya memberikan indikator rata-rata pendapatan suatu wilayah, padahal di dalamnya dapat terjadi ketimpangan pendapatan yang besar. Pertumbuhan ekonomi lebih relevan digunakan, karena digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu wilayah.
 - 3) Indeks gini masih relevan digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan, dimana penentuan target nilai indeks agar memperhatikan kondisi saat ini dan kemungkinan yang terjadi pada masa mendatang.
 - 4) Indeks williamson masih relevan digunakan untuk mengukur ketimpangan wilayah. Namun masih terdapat kesulitan dalam mendapatkan data produk domestik regional bruto kapanewon perkapita sebagai komponen data pembentuk indeks williamson harus dijadikan pertimbangan, kecuali menggunakan metode perhitungan lain dengan data yang lebih mudah didapatkan.
 - 5) Indeks pembangunan manusia masih relevan digunakan untuk mengukur kualitas hidup masyarakat.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Paradigma pembangunan menempatkan manusia sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan. Oleh karena itu, tren dan perubahan demografi sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Gambaran jumlah penduduk, komposisi, dan sebaran penduduk di masa depan dapat digunakan pemerintah dalam menyusun kebijakan pemerintah, terutama dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta perkembangan sosial ekonomi di suatu wilayah.

Jumlah penduduk Kabupaten Sleman senantiasa meningkat, meskipun dengan tingkat pertumbuhan menurun. Bahkan berdasarkan hasil *long form* Sensus Penduduk Tahun 2020 (LF SP2020), *total fertility rate* Kabupaten Sleman yang merupakan jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas telah menyentuh angka 1,87. Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Sleman juga banyak dipengaruhi oleh migrasi penduduk. Berdasarkan data kependudukan, migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar, karena alasan untuk menempuh pendidikan dan pekerjaan.

Dilihat dari proporsinya, jumlah penduduk Sleman paling besar dibandingkan dengan jumlah penduduk kabupaten/kota lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dapat menjadi peluang sekaligus ancaman bagi kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk yang besar dapat



menjadi potensi dukungan terhadap pembangunan apabila dipersiapkan dengan baik menjadi sumber daya manusia yang sehat, berpendidikan, berkualitas dan berdaya saing. Jumlah penduduk yang besar memberikan potensi penyediaan tenaga kerja yang besar yang dapat dioptimalkan untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi.

Jumlah penduduk yang besar, juga merupakan potensi pasar yang besar bagi penjualan hasil-hasil dan produk-produk asli daerah. Kedua hal tersebut, dapat mendorong peningkatan daya saing daerah dalam skala nasional serta mampu memberikan kesempatan investasi di wilayah Kabupaten Sleman. Sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja pun pula menjadi pasar atas produk yang dihasilkan diantaranya sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata.

Sebaliknya, jika Kabupaten Sleman tidak mampu mengelola jumlah penduduk yang besar menjadi sumber daya manusia yang sehat, berpendidikan, berkualitas dan berdaya saing, maka penduduk tersebut akan menjadi beban pembangunan dan menjadi permasalahan seperti pengangguran, kesenjangan ekonomi, keterbelakangan, kriminalitas dan tekanan yang besar terhadap lingkungan hidup serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam.

Pertambahan jumlah penduduk mulai dengan bergesernya komposisi penduduk menurut kelompok usia, berkurangnya kelompok umur muda, berkurangnya kelompok usia produktif bersamaan dengan penambahan jumlah penduduk kelompok lanjut usia, angka migrasi yang menyebabkan perubahan proporsi urban dan sub urban yang kemudian meningkatnya kepadatan penduduk di wilayah tertentu. Perubahan komposisi yang cepat dan mobilitas penduduk yang tinggi dengan distribusi yang kurang merata antar wilayah memerlukan penanganan yang tepat sehingga nantinya penduduk akan menjadi katalisator positif bagi pembangunan daerah.

Tren demografi ini akan sangat berpengaruh dalam penyiapan infrastruktur serta penyusunan rencana pembangunan yang tepat, untuk mewujudkan sumber daya manusia pada 20 tahun mendatang lebih baik, dan memberikan dukungan positif bagi pencapaian tujuan pembangunan dan keberlanjutan kelestarian lingkungan hidup. Penentuan model proyeksi dengan asumsi yang tepat menjadi dasar yang lebih akurat. Pembahasan terkait sumber daya manusia dan angka-angka demografis yang menyertainya akan disajikan secara bertahap dalam bab ini.

2.6.1. Demografi dan Kondisi Ideal Kependudukan

A. Proyeksi Jumlah Total Penduduk

Proyeksi penduduk merupakan data dasar sebagai fundamental dalam menyusun rencana atau kebijakan. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk provinsi, dilakukan perhitungan proyeksi penduduk kabupaten/kota dengan tahapan iterasi proyeksi. Skenario penghitungan menggunakan asumsi *total fertility rate* dan *infant mortality rate* atau umur harapan hidup saat lahir sesuai pola data masing-masing wilayah, serta migrasi sesuai pola migrasi hasil *long form* Sensus Penduduk 2020, yang disepakati bersama. Hasil proyeksi penduduk oleh Badan Pusat Statistik dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 51. Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2045 (Jiwa)

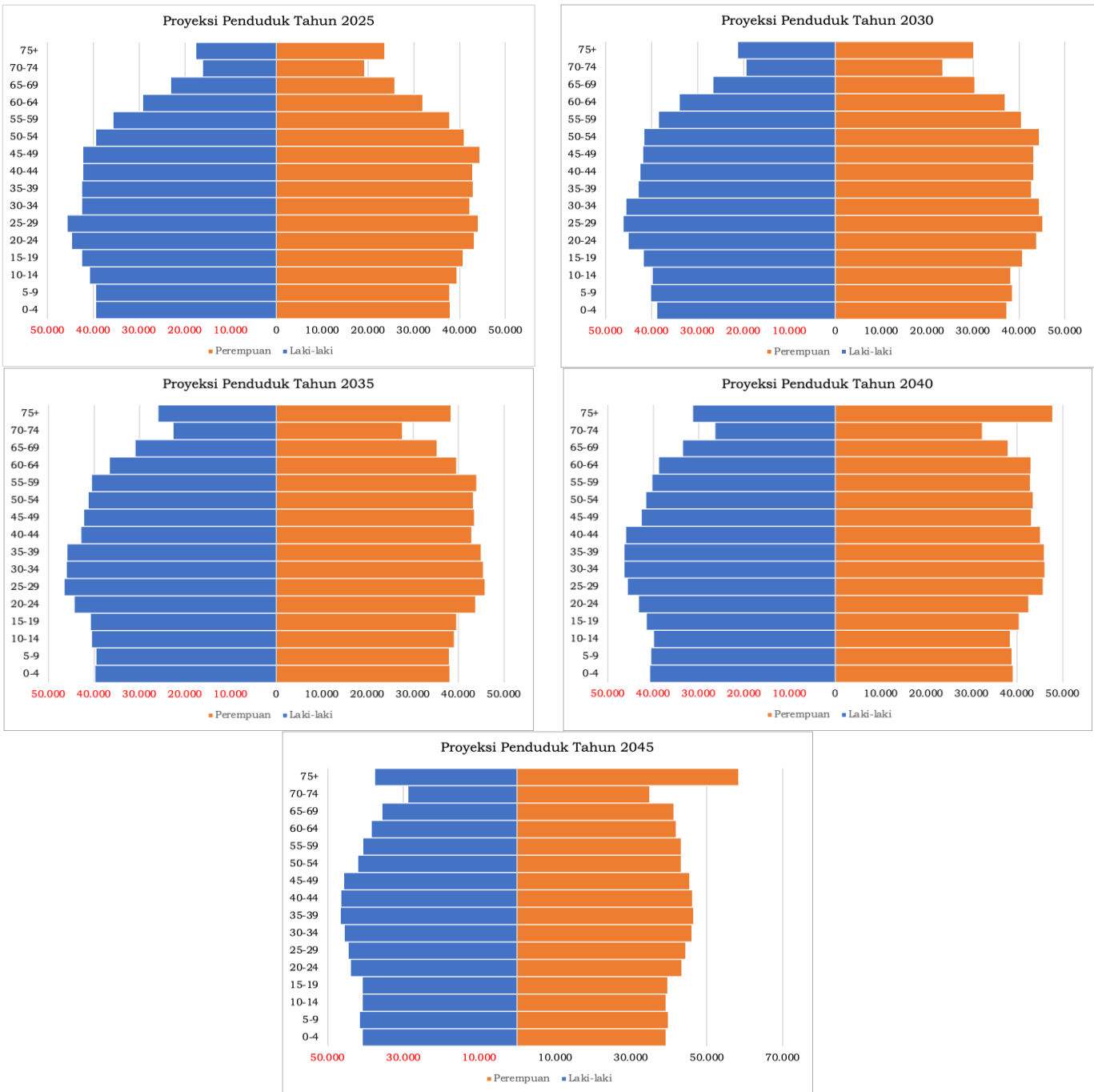
Penduduk	Jumlah Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	573.756	583.795	606.654	627.223	645.692	661.045
Perempuan	583.536	595.587	623.764	649.798	673.592	693.830
Total	1.157.292	1.179.382	1.230.418	1.277.021	1.319.284	1.354.875
Rasio Jenis Kelamin (%)	98,07	98,02	97,26	96,53	95,86	95,27

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2024



B. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin untuk melihat proporsi penduduk perempuan dan laki-laki serta merupakan salah satu instrumen dalam melakukan perumusan program dan kebijakan secara inklusif dengan memperhatikan kesetaraan gender untuk meminimalkan ketimpangan gender di Kabupaten Sleman. Berikut ini adalah proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Sleman dalam periodik 5 (lima) tahunan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, diolah, 2024

Grafik 2. 60. Piramida Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045

Pada tahun 2025, kelompok umur 35 tahun ke atas, jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Pada tahun 2030, kelompok umur 40 tahun ke atas, begitu selanjutnya sampai pada tahun 2045, jumlah penduduk perempuan lebih banyak pada kelompok umur 50 tahun ke atas.

C. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi penduduk Kabupaten Sleman, terdapat 3 (tiga) kelompok umur, yaitu usia 0-14 tahun, penduduk usia muda atau belum produktif; usia 15-64, penduduk usia dewasa atau



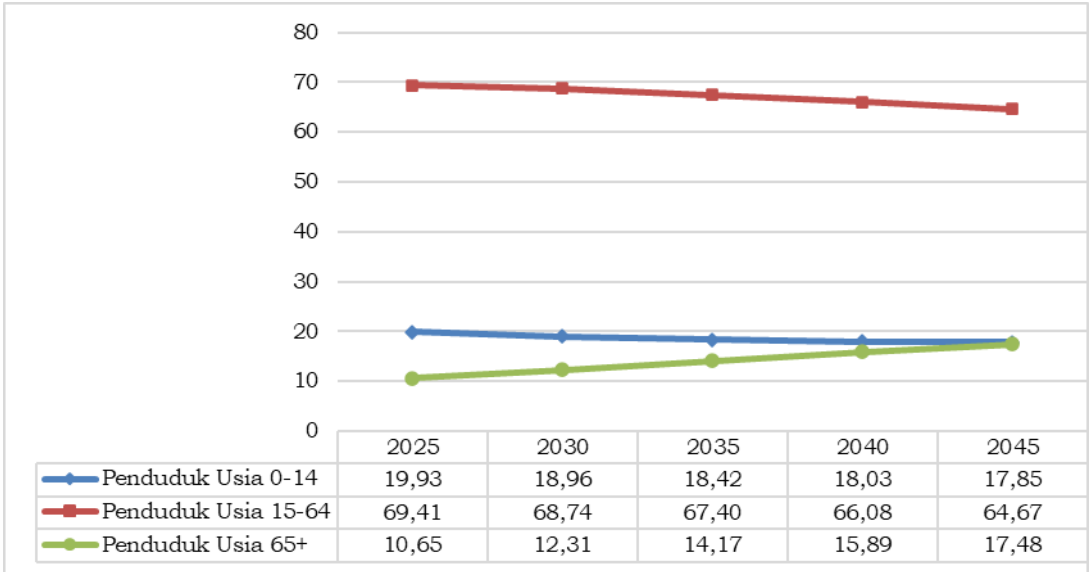
usia produktif/usia kerja; serta usia 65+, penduduk usia tua atau tidak produktif. Semakin tinggi nilai umur harapan hidup, maka jumlah lansia juga akan semakin meningkat. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 52. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman Menurut Kelompok Umur Tahun 2025-2045 (Jiwa)

Penduduk	Jumlah Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk				
		2025	2030	2035	2040	2045
0 -14	237.507	235.086	233.231	235.288	237.882	241.868
15 – 64	798.802	818.633	845.773	860.764	871.820	876.202
65 +	111.253	125.663	151.414	180.969	209.582	236.805
Total	1.157.292	1.179.382	1.230.418	1.277.021	1.319.284	1.354.875
Jumlah Usia 0-14 + (65+)	348.760	360.749	384.645	416.257	447.464	478.673

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2024

Proporsi jumlah penduduk pada usia muda, rentang usia 0-14 tahun di Kabupaten Sleman semakin kecil, dan pada tahun 2045 mencapai 17,85%. Proporsi penduduk usia produktif juga semakin berkurang, dari 69,41% pada tahun 2025 menjadi 64,67% pada tahun 2045. Adapun, proporsi penduduk usia tua atau usia 65 tahun ke atas semakin bertambah dari 10,65% pada tahun 2025 menjadi 17,48% pada tahun 2045.

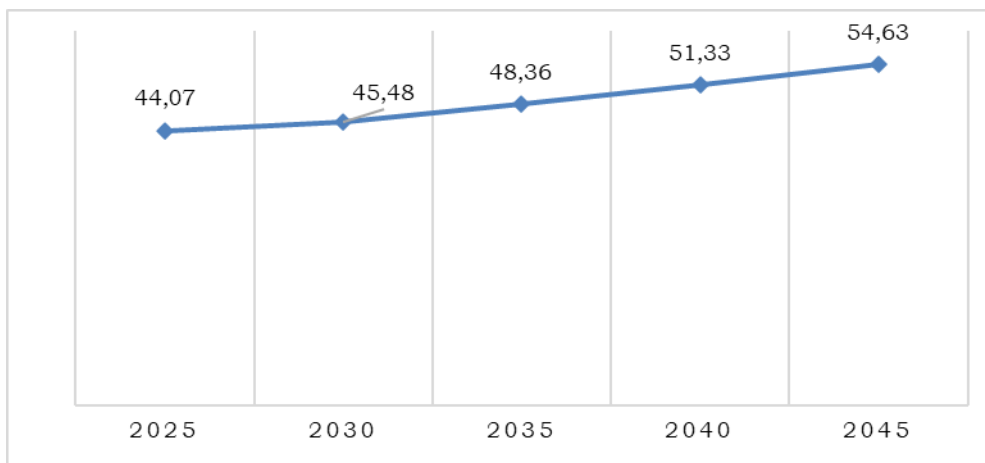


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, diolah, 2024

Grafik 2. 61. Proyeksi Proporsi Penduduk Kabupaten Sleman Menurut Kelompok Umur Tahun 2025-2045 (%)

Dengan berkurangnya penduduk usia produktif dan bertambahnya usia tua, maka angka ketergantungan penduduk semakin besar. Angka ini menunjukkan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia muda dan penduduk usia tua) dengan penduduk usia produktif. Oleh karena itu, jendela kesempatan (*window of opportunity*) untuk mendapatkan bonus demografi yang terbesar adalah saat ini, dan semakin lama semakin berkurang. Berdasarkan grafik di bawah, potensi pemanfaatan bonus demografi di Kabupaten Sleman masih dapat dioptimalkan sampai dengan tahun 2035.





Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, diolah, 2024

Grafik 2. 62. Proyeksi Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 (%)

Dari hasil penjelasan proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan rentang umur tersebut, beberapa potensi dan dampak kependudukan dapat diprediksikan dengan tetap mempertimbangkan asumsi-asumsi awal yang digunakan. Dari sisi potensi, beberapa peluang potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Sleman antara lain:

- 1) Jumlah penduduk di Kabupaten Sleman secara terus menerus cenderung mengalami kenaikan. Hal ini sangat baik dari sisi ketenagakerjaan karena jumlah penduduk yang banyak juga berarti angka penduduk usia kerja yang tinggi.
- 2) Angka harapan hidup yang tinggi berasosiasi dengan baiknya derajat kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, terus meningkatnya usia harapan hidup di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sleman akan semakin bagus. Hidup lebih lama berarti seseorang dapat tinggal bersama keluarganya lebih lama dan menikmati kehidupan selanjutnya yang bahagia. Jadi umur panjang yang akan dimiliki oleh penduduk di Kabupaten Sleman akan membantu untuk mempromosikan hubungan yang harmonis di antara anggota keluarga.
- 3) Angka ketergantungan yang potensial pada awal periode. Setiap tahun, angka ketergantungan penduduk cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Sleman sebesar 43,66, dan pada tahun 2045 diprediksi mencapai 54,63. Angka ketergantungan yang nilainya berada di bawah 50 adalah pada rentang tahun 2025 sampai dengan tahun 2035.

Namun di luar sisi positif pertambahan penduduk Kabupaten Sleman terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian oleh seluruh *stakeholders* di Kabupaten Sleman, yaitu:

- 1) Bertambahnya jumlah penduduk menuntut untuk peningkatan penyediaan ketercukupan pangan, perumahan dan fasilitas keberlangsungan hidup lainnya, seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, listrik, air minum.
- 2) Bertambahnya penduduk juga akan mengakibatkan bertambahnya beban lingkungan dikarenakan kebutuhan lahan untuk permukiman yang semakin tinggi, volume sampah dan limbah yang meningkat, polusi akibat aktivitas manusia meningkat dan transportasi yang meningkat, kondisi lalu lintas yang semakin padat, serta permasalahan lingkungan sosial semakin kompleks.
- 3) Naiknya jumlah penduduk dalam usia lanjut di Kabupaten Sleman perlu dipersiapkan sarana prasarana yang ramah terhadap lansia di masa mendatang. Misalnya dengan penyediaan rumah sakit *geriatri* yang



berfungsi untuk pelayanan kesehatan kepada lansia, panti perawatan lansia, sumber daya manusia perawat lansia, fasilitas umum ramah lansia serta fasilitas tambahan lainnya yang mendukung pelayanan terhadap lansia.

Kabupaten Sleman memasuki periode *aging society* dimana proporsi penduduk lansia terus meningkat, tetapi proporsi penduduk muda mengecil. Oleh karena itu, setelah bonus demografi berakhir, penduduk non-produktif akan mengalami peningkatan dan menjadi tanggungan kelompok usia produktif. Apabila kondisi ini tidak diimbangi dengan perencanaan masa depan yang baik, maka hal ini akan menciptakan *sandwich generation*, yaitu kondisi yang mengharuskan seseorang menanggung hidup tiga generasi, orang tua, anak dan dirinya sendiri. Di satu sisi generasi *sandwich* termasuk kelompok usia produktif, tetapi di sisi lain produktivitas mereka terhambat karena beban yang harus ditanggungnya, orang tua, anak dan dirinya sendiri. Beban itulah yang dapat menjadi penghambat optimalisasi peluang bonus demografi. Namun, apabila dikelola dengan baik, peningkatan penduduk usia produktif akibat bonus demografi dapat berdampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan, dan berakhir dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Penduduk lansia akan mampu memenuhi kebutuhan finansial dari tabungannya, sehingga tidak bergantung kepada generasi di bawahnya.

- 4) Apabila naiknya jumlah usia produktif tidak terserap oleh pasar tenaga kerja, maka pengangguran akan meningkat, yang akan berdampak pada beban ekonomi akan semakin berat karena kelompok usia tidak produktif tidak dapat didukung oleh usia produktif. Hal ini tentu akan berpengaruh kepada taraf kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Terjadinya kondisi dimana mayoritas penduduk perempuan pada kelompok umur di atas usia 50 tahun. Hal ini berarti pula akan semakin banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga. Oleh karena itu perlu dipikirkan lapangan kerja untuk kelompok perempuan ini.

2.6.2. Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Dalam melakukan analisis perhitungan proyeksi sarana dan prasarana di Kabupaten Sleman menggunakan metode, acuan dan pedoman yang telah disusun sebagai landasan perhitungan. Pada perhitungan proyeksi sarana dan prasarana Kabupaten Sleman, proyeksi dihitung dengan menggunakan acuan pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional serta perhitungan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) oleh kementerian/Lembaga terkait. Berikut ini adalah pembahasan secara detail dari hasil proyeksi rumah tinggal, sarana dan prasarana di Kabupaten Sleman.

A. Proyeksi Kebutuhan Rumah Tinggal

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2045, jumlah penduduk Kabupaten Sleman diproyeksikan sebesar 1.354.875 jiwa. Salah satu dampak pertumbuhan penduduk adalah peningkatan kebutuhan rumah tinggal. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan rumah adalah data *backlog*. Data *backlog* perumahan didasarkan pada kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan.



Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041, luas kawasan peruntukan permukiman sebesar 22.822 Ha. Dengan menggunakan koefisien luas kebutuhan ruang sebesar 26 m²/jiwa dan luas kawasan peruntukan permukiman yang sama, maka daya dukung permukiman pada tahun 2045 sebesar 6,48, yang artinya kapasitas lahan permukiman masih relatif tinggi, sehingga masih dimungkinkan adanya pengembangan permukiman. Kebutuhan lahan untuk permukiman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 53. Proyeksi Kebutuhan Rumah Tinggal

Uraian	Baseline 2023	Tahun Proyeksi Kebutuhan Rumah Tinggal				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk (jiwa)	1.157.292	1.179.382	1.230.418	1.277.021	1.319.284	1.354.875
Jumlah rumah tangga (KK)	385.022	409.272	432.231	454.185	475.129	494.174
Kebutuhan lahan untuk permukiman berbasis luas kavling minimal 100 m ² (Ha)	3.850	4.093	4.322	4.542	4.751	4.942

Sumber: Analisis, 2024

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2045, jumlah rumah yang dibutuhkan rumah tangga di Kabupaten sebanyak 494.174 rumah. Adapun kondisi pada tahun 2023, di Kabupaten Sleman terdapat 385.022 rumah tangga, dengan *backlog* perumahan sebanyak 47.621 rumah.

Faktor yang menyebabkan *backlog* antara lain adanya perpindahan penduduk, sehingga stok perumahan di wilayah tujuan mengalami kesenjangan terkait dengan pemenuhan kebutuhan permukiman. Selain itu, tingginya harga properti tanah/rumah, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja pada sektor informal sulit untuk mengaksesnya. Solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan bantuan subsidi perumahan.

Selain hitungan minimal di atas, kebutuhan kawasan per klasifikasi jenis unit hunian yang diperlukan. Berbasis Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, dikenal konsep hunian berimbang yang mengklasifikasikan 3 (tiga) jenis rumah, yakni rumah mewah, menengah dan sederhana. Komposisi yang diperlukan adalah 1:2:3, dimana setiap penyediaan 1 (satu) rumah mewah, perlu disediakan 2 (dua) rumah menengah dan 3 (tiga) rumah sederhana. Aturan ini telah diubah dengan menetapkan rasio antar jenis rumah tetapi tidak wajib menyediakan ketiga jenis rumah, namun untuk penyederhanaan dan penggunaan hunian berimbang sebagai konsep penyediaan rumah tinggal, tetap digunakan rasio 1:2:3. Luasan hunian mewah, menengah dan sederhana ditetapkan dengan asumsi, dimana luas kavling minimal yang umum digunakan dalam Rencana Detail Tata Ruang di Kabupaten Sleman digunakan sebagai basis luas lahan rumah sederhana, dengan multiplikasi luasan pada tingkat-tingkat berikutnya. Perhitungan kebutuhan luasan hunian berimbang dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 54. Proyeksi Kebutuhan Luasan Hunian Berimbang

Tipe	Jenis Hunian	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Komposisi Luasan Berbasis Hunian Berimbang (Ha)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Mewah	400	2.728,48	2.881,54	3.027,90	3.167,53	3.294,49
2	Menengah	200	2.728,48	2.881,54	3.027,90	3.167,53	3.294,49
3	Sederhana	100	2.046,36	2.161,16	2.270,93	2.375,65	2.470,87
Total luasan			7.503,32	7.924,24	8.326,73	8.710,71	9.059,85



Kebutuhan luasan untuk rumah tinggal berbasis hunian berimbang mencapai 9.059,85 Ha pada akhir tahun perencanaan, atau sekitar 15% dari total seluruh wilayah Kabupaten Sleman. Dengan kondisi daya dukung dan daya tampung yang perlu dipertimbangkan lebih jauh, maka pengembangan hunian ini perlu memperhatikan pemenuhan secara vertikal di beberapa lokasi yang relatif memiliki daya dukung yang memadai, tidak mengganggu Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Adisutjipto serta tidak terpapar bahaya gerakan tanah maupun gempa bumi.

B. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Berdasarkan rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum (sistem penyediaan air minum) Kabupaten Sleman, kebutuhan air minum domestik sebesar 100-150 liter/hari/orang dan non domestik sebesar 15-30% dari kebutuhan domestik. Berdasarkan karakteristik wilayah, maka ditetapkan kebutuhan total sebesar 157 liter/hari/orang.

Tabel 2. 55. Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.157.292	1.179.382	1.230.418	1.277.021	1.319.284	1.354.875
Kebutuhan air minum (liter/detik)	2.418	2.465	2.571	2.669	2.757	2.831

Sumber: Analisis, 2024

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2045, kebutuhan air untuk domestik dan non domestik sebesar 2.831 liter per detik. Kondisi saat ini, kebutuhan air minum dipenuhi dari air kemasan, sumur bor, sumur gali, dan jaringan air minum perpipaan. Sampai dengan tahun 2023, 23,50% kebutuhan air minum penduduk Sleman terlayani oleh jaringan perpipaan, yang terdiri dari perusahaan daerah air minum serta pengelolaan air minum dusun/Pengelola Air Minum Desa. Adapun debit perusahaan daerah air minum baru mencapai 680 liter/detik, dan pada musim kemarau berkurang 27 liter/detik.

Meskipun akses air minum telah terpenuhi 100%, namun berdasarkan Laporan Studi *Environmental Health Risk Assesment* masih terdapat penduduk di area berisiko sumber air yang disebabkan oleh sumber air terlindungi berisiko tercemar, penggunaan sumber air tidak terlindungi tidak aman serta adanya kelangkaan air. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan terhadap akses air minum layak dengan penambahan cakupan pelayanan jaringan perpipaan, baik perkotaan maupun perdesaan

C. Proyeksi Kebutuhan Energi atau Listrik

Analisis kebutuhan listrik di Kabupaten Sleman mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan dinamika kebutuhan energi listrik terkait dengan pertumbuhan ekonomi, dengan memperhatikan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2020-2050. Pertumbuhan ekonomi direncanakan untuk banyak mendukung sektor industri dan pariwisata, dengan menambahkan sektor lintas baru yang tercakup dalam industri kreatif.

Empat kelompok yang perlu didukung dengan energi listrik adalah kelompok rumah tangga, bisnis, industri dan fasilitas publik, dengan dominasi utama ada pada kebutuhan listrik untuk rumah tangga.



Berdasarkan hasil analisis proyeksi, kebutuhan listrik hingga tahun 2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 56. Proyeksi Kebutuhan Listrik

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.157.292	1.179.382	1.230.418	1.277.021	1.319.284	1.354.875
Jumlah Rumah Tangga	385.022	409.272	432.231	454.185	475.129	494.174
Kebutuhan Listrik Rumah Tangga (GWh)	889,04	906,01	1.249,86	1.919,28	2.526,48	3.075,11
Kebutuhan Listrik Bisnis (GWh)	396,01	403,57	594,35	952,79	1.282,89	1.668,63
Kebutuhan Listrik Industri (GWh)	155,16	158,12	179,02	219,29	248,91	265,15
Kebutuhan Listrik Fasilitas Publik (GWh)	125,78	128,18	143,52	170,43	188,65	193,05
Proyeksi Kebutuhan Listrik (GWh)	1.565,99	1.595,88	2.166,75	3.261,79	4.246,93	5.201,93

Sumber: Analisis, 2024

D. Proyeksi Jumlah Persampahan

Jumlah timbulan sampah pada tahun 2023 di Kabupaten Sleman sebesar 601,80 ton/hari dengan asumsi 0,52/orang/kg/hari. Komposisi potensi timbulan sampah di Kabupaten Sleman didominasi oleh sampah organik 46,49%, sampah plastik 32,77% dan sampah kertas 17,08%. Berdasarkan data tersebut, jumlah timbulan sampah organik sebesar 279,78 ton/hari, sampah plastik sebesar 197,21 ton/hari, sampah kertas sebesar 102,79 ton/hari dan sisanya adalah sampah logam, kaca, karet, kain dan lainnya. Pada tahun 2023, sebanyak 262,18 ton/hari tertangani. Sampah yang dibuang tersebut adalah sampah rumah tangga di wilayah perkotaan dan sampah non rumah tangga yang berasal dari perkantoran dan pasar.

Sampah dari wilayah perdesaan masih dikelola sendiri, baik dengan ditimbun maupun dibakar. Kondisi saat ini, pemilahan sampah belum optimal dilaksanakan, sehingga sampah yang diambil masih bercampur antara sampah organik dan sampah anorganik.

Tabel 2. 57. Proyeksi Timbulan Sampah

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbulan Sampah				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.157.292	1.179.382	1.230.418	1.277.021	1.319.284	1.354.875
Timbulan sampah (ton/hari)	601,80	613,28	639,82	664,05	686,03	704,54

Sumber: Analisis, 2024

Pada tahun ini, Pemerintah Kabupaten Sleman telah bekerja sama dengan PT Solusi Bangun Indonesia terkait pemanfaatan sampah *refuse-derived fuel* sebagai bahan bakar alternatif dengan kapasitas 100 ton per hari. Secara nominal memang besaran ini mampu mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir pada saat ini. Namun dengan bertambahnya waktu dan perubahan perilaku, jumlah timbulan sampah akan semakin besar dan komposisi sampah anorganik juga akan bertambah. Adapun kapasitas *refuse-derived fuel* terbatas, sehingga Pemerintah Kabupaten Sleman harus mulai memikirkan strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan, mulai dari hulu sampai hilir dengan menerapkan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* serta adanya peran aktif semua *stakeholders*, baik instansi Pemerintah Kabupaten Sleman, pemerintah kalurahan, masyarakat, swasta dan pihak lainnya.



Tabel 2. 58. Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Persampahan Kabupaten Sleman (Ton per Hari)

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Tempat pengolahan sampah terpadu					
Sendangsari	80	120	120	120	120
Tamanmartani	120	180	180	180	180
Donokerto	120	180	180	180	180
Sleman Tengah 2	-	120	180	180	180
Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, dan recycle	51	90	110	225	430
Transfer Depo	15	40	75	75	75
	388	730	845	960	1165
Timbulan	613,28	639,82	664,05	686,03	704,54
Selisih	-225,28	90,18	180,95	273,97	460,47

Sumber: Analisis, 2024

Pada tahun 2025 ditargetkan terdapat 3 tempat pengolahan sampah terpadu di Kabupaten Sleman dengan kapasitas pengelolaan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu Sendangsari sebanyak 80 ton per hari, tempat pengolahan sampah terpadu Tamanmartani sebanyak 120 ton per hari dan tempat pengolahan sampah terpadu Donokerto sebanyak 120 ton per hari sehingga target pengelolaan sampah melalui tempat pengolahan sampah terpadu sebanyak 320 ton per hari. Untuk pengelolaan sampah melalui tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, dan recycle* pada tahun 2025 ditargetkan 51 ton per hari dengan kapasitas pengelolaan sampah di 18 tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, dan recycle* masing-masing sebanyak 2 ton per hari dan upgrade pada 3 tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, dan recycle* masing-masing menjadi 5 ton per hari sehingga total pengelolaan sampah pada tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, dan recycle* pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak 51 ton per hari. untuk pengelolaan sampah pada transfer depo di tahun 2025 ditargetkan 3 transfer depo mampu mengelola 5 ton per hari sampah sehingga total pengelolaan sampah di transfer depo sebanyak 15 ton per hari.

Pada akhir tahun RPJPD yaitu di tahun 2045 ditargetkan terdapat 4 tempat pengolahan sampah terpadu pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman dengan kapasitas optimal yaitu di tempat pengolahan sampah terpadu Sendangsari sebanyak 120 ton per hari, tempat pengolahan sampah terpadu Tamanmartani sebanyak 180 ton per hari, tempat pengolahan sampah terpadu Donokerto sebanyak 180 ton per hari dan tempat pengolahan sampah terpadu Sleman Tengah 2 sebanyak 180 ton per hari sehingga target pengelolaan sampah melalui 4 tempat pengolahan sampah terpadu sebanyak 660 ton per hari pada tahun 2045. Untuk pengelolaan sampah melalui tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, dan recycle* pada tahun 2045 ditargetkan di 86 tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, dan recycle* dengan masing-masing kapasitas sebanyak 5 ton per hari sehingga target total sampah yang terkelola di tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, dan recycle* pada tahun 2045 adalah sebanyak 430 ton per hari. Untuk pengelolaan sampah pada transfer depo di tahun 2045 ditargetkan terdapat 15 transfer depo yang aktif dengan kapasitas masing masing sebanyak 5 ton per hari sehingga total pengelolaan sampah di transfer depo pada tahun 2045 ditargetkan sebanyak 75 ton per hari.

E. Proyeksi Jumlah Fasilitas Kesehatan

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Sleman 2045 dan SNI 03-1733 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, diperoleh gambaran kebutuhan fasilitas kesehatan sebagai berikut.



Tabel 2. 59. Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan

Jenis Fasilitas	Threshold (Jiwa per Unit)	Kondisi Tahun 2022 (Unit)	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan (Unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
Posyandu	1.250	1.535	896	919	936	947	951
Balai Pengobatan	2.500	n/a	448	459	468	473	475
BKIA/Klinik Bersalin	30.000	n/a	37	38	39	39	40
Puskesmas Pembantu	30.000	69	37	38	39	39	40
Puskesmas	120.000	25	9	10	10	10	10
Rumah Sakit	240.000	28	5	5	5	5	5
Tempat Praktek Dokter	5.000	1.589	224	230	234	237	238
Apotik/Rumah Obat	30.000	135	37	38	39	39	40

Sumber: Analisis, 2024

1. Posyandu

Secara jumlah, hingga tahun 2045, tidak memerlukan tambahan. Posyandu yang saat ini ada, telah menampakkan manfaat yang baik bagi kesehatan bayi dan balita. Namun diperlukan distribusi yang semakin merata serta revitalisasi pada posyandu yang saat ini kinerjanya belum maksimal dan perlu dikembangkan guna menambah manfaat untuk penjagaan kesehatan lansia.

2. Puskesmas Pembantu

Perhitungan kebutuhan pada tahun 2045 diperlukan sebanyak 40 puskesmas pembantu, sementara pada tahun 2023 telah tersedia 69. Dari 86 kalurahan yang berada di wilayah Kabupaten Sleman, 17 kalurahan tidak memiliki puskesmas pembantu karena pelayanan telah tercukupi dengan puskesmas. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah peningkatan jenis layanan dan jam layanan karena selama ini jenis layanan dan jam layanan puskesmas pembantu masih terbatas. Selain itu, sumber daya manusia kesehatan yang ditugaskan di puskesmas pembantu juga sangat terbatas.

3. Balai pengobatan

Tidak ditemukan jenis fasilitas balai pengobatan pada data Dinas Kesehatan. Yang ditemukan adalah klinik pratama dan klinik utama. Jumlah klinik pratama pada tahun 2023 adalah 118 klinik dan klinik utama berjumlah 48 klinik. Permasalahan yang terjadi adalah tidak meratanya persebaran. Dari sejumlah itu, terdapat 34 klinik pratama yang telah bekerja sama dengan BPJS.

4. Puskesmas

Saat ini terdapat 25 puskesmas, yang jika dilihat dari rasio puskesmas terhadap penduduk sudah mencukupi. Puskesmas tersebut tersebar di seluruh wilayah kapanewon di Kabupaten Sleman. Di Kapanewon Depok terdapat 3 puskesmas, di Kapanewon Tempel, Ngaglik, Ngemplak, Godean, Gamping, Mlati masing-masing 2 puskesmas. Yang masih perlu dilakukan adalah peningkatan kinerja pelayanan sebagai fasilitas dasar di masyarakat. Saat ini tercatat terdapat 10 puskesmas perawatan dengan jumlah tempat tidur 98 tempat tidur dan 15 puskesmas non perawatan. Yang perlu ditingkatkan adalah pemerataan persebaran ke penjuru wilayah Kabupaten Sleman, untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

5. Rumah Sakit

Di Kabupaten Sleman terdapat 28 (dua puluh delapan) rumah sakit. Yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sleman adalah 2 (dua) rumah sakit terdiri dari satu RSUD Tipe B dengan kapasitas tempat tidur 281 (dua ratus delapan puluh satu) tempat tidur dan satu RSUD Tipe C dengan kapasitas tempat tidur 100 (seratus) tempat tidur. Selain itu, di wilayah Kabupaten Sleman terdapat 1 RSUP yang di bawah Kementerian Kesehatan, 1 (satu) RS khusus milik Provinsi, 1 (satu) RSU



TNI/Polri, 2 (dua) RSUD BUMN, dan 21 (dua puluh satu) RS Swasta dengan berbagai tipe. Meskipun demikian, kondisi saat ini persebarannya masih belum merata. Sebagian besar terkonsentrasi di wilayah perkotaan, diantaranya berada di Kapanewon Depok, Mlati dan Gamping. Yang harus dilakukan adalah meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat, dengan mengembangkan rumah sakit di wilayah perbatasan dan pinggiran. Tidak mutlak harus dari pemerintah namun bisa dibuka peluang pengembangan oleh swasta dan masyarakat. Selain itu, perlu ditingkatkan kualitas pelayanan dan jenis pelayanan sesuai kebutuhan kesehatan masyarakat, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta.

6. Praktek Dokter

Pada tahun 2022 tercatat ijin praktek dokter sebanyak 1.589 ijin, terdiri dari dokter umum 599, dokter gigi 235 dan dokter spesialis 755. Dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten atau Kota Peduli Hak Asasi Manusia, proyeksi kebutuhan dokter pada tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 60. Proyeksi Rasio Fasilitas Kesehatan

Indikator	Rasio Dokter	Kondisi Tahun 2023	Tahun Proyeksi				
			2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk (jiwa)		1.157.292	1.179.382	1.230.418	1.277.021	1.319.284	1.354.875
Dokter Umum (orang)	1:2200	599	536	559	580	600	616
Dokter Gigi (orang)	1:7.500	235	157	164	170	176	181
Dokter Spesialis (orang)	1:16.000	755	74	77	80	82	85

Sumber: Analisis, 2024

Dari tabel di atas tampak bahwa kebutuhan jumlah dokter gigi dan dokter spesialis sudah terpenuhi. Pada tahun 2045, masih diperlukan penambahan dokter umum apabila diperbandingkan dengan jumlah dokter umum tahun 2045 lebih banyak dari kondisi saat ini, meskipun dengan kondisi sekolah kedokteran sekarang, optimis kebutuhan tersebut akan terpenuhi. Yang perlu diperhatikan adalah persebaran dokter di seluruh wilayah Kabupaten Sleman. Selain itu untuk dokter spesialis, perlu pula dicermati jenis spesialisnya untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan tren kondisi kesehatan masyarakat yang terjadi saat ini dan kemungkinan yang akan terjadi pada tahun 2045.

F. Proyeksi Jumlah Fasilitas Pendidikan

Kebutuhan infrastruktur pendidikan ini dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah. Perhitungan ini berdasarkan kondisi minimal yang seharusnya ada. Perhitungan jumlah rombongan belajar dihitung menggunakan jumlah penduduk usia sesuai tingkat pendidikan dengan nilai maksimal jumlah anak per rombongan belajar. Jumlah sekolah dihitung menggunakan jumlah rombongan belajar dengan nilai maksimal jumlah rombongan belajar per sekolah.

Sesuai perhitungan, proyeksi kebutuhan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sleman sudah memenuhi standar minimal, baik rombongan belajar maupun jumlah sekolah. Belum ada data jumlah rombongan belajar TK, sehingga tidak bisa digunakan sebagai pembanding. Selain itu, karena *total fertility rate* Kabupaten Sleman kurang dari 2 (dua), padahal angka standar capaian ideal bagi seluruh negara atau disebut penduduk tumbuh



seimbang adalah 2,1. Oleh karena itu, penduduk Kabupaten Sleman cenderung akan mengalami penurunan jumlah. Usia 29 (dua puluh sembilan) ke bawah mempunyai bentuk piramida konstruktif, atau semakin ke bawah semakin ramping. Hal ini tentu akan berdampak pada jumlah per kohort usia sekolah yang akan mengalami penurunan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah meskipun jumlah sekolah sudah berlebih, namun persebaran sekolah belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, perlu pemerataan sekolah, baik secara kuantitas dan kualitas di seluruh wilayah Kabupaten Sleman, terutama karena sekarang sudah menggunakan sistem zonasi. Hal tersebut tentu akan berimbas pada penambahan bangunan ruang kelas, yang berarti menambah luas bangunan terbangun di sekolah.

Tabel 2. 61. Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk usia TK (jiwa)	29.505	30.708	31.625	30.886	31.957	32.683
Jumlah penduduk usia SD (jiwa)	118.692	94.452	93.914	94.528	94.322	97.078
Jumlah penduduk usia SMP (jiwa)	49.120	48.874	47.524	47.828	47.640	47.888
Jumlah penduduk usia SMA/SMK (jiwa)	50.166	49.915	49.519	47.900	49.261	48.155
Jumlah rombel TK (rombel)	1.967	2.047	2.108	2.059	2.130	2.179
Jumlah rombel SD (rombel)	4.239	3.373	3.354	3.376	3.369	3.467
Jumlah rombel SMP (rombel)	1.535	1.527	1.485	1.495	1.489	1.496
Jumlah rombel SMA (rombel)	1.433	1.387	1.376	1.331	1.368	1.338
Jumlah minimal sekolah TK (sekolah)	584	128	132	129	133	136
Jumlah minimal sekolah SD (sekolah)	552	141	140	141	140	144
Jumlah minimal sekolah SMP (sekolah)	165	46	45	45	45	45
Jumlah minimal sekolah SMA (sekolah)	53	39	38	37	38	37

Sumber: Analisis, 2024

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Bagian ini akan menjelaskan mengenai rencana tata ruang wilayah yang akan menjadi pijakan pembangunan jangka panjang daerah, baik melalui struktur, pola maupun penetapan kawasan-kawasan strategis serta arahan yang ditekankan oleh pusat melalui berbagai proyek strategis nasional maupun konsep-konsep yang diusung.

2.7.1. Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Indikasi Program/Proyek Strategis (Rencana Struktur Ruang)

Pola pertumbuhan wilayah di Kabupaten Sleman membentuk struktur ruang dengan sistem permukiman yang monosentris. Sistem ini memiliki satu pusat kota (*central business district*) yaitu kawasan perkotaan Yogyakarta. Pola perkembangan permukiman cenderung untuk memperbesar kawasan perkotaan Yogyakarta tersebut ke segala arah. Selain itu, tumbuh juga permukiman permukiman perkotaan yang kecil secara *sprawl* di seluruh wilayah.

A. Pengembangan Pusat Permukiman

Pengembangan pusat permukiman direncanakan agar dapat mengendalikan pola permukiman yang saat ini cenderung *sprawl*. Pusat-pusat permukiman diarahkan untuk muncul di beberapa titik saja, dengan demikian struktur ruang permukiman Kabupaten Sleman ini diharapkan akan beralih dari monosentris menjadi polisentris yang induk kotanya berada di Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang juga dikendalikan agar tidak meluas.

1. Pengembangan Sistem Perkotaan



Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian pada wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian.



a. Pusat Kegiatan Nasional

Pusat kegiatan nasional adalah kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Pusat kegiatan nasional dikembangkan untuk fungsi MICE (*meeting, incentives, conferences, and exhibition*), pusat pendidikan, perdagangan dan jasa, serta pariwisata perkotaan terpadu. Kawasan perkotaan yang diklasifikasikan sebagai pusat kegiatan nasional adalah kawasan yang diarahkan sebagai pusat perkembangan wilayah dengan skala pelayanan nasional berupa kawasan perkotaan Yogyakarta.

Rencana pusat kegiatan nasional di Kabupaten Sleman meliputi: (1) Kapanewon Depok (Kalurahan Maguwoharjo, Condongcatur dan Caturtunggal); (2) sebagian Kapanewon Ngaglik (sebagian Kalurahan Sariharjo, sebagian Kalurahan Sinduharjo, sebagian Kalurahan Minomartani); (3) sebagian Kapanewon Mlati (sebagian Kalurahan Sendangadi dan Kalurahan Sinduadi); (4) sebagian Kapanewon Godean (sebagian Kalurahan Sidoarum); (5) sebagian Kapanewon Gamping (sebagian Kalurahan Trihanggo, Kalurahan Nogotirto, Kalurahan Banyuraden, sebagian Kalurahan Ambarketawang); (6) sebagian Kapanewon Ngemplak (sebagian Kalurahan Wedomartani); (7) sebagian Kapanewon Kalasan (sebagian Kalurahan Purwomartani); dan (8) sebagian Kapanewon Berbah (sebagian Kalurahan Kalitirto dan sebagian Kalurahan Tegaltirto).

b. Pusat Kegiatan Wilayah

Pusat kegiatan wilayah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kapanewon. Pusat kegiatan wilayah dikembangkan untuk fungsi pusat perkantoran pemerintah dan pengembangan kesenian serta kebudayaan. Adapun kawasan yang diarahkan berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah adalah kawasan yang potensial atau memiliki tingkat pertumbuhan relatif tinggi.

Rencana pusat kegiatan wilayah di Kabupaten Sleman meliputi: (1) sebagian Kalurahan Tridadi; (2) sebagian Kalurahan Triharjo; (3) sebagian Kalurahan Pandowoharjo; dan (4) sebagian Kalurahan Caturharjo. Keempat kalurahan tersebut berada di Kapanewon Sleman.

c. Pusat Kegiatan Lokal

Pusat kegiatan lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan pada lingkup lokal skala kabupaten atau beberapa kapanewon. Pusat kegiatan lokal dikembangkan untuk fungsi simpul layanan sarana prasarana permukiman, perdagangan jasa lokal, dan sarana pariwisata.

Rencana pusat kegiatan lokal di Kabupaten Sleman meliputi: (1) Pusat kegiatan lokal Prambanan (sebagian Kalurahan Bokoharjo Kapanewon Prambanan, sebagian Kalurahan Tamanmartani Kapanewon Kalasan, dan sebagian Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan); (2) Pusat kegiatan lokal Godean (sebagian Kalurahan Sidoagung, sebagian Kalurahan Sidoluhur, sebagian Kalurahan Sidokarto, dan sebagian Kalurahan Sidomoyo di Kapanewon Godean, serta sebagian Kalurahan Margoluwih Kapanewon Seyegan); (3) Pusat kegiatan lokal Pakem (sebagian Kalurahan Pakembinangun dan sebagian Kalurahan Harjobinangun di Kapanewon Pakem, serta sebagian Kalurahan Umbulmartani Kapanewon Ngemplak); serta (4) Pusat kegiatan lokal Tempel



(sebagian Kalurahan Lumbungrejo, sebagian Kalurahan Merdikorejo, sebagian Kalurahan Margorejo, dan sebagian Kalurahan Mororejo).

d. Pusat Pelayanan Kawasan

Pusat pelayanan kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kapanewon atau beberapa kalurahan. Rencana pusat pelayanan kawasan di Kabupaten Sleman meliputi: (1) Pusat pelayanan kawasan Perkotaan Minggir 1 (sebagian Kalurahan Sendangagung); (2) Pusat pelayanan kawasan Perkotaan Minggir 2 (sebagian Kalurahan Sendangsari, sebagian Kalurahan Sendangrejo, dan sebagian Kalurahan Margokaton); (3) Pusat pelayanan kawasan Perkotaan Moyudan (sebagian Kalurahan Sumberagung, dan sebagian Kalurahan Sendangarum); (4) Pusat pelayanan kawasan Perkotaan Mlati (sebagian Kalurahan Tlogoadi, sebagian Kalurahan Sumberadi, dan sebagian Kalurahan Tirtoadi); (5) Pusat pelayanan kawasan Perkotaan Seyegan (sebagian Kalurahan Margodadi, dan sebagian Kalurahan Margomulyo); (6) Pusat pelayanan kawasan Perkotaan Gamping (sebagian Kalurahan Balecatur); (7) Pusat pelayanan kawasan Perkotaan Tempel (sebagian Kalurahan Sumberrejo, sebagian Kalurahan Tambakrejo, dan sebagian Kalurahan Banyurejo); (8) Pusat pelayanan kawasan Perkotaan Turi (sebagian Kalurahan Donokerto, sebagian Kalurahan Wonokerto, dan sebagian Kalurahan Bangunkerto); (9) Pusat pelayanan kawasan Perkotaan Ngaglik (sebagian Kalurahan SardonoHarjo, sebagian Kalurahan Sukoharjo, sebagian Kalurahan Umbulmartani, dan sebagian Kalurahan Harjobinangun); (10) Pusat pelayanan kawasan Perkotaan Cangkringan (sebagian Kalurahan Argomulyo); (11) Pusat pelayanan kawasan Perkotaan Ngemplak (sebagian Kalurahan Widodomartani); dan (12) Pusat pelayanan Perkotaan Prambanan (sebagian Kalurahan Bokoharjo, dan sebagian Kalurahan Madurejo); (13) Pusat pelayanan kawasan Perkotaan Berbah (sebagian Kalurahan Sendangtirto, sebagian Kalurahan Tegaltirto, dan sebagian Kalurahan Kalitirto).

2. Strategi Pengembangan Sistem Perkotaan

Arah kebijakan Wilayah Jawa yang terdapat dalam RPJPN 2025-2045 adalah sebagian wilayah Jawa akan menjadi kawasan perkotaan pada tahun 2045, yang diproyeksikan menjadi tempat tinggal bagi kurang lebih 70% penduduk di wilayah Jawa. Kawasan perkotaan Yogyakarta yang merupakan kawasan strategis aglomerasi penduduk, menjadi suatu kekuatan market yang sangat potensial dan menjadi *demand generator* bagi kawasan sekitarnya.

Selain itu, kawasan perkotaan Yogyakarta juga memungkinkan terjadinya diversifikasi aktivitas ekonomi secara signifikan, dengan aktivitas penumpu utama di kawasan ini adalah sektor jasa (*tertiary sector*). Kawasan perkotaan Yogyakarta juga menjadi tempat interaksi multikultural yang harus diiringi dengan penguatan ketahanan sosial. Signifikansi peran kawasan perkotaan dan pesatnya aktivitas ekonomi perkotaan tersebut perlu diperkuat dan didukung, dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta dengan menguatkan ketahanan kawasan perkotaan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Pengembangan pusat permukiman mengacu pada konsep kompak dengan pengembangan beberapa konsentrasi kegiatan atau polisentris. Konsep kota kompak tidak terlepas dari permukiman kompak sebagai elemen pembentuknya. Adapun permukiman kompak adalah peningkatan kepadatan permukiman (*high-density-low-rise*) tanpa mengurangi atau menurunkan kualitas hidup, fokus pada



pengaturan pelayanan kota, lingkungan yang nyaman dan pemanfaatan fungsi tanpa harus merusak lingkungan.

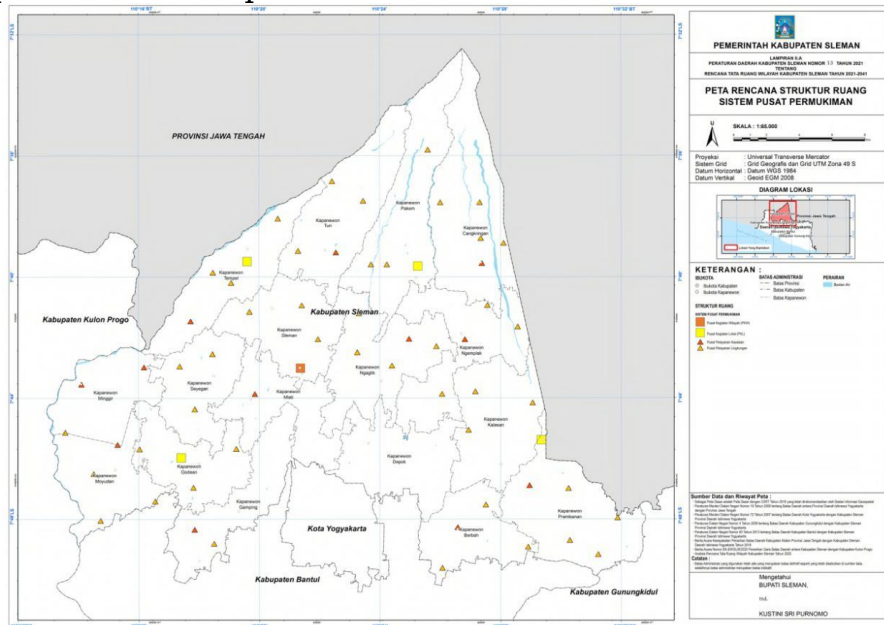
Adapun *compact city* merupakan sebuah konsep desain dan perencanaan kota dengan ciri khas kepadatan tinggi dan memiliki penggunaan lahan yang beragam dalam suatu wilayah untuk mengefisiensikan pemanfaatan lahan tersebut. Strategi pengembangan sistem perkotaan dilakukan terdiri atas:

- a. Pembentukan sistem kota kompak:
 - 1) Mengembangkan pusat-pusat perkotaan yang berdaya saing global;
 - 2) Mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang terintegrasi dengan sistem prasarana dan sarana di Kawasan perkotaan Yogyakarta;
 - 3) Menjaga keterkaitan antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan; dan
 - 4) Menerapkan batas pertumbuhan perkotaan secara tegas (*urban growth boundary*).
- b. Pengembangan kegiatan pariwisata terintegrasi yang berbasis alam dan budaya
 - 1) Mengembangkan obyek dan daya tarik wisata;
 - 2) Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pariwisata; dan
 - 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pariwisata untuk mendorong ekonomi lokal.
- c. Pengembangan kegiatan ekonomi kreatif
 - 1) Memberdayakan sektor ekonomi informal dan industri kreatif;
 - 2) Meningkatkan produktivitas ekonomi, lapangan kerja, serta peluang penghidupan.
- d. Pengembangan industri menengah, kecil, dan mikro yang ramah lingkungan
 - 1) Memantapkan kegiatan industri;
 - 2) Mengembangkan kegiatan industri kecil dan menengah; dan
 - 3) Mengembangkan industri ramah lingkungan.
- e. Pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh, untuk mendukung pembangunan ekonomi, kesejahteraan, serta perwujudan daerah sebagai wilayah cerdas
 - 1) Mengembangkan infrastruktur telekomunikasi;
 - 2) Mengembangkan sistem transportasi yang efisien; dan
 - 3) Mengembangkan jaringan infrastruktur berkualitas.
- f. Pengembangan kawasan permukiman yang aman, nyaman, dan berkelanjutan
 - 1) Mengembangkan kawasan permukiman di luar kawasan rawan bencana;
 - 2) Mengembangkan ruang terbuka hijau perkotaan dalam rangka upaya pemenuhan ruang terbuka hijau perkotaan minimal 30%; dan
 - 3) Mengembangkan prasarana dan sarana dasar permukiman yang berkelanjutan.
- g. Pengembangan kawasan pendidikan yang terintegrasi dengan sistem ruang perkotaan
 - 1) Mengembangkan prasarana dan sarana pendidikan; dan
 - 2) Melaksanakan penataan sekitar kawasan pendidikan.
- h) Pemantapan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara
 - 1) Memperkuat keamanan akses jalur informasi global;



- 2) Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan
- 3) Menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

Pengembangan pusat-pusat kegiatan disajikan melalui rencana sistem perkotaan Kabupaten Sleman di bawah ini.



Sumber: Perda Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021

Gambar 2. 20. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041

3. Pengembangan Sistem Perdesaan

Kawasan permukiman perdesaan adalah kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian pada wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar kalurahan.

Strategi pengembangan sistem perdesaan merupakan hal yang penting selaras dengan kecenderungan pertumbuhan perkotaan di Kabupaten Sleman dimana *urban sprawl* terjadi di seluruh wilayah. Hal ini akan mengarah kepada semakin besarnya kawasan perkotaan dan semakin kecilnya proporsi lahan hijau (sawah). Meskipun kegiatan ekonomi dan penduduk perkotaan didorong agar meningkat, namun diharapkan lahan terbangun perkotaan tidak terus meningkat sehingga proporsi lahan hijau dapat dipertahankan.

Selain dengan mengendalikan alih fungsi lahan dan menerapkan teknologi, upaya perlindungan dan pengendalian lahan hijau dari perkembangan kawasan perkotaan dapat dengan mengembangkan wisata pertanian. Wisata pertanian juga dapat meningkatkan pemberdayaan sumber daya dan ekonomi masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan peluang lokasi pertanian tersebut. Upaya pengembangan wisata pertanian ini tercantum dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.33 Tahun 2021 tentang Pengembangan Wisata Pertanian Sleman.

- a. Peningkatan perlindungan dan pengembangan lahan menuju pertanian modern
 - 1) Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian;
 - 2) Mengembangkan agropolitan dan minapolitan;
 - 3) Menerapkan teknologi atau inovasi di bidang pertanian yang lebih modern (mesin, pengendalian hama penyakit, panen, pasca panen);



- 4) Meningkatkan produksi pertanian untuk ketahanan pangan; dan
- 5) Mengembangkan wisata pertanian dan aksesibilitasnya.
- b. Pemantapan kawasan lindung
 - 1) Mengendalikan kegiatan budidaya pada kawasan lindung;
 - 2) Mengendalikan kegiatan budidaya pertambangan;
 - 3) Mengendalikan fungsi kawasan pelestarian alam taman nasional gunung merapi; dan
 - 4) Melestarikan cagar budaya dan alam.
- c. Pengelolaan kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi
 - 1) Membentuk sistem ruang mitigasi bencana terintegrasi dengan sistem peringatan dini;
 - 2) Menerapkan desain bangunan sesuai karakteristik wilayah rawan bencana; dan
 - 3) Melakukan pemeliharaan dan operasional infrastruktur agar berfungsi optimal pada saat terjadi bencana.

B. Kawasan Strategis Wilayah

Kawasan strategis kabupaten adalah bagian wilayah daerah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah daerah di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Rencana kawasan strategis Kabupaten Sleman terdiri atas:

1. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya

Rencana lokasi kawasan strategis kepentingan sosial dan budaya Kabupaten Sleman merupakan kawasan yang memenuhi kriteria aspek filosofis, historis, perilaku budaya, saujana alam, dan cagar budaya sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kawasan strategis nasional meliputi Kawasan Taman Wisata Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko di Kapanewon Prambanan;
- b. Kawasan strategis provinsi berupa Kawasan Strategis Kasultanan Candi Prambanan-Candi Ijo di Kapanewon Prambanan;
- c. Kawasan strategis provinsi berupa Kawasan Strategis Kasultanan Masjid Pathok Nagoro di Kapanewon Ngaglik dan Kapanewon Gamping;
- d. Kawasan strategis provinsi berupa Kawasan Strategis Gunung Merapi di Kapanewon Turi, Pakem, dan Cangkringan; dan
- e. Kawasan Strategis Kabupaten Kawasan Sekitar Kawasan Strategis Nasional Prambanan dengan tema pengembangan potensi wisata pendukung Kawasan Strategis Nasional Candi Prambanan.

2. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi

Kawasan strategis kepentingan ekonomi memiliki peran sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Sleman. Kawasan ini ditetapkan karena adanya potensi ekonomi cepat tumbuh, sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, posisi geo-strategis dan geo-ekonomi, didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi, berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan, dan ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan tertinggal.



a. Kawasan Perkotaan Yogyakarta

Kawasan perkotaan Yogyakarta merupakan kawasan yang telah tumbuh melewati batas administratif Kota Yogyakarta dan berkembang hingga beberapa kapanewon, yang salah satunya berada di wilayah Kabupaten Sleman. Adanya aglomerasi pertumbuhan tersebut memberikan keuntungan bagi wilayah Kabupaten Sleman khususnya dari segi ekonomi karena Kabupaten Sleman sebagai penopang dari kegiatan yang ada di Kawasan Perkotaan Yogyakarta seperti pelayanan pariwisata, pendidikan, perdagangan, serta simpul transportasi.

b. Kawasan Temon-Prambanan

Kawasan Temon-Prambanan merupakan kawasan yang dilalui jalan arteri primer dan jalan perkeretaapian nasional, sehingga dapat dioptimalkan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi. Penetapan Kawasan Temon-Prambanan bertujuan untuk mengantisipasi perkembangan kawasan perkotaan Yogyakarta agar tidak meluas ke segala arah, sehingga perlu rekayasa perkembangan kawasan perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan Temon-Prambanan terdiri dari ruas-ruas pertumbuhan, yang meliputi Kapanewon Prambanan.

c. Kawasan Tempel-Parangtritis

Kawasan Tempel-Parangtritis disediakan untuk mewadahi kegiatan ekonomi yang selama ini terpusat di Kota Yogyakarta. Pengembangan Kawasan Tempel-Parangtritis juga diharapkan membantu mengatasi masalah kesenjangan pembangunan wilayah yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan Tempel-Parangtritis memiliki sektor strategis berupa sektor pertanian, industri kecil, dan pariwisata.

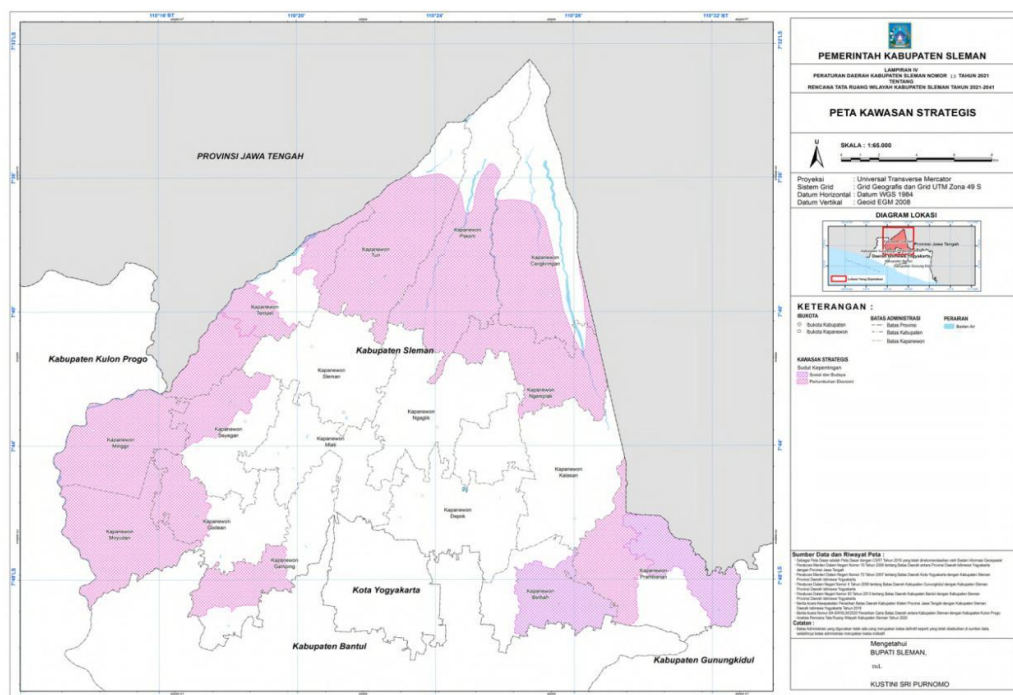
Berdasarkan posisinya, kawasan koridor Tempel-Parangtritis memiliki kontribusi yang besar pada sektor jasa atau kegiatan tersier. Selain itu, koridor ini juga berkontribusi besar terhadap sektor pertanian, yang ditunjukkan dengan luasan lahan pertanian yang besar. Sementara itu, besarnya kontribusi sektor industri menunjukkan kawasan ini menjadi salah satu tempat favorit bagi investor yang ingin mengembangkan sektor industri.

3. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup karena merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati, aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan, memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara, memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro, menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

- a. Kawasan strategis nasional Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dengan luas 1.786,96 Ha.
- b. Kawasan strategis kabupaten berupa kawasan resapan air seluas kurang lebih 24.205,43 Ha.





Sumber: Perda Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021

Gambar 2. 21. Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041

C. Indikasi Program/Proyek Strategis

1. Sistem Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan dalam hal ini meliputi jalan umum, jalan bebas hambatan, terminal penumpang, dan jembatan timbang. Arah kebijakan dari sistem jaringan jalan di Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4, yaitu transportasi penduduk, wisata, logistik, dan keperluan evakuasi. Indikasi program sistem jaringan jalan terdiri atas:

- Pemeliharaan ruas dan drainase jalan;
- Pengembangan jalan arteri primer;
- Pengembangan jalan kolektor primer;
- Pengembangan jalan lokal primer;
- Pengembangan jalan lokal sekunder;
- Pengembangan jalan lingkungan;
- Pembangunan jalan bebas hambatan Yogyakarta-Bawen;
- Pembangunan jalan bebas hambatan Solo-Yogyakarta-Kulon Progo
- Pengembangan terminal penumpang sesuai dengan jenis dan kelas pelayanannya;
- Pemeliharaan jembatan timbang;
- Pembangunan dan pemeliharaan simpang tidak sebidang (*fly over/under pass*);
- Pembangunan *park and ride*;
- Pembangunan *rest area*.

Pembangunan jalan bebas hambatan yang merupakan Program Strategis Nasional dan dilaksanakan melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, serta pihak perencana dan pelaksana. Pekerjaan jalan bebas hambatan tersebut juga meliputi pembangunan *rest area*. Program terkait pengembangan jalan akses menuju *exit toll* akan menjadi perhatian dalam arah kebijakan kedepannya, untuk mencegah terjadinya masalah kemacetan di kawasan sekitar *exit toll*.

2. Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Bandar udara di Kabupaten Sleman meliputi Bandara Adisutjipto di Kapanewon Depok dan Kapanewon Berbah. Indikasi program meliputi:



- a. Mendorong penataan Bandara Adisutjipto sebagai bandara pengumpul skala pelayanan sekunder;
- b. Penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandara.

Bandara Adisutjipto sejak tahun 2020 beralih menjadi bandara pengumpul skala pelayanan sekunder, karena dipindahkannya kegiatan penerbangan *air carrier* secara penuh ke *Yogyakarta International Airport* di Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, Bandara Adisutjipto direncanakan menjadi bandara *general aviation* dan bandara khusus bagi kegiatan pendidikan Akademi Angkatan Udara.

3. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Jaringan minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke fasilitas penyimpanan yang melewati Kapanewon Gamping, Kapanewon Berbah, dan Kapanewon Prambanan. Indikasi program meliputi :

- a. Pengembangan jaringan gas perkotaan;
- b. Pemeliharaan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke fasilitas penyimpanan.

Jaringan gas perkotaan telah dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat di Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok sebanyak 3200 sambungan rumah (SR).

4. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, yang meliputi jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem, jaringan distribusi tenaga listrik, dan gardu listrik. Indikasi program dari jaringan ketenagalistrikan meliputi:

- a. Pengembangan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro;
- b. Pengembangan sumber energi baru terbarukan lain;
- c. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik;
- d. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
- e. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik;
- f. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
- g. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik;
- h. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
- i. Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
- j. Pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.

Pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang telah beroperasi di Kabupaten Sleman adalah Minggir unit I dan II, Talang Krasak, Turi unit I dan II. Adapun sumber energi terbarukan lainnya yang berpotensi dikembangkan selain pembangkit listrik tenaga mikro hidro adalah energi surya, dengan pengembangan di wilayah Kapanewon Prambanan. Hal ini sejalan dengan penetapan Yogyakarta sebagai pusat riset pembangkit listrik tenaga surya oleh BPPT dan PT LEN Industri. Adapun gardu induk sejak tahun 2018 direncanakan akan dibangun oleh PLN di Kapanewon Prambanan dengan kapasitas 60 mega volt ampere (MVA).

5. Jaringan Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi terdiri dari jaringan tetap, infrastruktur jaringan tetap, dan jaringan bergerak. Jaringan bergerak yang dimaksud adalah jaringan bergerak seluler berupa menara *base transceiver station* (BTS) bersama. Indikasi program meliputi:

- a. Pengembangan jaringan tetap dan infrastruktur jaringan tetap; dan
- b. Pengembangan jaringan bergerak seluler.



Pengembangan jaringan telekomunikasi ini termasuk untuk mendukung pelayanan telekomunikasi untuk pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, pusat pelayanan perkotaan, dan pusat pelayanan lokal, serta untuk fasilitas-fasilitas pendidikan, kebudayaan, dan obyek wisata.

6. Jaringan Sumber Daya Air

Prasarana sumber daya air meliputi sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan bangunan sumber daya air. Arah kebijakan dari Kabupaten Sleman terkait pemanfaatan air sendiri lebih mengutamakan penggunaan air permukaan, karena air permukaan lebih mudah dikontrol secara kualitas dan kuantitasnya dibandingkan air tanah, meskipun penggunaan air tanah masih dominan. Indikasi program meliputi:

- a. Pengembangan prasarana pengairan mata air;
- b. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar mata air;
- c. Pengaturan pemanfaatan mata air;
- d. Pemberdayaan masyarakat pengelola mata air;
- e. Pemanfaatan air melalui sumur dalam dan sumur dangkal;
- f. Pengelolaan jaringan daerah irigasi;
- g. Pengelolaan sistem irigasi teknis, setengah teknis, sederhana, dan tadah hujan untuk melayani lahan persawahan;
- h. Peningkatan jaringan irigasi bagi daerah pengembangan pertanian lahan basah;
- i. Mendorong pemeliharaan jaringan irigasi primer Selokan Mataram dan Van der Wijk, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier;
- j. Pemberdayaan masyarakat perkumpulan petani pemakai air;
- k. Peningkatan, pengembangan, dan pemeliharaan bangunan pengendali banjir lahar;
- l. Pengembangan dan pemeliharaan bangunan pengendali banjir lahar berupa sabo dam.

Selokan Mataram dan Van der Wijk dalam pemeliharaannya merupakan kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO), serta kewenangan pemeliharaan jaringan irigasi tersier ada pada Pemerintah Desa. Pemerintah daerah dalam hal ini hanya memiliki kewenangan berkoordinasi untuk mendorong terlaksananya pemeliharaan bangunan tersebut.

7. Sistem Penyediaan Air Minum

Penyediaan air minum berupa sistem penyediaan air minum meliputi jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Jaringan perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, jaringan produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan. Jaringan bukan perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur pompa, bak penampung air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air. Program terkait sistem penyediaan air minum terdiri dari:

- a. Pemeliharaan dan pengembangan unit air baku;
- b. Pemeliharaan unit produksi;
- c. Pengembangan dan pemeliharaan unit distribusi;
- d. Pengembangan dan pemeliharaan unit pelayanan; dan
- e. Pengembangan bukan jaringan perpipaan.

Selain indikasi program tersebut, terdapat proyek strategis yaitu pembangunan sistem penyediaan air minum Berbah untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Prambanan. Kewenangan jaringan perpipaan ada pada perusahaan daerah air minum Tirta Sembada, sedangkan untuk jaringan perpipaan berbasis masyarakat



kewenangan berada pada sistem penyediaan air minum desa dan unit produksi berbasis masyarakat lainnya di bawah Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.

8. Sistem Pengelolaan Air Limbah

Sistem pengolahan air limbah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang terdiri atas sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat dan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat. Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat adalah sistem pengelolaan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Sistem pengolahan air limbah domestik setempat adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja. Program yang berkaitan dengan sistem pengolahan air limbah meliputi:

- a. Pengembangan dan pemeliharaan prasarana pembuangan lumpur tinja yang berasal dari tangki septik melalui penyediaan sarana angkut lumpur tinja menuju instalasi pengolahan lumpur tinja Prambanan;
- b. Pembangunan jaringan air limbah terpusat di wilayah perkotaan yang terhubung dengan instalasi pembuangan air limbah Sewon;
- c. Pengembangan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat instalasi pengolahan air limbah kota;
- d. Pembangunan dan pemeliharaan sistem pengolahan air limbah komunal skala kawasan permukiman; dan
- e. Pembangunan dan pemeliharaan sistem pengolahan air limbah komunal skala permukiman dalam kawasan permukiman.

9. Sistem Jaringan Persampahan

Sistem jaringan persampahan merupakan sistem jaringan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Sleman. Adapun pengelolaan persampahan di Kabupaten Sleman merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Adapun indikasi program terkait sistem jaringan persampahan adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan sistem pengelolaan persampahan;
- b. Pengembangan sistem pengurangan, penggunaan ulang, daur ulang, serta pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah melalui skema bank sampah;
- c. Pengembangan sarana prasarana persampahan berupa depo transfer;
- d. Pengembangan tempat pengelolaan sampah *reuse*, *reduce*, dan *recycle*;
- e. Pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu; dan
- f. Penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun sementara sebelum dibawa oleh transporter ke unit pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pengembangan sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Sleman bersifat terdesentralisasi dan terintegrasi dengan ketersediaan fasilitas pelayanan persampahan berupa bank sampah, transfer depo, tempat pengelolaan sampah *reuse*, *reduce*, dan *recycle*, tempat pengolahan sampah terpadu Tamanmartani dan tempat pengolahan sampah terpadu Sendangsari, serta sarana prasarana penunjang lainnya.



10. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Jaringan evakuasi bencana terdiri dari jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana. Indikasi program meliputi:

- a. Pengembangan dan pemeliharaan jalur evakuasi bencana pada zona aman terdapat di kalurahan terdekat dengan lokasi bencana pada lapangan, fasilitas pendidikan, balai kalurahan dan fasilitas umum lainnya;
- b. Pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor;
- c. Pengembangan dan pemeliharaan jalur evakuasi bencana letusan Gunungapi Merapi;
- d. Pengembangan dan pemeliharaan jalur evakuasi bencana banjir lahar dingin;
- e. Pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk pencegahan bencana gempa bumi;
- f. Pengembangan kalurahan tahan bencana di seluruh kalurahan di wilayah Kabupaten Sleman;
- g. Pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk pencegahan bencana letusan Gunungapi Merapi;
- h. Penyediaan tempat penampungan sementara dan/atau hunian sementara (huntara);
- i. Penyediaan tempat hunian tetap (huntap);
- j. Penyediaan barak pengungsian;
- k. Pengembangan ruang terbuka;
- l. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalur evakuasi; dan
- m. Pengoptimalan jaringan jalan terdekat menuju tempat evakuasi.

11. Sistem Drainase

Jaringan drainase meliputi jaringan drainase primer, sekunder, dan tersier. Indikasi program meliputi:

- a. Penyusunan masterplan jaringan drainase;
- b. Pengembangan dan pemeliharaan sistem pengelolaan prasarana drainase secara terpadu pada kawasan perkotaan Kabupaten Sleman yang berada di dalam kawasan perkotaan Yogyakarta;
- c. Pengembangan dan pemeliharaan sistem pengelolaan prasarana drainase yang berwawasan lingkungan dengan drainase induk;
- d. Pembangunan sistem jaringan drainase berwawasan lingkungan untuk memanen air hujan;
- e. Pemeliharaan fungsi sungai sebagai prasarana drainase alami;
- f. Pengembangan sistem drainase sesuai dengan karakteristik wilayah;
- g. Pengembangan drainase buatan di kawasan permukiman perkotaan dan wilayah yang terdapat genangan; dan
- h. Pemeliharaan sistem jaringan drainase.

2.7.2. Pengembangan Pola Keruangan Wilayah (Rencana Pola Ruang)

Pengembangan pola keruangan wilayah menjadi dasar dalam pemanfaatan ruang, yang meliputi kebutuhan ruang dalam pembangunan infrastruktur, investasi ekonomi, perlindungan dan kelestarian lingkungan, penyediaan hunian, penyediaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pola ruang ini dilakukan dengan klasifikasi lebih mendalam terkait penggunaan masing-masing ruang serta mengatur ketentuan umum pemanfaatan ruang di dalam pola ruang tersebut, yang kemudian ditentukan ruang lindung dan budidaya. Peruntukan fungsi lindung memungkinkan ruang untuk dijaga kelestarian, sedangkan peruntukan budidaya merupakan ruang yang disediakan untuk perkembangan kehidupan manusia, baik ekonomi,



kemungkinan pemanfaatan kawasan peruntukan industri ini tetap sebagai ruang pengolahan produk non-lokal.

B. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman di Kabupaten Sleman seluas kurang lebih 32.555 Ha, yang terdiri dari:

1. Kawasan permukiman perkotaan seluas 10.763 Ha
2. Kawasan permukiman perdesaan seluas 21.792 Ha

Pada permukiman perdesaan, umumnya diperbolehkan pengembangan kegiatan permukiman (hunian, sarana pelayanan umum pendidikan maupun kesehatan, fungsi-fungsi sosial dan perdagangan dan jasa serta industri skala kecil). Pada permukiman perkotaan, umumnya pengembangannya berbeda skala dengan permukiman perdesaan, dimana untuk pelayanan umum dan perdagangan dan jasa memiliki skala pelayanan yang besar (bahkan hingga internasional bagi pendidikan dan kesehatan) serta memiliki kepadatan yang tinggi. Permukiman perkotaan juga umumnya membutuhkan penyediaan jaringan prasarana dengan kompleksitas yang lebih tinggi, terutama di Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang menjadi generator ekonomi.

Kawasan permukiman ini tersebar di seluruh wilayah. Dalam jangka panjang dapat menjadi beban atau ancaman bagi keberlanjutan, dimana permukiman yang terus berekspansi seiring waktu mengurangi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan ruang-ruang keberlanjutan lainnya. Kawasan permukiman yang berpotensi menjadi tekanan bagi lingkungan harus dapat didukung oleh daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang memadai, termasuk di dalamnya pengupayaan peningkatan jasa lingkungan bagi peningkatan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

C. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian berupa kawasan tanaman pangan yang diklasifikasikan sebagai pola ruang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, seluas kurang lebih 18.859 Ha yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten. Kawasan ini adalah bentuk dari kegiatan budidaya yang tidak atau semi-terbangun. Kawasan pertanian dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan sektoral, antara lain adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2020 tentang irigasi serta lahan sawah yang dilindungi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021.

Adapun kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Sleman seluas 18.491 Ha. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan secara makro telah mengutamakan kompaktifikasi dan kestrategisan yang berdasarkan nilai lahan, meski berarti tidak memberikan kemudahan fleksibilitas dalam pemanfaatan ruang, sehingga sangat sulit untuk dialihfungsikan.

Di lain pihak, lahan sawah yang dilindungi merupakan lahan sawah yang ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dimana permohonan pelepasan terhadap lahan sawah yang dilindungi perlu untuk meminta rekomendasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Konsep penyediaan pangan sebaiknya dikembangkan secara lebih revolusioner, baik melalui pendekatan kebutuhan kalori dan kelengkapan gizi yang tepat (bukan hanya berbasis pada tanaman pangan saja), namun juga dikaitkan dengan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas tanpa lebih lanjut membebani lingkungan hidup.



Kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional. Skema kawasan pertanian pangan berkelanjutan merupakan upaya mewujudkan ketangguhan terhadap kekurangan pangan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan.

2.7.3. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Wilayah

Kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana wilayah diarahkan dalam kerangka perwujudan Wilayah Jawa sebagai “Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan,” yang dilaksanakan melalui 5 (lima) prioritas sebagai berikut:

- a. Pengembangan sumber daya manusia berdaya saing global serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem;
- b. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan, industri berbasis inovasi riset dan teknologi, kawasan strategis pariwisata, dan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan;
- c. Percepatan pembangunan berbasis pengembangan *multi-infrastructure* yang mumpuni guna meningkatkan daya saing. Selain itu, perlu penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan lindung dan *geopark*;
- d. Pengembangan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah, penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar; dan
- e. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim.

Selain itu, pembangunan kewilayahan di Kabupaten Sleman mengacu pada arah pembangunan kewilayahan dalam rencana tata ruang wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043. Terdapat dua tema utama pengembangan di Kabupaten Sleman, yaitu: (1) pelestarian lingkungan dan penunjang ekonomi wilayah dan (2) kawasan industri terpadu berbasis sumber daya alam wilayah.

Pelestarian lingkungan dan penunjang ekonomi wilayah terdiri atas pengendalian dan perlindungan tinggi dengan pengembangan terbatas sesuai dengan ketentuan terkait dan kegiatan diarahkan kepada konservasi, budaya, pariwisata, dan pertanian. Kawasan industri terpadu berbasis sumber daya alam wilayah terdiri atas pengembangan sedang-tinggi berbasis potensi lokal dan kegiatan diarahkan kepada perdagangan, jasa, industri terpadu, pertanian, dan pariwisata.

Pembangunan wilayah dan sarana prasarana wilayah di Kabupaten Sleman dilaksanakan sesuai dengan kaidah perencanaan pembangunan nasional, yakni terwujudnya keselarasan antar dokumen perencanaan. Oleh karena itu, pembangunan wilayah dilaksanakan secara selaras dengan rencana pembangunan wilayah yang lebih luas termasuk pelaksanaan proyek strategis nasional yang berada di Kabupaten Sleman. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dalam rangka percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan pemulihan ekonomi nasional, proyek strategis nasional yang berada di Kabupaten Sleman pada sektor jalan dan jembatan adalah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen dan Penambahan Lingkup Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo.



Pembangunan wilayah di Kabupaten Sleman dipengaruhi juga oleh proyek strategis nasional sektor bandar udara yang terletak di Kabupaten Kulon Progo, yaitu Bandar Udara Baru Yogyakarta-Kulon Progo, yang didukung oleh proyek strategis nasional sektor kereta berupa Kereta Api Akses Bandar Udara Baru Yogyakarta Kulon Progo, dan *Double Track* Jawa Selatan. Selain itu, Program Pengembangan Jalan Akses Exit Toll dan Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) juga sangat berpengaruh terhadap pembangunan wilayah di Kabupaten Sleman.

Oleh karena itu, agar dapat secara efektif berdampak positif terhadap masyarakat di Kabupaten Sleman, maka perlu adanya sinergi dengan pembangunan wilayah Kabupaten Sleman dan penyesuaian arah kebijakan pembangunan, termasuk kebijakan terkait tata ruang. Berdasarkan RPJPN 2025-2045, arah kebijakan tata ruang untuk menyelesaikan isu penataan ruang di Kabupaten Sleman terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Penyusunan indikator ketercapaian rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, meliputi:
 - 1) Perwujudan keterkaitan desa-kota dalam rencana tata ruang;
 - 2) Sinkronisasi muatan rencana tata ruang secara hierarkis; dan
 - 3) Penyusunan rencana detail tata ruang kabupaten.
- b. Mewujudkan penataan ruang yang berkualitas, meliputi:
 - 1) Pengintegrasian kajian lingkungan hidup strategis dan risiko bencana;
 - 2) Pengembangan digitalisasi rencana tata ruang;
 - 3) Perluasan akses masyarakat pada produk tata ruang;
 - 4) Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam penataan ruang;
 - 5) Pengintegrasian rencana pembangunan; dan
 - 6) Pengacuan pada data dan informasi terpadu.
- c. Mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1) Pemenuhan kebutuhan instrumen, mekanisme, dan pelaksana pengendalian terutama penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang;
 - 2) Pengintegrasian rencana tata ruang dan penatagunaan tanah; dan
 - 3) Penggunaan indikator rencana tata ruang yang spesifik dan terukur.

Kebijakan bidang pertanahan diupayakan untuk menyelesaikan isu-isu strategis bidang pertanahan, meliputi pelaksanaan redistribusi tanah dan perbaikan sistem pertanahan.

A. Pembangunan Jalan Bebas Hambatan

Menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043, pembangunan jalan bebas hambatan di Yogyakarta meliputi jalur bebas hambatan Yogyakarta-Cilacap, Yogyakarta-Bawen, dan Yogyakarta-Solo. Proyek jalan bebas hambatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar untuk memperkuat konektivitas Jalan bebas hambatan Trans Jawa. Keberadaan jalan bebas hambatan tersebut juga akan meningkatkan aksesibilitas pusat-pusat aktivitas dan pusat ekonomi terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Jalur ini direncanakan akan mendukung kawasan wisata Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Plaosan, Candi Ratu Boko, Candi Ijo, dan Tebing Breksi yang selama ini hanya dilayani oleh jalan nasional dengan arus lalu lintas yang melebihi kapasitas jalan. Penetapan lokasi untuk trase bebas hambatan Yogyakarta-Solo telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 206/KEP/2020 dan trase bebas hambatan Yogyakarta-Bawen melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 385/KEP/2020.

Kebijakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pembangunan jalan bebas hambatan harus mempertimbangkan kelestarian situs bersejarah, tidak memisahkan komunitas di masyarakat yang sudah ada, serta seminimal mungkin menggunakan lahan pertanian.



Pembangunan rest area juga menjadi fokus kebijakan, dimana rest area harus terletak pada lokasi yang juga dapat diakses oleh masyarakat umum di luar jalan bebas hambatan, sehingga dapat berdampak pada masyarakat luas tidak hanya pengguna jalan bebas hambatan saja.

Selain kebijakan tersebut juga terdapat kebijakan untuk penambahan lingkup jalan di sekitar *exit toll* untuk mencegah adanya peningkatan arus lalu lintas, sehingga diperlukan ruas jalan yang dapat menampung volume kendaraan yang tinggi.

B. Program Pengembangan Pariwisata Terpadu dan Berkelanjutan (P3TB) di Borobudur-Yogyakarta-Prambanan

Borobudur-Yogyakarta-Prambanan adalah salah satu dari 3 (tiga) destinasi wisata prioritas di Indonesia dengan Prambanan sebagai salah satu *key tourism area*-nya. Guna mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan pariwisata, salah satu agenda Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan adalah penyusunan *Integrated Tourism Master Plan* atau Rencana Induk Pariwisata Terpadu. Kapanewon Prambanan menjadi salah satu kawasan inti pariwisata dalam Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan di Borobudur-Yogyakarta-Prambanan.

Daya tarik wisata utama di Kapanewon Prambanan saat ini adalah Candi Prambanan, Candi Ratu Boko, dan Tebing Breksi. Dalam Masterplan dan *detail engineering design* Pengembangan Wisata Prambanan Timur, pembangunan daya tarik wisata akan direncanakan di 4 (empat) titik yang masing masing terdapat di Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Wukirharjo, dan Kalurahan Gayamharjo.

Lokasi Prambanan sebagai kawasan inti juga didukung dengan adanya pintu tol Yogyakarta-Solo yang direncanakan berlokasi di Kalurahan Bokoharjo, dengan *rest area* di luar jalur jalan tol, berkonsep *transit multi fungsi* yang merupakan kawasan multi fungsi yang terdiri dari transit kegiatan pariwisata, pusat *souvenir*, tempat parkir, *show room* usaha kecil, dan menengah, *tourist information center*, dan pusat kuliner, sesuai kebijakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam menunjang Kawasan di Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Kabupaten Sleman melakukan sinkronisasi terkait dengan pengembangan maupun pengembangan proyek strategis nasional maupun pengembangan infrastruktur lainnya, dengan memperhatikan arahan pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar area pengembangan. Selain itu, terdapat program untuk pengembangan investasi pariwisata, yaitu *Investment Project Ready to Offer* program investasi pariwisata yang bertujuan untuk memberikan latar belakang yang komprehensif tentang peluang investasi pariwisata di tingkat nasional.

Selain itu, Kabupaten Sleman menyediakan lokasi lahan yang memiliki potensi investasi dan bisnis dengan nilai jual dan proposisi nilai yang unik. Beberapa hal yang menjadi kriteria dalam pemilihan usulan adalah kesiapan teknis lokasi, peran pemangku kepentingan, strategi dan analisis pasar, perencanaan keuangan proyek, estimasi keuntungan, pengembalian investasi, skema insentif, dan analisis risiko. Adapun kawasan *Investment Project Ready to Offer* di Kabupaten Sleman terletak di Kapanewon Prambanan.

C. Program Pengembangan Geopark Jogja

Geopark Jogja merupakan salah satu *geopark* yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengelolaan *Geopark* Jogja merupakan kerjasama berbagai *stakeholders*, antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah



Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kota Yogyakarta, dan perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta serta melibatkan masyarakat setempat. *Geopark* Jogja saat ini masih berstatus *Aspiring Geopark* Nasional atau kandidat *geopark* yang sedang diajukan untuk mendapat status *Geopark* Nasional.

Pengelolaan *geopark* di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Taman Bumi (*Geopark*) di Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa kelestarian dan keselamatan dunia dalam rangka memuliakan taman bumi (*geopark*) sebagai pengejawantahan filosofi *hamemayu hayuning bawana-rahayuning bawana kapurba waskithaning manungsa* ditentukan oleh kebijaksanaan manusia. Peraturan ini disusun untuk mengatur pengelolaan warisan geologi (*geoheritage*) secara bijak yang memperhatikan nilai keunikan geologi dan kelestariannya, mengupayakan pelestarian keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dan keragaman budaya (*cultural diversity*), serta pengelolaan keragaman geologi (*geodiversity*), melalui kegiatan yang terencana, dengan memadukan pengelolaan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat setempat ke dalam proses pembangunan yang berkelanjutan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan kesinambungan hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Adapun *geosite* pada *geopark* Jogja di Kabupaten Sleman meliputi:

- 1) Kompleks Perbukitan Intrusi Godean di Kapanewon Godean;
- 2) Kompleks Batuan Merapi Tua Turgo-Plawangan di Kapanewon Pakem;
- 3) Aliran Piroklastik Bakalan di Kapanewon Cangkringan;
- 4) Tebing Breksi Piroklastik Purba Sambirejo di Kapanewon Prambanan;
- 5) Rayapan Tanah Nglepen di Kapanewon Prambanan;
- 6) Lava Bantal Berbah di Kapanewon Berbah; dan
- 7) Batugamping Eosen di Kapanewon Gamping.

2.7.4. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Berikut ini adalah gambaran analisis penilaian perwujudan rencana pola ruang Kabupaten Sleman yang didasarkan berdasarkan kategorinya.



Tabel 2. 62. Penilaian Perwujudan Rencana Pola Ruang berdasarkan Kategorinya

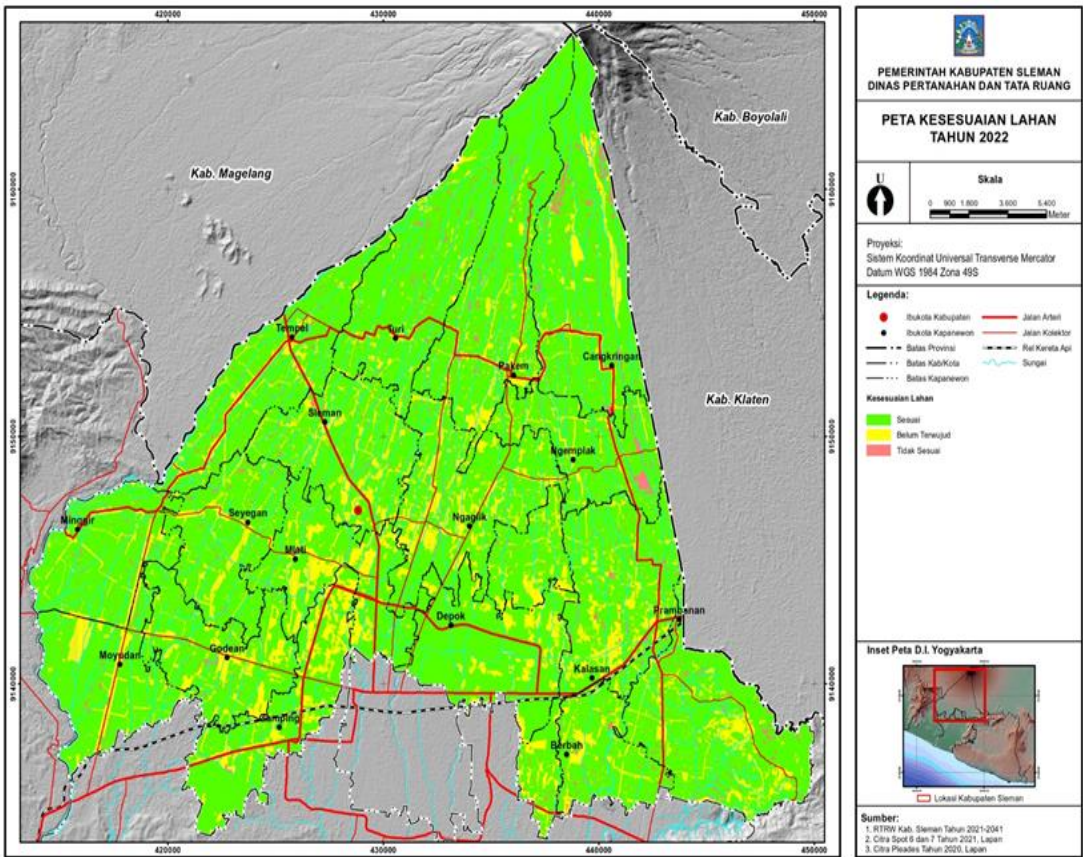
	Klasifikasi dari Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah	Klasifikasi di Peta Pola Ruang	Sesuai	Belum Terwujud	Tidak Sesuai	JUMLAH	Sesuai	Belum Terwujud	Tidak Sesuai
Lindung	Badan Air	Badan Air	435,98	-	12,74	448,72	97,16%	-	2,84%
	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Perlindungan Setempat	1.604,55	-	357,43	1.961,98	81,78%	-	18,22%
	Kawasan Konservasi	Taman Nasional	1.787,99	-	0,16	1.788,15	99,99%	-	0,01%
		Taman Wisata Alam	-	-	0,98	0,98	0,00%	-	100,00%
		Cagar Alam	-	-	0,06	0,06	0,00%	-	100,00%
	Kawasan Lindung Geologi	Kawasan Cagar Alam Geologi	19,86	-	3,93	23,79	83,48%	-	16,52%
	Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya	30,16	-	6,05	36,21	83,28%	-	16,72%
	TOTAL		3.878,54	-	381,34	4.259,88	91,05%	-	8,95%
Budidaya	Kawasan Perkebunan Rakyat	Kawasan Perkebunan Rakyat	929,98	101,15	26,80	1.057,93	87,91%	9,56%	2,53%
	Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	17.794,92	349,94	714,53	18.859,39	94,36%	1,86%	3,79%
	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	38,86	113,10	29,23	181,20	21,45%	62,42%	16,13%
	Kawasan Pariwisata	Kawasan Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-
	Kawasan Peruntukan Permukiman	Kawasan Permukiman Perkotaan	8.599,12	2.148,76	15,31	10.763,20	79,89%	19,96%	0,14%
		Kawasan Permukiman Perdesaan	16.221,58	5.544,10	26,51	21.792,19	74,44%	25,44%	0,12%
	Kawasan Transportasi	Kawasan Transportasi	14,47	10,40	0,04	24,91	58,08%	41,76%	0,16%
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	354,02	81,32	1,93	437,27	80,96%	18,60%	0,44%
	TOTAL		43.952,96	8.348,78	814,35	53.116,09	82,75%	15,72%	1,53%
LUAS TOTAL		47.831,50	8.348,78	1.195,69	57.376				

Sumber : DPTR Kabupaten Sleman, 2022



Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh bahwa kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya sebesar 82,75%, yaitu sesuai atau terwujud, sedangkan kesesuaian pemanfaatan ruang sebanyak 15,72% belum terwujud, dan 1,53% tidak sesuai. Adapun Kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung sebesar 91,05% dan tidak sesuai sebesar 8,95%.

Pada kawasan lindung, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang didominasi oleh rencana kawasan perlindungan setempat yaitu berupa permukiman sebesar 357,43 Ha, sedangkan pada rencana kawasan budidaya terbesar berada pada rencana kawasan pertanian yaitu sebagai kawasan tanaman pangan sebesar 714,53 Ha. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sleman tersebar di seluruh kapanewon, sedangkan kawasan yang belum terwujud didominasi pada kawasan yang berada dekat dengan aglomerasi perkotaan Yogyakarta. Secara spasial, kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sleman dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.



Sumber: DPTR Kabupaten Sleman, 2022

Gambar 2. 23. Kesesuaian Lahan di Kabupaten Sleman Tahun 2022



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan

A. Kesenjangan Ekonomi Masih Relatif Tinggi

Kesenjangan ekonomi merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam setiap proses pembangunan. Kesenjangan ekonomi merupakan salah satu aspek yang dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa argumen terkait hal ini, antara lain bahwa kesenjangan ekonomi dapat memicu timbulnya masalah sosial yang muncul karena adanya sentimen rasa keadilan. Selain itu, kesenjangan juga merupakan ranah manusiawi, dimana kesenjangan yang terlalu *ekstrem* akan menimbulkan persoalan-persoalan kemanusiaan, yang akhirnya berpotensi memunculkan instabilitas sosial dan bahkan instabilitas politik.

Terlepas dari potensi dampak negatif dari kesenjangan, secara konsep kesenjangan pada dasarnya merupakan konsekuensi yang dapat muncul dari pembangunan yang memacu pertumbuhan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, diperlukan berbagai sumber daya dengan proses produksi yang efisien. Prinsip efisiensi inilah yang menjadikan proses pembangunan tidak bisa melibatkan semua sumber daya yang ada, termasuk di dalamnya sumber daya manusia. Konsep efisiensi yang mengedepankan pemanfaatan teknologi, dapat memunculkan dampak kesenjangan, namun bukan berarti pertumbuhan, teknologi dan prinsip efisiensi harus ditinggalkan demi tidak terjadi kesenjangan, karena pertumbuhan, efisiensi dan teknologi merupakan sumber kesejahteraan yang signifikan.

Berdasarkan analisis kondisi *eksisting* yang telah diuraikan pada bab terdahulu, aspek kesenjangan ekonomi masih menjadi persoalan bagi Kabupaten Sleman. Nilai gini yang cenderung tinggi dan meningkat merupakan indikator tingginya kesenjangan antar golongan pendapatan. Untuk perencanaan 20 (dua puluh) tahun ke depan, diperlukan strategi dan program untuk menurunkan kesenjangan, sebelum kesenjangan berdampak negatif terhadap harmoni kehidupan masyarakat yang sudah tertata dengan baik.

Untuk menurunkan kesenjangan, atau meredam dampak negatif kesenjangan, diperlukan antara lain meratakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik antar wilayah, antar sektor, maupun antar golongan masyarakat. Selain itu, memberdayakan masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi dan menanamkan budaya kreatif dan efisien diharapkan dapat meredam menurunkan kesenjangan yang lebih efektif. Selanjutnya berbagai kebijakan, seperti kebijakan pajak dan subsidi perlu dirancang dan diimplementasikan sedemikian rupa sehingga dapat menurunkan kesenjangan tanpa mengurangi pertumbuhan ekonomi.

B. Penurunan Kemiskinan Relatif Lamban

Selain kesenjangan, persoalan lain yang dihadapi Kabupaten Sleman dalam proses pembangunan ke depan adalah masalah kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sleman, memang di bawah angka persentase penduduk miskin Daerah Istimewa Yogyakarta, bahkan jauh di bawah angka Nasional. Namun demikian, tingkat penurunan persentase penduduk miskin mengalami perlambatan mulai lebih dari 0,5% per tahun menurun menjadi kurang dari 0,5% per tahun, bahkan pada tahun 2023, hanya turun 0,2%. Perlambatan penurunan tersebut dapat memperlambat pencapaian penghapusan kemiskinan, meskipun dapat



dipahami bahwa pada tingkat kemiskinan yang rendah cukup sulit untuk lebih ditekan lagi.

Salah satu karakter kemiskinan adalah kemiskinan kultural, dimana penyebab kemiskinan bukan karena rendahnya akses terhadap sumber pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih pada pandangan, kebiasaan, dan bahkan mungkin selera. Untuk mengantisipasi hal ini, tentu dibutuhkan cara dan strategi yang berbeda dan memerlukan waktu yang tidak sedikit. Sebagai contoh, mengubah hobi menjadi profesional adalah hal yang tidak mudah.

Dari konsep di atas, maka pada masa perencanaan ke depan, dalam hal penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman diperlukan komitmen, strategi yang inovatif, dengan pendekatan tidak seragam dan disesuaikan kasusnya. Dengan demikian penanggulangan kemiskinan tidak lagi mengandalkan program-program konvensional dan dianggap rata.

C. Pendapatan per Kapita Masih Relatif Rendah

Secara konsep pendapatan per kapita merupakan cerminan kesejahteraan yang cukup kuat, karena memasukkan unsur jumlah penduduk. Produk domestik regional bruto yang besar tetapi bila jumlah penduduk juga besar, maka tingkat kesejahteraan rata-rata menjadi rendah. Terkait konsep inilah maka produk domestik regional bruto per kapita perlu mendapat perhatian, di samping indikator lain, seperti pertumbuhan ekonomi.

Selaras dengan kinerja kesejahteraan yang lain, pendapatan per kapita Kabupaten Sleman pada dasarnya relatif baik dibanding Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun bila dibandingkan dengan Nasional, pendapatan per kapita Kabupaten Sleman jauh di bawah rata-rata Nasional. Merujuk pada grafik di dalam uraian Bab II, pendapatan per kapita Kabupaten Sleman pada kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar Rp26,78 juta menjadi Rp51,35 juta pada tahun 2023. Sebagai perbandingan, pada tahun 2023 pendapatan per kapita Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai Rp48,36 juta dan Nasional sebesar Rp74,97 juta.

Dari angka di atas, maka Kabupaten Sleman perlu menyusun berbagai strategi, mengejar ketertinggalan dibanding produk domestik regional bruto per kapita Nasional. Harapannya, tingkat kesejahteraan masyarakat Sleman tidak jauh tertinggal dari rata-rata Indonesia secara umum.

D. Kebutuhan Investasi yang Tinggi

Untuk menyelesaikan 3 (tiga) permasalahan di atas, yaitu kesenjangan, perlambatan penurunan kemiskinan, dan pendapatan per kapita, maka diperlukan instrumen yang efektif. Salah satu instrumen yang efektif adalah investasi. Untuk menurunkan kesenjangan, maka dilakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi di semua bidang dan semua wilayah. Salah satu sumber pertumbuhan yang signifikan adalah investasi, baik investasi produksi, investasi infrastruktur, investasi suprastruktur terutama dalam hal sumber daya manusia. Sebagai contoh, untuk mengatasi perlambatan penurunan kemiskinan Kabupaten Sleman, perlu menyasar langsung pada sumber daya manusia, yang merupakan investasi suprastruktur.

Dari kondisi di atas, maka pada perencanaan investasi ke depan bagi Kabupaten Sleman menjadi hal penting, tidak saja jumlahnya, tetapi juga jenis dan sebarannya. Sebaran investasi diharapkan akan mengurangi kesenjangan antar wilayah, sementara variasi fokus investasi akan mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan.



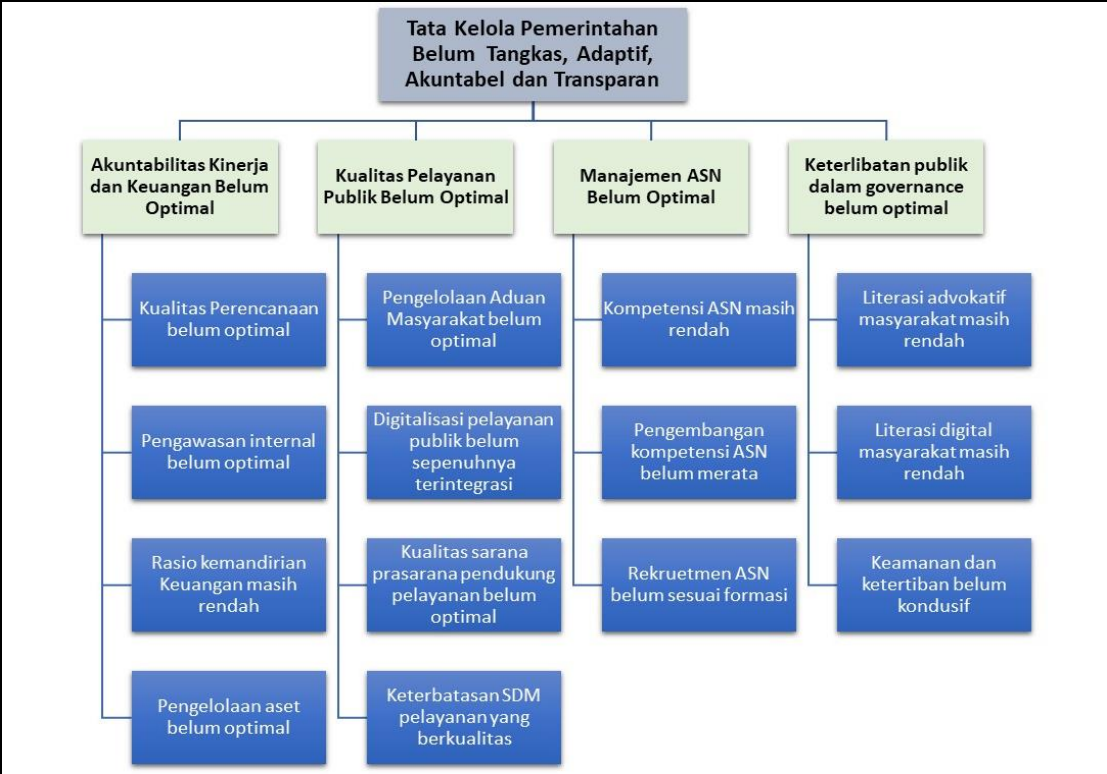
Sebagai gambaran besarnya kebutuhan investasi di Kabupaten Sleman, berdasarkan nilai *incremental capital output ratio* Kabupaten Sleman selama ini adalah sebesar 5-6, yang berarti untuk meningkatkan produk domestik regional bruto sebesar 1% maka dibutuhkan investasi sebesar 5-6%.

E. Ketahanan Pangan Cenderung Menurun

Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir yaitu pada tahun 2018-2023 cenderung menurun. Pada tahun 2018, Indeks Ketahanan Pangan sebesar 83,43 menurun menjadi 83,16 pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena menurunnya nilai dari aspek ketersediaan pangan yaitu sebesar 71,74 pada tahun 2019 menjadi 66,51 pada tahun 2023, yang dapat dilihat dari menurunnya produksi pertanian. Produksi menurun karena dampak perubahan iklim terhadap pola tanam, potensi produksi dan ketersediaan air, skala usaha pertanian yang masih didominasi oleh usaha tani kecil, laju konversi lahan yang cukup tinggi serta produktivitas lahan yang mengalami *levelling off*. Selain itu juga disebabkan penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang belum merata serta inovasi dan diseminasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas belum dilaksanakan secara masif.

F. Tata Kelola Pemerintahan Belum Agile, Adaptif, Akuntabel dan Transparan

Tata kelola pemerintahan (*governance*) merupakan konsep yang mencakup semua proses, struktur, dan mekanisme yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola sumber daya dan urusan publik, meliputi pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, pengawasan dan akuntabilitas. Tata kelola pemerintahan yang baik memastikan bahwa pemerintah bekerja secara efisien, transparan, akuntabel serta responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Akselerasi tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Sleman dilaksanakan melalui penerapan reformasi birokrasi sesuai dengan *road map* reformasi birokrasi Kabupaten Sleman yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.5 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024.



Sumber: Analisis, 2024

Gambar 3. 1. Analisis Permasalahan Bidang Pemerintahan Kabupaten Sleman



Kinerja tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sleman direpresentasikan dengan nilai capaian indeks reformasi birokrasi. Berdasarkan data capaian pada Bab II terlihat bahwa kinerja reformasi birokrasi menunjukkan tren positif pada tahun 2018-2022, dan pada tahun 2023 mencapai nilai 80, 82 dengan predikat A. Indeks reformasi birokrasi tahun 2023 ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya perubahan parameter komponen pengukurannya. Penilaian evaluasi reformasi birokrasi pada tahun 2023 lebih ditekankan pada reformasi birokrasi yang berdampak dan kolaboratif.

Meskipun nilai reformasi birokrasi tahun 2023 telah mencapai predikat A, namun angkanya masih pada batas minimal masuk predikat A. Kondisi ini mencerminkan bahwa kinerja tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sleman belum sepenuhnya akuntabel, transparan, tangkas dan adaptif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain akuntabilitas kinerja dan keuangan belum optimal, kualitas pelayanan publik berbagai sektor belum optimal, manajemen aparatur sipil negara belum optimal serta keterlibatan publik dalam *governance* belum optimal.

1. Akuntabilitas kinerja dan keuangan belum optimal

Akuntabilitas kinerja suatu daerah bisa dilihat dari capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sleman selama 4 (empat) tahun terakhir cenderung meningkat, bahkan pada tahun 2023 mencapai angka 82,75, dengan predikat A. Meskipun telah mencapai predikat A, namun dari skor yang didapat masih perlu ditingkatkan untuk menyentuh nilai di atas 90 atau AA.

Hal ini mencerminkan bahwa akuntabilitas kinerja di Kabupaten Sleman belum optimal. Beberapa faktor menjadi penyebab permasalahan akuntabilitas kinerja belum optimal, yaitu: Pertama, kualitas perencanaan kinerja belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat pada komponen perencanaan kinerja berada pada angka 27,58 dari bobot maksimal 30 dan pengukuran kinerja mendapat nilai 22,76 dari bobot maksimal 30. Apabila ditelusuri lebih jauh, capaian yang belum optimal tersebut disebabkan pohon kinerja yang disusun masih dibatasi oleh kewenangan/struktur organisasi, sehingga belum sepenuhnya tersusun berdasarkan *critical success factor* dan *logical framework* yang lebih komprehensif. Kondisi ini menggambarkan bahwa struktur kelembagaan masih terfragmentasi, sehingga belum tangkas dan adaptif terhadap kebutuhan publik. Di samping itu, manual indikator kinerja utama pada level perangkat daerah belum seluruhnya dilengkapi dengan definisi operasional, formulasi perhitungan, dan sumber data untuk mengetahui cara pengumpulan dan perhitungan indikator kinerja serta laporan kinerja pada level perangkat daerah belum seluruhnya menyajikan analisis mengenai faktor penghambat dan pendukung, analisis detail terkait keberhasilan program/kegiatan, dan analisis terkait upaya *refocusing* program/kegiatan.

Kedua, pengawasan internal masih belum optimal ditunjukkan dengan data nilai komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada angka 19,28 dari bobot maksimal 30 dan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi masih di level 3 (terdefinisi) dengan angka 3,390 dari level maksimal 5.

Ketiga, pengelolaan inovasi daerah masih belum optimal ditunjukkan dengan angka indeks inovasi daerah Kabupaten Sleman tahun 2023 masih diangka 57,23 dengan predikat inovatif. Pencapaian ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Inovasi daerah diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan lebih efisien dan efektif.



Permasalahan lainnya adalah akuntabilitas keuangan Kabupaten Sleman belum optimal. Akuntabilitas keuangan pada tataran kriteria hasil audit sudah menunjukkan wajar tanpa pengecualian, namun dukungan keuangan dalam meningkatkan kinerja masih perlu diselaraskan dengan kinerja pada tingkat pemerintah kabupaten, perangkat daerah, unit-unit pelaksanaan sampai pada level individu. Di sisi lain tingkat kemandirian Kabupaten Sleman yang ditunjukkan dengan proporsi pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih rendah. Persentase pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Sleman pada tahun 2023 sebesar 36,65%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 35,30%. Apabila ditelusuri lebih jauh kemandirian keuangan yang masih rendah di Kabupaten Sleman disebabkan belum maksimalnya upaya rasionalisasi retribusi daerah dengan menciptakan klasifikasi dan basis perpajakan yang diperbaharui, intensifikasi pajak dan retribusi daerah belum optimal terutama dalam ekstensifikasi wajib pajak dan retribusi, adanya deviasi karena belum optimalnya pengintegrasian antara program kegiatan dengan penganggaran yang ada dalam dokumen perencanaan daerah dan pengelolaan aset daerah yang belum optimal, termasuk aset desa.

2. Kualitas pelayanan publik berbagai sektor belum optimal

Kualitas pelayanan publik sangat penting untuk mendorong terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sleman mengalami sedikit penurunan ditunjukkan dengan menurunnya nilai indeks pelayanan publik dari 4,60 (tahun 2022) menjadi 4,54 (tahun 2023). Di sisi lain, tingkat kepatuhan standar pelayanan publik mencapai angka 93,54%. Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman lima tahun terakhir menunjukkan tren yang positif dan secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik, namun rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Sleman yang dicapai tahun 2023 sebesar 84,58, belum mencapai target RPJPD sebelumnya dan masih di bawah indeks kepuasan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berbagai sektor di Kabupaten Sleman belum optimal. Berbagai persoalan yang menyebabkan kualitas pelayanan publik belum optimal adalah (1) pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum optimal karena sistem Lapor Sleman sebagai sistem pengaduan masyarakat Kabupaten Sleman terhadap pelayanan publik belum terintegrasi dengan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) mengakibatkan respons terhadap berbagai keluhan masyarakat belum tertangani secara optimal; (2) digitalisasi pelayanan publik yang belum sepenuhnya terintegrasi sehingga data masih berada pada aplikasi masing-masing; (3) kualitas sarana dan prasarana pendukung layanan publik masih belum optimal diantaranya beberapa sarana pendukung layanan administrasi dan kependudukan telah memasuki masa *out of product* dan *out of service*; serta (4) keterbatasan sumber daya manusia pelayanan yang berkualitas, khususnya di wilayah kapanewon.

3. Manajemen aparatur sipil negara belum optimal



Aparatur sipil negara memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, diperlukan adanya manajemen aparatur sipil negara yang tepat. Kinerja manajemen aparatur sipil negara di Kabupaten Sleman dapat dilihat dari capaian indeks profesional aparatur sipil negara dan indeks sistem merit. Indeks profesionalitas aparatur sipil negara Kabupaten Sleman tahun 2023 mencapai 72,11 meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2022 (55,22). Namun angka tersebut masih dalam kategori rendah. Indeks sistem merit Kabupaten Sleman tahun 2023 juga masih stagnan berada pada angka 336.

Kondisi ini mencerminkan bahwa manajemen aparatur sipil negara di Kabupaten Sleman belum optimal. Hal ini disebabkan karena kompetensi aparatur sipil negara yang cenderung rendah baik secara teknis, manajerial maupun sosial kultural ditunjukkan dengan masih rendahnya penguasaan teknologi informasi, bahasa asing dan *networking* bagi sebagian besar aparatur sipil negara. Di samping itu, pengembangan kompetensi di berbagai tingkatan atau jenis jabatan yang belum merata, disebabkan manajemen talenta belum dilaksanakan dengan baik dan digunakan sebagai dasar untuk penguatan kapasitas aparatur sipil negara serta rekrutmen aparatur sipil negara yang belum sesuai dengan formasi juga menjadi faktor penyebabnya.

4. Keterlibatan publik dalam *governance* belum optimal

Keterlibatan publik dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan data persentase keterlibatan publik dalam proses perencanaan pembangunan pada tahun 2022 adalah sebesar 76,08%, angka ini cenderung sedang dan masih dapat dilakukan optimalisasi. Hal ini dapat disebabkan karena tingkat literasi advokatif masyarakat dalam sistem pemerintahan, pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan keuangan dan aset daerah masih cenderung rendah.

Dalam era transformasi digital, tingkat literasi digital masyarakat sangat berpengaruh terhadap akses informasi di Kabupaten Sleman yang dapat mendorong peningkatan pemahaman publik dalam sistem pemerintahan dan pembangunan. Indeks literasi digital Kabupaten Sleman tahun 2023 berada pada angka 3,6 dari skala 5, dengan kategori cukup baik, meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 3,26, meskipun masih di bawah Daerah Istimewa Yogyakarta. Belum tingginya literasi digital masyarakat disebabkan karena keamanan digital masih belum optimal, terutama Kapanewon Seyegan dan Minggir, serta ketrampilan digital di Kapanewon Prambanan dan Godean. Adapun etika digital dan budaya digital sudah lumayan baik, meskipun masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini tentunya sangat mempengaruhi terhadap kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

Tingkat partisipasi publik tidak hanya ditunjukkan melalui keterlibatan musyawarah perencanaan pembangunan saja, namun juga dalam pengawasan partisipatif dan dukungan publik dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban umum. Pada tahun 2023, Kabupaten Sleman menjadi daerah dengan kasus kriminalitas tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tingkat kriminalitas di Kabupaten Sleman mencapai angka 232 per 100.000 penduduk dan tindak kejahatan dilaporkan sebanyak 2.667 kasus dengan jenis kejahatan terbesar pada penipuan, pencurian biasa, penganiayaan, penggelapan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan.



Di samping itu, pada tahun 2023, pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman dan keindahan) juga masih terjadi, sebanyak 30 kasus dan jumlah pelanggaran perda yang terpantau sebanyak 93 kasus. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sleman belum kondusif. Dengan banyaknya perguruan tinggi yang menjadi magnet bagi masyarakat dari berbagai daerah dengan beragam budaya untuk menimba ilmu, menjadikan Kabupaten Sleman sebagai wilayah dengan keragaman yang sangat tinggi. Meskipun mendongkrak perekonomian wilayah, namun kondisi ini juga menjadi salah satu potensi timbulnya kerawanan dan kriminalitas, konflik bernuansa SARA, aksi terorisme dan separatisme. Kejahatan jalanan berupa *klitih* yang semakin marak juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya tingkat kriminalitas di Kabupaten Sleman.

G. Kualitas Lingkungan Hidup Belum Pada Kategori Baik

Ada beberapa permasalahan terkait lingkungan hidup di Kabupaten Sleman. Permasalahan pertama adalah nilai indeks kualitas air pada sungai yang mengalir di Kabupaten Sleman menunjukkan kategori kurang baik. Indeks kualitas air pada air sungai dipengaruhi oleh 2 (dua) sumber, yaitu *point source* (sumber terlihat) dan *non-point source* (sumber tidak terlihat). Sumber terlihat berasal dari pembuangan industri-industri di Kabupaten Sleman yang belum memiliki pengolahan air limbah yang memadai, terutama industri menengah dan kecil. Sumber tidak terlihat dapat berasal dari pembuangan air limbah rumah tangga terutama *grey water*, *run-off* (air hujan) dari drainase, lahan pertanian, area peternakan, dan kandungan organik dari makhluk hidup atau jasad renik yang telah mati. Sumber pencemaran tadi sangat berpotensi untuk menurunkan kualitas air sungai terutama pada musim kemarau saat debit air sungai menurun. Penurunan kualitas air sungai akan berdampak buruk pada kesehatan lingkungan dan masyarakat, dan mempengaruhi proses dan biaya pengolahan air bersih.

Permasalahan kedua berkaitan dengan kualitas udara. Berdasarkan data peningkatan kadar CO₂ di udara, perlu ada perhatian terhadap emisi-emisi yang berasal dari sektor energi dan transportasi. Sektor ini dapat menurunkan nilai indeks kualitas udara, terutama dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk dan penggunaan kendaraan bermotor. Adapun dari sektor *agriculture, forestry, and other land use*, banyak temuan kegiatan pertanian yang memberikan kontribusi gas rumah kaca. Pada jangka pendek, memang belum diperlukan narasi lanjutan untuk menangani ini, tapi pada jangka panjang, tetap diperlukan kegiatan *agriculture, forestry, and other land use* yang berprinsip pembangunan berkelanjutan.

Permasalahan ketiga terkait kualitas tutupan lahan di Kabupaten Sleman. Indeks kualitas tutupan lahan di Kabupaten Sleman tahun 2023 dengan nilai sebesar 43,78, lebih baik dari tahun 2022 yang sebesar 31,73, namun masih berada pada kategori kurang. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, indeks kualitas tutupan lahan tahun 2023 meningkat karena adanya penambahan jenis tutupan lahan, berupa ruang terbuka hijau atau ruang yang memiliki fungsi lindung seperti sempadan sungai dan sempadan embung. Nilai indeks kualitas tutupan lahan ini menjadi salah satu indikator penting yang menjadi tolok ukur upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini karena kebutuhan akan lahan dari tahun ke tahun makin meningkat, sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, yang menyebabkan pemanfaatan lahan juga semakin intensif. Beberapa dampak sebagai akibat berkurangnya luasan tutupan lahan, antara lain:



- 1) Penurunan kualitas lingkungan hidup;
- 2) Mengganggu lingkungan dan berkurangnya kemampuan vegetasi atau hutan yang dapat menyerap dan mengurangi kandungan gas rumah kaca; dan
- 3) Berkurangnya produksi pangan, terutama padi sebagai bahan pokok sumber makanan masyarakat di Kabupaten Sleman.

Kualitas lingkungan dapat dilihat dari nilai indeks kualitas lingkungan hidup, yang meliputi nilai indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan yang semakin meningkat, sedangkan kualitas hidup masyarakat dapat dilihat dari naiknya aktivitas ekonomi yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai produk domestik regional bruto Kabupaten Sleman. Berkaca pada nilai indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Sleman yang masih berada pada kategori sedang, maka perlu dilakukan upaya untuk menaikkan nilai indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sleman.

H. Penyediaan Infrastruktur Dasar Belum Optimal

Penyediaan infrastruktur dasar di Kabupaten Sleman memang sudah merata mencapai berbagai wilayah, namun kualitas dan kapasitasnya masih perlu menjadi perhatian. Terhambatnya laju pertumbuhan infrastruktur dasar ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup, kerusakan lingkungan, dan mudahnya penyebaran penyakit melalui air, tanah dan udara. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur dasar, seperti pengolahan air bersih, pengolahan air limbah dan pengelolaan timbunan sampah menjadi isu yang sangat penting dan harus dievaluasi efektivitasnya. Hal ini menuntut pemerintah meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar sanitasi di Kabupaten Sleman. Beberapa layanan dasar yang perlu untuk diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur Pertanian

Infrastruktur pertanian pada bahasan ini diwakili oleh jaringan irigasi. Inventarisasi kondisi saluran irigasi dan daerah irigasi menjadi penting untuk mempermudah kegiatan pemeliharaan irigasi dan menjamin suplai air irigasi dapat mengalir ke semua daerah irigasi. Panjang saluran irigasi dan daerah irigasi yang dalam kondisi baik pada tahun 2023 sebesar 81,29% (532.955 m), kategori sedang 13,22% (86.666 m) dan kategori rusak 5,49% (35.969 m).

Berdasarkan data di atas, maka masih ada saluran irigasi dan daerah irigasi dengan kondisi yang kurang baik/layak, sehingga memerlukan rehabilitasi perbaikan dan rehabilitasi saluran dan daerah irigasi untuk meningkatkan efisiensi jumlah air yang dikirimkan ke area pertanian dan yang nantinya dapat meningkatkan produksi hasil pertanian. Selain itu, perlu dibuatkan suatu kebijakan atau aturan untuk menaikkan produktivitas lahan pertanian, diantaranya:

- a. Mencegah perubahan lahan pertanian produktif menjadi lahan non-pertanian;
- b. Meningkatkan rehabilitasi saluran irigasi yang masih dalam kondisi sedang dan rusak; dan
- c. Mempertahankan dan memperbaiki bangunan embung yang mengalami kerusakan sedang dan rusak.

2. Prasarana Permukiman

a. Ruang Terbuka Hijau

Pengelolaan ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Sleman belum dapat terlaksana secara optimal. Luas ruang terbuka hijau baru mencapai 6,7% dari luas wilayah perkotaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan kepemilikan lahan oleh pemerintah,



kesadaran masyarakat yang masih relatif rendah, nilai jual tanah yang relatif tinggi, dan keterbatasan sarana dan prasarana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota, yang terdiri atas wilayah hutan dan tegakan vegetasi, dan 10% merupakan ruang terbuka hijau privat.

Ruang terbuka hijau publik, selain berfungsi untuk pelestarian lingkungan, yakni sebagai resapan air, penyedia oksigen dan pengaturan iklim, juga memiliki fungsi-fungsi sosial, yakni fungsi rekreasi, ruang interaksi sosial, ruang publik untuk tumbuh kembang anak terutama di kawasan perumahan yang saat ini cenderung tidak mengarah pada tumbuh kembang anak, hingga sebagai ruang kedaruratan masyarakat, yaitu untuk titik kumpul ketika terjadi kedaruratan, seperti pada kerawanan bencana. Keterbatasan jumlah ruang terbuka hijau publik secara tidak langsung menjadi beban masyarakat melalui berkurangnya kualitas hidup akibat rendahnya kualitas udara bersih serta hilangnya daya perekat sosial antar masyarakat.

Faktor penghambat penyediaan ruang terbuka hijau publik antara lain adalah terkait dengan keterbatasan pengelolaan pemanfaatan ruang serta belum tercapainya pengarusutamaan valuasi manfaat ruang terbuka hijau publik. Sebagian besar pengelolaan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sleman hanya mengakomodasi kondisi *eksisting* dan belum berani berinovasi bersama masyarakat untuk mewujudkan ruang yang asri, lestari dan sehat bagi masyarakat. Intervensi penyediaan ruang terbuka hijau publik sering kali dibebankan pada tanah milik pemerintah daerah maupun tanah milik desa sehingga aspek fungsi publik akan sangat tergantung pada ketersediaan tanah tersebut. Pemerintah Kabupaten Sleman juga belum memiliki sikap yang tegas untuk berinvestasi pada pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau publik.

b. Akses Hunian Layak

Berdasarkan data terkait akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan menunjukkan masih terdapat rumah yang masih belum layak huni di Kabupaten Sleman. Rumah tidak layak huni di Kabupaten Sleman masih ada sekitar 2,32% yang belum mendapat penanganan, sehingga Pemerintah Kabupaten Sleman masih memiliki tugas cukup besar untuk menangani rumah yang belum layak huni untuk menaikkan kesehatan tempat tinggal, sanitasi yang aman dan mengurangi penyebaran penyakit. Selain itu, penanganan rumah tidak layak huni harus memperhitungkan arah perkembangan kota untuk merencanakan area permukiman dan akses hunian layak untuk penduduk Kabupaten Sleman hingga tahun 2045.

c. Sanitasi Aman

Akses sanitasi layak di Kabupaten Sleman sudah tinggi mencapai 99,37% pada tahun 2023, sedangkan penduduk yang memiliki akses sanitasi belum layak tercatat sebanyak 2.383 kartu keluarga (0,63%). Akses sanitasi aman baru mencapai 26,15% atau sebanyak 98.824 kartu keluarga yang dilayani dengan instalasi pengolahan air limbah. Berdasarkan data tersebut, masih ada keluarga di Kabupaten Sleman yang belum memiliki sanitasi layak serta masih banyak rumah tangga yang belum terakses pengolahan



air limbah secara terpusat atau komunal. Kondisi ini dapat menyebabkan potensi risiko sanitasi dari pencemaran air limbah terhadap lingkungan. Adapun berdasarkan laporan *environmental health risk assesment* tahun 2023, di Kabupaten Sleman masih terdapat kalurahan dengan indeks risiko sanitasi tinggi pada 17 kalurahan (19,76%) dari 86 kalurahan.

Pelayanan sarana pengolahan air limbah domestik terpusat baik berupa instalasi pengolahan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah komunal masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan infrastruktur pengolahan air limbah sampai tahun 2023 baru terdiri dari 1 (satu) instalasi pengolahan air limbah regional perkotaan Sewon, 2 (dua) instalasi pengolahan air limbah terpusat permukiman Berbah dan Depok, serta 178 instalasi pengolahan air limbah komunal. Selain itu, jumlah instalasi pengolahan lumpur tinja di Kabupaten Sleman baru 2 (dua) unit dengan kapasitas pengolahan sekitar 55 m³/hari. Kapasitas instalasi pengelolaan lumpur tinja ini masih jauh dari ideal untuk mengolah air limbah dari 265.723 kartu keluarga pada tahun 2023, yang menggunakan jamban individu dan tangki septik layak. Adapun pada tahun 2024, dilakukan peningkatan kapasitas pengolahan di instalasi pengelolaan lumpur tinja Madurejo menjadi 100 m³/hari, sehingga total kapasitas instalasi pengelolaan lumpur tinja menjadi 130 m³/hari. Meskipun demikian, peningkatan jumlah dan kapasitas instalasi pengelolaan lumpur tinja harus selalu dilakukan untuk dapat mengolah seluruh lumpur tinja di Kabupaten Sleman.

Oleh karena itu, untuk menuju Indonesia Emas pada tahun 2045, maka Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menyusun perencanaan dan program untuk memenuhi target 85% penduduk memiliki akses sanitasi aman. Beberapa permasalahan sanitasi yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, antara lain:

- 1) Masih ada rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi layak. Penyediaan akses sanitasi layak menggunakan tangki septik individu atau bersama yang terhubung dengan pengolahan air limbah terpusat, terutama di daerah yang memiliki risiko sanitasi rendah.
- 2) Kualitas air sumur atau air bawah tanah dapat menurun karena terkontaminasi kandungan amonia dan patogen bakteri dari buangan tangki septik. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pengolahan air limbah komunal dan terpusat serta instalasi pengelolaan lumpur tinja, sehingga meningkatkan akses masyarakat yang terhubung saluran air limbah melalui *pipa sewerage*.

d. Pengelolaan Sampah

Berdasarkan data pengelolaan sampah dan indeks risiko sanitasi sektor persampahan, Kabupaten Sleman masih memiliki permasalahan pengelolaan persampahan, baik penanganan maupun pengurangan sampah mulai dari sumber (rumah tangga), tempat pengelolaan sampah *reuse*, *reduce* dan *recycle* dan tempat pengolahan sampah terpadu, dan pengelolaan sampah dengan teknologi yang modern yang sangat minim seperti *furnace* dan *refuse derive fuel*.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman pada dasarnya sudah dimulai dari sumber mulai dari pengumpulan, pemisahan dan pengurangan di sumber. Akan tetapi, kegiatan pemisahan dan pengurangan sampah di sumber tidak berjalan dengan baik karena



penghasil sampah dari rumah tangga masih belum bijak dalam memilah sampah organik (sampah dapur), anorganik (kaca, plastik, kaleng, dan kardus) dan sampah B3 (baterai, lampu, barang elektronik, dan botol cairan pembersih). Banyak sampah yang dicampur menjadi satu, sehingga menyusahkan pengumpul dan pengelola sampah di tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pengelolaan sampah *reuse*, *reduce*, dan *recycle* dalam memilah sampah, mengelola sampah organik, dan membuang sisa residu sampah.

Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Sleman pada tahun 2023 sebesar 601,80 ton/hari. Dari timbulan sampah yang dikumpulkan tersebut, jumlah sampah yang tertangani sebesar 262,18 ton/hari atau 43,57% dan persentase pengurangan sampah sebesar 8,32%. Hal ini menunjukkan tingkat pengelolaan sampah dengan menggunakan sarana dan prasarana tempat pengelolaan sampah *reuse*, *reduce*, dan *recycle* yang ada pada tingkat lingkungan permukiman masih belum optimal, terlebih dengan masih ditemukannya sampah yang diangkut langsung ke tempat pengolahan sampah terpadu tanpa melalui tahap pengelolaan dan pemilahan.

Infrastruktur pengelolaan lingkungan seperti sarana prasarana persampahan belum maksimal tersedia. Sampai awal tahun 2024, prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman terdiri dari 2 tempat pengolahan sampah terpadu, 41 tempat pengelolaan sampah *reuse*, *reduce*, dan *recycle* dan sebagainya. Adapun kondisi sarana persampahan di Kabupaten Sleman adalah 34 buah *dump truck*, 7 buah *arm roll*, 1 unit *backhoe* dan 1 unit *loader*.

Pertumbuhan jumlah penduduk akan berdampak secara langsung terhadap jumlah timbulan sampah. Kebutuhan sarana dan prasarana pun akan lebih besar lagi untuk mengelola sampah domestik untuk proyeksi penduduk pada tahun 2045. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menyusun strategi untuk meningkatkan pengelolaan sampah, sehingga layanan sampah pada tahun 2045 mencapai 100% dan proporsi sampah terolah mencapai lebih dari 90%.

e. Akses air bersih

Akses air bersih di Kabupaten Sleman mencapai 100% dengan sumber air baku yang berbeda-beda, seperti air sumur, mata air, ledeng/perusahaan daerah air minum dan lainnya. Sistem penyediaan air bersih melalui perpipaan baru mencapai 23,50% pada tahun 2023. Angka ini masih jauh dari target akses air minum perpipaan pada tahun 2045 yang sebesar 100% terlayani. Hal ini karena masih banyak masyarakat yang memilih menggunakan air sumur (sumur dangkal atau dalam). Kemampuan masyarakat terutama golongan ekonomi menengah ke bawah tidak mampu untuk membayar biaya instalasi jaringan perpipaan ke rumah dan biaya retribusi pemakaian jasa air bersih.

Permasalahan akses air bersih pada saat ini masih memiliki kendala karena terbatasnya akses dan instalasi air bersih perpipaan, serta kendala sistem administrasi. Selain itu, permasalahan ke depannya adalah dampak pertumbuhan penduduk terhadap meningkatnya permintaan instalasi terhadap air bersih akan semakin tinggi. Hal ini akan menjadi kendala jika perusahaan daerah air minum tidak mampu menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memberikan



pelayanan yang baik, air yang berkualitas dan layak minum, serta kontinuitas ketersediaan air. Beberapa hal terkait pelayanan air bersih yang menjadi perhatian adalah:

- 1) Upaya mempertahankan cakupan pelayanan air minum 100%, baik perpipaan maupun non-perpipaan pada tahun 2045;
- 2) Meningkatkan kuantitas sumber daya air minum melalui upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air secara terpadu; dan
- 3) Mendorong pemerataan pembangunan melalui keterpaduan perencanaan wilayah untuk menekan laju kebutuhan air bersih.

Permasalahan lainnya adalah sumber air bersih dari 76,50% kartu keluarga di Kabupaten Sleman pada tahun 2023 masih menggunakan sumber air bersih non perpipaan, dengan sebagian besar menggunakan sumur gali. Dalam jangka panjang, sumber air bersih yang berasal dari sumur gali ini diarahkan untuk menggunakan jaringan air minum perpipaan untuk memastikan kelayakan dan keamanan sumber air bersih masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang strategis dan optimalisasi kapasitas pengelola sistem penyediaan air minum perpipaan dan non-perpipaan, pengembangan inovasi untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air minum, meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya air minum, dan meningkatkan sarana dan prasarana penyediaan air bersih untuk mengatasi pertumbuhan penduduk. Selain itu, pemenuhan kebutuhan sumber air baku untuk menjamin pemerataan dan keberlanjutan suplai air bersih di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

I. Masih Terdapat Ketidaksesuaian Perwujudan Tata Ruang

Pengelolaan penataan ruang yang belum efektif digambarkan melalui perwujudan pemanfaatan ruang yang masih belum sesuai rencana tata ruang dan perwujudan ruang yang cenderung belum sesuai bobot pada rencana sistem perkotaan dalam rencana tata ruang. Selain itu, permasalahan pemahaman masyarakat juga mendasari permasalahan pengelolaan penataan ruang lainnya.

1. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pertanahan dan penataan ruang

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pertanahan dan penataan ruang menyebabkan adanya pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang. Rendahnya pemahaman ini juga menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan, baik pada lahan pertanian maupun pada lahan yang bersifat lindung atau lahan alami lainnya. Alih fungsi lahan ini akan memberikan dampak pada lingkungan. Alih fungsi lahan ini secara tidak langsung merupakan dampak timbal balik oleh harga lahan yang kurang terjangkau.

2. Pengendalian pemanfaatan ruang dan tata bangunan yang belum tegas

Pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan di Kabupaten Sleman, yang tidak sesuai peruntukan cenderung belum tegas. Jika tidak ada ketegasan dalam pengendalian pemanfaatan ruang, maka kondisi lingkungan hidup akan berpotensi semakin menurun. Pendekatan pengendalian pemanfaatan ruang juga bisa dikaitkan dengan pemahaman masyarakat yang masih rendah. Oleh karena itu, aspek preventif dalam pemanfaatan ruang perlu diupayakan melalui pembinaan dan kesepakatan bersama dalam perencanaan tata ruang.

3. Masih adanya penggunaan tanah kalurahan yang tidak sesuai fungsinya



Perkembangan wilayah Kabupaten Sleman yang tumbuh dengan masif, terutama fasilitas pendidikan tinggi menyebabkan *multiplier effect* pada sektor perdagangan dan jasa seperti restoran, jasa *laundry* hingga perumahan (kontrakan atau kos), yang akhirnya berdampak pada peningkatan nilai tanah yang ada.

Keterbatasan ruang yang ada di Kabupaten Sleman menyebabkan penggunaan ruang yang tidak semestinya, tidak sesuai peruntukannya. Berdasarkan temuan di lapangan banyak ditemukan adanya penyelewengan tanah kas kalurahan yang dilakukan oleh oknum hingga diperjualbelikan menjadi perumahan. Pentingnya pengawasan dan pengendalian tanah kas kalurahan di Kabupaten Sleman menjadi sebuah solusi untuk menekan penyelewengan pemanfaatan penggunaan tanah kas kalurahan. Dari sisi birokrasi, pemerintah dapat menyediakan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan pemanfaatan tanah kas kalurahan dan pengetatan pengeluaran izin pemanfaatan tanah kas kalurahan. Dukung masyarakat untuk mengawasi pemanfaatan tanah kas kalurahan apabila terindikasi terdapat ketidaksesuaian pemanfaatan tanah kas kalurahan.

J. Pergerakan dan Konektivitas Belum Sepenuhnya Memadai

Kabupaten Sleman tidak memiliki permasalahan dari sisi sistem jaringan dan konektivitas. Permasalahan yang timbul adalah dari sisi sistem pergerakan dan sistem kegiatan. Tiga sistem tersebut seharusnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan perencanaan transportasi. Dalam perkembangannya, saat ini sudah tidak terasa lagi adanya sistem pergerakan yang memadai ataupun merata. Dari sisi sistem kegiatan, bangkitan kegiatan semakin merata menjadi sumber pergerakan yang terpecah. Meskipun tersedia sistem jaringan jalan yang memadai, pembiayaan sistem pergerakan akan cenderung lebih mahal. Kondisi ini mereduksi hak-hak masyarakat dalam kebebasan pergerakan maupun pemilihan moda pergerakan. Permasalahan ini dirasakan bahwa penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat justru akan menjadi beban bagi jalan (kemacetan).

K. Manajemen Sistem Transportasi Belum Efektif

Manajemen sistem transportasi yang belum memadai berkaitan dengan tiga sistem transportasi, yakni sistem jaringan, sistem kegiatan dan sistem pergerakan. Belum terpantaunya rantai pasok di Kabupaten Sleman menjadi satu kendala bagi perencanaan jaringan jalan yang memadai. Hal ini berdampak pada kerawanan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sleman yang cenderung meningkat.

Selain manajemen sistem, penyediaan sistem pergerakan juga mengalami banyak kendala. Kemudahan dalam mendapatkan akses kepemilikan kendaraan pribadi bermotor menyebabkan pergeseran paradigma perjalanan masyarakat yang ada di Kabupaten Sleman. Ketidakterjangkauan trayek dari angkutan umum ini mengakibatkan perpindahan moda transportasi umum ke kendaraan pribadi. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, persentase layanan angkutan darat tanpa angkutan perkotaan pada tahun 2023 baru mencapai 26,49%. Selain itu, rasio izin trayek juga cenderung mengalami penurunan dan pada tahun 2023 sebesar 0,00026. Data tersebut mengindikasikan ketersediaan angkutan umum yang terbatas.

L. Kualitas Kesehatan Belum Optimal

Kualitas kesehatan masih belum optimal, ditandai dengan masih adanya angka kematian ibu, angka kematian bayi, prevalensi gizi buruk dan kasus *stunting* yang relatif tinggi. Baik angka kematian ibu, angka kematian bayi, prevalensi gizi buruk maupun *stunting* merupakan



permasalahan yang saling terkait. Masalah pengetahuan tentang gizi, budaya makan dan pola konsumsi, serta aksesibilitas terhadap sarana-prasarana penunjang kesehatan dan sumber daya air merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional. Penanganan dan pencegahan yang kurang terpadu dan terintegrasi akan menjadikan hasilnya kurang optimal.

M. Kualitas Keluarga Belum Merata

Kualitas keluarga yang baik belum tercapai pada setiap keluarga di Kabupaten Sleman. Hal ini disebabkan masih adanya sisi lemah dari ketahanan fisik dan ekonomi serta kesadaran pentingnya ketahanan sosial psikologi dan sosial budaya yang belum meluas dan mendalam di kalangan masyarakat maupun *stakeholders*.

1. Ketahanan fisik yang terbentuk dari asupan sehat dan bergizi, sehingga meminimalkan keluhan kesehatan. Tindakan antisipatif terhadap berbagai masalah seperti gizi buruk dan keluhan sakit belum menjadi supervisi dan pengendali yang bersifat pragmatis dan parsial. Hal ini disebabkan oleh belum terintegrasikannya sistem layanan kesehatan yang sederhana, mudah diselenggarakan oleh institusi terbawah. Perilaku dan kebiasaan hidup bersih dan sehat belum optimal dilaksanakan. Lingkungan yang bebas rokok juga belum dapat terkondisi secara optimal, bahkan masih ditemukan anak yang merokok. Hal ini menggambarkan belum optimalnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam merespons dan melembagakan pentingnya kondisi fisik yang kuat.
2. Ketahanan ekonomi masih belum mengakar pada setiap keluarga secara merata, karena adanya kesenjangan penghasilan dengan upah minimum kabupaten relatif rendah. Jumlah wanita yang bekerja juga terbatas. Dengan penghasilan minim, maka akan mengalami kesulitan untuk membangun rumah, menabung, membayar asuransi secara rutin, dan membiayai sekolah anak. Pendapatan keluarga yang belum merata menggambarkan adanya ketimpangan sosial ekonomi.
3. Ketahanan sosial-psikologi belum tertanam dengan optimal, sehingga keluarga mudah guncang dan kurang mampu mengelola anggota keluarga. Hal ini berpotensi pada terjadinya kekerasan terhadap anak. Terbatasnya kegiatan anak bersama orang tua karena mobilitas orang tua yang tinggi, akan menimbulkan kondisi yang vakum dan kurang responsif terhadap permasalahan yang timbul. Kurang kondusifnya lingkungan sosial, contohnya tidak segera menangani korban kejahatan dengan tuntas, juga menambah rentannya ketahanan sosial-psikologi.
4. Ketahanan sosial-budaya masih belum melembaga pada setiap keluarga, sehingga masih banyak terjadi perkawinan anak. Kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat juga belum optimal. Untuk meningkatkan ketahanan sosial-budaya ini, perlu mengasah kepekaan sosial, menambah frekuensi kegiatan bersama antara orang tua dan anak dan meningkatkan pelayanan internal lansia.

N. Kesetaraan Gender Belum Terwujud Optimal

Kesetaraan gender dalam konteks sosial, budaya, ekonomi dan politik belum dapat terwujud secara optimal, karena keterbatasan kapasitas dan kualitas perempuan untuk berkembang, dan masih adanya stereotip terhadap atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki.

1. Belum optimalnya implementasi kesetaraan gender bersumber pada faktor internal dan eksternal. Faktor internal perempuan yang masih belum optimal dalam kapasitas dan pengembangan diri untuk



mencapai profesionalitas, sehingga partisipasi perempuan masih terbatas. Faktor eksternal berupa program yang belum secara optimal menyerap muatan gender, sehingga perlu untuk ditingkatkan kapasitasnya.

2. Pemberdayaan gender untuk membentuk peran gender masih pada tataran permukaan. Aspek-aspek peran gender tersebut belum tercermin secara mendalam. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi, keseimbangan dan keselarasan peran gender secara optimal. Salah satunya dengan pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap gender secara inklusif. Peran gender ini juga penting ditanamkan melalui budaya maupun pendidikan pengetahuan.

O. Pembangunan Pemuda Belum Optimal

Pembangunan pemuda dalam mendukung pencapaian pembangunan manusia belum optimal. Hal ini dicerminkan dengan rata-rata lama sekolah yang masih terbatas, terjadinya anak putus sekolah, lemahnya angkatan kerja, dan tidak terserapnya angkatan kerja dengan baik.

- 1) Secara umum indeks pendidikan Kabupaten Sleman meningkat. Namun berdasarkan capaian angka partisipasi murni, terutama jenjang sekolah SD/MI dan SMP/MTs, yang mencerminkan pembangunan pendidikan dalam mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia, belum optimal. Tingginya angka harapan lama sekolah belum diikuti dengan rata-rata lama sekolah secara seimbang. Gap antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah sangat lebar, yaitu lebih dari 5 tahun, yang menunjukkan adanya harapan mencetak sarjana masih terpenuhi, meskipun ketersediaan tenaga kerja terdidik yang berdaya saing tinggi masih relatif terbatas, terlebih dengan belum dilaksanakan kebijakan sekolah vokasi.
- 2) Kualitas ketenagakerjaan terampil dan terdidik serta profesional masih terbatas, sehingga kurang terserap ke dalam bursa kerja yang mapan. Hal ini berdampak pada kesejahteraan relatif rendah karena penerimaan upah yang rendah, kurang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan yang memadai, serta hidup berhemat, dengan menekan pengeluaran baik untuk konsumsi/makanan maupun non makanan.

P. Pengembangan Kebudayaan Belum Optimal

Manajemen dan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Sleman belum optimal, yang meliputi aspek warisan budaya, cagar budaya, pemanfaatan pelaku sejarah, situs, kesenian, adat-istiadat, tradisi, maupun nilai-nilai luhur. Dampak terhadap perilaku budaya belum muncul secara eksplisit dalam peri kehidupan bermasyarakat, sebagai fondasi pembentukan struktur sosial, sikap budaya yang mencerminkan pemahaman, penjiwaan, pengamalan nilai-nilai dan kebudayaan yang adiluhung, perilaku budaya dalam kehidupan bermasyarakat belum optimal.

3.2. Isu Strategis

A. Kemiskinan dan Kerentanan Sosial

Kemiskinan dan kerentanan sosial adalah isu strategis mendasar yang memerlukan perhatian karena kemiskinan merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan pokok dan pelayanan dasar yang tidak terselesaikan, seperti misalnya permasalahan kesehatan, kerawanan bencana, kesempatan kerja dan permasalahan lainnya, yang akan bermuara pada kemiskinan. Kerentanan sosial juga menjadi strategis karena golongan masyarakat ini hanya berada satu langkah dari kemiskinan.

Kemiskinan dan kerentanan sosial memiliki dampak yang luas dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat serta stabilitas sosial-



ekonomi di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kemiskinan dan kerentanan sosial perlu menjadi isu strategis pembangunan:

1. Kemiskinan dan kerentanan sosial merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi. Masalah ini tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga faktor sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan holistik untuk mengatasi masalah ini.
2. Kemiskinan dan kerentanan sosial memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat miskin itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terkoordinasi dan sinergis dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini.
3. Kemiskinan dan kerentanan sosial dapat menghambat pembangunan daerah. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa.

Pemahaman tentang kemiskinan dan kerentanan sosial memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan inklusif. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kemiskinan tidak bisa dilaksanakan melalui satu sisi saja, melainkan harus menyesuaikan aspek-aspek yang menjadi sumber kemiskinan. Beberapa aspek lain yang diperkirakan menjadi sumber kemiskinan di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan dan kesehatan

Pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara. Orang yang berpendidikan dan sehat memiliki peluang lebih besar mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan terhadap pendidikan dan kesehatan.

2. Penyediaan lapangan kerja

Lapangan kerja merupakan salah satu faktor penting untuk mengurangi kemiskinan. Apabila tidak memiliki pekerjaan yang baik, tetap, dan kontinu, tentu akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menciptakan lapangan kerja baru, terutama untuk masyarakat miskin dan rentan.

3. Kerawanan bencana

Kerawanan bencana berpotensi menjadi salah satu penyebab kemiskinan di Kabupaten Sleman

4. Inklusivitas dan pemerataan dalam pembangunan

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Sleman masih belum terasa inklusif, mengingat angka indeks gini masih tinggi, terlebih bagi difabel. Akses pelayanan bagi masyarakat difabel belum sepenuhnya merata sehingga aspek kerentanan sosial juga masih belum sepenuhnya setara dalam mendapatkan pelayanan publik.

Kemiskinan bersifat multidimensional yang disebabkan oleh banyak faktor, tidak hanya menjadi domain bidang ekonomi saja, tetapi juga sosial, lingkungan hidup, bahkan tata kelola pemerintahan. Kemiskinan dan kerawanan sosial merupakan dua buah fenomena sosial yang saling terkait, bahkan dipandang memiliki hubungan sebab akibat. Kemiskinan dan kerentanan sosial dapat menjadi bibit bagi kerawanan sosial, baik itu dari sisi kejahatan, immoralitas, serta penggunaan substansi yang terlarang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya holistik dan integratif untuk dapat menyelesaikan isu kemiskinan dan kerentanan sosial ini.

B. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul (Transformasi Sosial)



Isu strategis terkait kualitas sumber daya manusia yang unggul menjadi aspek penting yang diposisikan sebagai modal dasar pembangunan. Agenda pembangunan nasional yakni transformasi sosial juga telah diarahkan sebagai upaya perbaikan fondasi pembangunan. Beberapa bahasan sumber daya manusia unggul yang relevan dengan kondisi Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

- 1) Tata kelola dan profesionalitas penyelenggaraan pendidikan vokasi untuk mewujudkan harapan lama sekolah menjadi rata-rata lama sekolah secara nyata, serta menyiapkan tenaga kerja terampil dan setengah ahli yang berdaya saing guna mewujudkan kesejahteraan sosial yang ditunjang oleh jaminan sosial ketenagakerjaan dan pendapatan yang memadai.
- 2) Pengembangan sistem kesehatan terpadu terintegrasi dengan pelibatan *stakeholders* dan partisipasi aktif masyarakat baik dalam pencegahan maupun penanganan masalah Kesehatan yang ditunjang oleh kesadaran dan komitmen masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Perwujudan kesehatan secara umum juga ditunjang melalui peningkatan gizi anak, baik dari dalam kandungan hingga pada masa emas tumbuh kembang anak, baik pertumbuhan otak ataupun masa percepatan tumbuh kembang anak.
- 3) Kesetaraan gender dalam konteks sosial, budaya, ekonomi dan politik dengan memperbesar inisiatif dan partisipasi perempuan untuk berkembang dengan pencapaian harmonisasi, keseimbangan dan keselarasan. Pembangunan dan pemberdayaan gender menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesetaraan gender ini. Dengan Pembangunan dan pemberdayaan gender dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas, sehingga wanita dapat berkontribusi dalam bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik secara seimbang dan setara.

Dalam konteks bahasan permasalahan di atas, terdapat satu aspek yang menjadi elemen penyatu dari keseluruhan yakni peran keluarga dalam pembangunan. Pengembangan keluarga yang mengutamakan nilai pembangunan sosial mendasar akan sangat penting sebagai fondasi dasar pembangunan manusia lebih lanjut. Sebagai unit kelompok manusia terkecil, indikator terkait ketahanan keluarga seharusnya dijadikan target kinerja dasar untuk membangun masyarakat dari unit terkecil hingga masyarakat umum.

C. Ketahanan Budaya

Pengupayaan pengembangan budaya perlu didekati dari dua sisi yakni dari budaya sebagai hasil tradisi (budaya tradisional) dan budaya sebagai hasil olah pikir manusia saat ini untuk menghadapi keseharian kehidupan, baik secara individual yang kemudian dilaksanakan oleh banyak orang maupun secara keseharian dalam bermasyarakat. Pengembangan kebudayaan ini seharusnya diarahkan melalui peningkatan interaksi non-patron, dimana interaksi yang terjadi lebih mengeksplorasi konsep, pandangan dan peminatan, bukan pada proses kebutuhan penyejahteraan. Oleh karena itu, seperti halnya dalam aspek transformasi sosial, ketahanan budaya juga perlu untuk diberi ruang berkualitas di dalam masyarakat.

Masalah ketahanan budaya ditentukan oleh sikap, respons dan semangat pelestarian budaya baik yang mencakup benda dan non benda. Budaya yang menyangkut benda membutuhkan pemeliharaan, perawatan, dan pemugaran. Sedangkan hal-hal yang bersifat non benda membutuhkan edukasi dan peningkatan kesadaran dan ketekunan serta komitmen Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan, sosialisasi, internalisasi dan pemanfaatan serta pengamalannya.



Manajemen dan pemajuan budaya yang bersifat komprehensif mencakup semua aspek kebudayaan. Melalui internalisasi budaya, manajemen dan pemajuan budaya dapat berdampak pada meningkatnya integritas sosial, komitmen dan perilaku sadar dalam pengamalan nilai-nilai budaya yang positif dan adiluhung ke dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

D. Transformasi Ekonomi

Dalam pembangunan Kabupaten Sleman, salah satu isu strategis yang perlu diangkat adalah perubahan mendasar mengenai paradigma perekonomian dan penyesuaian arah pembangunan perekonomian menuju keberlanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, bahasan-bahasan isu strategis yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Modernisasi Perekonomian

Masa perencanaan sampai dengan tahun 2045, merupakan masa revolusi industri yang menghasilkan *disruption economy* (gangguan ekonomi) dalam arti positif. Adanya teknologi baru, mau tidak mau, suka tidak suka mewajibkan Kabupaten Sleman untuk menggunakan teknologi dalam menyelesaikan persoalan. Modernisasi ekonomi dengan basis teknologi merupakan hal yang tidak terhindarkan.

Meskipun revolusi industri pada awalnya dipicu oleh munculnya revolusi teknologi informasi dan telekomunikasi, ternyata selanjutnya diikuti oleh berbagai perkembangan teknologi lainnya yang mampu meningkatkan produktivitas di banyak sektor. Adanya teknologi informasi, menjadi sangat mudah untuk mendiseminasikan hasil-hasil temuan baru di bidang apa pun. Sehingga revolusi industri tidak lagi hanya sebatas industri digital, tetapi industri digital telah mendorong revolusi di semua bidang termasuk manufaktur, dan jasa-jasa lain.

Persoalan kemiskinan, contohnya, perlu diselesaikan dengan teknologi misalnya dalam hal pemantauan dan deliverisasi sumber daya. Demikian juga dengan persoalan investasi, bagaimana meningkatkan, meratakan, baik lokasi maupun sektor. Selain itu untuk masalah pendidikan, implementasi jaminan sosial, peningkatan produktivitas wilayah, produktivitas lahan, produktivitas infrastruktur, dan lain-lain dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dengan basis teknologi.

2. Mengoptimalkan Ekonomi Kreatif

Yogyakarta dikenal sebagai pusat pendidikan. Namun jika ditelusur lebih jauh, lembaga-lembaga pendidikan ternama berada di Kabupaten Sleman. Dengan posisi ini Sleman memiliki keunggulan untuk mengembangkan ekonomi kreatif, dimana sebagai wilayah pusat pendidikan sudah barang tentu memiliki sumber daya kreatif yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia. Selain itu Kabupaten Sleman memiliki berbagai keterbatasan lahan, mengingat Kabupaten Sleman terdapat sebagian wilayah yang merupakan kawasan konservasi. Dalam kondisi yang demikian, maka ekonomi kreatif adalah jawaban yang tepat untuk menyelesaikan berbagai persoalan.

Berdasarkan data pada tabel pelaku ekonomi kreatif pada Bab 2, di Kabupaten Sleman terdapat 135 pelaku ekonomi kreatif di 13 subsektor dengan pelaku terbanyak pada subsektor kuliner (30,37%), subsektor kriya (21,48%), dan subsektor *fashion* (15,56%) Ekonomi kreatif memang bertumpu pada sumber daya manusia, namun ekonomi kreatif juga memerlukan kebijakan, kelembagaan, dan infrastruktur yang baik. Dalam perencanaan ke depan, aspek-aspek ekonomi kreatif perlu direncanakan dan diimplementasikan secara optimal.

3. Target Menuju Indonesia Emas



Indonesia Emas adalah umur 100 tahun Indonesia merdeka, yaitu tahun 2045. Sesuai cita-cita Bangsa Indonesia, yang ingin setara dengan bangsa-bangsa di dunia, maka pada Indonesia Emas bertujuan untuk setara dengan negara maju. Cita-cita ini membawa konsekuensi yang sangat signifikan, antara lain:

- a) Pendapatan per kapita yang setara dengan negara maju;
- b) Tidak ada lagi kemiskinan;
- c) Perekonomian modern, dengan struktur yang kuat;
- d) Berwawasan lingkungan; dan
- e) Tingkat akses masyarakat pada infrastruktur dasar sebesar 100%.

Jika target tersebut dilihat secara parsial, rasanya sangat ambisius. Namun jika diamati secara komprehensif maka target tersebut merupakan hasil dari pembangunan manusia seutuhnya, sehingga wajib untuk diikuti. Oleh karena itu, perlu upaya strategi dan implementasi di masa perencanaan sampai tahun 2045.

4. Pembangunan ekonomi inklusif dan ekonomi hijau

Pembangunan inklusif dan ekonomi hijau pada dasarnya merupakan konsekuensi dari cita-cita Indonesia Emas 2045. Pembangunan ekonomi inklusif dan ekonomi hijau merupakan isu global yang sudah tertuang dalam *sustainable development goals*. Dimulai dari *milenium development goals* tahun 2000-2015, *sustainable development goals* dicanangkan oleh PBB (melalui UNDP) dimana Indonesia ikut menandatangani dan meratifikasinya.

Tujuan pertama dari *milenium development goals* adalah menghapus kemiskinan dan kelaparan. Untuk mencapai tujuan ini strategi yang tepat adalah pembangunan ekonomi inklusif, dengan indikator pertumbuhan ekonomi inklusif. Sayangnya, sampai saat ini belum indikator-indikator tersebut, sehingga untuk menyusun perencanaan dan implementasi perlu alternatif indikator.

5. Investasi berkelanjutan

Investasi berkelanjutan merupakan bagian dari pembangunan inklusif dan ekonomi hijau. Jika pembangunan tidak inklusif maka investasi tidak akan berjangka panjang. Investasi jangka pendek pada umumnya menghasilkan nilai tambah yang tidak stabil, dan tidak mampu membawa perubahan besar. Investasi yang bersifat temuan - temuan baru pada umumnya berisiko besar dan berjangka panjang. Namun investasi yang berupa ide - ide baru inilah yang menjadikan salah satu faktor yang akan membawa lompatan kesejahteraan Masyarakat.

E. Penguatan Ketahanan Pangan

Pangan selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan baik di tingkat global, nasional maupun regional, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi. Upaya penguatan ketahanan pangan merupakan upaya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang sehat, aktif dan produktif, serta berdaya saing sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Kabupaten Sleman yang selama ini menjadi salah satu lumbung pangan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi semua orang dan daerah/wilayah yang tercermin dari ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan.

Ketersediaan pangan yang bersumber dari pertanian, peternakan, dan perikanan harus dapat memenuhi kebutuhan penduduk di suatu wilayah dalam jangka panjang dan lintas generasi. Ketersediaan pangan akan dapat dicapai dan dijamin keberlanjutannya jika pembangunan



memperhatikan sarana prasarana pertanian, konversi lahan/alih fungsi lahan yang terkendali, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, dan *up-skilling* sumber daya manusia pertanian.

Faktor penting lainnya adalah memastikan keterjangkauan pangan oleh masyarakat yang dicerminkan oleh distribusi yang lancar dari produsen ke konsumen antar waktu antar wilayah, stok pangan dan harga yang selalu terjaga. Selain itu perlu upaya yang lebih konkret bahwa pangan yang tersedia dan dapat dijangkau oleh setiap penduduk memiliki manfaat bagi tubuhnya. Hal ini dapat didukung dengan pola konsumsi yang seimbang dan beraneka ragam, kecukupan gizi, keamanan dan mutu pangan serta pengembangan pengolahan pangan lokal. Selain itu diperlukan pengembangan pertanian dalam arti luas sesuai dengan karakteristik dan potensi unggulan masing-masing daerah

F. Pemanfaatan Tanah dan Tata Ruang

Dalam dua dekade terakhir, Kabupaten Sleman mengalami perkembangan wilayah yang sangat pesat. Perubahan tata guna lahan menjadi respon terhadap pertumbuhan penduduk dan aktivitas sosial ekonomi serta kepentingan pembangunan. Konversi lahan hijau terbuka, khususnya lahan pertanian terus meningkat yang menyebabkan penurunan luas lahan pertanian.

Kondisi dilematik dan strategis serta pilihan yang sulit, karena disatu sisi, Kabupaten Sleman memiliki kesuburan dan produktivitas lahan tinggi dengan suplai air sangat bagus dan menjadi lumbung pangan, serta memiliki nilai fungsi lindung lingkungan yang tinggi. Di sisi lain, desakan kebutuhan lahan untuk pengembangan wilayah tidak terhindarkan. Perumahan, permukiman, fasilitas hotel perdagangan dan industri terus meningkat yang menggerus keberadaan lahan pertanian.

Alih fungsi ini telah memberikan dampak yang luas terkait dengan lingkungan hidup, seperti gangguan sistem tata air dengan banyak hilangnya lahan irigasi, meningkatkannya kerentanan pangan, penurunan kualitas udara dan iklim makro. Secara sosial, banyak masyarakat lokal Sleman kehilangan aset dan sistem penghidupan khususnya pertanian dan komunitas sosial, termasuk melambungnya harga properti dan perubahan kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa kasus, meningkatnya intensitas perubahan penggunaan lahan ini juga menciptakan konflik pemanfaatan ruang dan tanah bahkan konflik sosial.

Isu alih fungsi lahan pertanian adalah tantangan kompleks masa mendatang yang membutuhkan perencanaan yang matang, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, dengan memahami dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari perubahan tata guna lahan, guna mengembangkan solusi yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Peningkatan pesat intensitas pemanfaatan tanah dan ruang di Kabupaten Sleman akan terus meningkat dalam masa mendatang, hal ini disebabkan semakin naiknya pertumbuhan penduduk, level urbanisasi, Persaingan antar pemanfaatan tanah antara sektor pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan perumahan dengan kawasan hijau akan memicu ketegangan antar komunitas lokal, pemerintah dan swasta. Kasus banyaknya aset tanah kas kalurahan yang lepas ke pihak tidak bertanggungjawab semakin mempersulit penyelesaian kasus pertanahan.

Pada sisi tata ruang, masih banyak penggunaan tanah dan ruang tidak sesuai dengan ketentuan perencanaan tata ruang yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan dan meningkatkan intensitas konflik. Di lain pihak masih ditemukan rendahnya kesadaran masyarakat akan tertib



penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Kabupaten Sleman harus mampu mengatasi permasalahan ini melalui perbaikan kebijakan, perencanaan tata ruang yang lebih baik, dan promosi praktik-praktik pengelolaan lahan atau tanah yang berkelanjutan. Tantangan ini masih memerlukan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai pemanfaatan lahan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

G. Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur

Dalam pembangunan Kabupaten Sleman, masih terdapat isu strategis terkait dengan pemerataan dan kualitas infrastruktur. Infrastruktur menjadi modal dasar pembangunan, dimana tanpa pancingan infrastruktur, pembangunan akan susah terwujud atau setidaknya memiliki kapasitas yang kecil. Adapun untuk pemerataan menjadi penting untuk kemudian menyelesaikan permasalahan ketimpangan baik kesejahteraan maupun ketimpangan wilayah. Beberapa bahasan yang perlu dipertimbangkan sebagai isu strategis terkait infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur Dasar

Target Indonesia emas tahun 2045 menuju Negara Nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan, perlu mempertimbangkan dan merencanakan arah perkembangan pertumbuhan penduduk dengan baik untuk menunjang kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator negara yang makmur dan menandakan potensi keberlanjutan suatu negara. Pertumbuhan penduduk juga menjadi salah satu *driving factor* bagi negara untuk membuat perencanaan arah pembangunan dan pengembangan negara yang berkelanjutan. Akan tetapi, pertambahan penduduk berpotensi memberikan beban ke lingkungan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan menerima buangan hasil aktivitasnya. Pertumbuhan penduduk akan berdampak kepada peningkatan akses infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi layak, kebutuhan pangan, dan energi. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut pemerintah daerah khususnya Kabupaten Sleman memiliki peranan penting untuk menjamin semua masyarakat memiliki kesempatan akses sama.

Peningkatan infrastruktur sarana dasar seperti kebutuhan air bersih, pengolahan air limbah dan pengelolaan sampah menjadi pertimbangan khusus sebagai akibat pertumbuhan penduduk. Peningkatan akses air bersih menyebabkan meningkatnya sumber air baku untuk diolah menjadi air yang bisa dimanfaatkan secara langsung atau tidak langsung. Sisa buangan air bersih menjadi air limbah yang harus diolah sebelum dibuang ke lingkungan air limbah. Selain itu, pertumbuhan penduduk juga berdampak terhadap peningkatan pengelolaan sampah mulai dari infrastruktur pengelolaan sampah, sumber daya manusia, dan kelembagaan pengelola.

Sebagai perwujudan *sustainable development goals* mengenai lingkungan terutama akses air bersih dan sanitasi layak menjadi pertimbangan yang sangat penting untuk menjamin keberlanjutan lingkungan yang sehat, asri, dan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, Kabupaten Sleman perlu membuat strategi dan kebijakan untuk menjamin peningkatan dan pemerataan infrastruktur dasar sanitasi di Kabupaten Sleman seperti meningkatkan instalasi pengolahan air bersih, pengolahan air limbah, manajemen dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta akses distribusi air bersih dan penyaluran air limbah ke sistem terpusat. Sehingga,



diperlukan perencanaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam perancangan infrastruktur sanitasi.

Selain permasalahan sanitasi, satu kelompok isu infrastruktur wilayah yang masih perlu diangkat adalah isu tentang ruang terbuka hijau. Salah satu peruntukan ruang yang penting adalah keberadaan ruang terbuka hijau dalam arti yang luas. Perlindungan kawasan lindung dan pemantapan serta penambahan ruang terbuka hijau diharapkan dapat menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati, pengendalian suhu dan iklim mikro, peningkatan kualitas udara, serta mengurangi pencemaran udara dan tentu saja konservasi air.

Upaya menjaga keseimbangan dan kestabilan lingkungan hidup dan kehidupan harus terus dilakukan di antaranya dengan penetapan rencana tata ruang yang mantap serta pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam faktanya, mempertahankan kawasan lindung dan ruang terbuka hijau menghadapi banyak permasalahan, terkait dengan penurunan areal hijau, stagnasi penambahan ruang terbuka hijau, pengendalian pemanfaatan ruang, pembiayaan, perawatan dan pemeliharaan, dan lain sebagainya. Diharapkan pada masa mendatang kawasan lindung dan ruang terbuka hijau di Kabupaten Sleman dapat berfungsi optimal dalam melestarikan keberlanjutan lingkungan dan sistem kehidupan.

2. Konektivitas Wilayah

Kendala utama dari konektivitas wilayah adalah kualitas dan kuantitas pelayanan dari pergerakan, salah satunya terkait kemacetan. Meskipun belum bisa dibandingkan dengan kemacetan di kota sekelas metropolitan, sebagian Kabupaten Sleman yang termasuk wilayah Pusat Kegiatan Nasional Yogyakarta mulai mengalami kemacetan. Selain itu, terdapat juga kendala kualitas pelayanan dasar perkotaan yang masih perlu ditingkatkan untuk bisa setara dengan Kota Yogyakarta. Selain itu terdapat juga isu konektivitas dalam artian volume besaran. Sub-isu ini akan dibahas di dalam sub pembahasan pada bagian berikutnya.

Selain ketidakseimbangan antara volume kendaraan yang tinggi dan infrastruktur jalan yang kurang memadai. Kemacetan juga berhubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas, dan gagalnya transportasi publik. Tidak kalah penting adalah hubungannya dengan sistem perencanaan kota dan wilayah, baik internal Kabupaten Sleman maupun hubungannya dengan daerah lainnya.

Dampak kemacetan bisa sangat merugikan, termasuk waktu perjalanan yang lebih lama, peningkatan polusi udara, stres bagi pengemudi, dan dampak negatif terhadap perekonomian dan produktivitas. Untuk mengatasi kemacetan dan kecelakaan, diperlukan perencanaan jangka panjang yang mencakup tidak hanya perencanaan transportasi yang baik, investasi dalam infrastruktur yang memadai, dan penggunaan transportasi publik, namun juga perencanaan tata ruang dan tata guna lahan yang baik. Oleh karena itu diperlukan perencanaan tata ruang dan kebijakan kerja sama antar wilayah dan antar pelaku pembangunan.

3. Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah

Tantangan Kabupaten Sleman masa mendatang adalah penyediaan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur wilayah yang cukup dan terdistribusi secara merata, tidak hanya di perkotaan,



namun sampai pelosok perdesaan. Pengembangan infrastruktur wilayah adalah suatu usaha untuk meningkatkan dan memperbaiki berbagai fasilitas dan sarana di suatu wilayah tertentu. Hal ini dapat mencakup berbagai sektor, seperti transportasi, energi, air dan sanitasi, pendidikan, kesehatan, dan teknologi informasi.

Pengembangan infrastruktur wilayah menjadi prasyarat dasar dalam pembangunan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Diperlukan perencanaan dan dukungan kemampuan finansial yang cukup dalam memenuhi infrastruktur wilayah. Oleh karena itu diperlukan kerja sama atau kolaborasi yang baik antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat.

H. Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sleman menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan masa depan yang lebih sulit dan kompleks. Intensitas pemanfaatan ruang dan sumber daya yang terus meningkat, diikuti dengan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Indeks kualitas air yang menurun akibat aktivitas domestik dan ekonomi yang meningkatkan pencemaran air terutama di perkotaan. Kualitas udara juga sulit membaik, dikarenakan semakin padatnya transportasi, kegiatan ekonomi yang menambah polutan udara terus meningkat. Sedangkan kualitas lahan juga menurun dan waspada akibat semakin tingginya konversi lahan hijau khususnya lahan pertanian.

Penurunan kualitas lingkungan, dapat menurunkan tingkat kenyamanan bahkan kualitas hidup yang lebih baik. Tantangan lain terkait dengan pemanasan global, dampak perubahan iklim juga telah memberikan tekanan besar bagi keberlanjutan penghidupan masyarakat Kabupaten Sleman pada masa mendatang. Disisi lain, temuan inovasi teknologi ramah lingkungan termasuk energi terbarukan berpeluang meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Mengatasi isu-isu kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sleman masa mendatang memerlukan upaya serius dan kebersamaan dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu untuk mengimplementasikan kebijakan yang berkelanjutan, meningkatkan kesadaran, dan mengadopsi praktik peningkatan kualitas lingkungan.

1. Pengendalian degradasi lingkungan (pengembangan ekonomi hijau)

Peningkatan pemanfaatan air bersih sebagai kebutuhan sehari-hari berpotensi meningkatnya degradasi kualitas lingkungan disebabkan pencemaran akibat aktivitas manusia seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk per tahunnya. Pembuangan air limbah ke badan air akan menyebabkan pencemaran air baik di sungai, air tanah, dan laut. Pencemaran air limbah berdampak tidak hanya penurunan kualitas badan air, tetapi juga menurunkan kondisi sanitasi yang berpotensi terjadi penyebaran penyakit melalui air yang tidak bersih.

Selain itu, peningkatan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan dan pengelolaan sampah. Hal ini akan menyebabkan peningkatan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir tidak merusak lingkungan. Pembuangan sampah sembarangan akan menyebabkan penurunan estetika lingkungan, mencemari air tanah melalui produksi air lindi dari sampah, penyebaran penyakit, dan lainnya. Tidak hanya permasalahan sampah, peningkatan jumlah penduduk juga menyebabkan naiknya kebutuhan energi untuk memutar roda perekonomian. Kenaikan penggunaan



energi berpotensi merusak lingkungan baik secara langsung atau tidak langsung. Eksplorasi sumber energi di dalam tanah seperti minyak bumi, batu bara, dan sumber energi nuklir menyebabkan kerusakan langsung terhadap di daerah pertambangan. Dan, pemanfaatan bahan alam sebagai sumber energi seperti bahan bakar PLN, transportasi, dan lainnya berpotensi menyebabkan penurunan kualitas udara, menipisnya lapisan ozon, *climate change*, dan meningkatnya efek gas rumah kaca.

Salah satu pendekatan yang menjanjikan untuk mengatasi degradasi lingkungan adalah melalui penerapan konsep ekonomi hijau. Ekonomi hijau berfokus pada pembangunan yang memperhitungkan aspek lingkungan dan sosial, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Ini dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, daur ulang, dan promosi teknologi ramah lingkungan.

Penerapan ekonomi hijau tidak hanya akan membantu mengatasi degradasi lingkungan, tetapi juga membuka peluang baru dalam hal lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi dalam sektor-sektor ekonomi hijau, seperti energi terbarukan, transportasi publik, dan pengelolaan limbah, akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing ekonomi. Selain itu, ekonomi hijau juga dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas dan rentan terhadap eksploitasi berlebihan. Dengan mempromosikan praktik-praktik ekonomi yang berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa sumber daya alam kita dapat dinikmati oleh generasi masa depan.

Tantangan untuk mewujudkan visi ekonomi hijau, adalah diperlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dukungan kebijakan yang tepat, insentif untuk inovasi, serta kesadaran dan partisipasi masyarakat yang aktif akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan ekonomi hijau.

2. Pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Batas Ekologis

Di tengah perubahan iklim global dan degradasi lingkungan yang semakin memprihatinkan, Kabupaten Sleman menghadapi tantangan besar dalam pelestarian lingkungan hidup. Salah satu pendekatan yang menjadi perhatian utama adalah pendekatan hulu-hilir dan pemanfaatan jasa lingkungan. Kabupaten Sleman memiliki posisi hulu dan hilir tengah, dimana beberapa wilayah menjadi hulu bagi seluruh wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Yogyakarta serta sebagian menjadi hilir tengah dari CAT tersebut. Dari hulu ke hilir, Kabupaten Sleman memiliki ekosistem yang kaya dan beragam, mulai dari kawasan pegunungan di bagian utara hingga daerah dataran rendah di sepanjang pesisir selatan. Tetapi, perkembangan pembangunan yang cepat dan tidak terkendali telah menimbulkan tekanan besar terhadap lingkungan, mulai dari kerusakan lingkungan (misal pada pertambangan lahan) hingga pencemaran air. Posisi ini memberikan penekanan bahwa pelestarian lingkungan hidup perlu ditanggapi serius karena Kabupaten Sleman adalah pemeran utama dari kondisi lingkungan hidup ini.

Di hulu, upaya pelestarian hutan dan konservasi sumber daya alam menjadi fokus utama. Hutan-hutan yang ada tidak hanya menyediakan habitat bagi flora dan fauna endemik, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mengatur tata air, dan mengurangi risiko bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Sementara di hilir, terutama di sekitar daerah perkotaan dan pertanian,



pemanfaatan jasa lingkungan seperti pengaturan tata air, mitigasi banjir, dan penyediaan air bersih menjadi krusial. Namun, pola penggunaan lahan yang tidak terencana dan aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan mengancam keberlangsungan jasa lingkungan tersebut.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah konkret dan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan masyarakat lokal. Diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum yang ketat untuk mengendalikan aktivitas yang merusak lingkungan. Selain itu, program edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan keberlanjutan juga harus ditingkatkan, baik di tingkat sekolah maupun masyarakat umum.

Komitmen untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan harus diwujudkan dalam setiap kebijakan dan tindakan, dengan memperhatikan aspek hulu-hilir dan memanfaatkan jasa lingkungan secara bijak. Hanya dengan upaya bersama yang berkelanjutan, Kabupaten Sleman dapat melindungi warisan alamnya untuk generasi yang akan datang.

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis kesadaran dan partisipasi masyarakat

Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan tanggung jawab bersama yang tidak hanya menjadi urusan pemerintah, tetapi juga melibatkan aktivitas dan kesadaran seluruh masyarakat. Di zaman ini, kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup semakin penting dan menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan planet ini.

Kesadaran lingkungan bukanlah sesuatu yang dapat ditanamkan secara paksa, melainkan perlu dibangun melalui pendidikan, informasi, dan contoh nyata dari lingkungan sekitar. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang mendalam mengenai dampak dari aktivitas manusia terhadap lingkungan, serta pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem untuk kelangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi ini.

Partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ketika masyarakat merasa memiliki peran dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan, mereka akan lebih termotivasi untuk bertindak secara proaktif dalam menjaga kebersihan, mengurangi sampah, dan mengelola sumber daya alam dengan bijak.

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai cara, mulai dari pengorganisasian kegiatan bersih-bersih lingkungan, penyuluhan mengenai pengelolaan sampah, hingga pelibatan dalam program-program penanaman pohon dan restorasi habitat alami. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta juga dapat menjadi motor penggerak dalam menggalang partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan.

Partisipasi masyarakat juga dapat diwujudkan dari awal, dimana pendidikan mengenai lingkungan hidup menjadi penting untuk ditekankan. Generasi muda yang nantinya akan menuai manfaat (atau bencana) dari kondisi lingkungan berhak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup sehingga pada forum-forum yang terkait dengan hak-hak keberlanjutan generasi muda, generasi muda dapat memberikan pendapat mereka dan lebih lanjut mengaplikasikan



pengetahuan dan harapan terhadap kondisi lingkungan hidup di masa depan.

Pengelolaan lingkungan hidup berbasis kesadaran dan partisipasi masyarakat bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan komitmen bersama dan upaya yang berkelanjutan, hal ini dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keberlanjutan planet ini untuk generasi yang akan datang.

I. Ketangguhan Menghadapi Bencana

Kabupaten Sleman merupakan wilayah dengan ciri multirisiko bencana. Beberapa bencana yang berpotensi di antaranya gempa bumi, letusan gunung berapi (mengingat adanya Gunung Merapi di sekitar daerah ini), banjir, longsor, dan lainnya. Pada masa depan diperlukan perubahan pendekatan tidak hanya pada pengurangan risiko bencana namun membentuk sistem ketangguhan wilayah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Ketangguhan menghadapi bencana adalah kemampuan individu, kelompok, atau komunitas untuk pulih kembali, beradaptasi, dan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tekanan, tantangan bencana. Diperlukan upaya perencanaan dan pengelolaan bencana dengan dukungan kerja sama dan keterlibatan aktif dari pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dalam membangun ketangguhan terhadap bencana

Dalam menghadapi bencana, terdapat dua pendekatan yang bisa dijadikan pedoman dasar yakni pendekatan menghindari bencana dalam arti tidak melaksanakan pembangunan permanen pada kawasan yang akan terkena bencana dan pendekatan adaptasi kehidupan dalam kerawanan bencana, yakni pendekatan yang mengarahkan pada tetap terlaksananya kegiatan-kegiatan pada kawasan bencana dengan pengaturan-pengaturan, *drill*/pelatihan, peningkatan kapasitas serta penyediaan infrastruktur evakuasi bencana yang sigap.

Umumnya jika kondisi bencana bersifat vektor/memiliki arah seperti erupsi gunung berapi, kerawanan longsor, kerawanan banjir dan tsunami, maka pendekatannya adalah penghindaran dari bencana alam. Namun ketika kondisi bencananya jangkauannya luas atau tidak tentu, maka diperlukan adaptasi dalam menghadapi kondisi bencana, contohnya adalah bencana gempa bumi, kekeringan, dan cuaca ekstrem dan pergeseran tren cuaca akibat perubahan iklim. Dalam jangka panjang, seharusnya dapat ditekankan dua jenis pendekatan ini sesuai dengan kondisi ruang-ruang yang ada di Kabupaten Sleman, khususnya pada kawasan rawan bencana erupsi gunung berapi.

J. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Perubahan dinamika lingkungan di tingkat global, regional, dan nasional membawa pengaruh mendasar dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sleman. Pemetaan megatren global menunjukkan bahwa persaingan ekonomi dimasa mendatang yang semakin ketat, perubahan iklim, pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, kompetisi memperebutkan sumber daya alam dan transformasi teknologi yang semakin cepat menjadi tantangan tersendiri yang harus direspons secara cepat oleh Kabupaten Sleman. Hasil pemetaan megatren global terutama yang disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) membawa perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang dan bersifat masif.

Agenda nasional dalam menghadapi perubahan global diarahkan untuk memantapkan pemulihan kondisi sosial ekonomi pasca pandemi



dengan mengembalikan jalur (*trajectory*) pertumbuhan untuk mencapai target menjadi negara berpendapatan tinggi (lulus dari jebakan pendapatan menengah/*middle income trap*). Upaya mengoptimalkan jendela kesempatan yang langka dari proses transisi kependudukan (bonus demografi) Lapisan penduduk muda yang besar harus dikapitalisasi menjadi sumber daya manusia produktif (Buku I Narasi Rancangan akhir RPJPN 2025-2045).

Visi, Misi, Arah dan Indikator Utama Pembangunan sudah dirancang agar diacu oleh seluruh institusi pemerintah, baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Tata kelola pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah dituntut mampu beradaptasi, tangkas dan dikelola secara dinamis. Transformasi tata kelola pemerintahan di bidang kelembagaan, sumber daya manusia aparatur sipil negara, pelayanan publik melalui digitalisasi diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan di atas. Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Sleman dalam bidang tata kelola pemerintahan daerah adalah masih belum tangkas, adaptif, akuntabel dan transparan. *Agility* tata kelola pemerintahan diharapkan mampu merespons perubahan khususnya untuk meningkatkan pembangunan yang inklusif, transformatif dan berkelanjutan. Aspek akuntabilitas dan transparansi secara menyeluruh masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dikembangkan terutama akuntabilitas kinerja dan keuangan, manajemen sumber daya manusia, pelayanan publik dan keterlibatan publik dalam *governance*. Struktur yang masih terfragmentasi menyebabkan struktur kelembagaan kurang tangkas dan adaptif.

Rendahnya pengawasan di level perangkat daerah dan pemerintah daerah dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas yang pada gilirannya dapat mereduksi efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Dukungan keuangan yang belum diselaraskan dengan kinerja pemerintah dari level organisasi sampai dengan individu, kemandirian fiskal yang masih rendah dan pemanfaatan aset yang belum optimal menyebabkan kurangnya akuntabilitas keuangan. *Clean government* juga perlu ditingkatkan agar mitigasi terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme bisa ditekan dan ditiadakan, dari level pemerintah kabupaten sampai pada level pemerintahan kalurahan. Perputaran perekonomian daerah yang ditopang Anggaran pendapatan dan belanja daerah diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi lokal yang akan berkontribusi pada pendapatan daerah. Akuntabilitas kinerja dan keuangan secara holistik perlu ditingkatkan dengan meningkatkan peran publik yang lebih menyeluruh.

Disisi lain kompetensi aparatur sipil negara di Kabupaten Sleman masih rendah, pengembangan kompetensi aparatur sipil negara belum berbasis manajemen talenta dan rekrutmen aparatur sipil negara belum sesuai formasi menghambat jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Proses digitalisasi pelayanan yang belum terintegrasi, pengelolaan aduan masyarakat yang belum optimal dan integrasi data yang belum berjalan secara efektif mengakibatkan kurangnya kualitas pelayanan publik. Transformasi tata kelola pemerintahan di bidang manajemen aparatur sipil negara dan digitalisasi pelayanan publik menjadi isu strategis yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di masa depan. Transformasi digital masih dihadapkan pada persoalan mendasar yaitu dukungan infrastruktur telekomunikasi dan informasi, rendahnya literasi digital, tingkat kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, tata kelola keamanan siber, keterpaduan data dan



informasi serta rendahnya literasi digital. Transformasi teknologi dan informasi menjadi kunci dalam pelayanan publik di masa mendatang. Sebagai landasan transformasi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup adalah transformasi tata kelola pemerintahan. Aparatur yang kompeten dan memiliki komitmen melayani publik harus dibangun berbasis *merit system*.

Tantangan keterlibatan publik juga perlu ditingkatkan agar pembangunan inklusif dapat terwujud. Tingkat partisipasi publik tidak hanya ditunjukkan melalui keterlibatan musyawarah perencanaan pembangunan saja, tetapi juga dalam pengawasan yang partisipatif, dan dukungan publik dalam mewujudkan keamanan, ketertiban umum sehingga angka pelanggaran ketertiban umum bisa diminimalisir semaksimal mungkin. Iklim investasi tentunya sangat didukung oleh atmosfer sosial yang stabil dan tertib. Peningkatan literasi masyarakat tidak hanya pada tataran budaya baca yang dikembangkan oleh urusan perpustakaan daerah, tetapi mengarah pada literasi advokatif yang mendorong pemahaman publik dalam sistem pemerintahan, pengelolaan dan pemanfaatan keuangan dan aset daerah, serta jalannya pembangunan yang tepat mengarah pada penyelesaian permasalahan di masyarakat. Rendahnya literasi digital di era akselerasi digitalisasi ini akan dapat mereduksi akses dan tingkat partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Mewujudkan masyarakat yang inklusif perlu dibangun dan dibudayakan.

Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di antaranya segala proses mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, keuangan, pelaporan dan pelayanan publik telah diadaptasi ke dalam sistem digital. Langkah maju ini terlihat dalam penerapan masterplan *smart city*, yang telah diterapkan dalam berbagai aplikasi umum dan khusus untuk kebutuhan pemerintah daerah.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengadopsi teknologi untuk meningkatkan layanan publik dan mengoptimalkan efisiensi administrasi pemerintahan. Kabupaten Sleman juga memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, terutama karena wilayah ini merupakan rumah bagi beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia. Sumber daya manusia yang berkualitas ini dapat menjadi modal penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah serta implementasi kebijakan yang lebih efektif dan inovatif. Masyarakat Kabupaten Sleman juga memiliki tradisi partisipasi yang tinggi dalam kegiatan sosial, budaya dan politik. Pemerintah dapat memanfaatkan potensi ini untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan pemerintah, serta pelaksanaan program pembangunan. Potensi ini juga dapat dimanfaatkan untuk membentuk kohesivitas sosial dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban yang kondusif di Kabupaten Sleman.

Berbagai potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dapat dioptimalkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel dan transparan melalui transformasi tata kelola pemerintahan di bidang kelembagaan, manajemen aparatur sipil negara, dan pelayanan publik dengan transformasi digital yang berpusat pada manusia. Transformasi tata kelola pemerintahan melalui transformasi digital dalam layanan publik akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa depan.

K. Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi



Pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas sumber daya (sumber daya alam, sumber daya manusia). Seperti telah disinggung pada isu strategis sebelumnya, isu strategis selanjutnya yang perlu mendapat perhatian selama periode perencanaan adalah isu pengupayaan inovasi dan pemanfaatan teknologi. Secara konsep, pemanfaatan teknologi memiliki dimensi yang cukup luas. Terjadinya lompatan teknologi informasi, menjadikan bahwa akses teknologi dalam aspek apa pun menjadi lebih mudah. Hal ini dikarenakan, dengan majunya teknologi informasi banyak sumber-sumber pembelajaran yang murah, bahkan gratis. Hal yang perlu ditangani selanjutnya adalah bagaimana perkembangan teknologi dapat dikuasai untuk menyelesaikan berbagai persoalan.

Sebagai contoh dalam urusan pertanian, dirasakan oleh para petani bahwa profesi bertani tidak akan menjadikan lebih sejahtera dibanding profesi yang lain. Pandangan ini menjadikan tidak banyak generasi muda yang tertarik dengan pertanian. Hal ini terjadi karena pertanian dilakukan secara konvensional dan tidak ada sentuhan teknologi. Sementara di negara maju banyak berkembang teknologi pertanian yang diterapkan sehingga profesi petani merupakan profesi yang menjanjikan. Selain itu persoalan alih fungsi lahan dianggap sebagai desakan sektor lain pada sektor pertanian. Hal ini perlu diselesaikan dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas lahan, sehingga desakan perkembangan sektor lain tidak akan mendesak produktivitas pertanian. Demikian juga dengan pengolahan limbah. Selama ini pengolahan limbah lebih banyak dilakukan dengan konvensional, sehingga limbah merupakan hal yang ditakuti karena mengalami perkembangan yang cukup masif seiring pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Dari kondisi yang telah disampaikan, yang menjadi kendala adalah bagaimana mendapatkan sumber-sumber teknologi tersebut. Dengan kondisi teknologi informasi yang ada saat ini, sumber-sumber pembelajaran teknologi cukup mudah diakses. Namun ada empat aspek pokok yang perlu mendapat perhatian:

- 1) Tingkat literasi masyarakat;
- 2) Ketersediaan infrastruktur teknologi jaringan informasi;
- 3) Pemberdayaan masyarakat atas pemanfaatan teknologi untuk menjadi aktivitas yang produktif; dan
- 4) Kemampuan masyarakat dalam membiayai pemanfaatan (konsumsi) teknologi.

Keempat hal tersebut perlu menjadi isu strategis yang mendapat perhatian khusus selama periode Pemanfaatan teknologi untuk mengatasi persoalan (persoalan sampah, persoalan alih fungsi lahan dan persoalan kepadatan penduduk dan lain-lain).



BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Visi

Visi RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang selaras dengan Visi RPJPN Tahun 2025-2045. Visi RPJPD menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka panjang. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Visi Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 adalah:

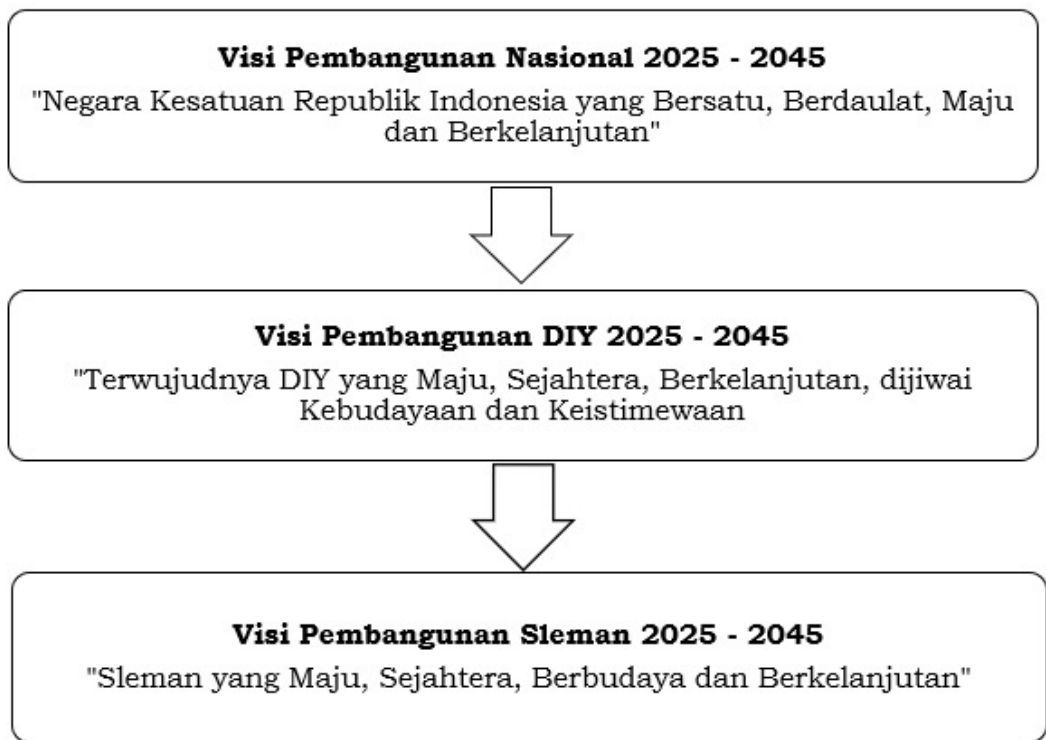
“Sleman yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan”

Penjelasan dari visi tersebut adalah:

- Maju : Perwujudan dari keadaan masyarakat yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, lepas landas dan memiliki kemampuan dasar untuk menghadapi persaingan dunia global dengan kemampuan budaya dan teknologi yang unggul, sehingga mampu bersaing secara sehat dengan didasari oleh keyakinan akan potensi dan permasalahan yang dimiliki untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.
- Sejahtera : Perwujudan keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah baik kebutuhan dasar, kebutuhan tumbuh dan kebutuhan berkembang yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi dan sosial.
- Berbudaya : Perwujudan budaya, baik pelestarian dan pemaknaan budaya tradisional serta pengembangan budaya modern yang adaptif dan siap berakulturasi dengan budaya global, dengan dicirikan karakter utama masyarakat Sleman yang senantiasa percaya diri dalam bertindak, memiliki rasa kekeluargaan, tolong-menolong dan bekerja sama dengan sukarela untuk mencapai cita-cita yang diinginkan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Berkelanjutan : Pembangunan yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan serta bersifat inklusif baik bagi mereka yang memiliki perbedaan kemampuan maupun bagi mereka yang tidak berkesempatan menyuarakan kebutuhannya.

Visi Kabupaten Sleman tersebut berpedoman pada visi pembangunan jangka panjang nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang disebut sebagai Visi Indonesia Emas 2045, yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”. Visi Kabupaten Sleman juga berpedoman pada visi RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu “Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan. Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:





Sumber: Analisis, 2024

Gambar 4. 1. Keterkaitan Visi RPJPN, RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan RPJPD Kabupaten Sleman

Visi Kabupaten Sleman sebagai Sleman yang Maju selaras dengan visi pembangunan nasional, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia Maju. Visi Sleman yang berkelanjutan juga sudah selaras dengan visi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Visi Kabupaten Sleman juga selaras dengan visi Daerah Istimewa Yogyakarta. Visi Nasional diadopsi dengan mengutamakan aspek maju dan berkelanjutan, dimana posisi kedaulatan diharapkan tertangani di level nasional dengan pengupayaan kedaulatan di level Sleman adalah pada upaya kedaulatan dari sisi kebudayaan.

Pengupayaan kemajuan diharapkan dengan peningkatan daya saing yang selaras dengan dunia global. Pengupayaan berkelanjutan diharapkan dapat diraih dengan menempatkan paradigma ekonomi yang semakin bergeser menjadi ekonomi hijau serta didukung penghayatan nilai-nilai keistimewaan terutama pada dasar filosofi *hamemayu hayuning bawono*. Wujud akhir yang ingin dicapai adalah kesejahteraan, dimana dalam skala kabupaten, kesejahteraan menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang bersinggungan langsung dengan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4.2. Sasaran Visi

Pencapaian visi RPJPD “Sleman yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan” diukur dengan 3 (tiga) sasaran visi, yakni:

- 1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing;
- 2. Peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan; dan
- 3. Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju *net zero emission*.

Ketiga sasaran ini dilengkapi dengan *baseline* tahun 2025 dan target tahun 2045 yang telah diselaraskan dengan sasaran visi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional. Sasaran visi beserta *baseline* dan target disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4. 1. Persandingan Sasaran Visi RPJPN dengan RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan RPJPD Kabupaten Sleman

SASARAN VISI NASIONAL			SASARAN VISI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA			SASARAN VISI SLEMAN		
Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			Peningkatan daya saing sumber daya manusia			Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing		
INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045
Indeks Modal Manusia (indeks)	0,56	0,73	Indeks modal manusia	0,71	0,88	Indeks Pembangunan Manusia	85,00-85,34	86,11 - 87,04
						Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	68,22	82,25 – 84,5
Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju			Peningkatan Pendapatan per kapita			Peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan		
INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045
a. GNI Per kapita (US\$)	5.500 – 5.520	30.300	Produk domestik regional bruto per kapita (Rp juta)	53,19 - 53,56	262,61 – 313,03	Produk domestik regional bruto per kapita (Rp juta)	57,75 - 61,56	118,87 – 144,78
b. Kontribusi Produk Domestik Bruto maritim (%)	8,1	15,0	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	10,11	39,05			
c. Kontribusi Produk Domestik Bruto manufaktur (%)	20,8	28,0	Kontribusi produk domestik regional bruto industri pengolahan (%)	11,89 - 12,00	13,47 - 13,82	Kontribusi produk domestik regional bruto industri pengolahan (%)	11,59 - 12,93	14,00 – 14,37
Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang			Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan					
a. Tingkat kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	0,5 - 0,8	Tingkat kemiskinan (%)	10,00 – 10,50	0,41 – 0,91	Tingkat kemiskinan (%)	6,79 – 6,98	0,39 – 0,79
b. Rasio gini	0,379 - 0,382	0,29 - 0,32	Rasio gini	0,443 - 0,447	0,381 - 0,404	Rasio gini	0,425 - 0,430	0,367 – 0,412
c. Kontribusi PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KTI (%)	21,4	28,5	Kontribusi produk domestik regional bruto Provinsi (%)	0,88	0,74	Kontribusi produk domestik regional bruto Kabupaten/Kota (%)	32,62	30,45
Intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju net zero emission			Penurunan emisi gas rumah kaca menuju net zero emisison			Intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju net zero emission		
INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045
Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (%)	38,6	93,5	Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (%)	62,14	95,82	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,96	71,5
Indeks kualitas lingkungan hidup	76,49	83,00	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	70,49	77,64			

Sumber: Analisis, 2024



4.3. Misi

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045. Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi Kabupaten Sleman tahun 2045. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi sasaran pokok beserta indikator pembangunan jangka panjang serta menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi Kabupaten Sleman selama 20 (dua puluh) tahun ke depan adalah:

Misi 1 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangkas, Inovatif, dan Akuntabel

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dilakukan dengan mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas dan dapat dipercaya, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat meningkat.

Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata.

Misi 3 : Memperkuat Sosial Budaya Masyarakat yang Berbudhi Luhur dan Saling Menghargai

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat budaya masyarakat Sleman berupa prinsip hidup yang dilandasi sikap saling menghormati perbedaan dan keberagaman serta jiwa gotong royong.

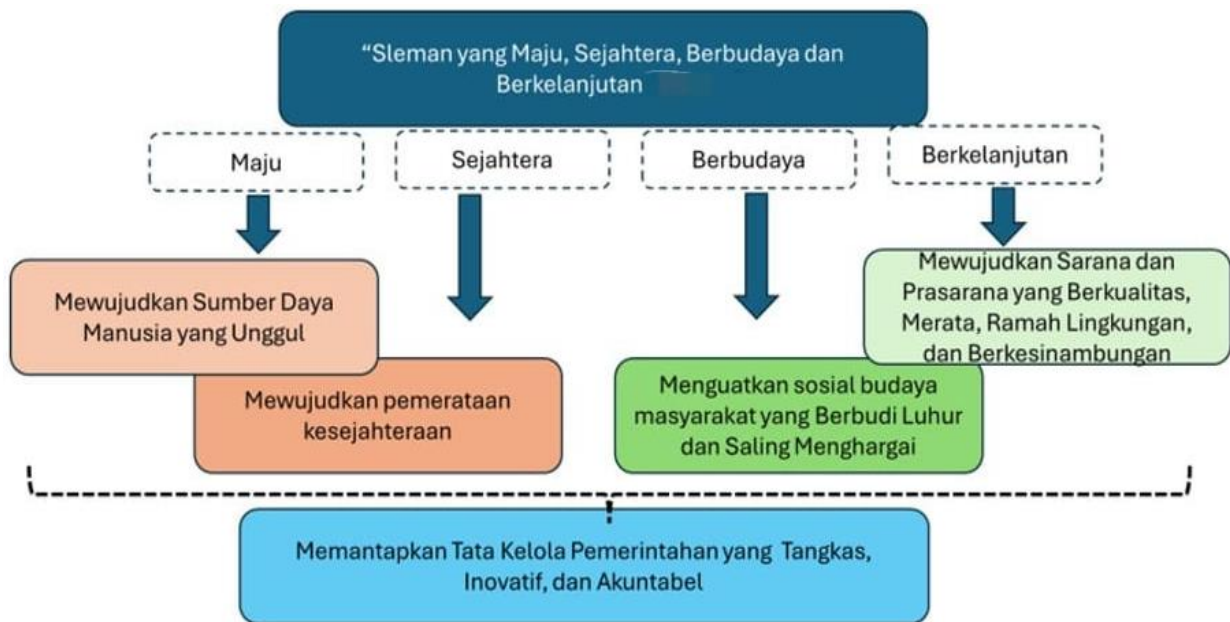
Misi 4 : Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat Kabupaten Sleman.

Misi 5 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Merata, Ramah Lingkungan dan Berkesinambungan

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.





Sumber: Analisis, 2024

Gambar 4. 2. Penjabaran Visi ke dalam Misi RPJPD Kabupaten Sleman

Misi RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, dan RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045, sehingga terdapat hubungan yang kuat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 2. Keselarasan antara Misi RPJPN dengan RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan RPJPD Kabupaten Sleman

No	Misi RPJPN 2025-2045	Misi RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta 2025-2045	Misi RPJPD Kabupaten Sleman 2025-2045
1	Mewujudkan Transformasi Sosial	Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat melalui Transformasi Sosial untuk mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Kesehatan Untuk Semua, termasuk di dalamnya Lingkungan Hidup dan Permukiman yang Berkualitas dan Kesejahteraan Sosial.	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul
2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Meningkatkan Produktivitas Ekonomi yang Menitikberatkan pada Peningkatan Inovasi dan Kreativitas, Pemanfaatan IPTEK, Pengembangan Ekonomi Budaya dan Peningkatan Kualitas Produk melalui Transformasi Ekonomi dengan Menempatkan Kawasan Selatan sebagai Kawasan Prioritas Pertumbuhan	Misi 4: Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan
3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Transformasi Tata Kelola yang Demokratis dan Transparan	Misi 1: Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangkas, Inovatif, dan Akuntabel
4	Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Menciptakan Kondisi Stabilitas Keamanan, Demokrasi Substansial, dan Ekonomi Makro yang Tangguh melalui Penguatan Penegakan Hukum dan Kehidupan yang Dilandasi Moral serta Etika Luhur	Misi 3: Menguatkan Sosial Budaya Masyarakat yang Berbudi Luhur dan Saling Menghargai
5	Memantapkan Ketahanan Sosial,	Meningkatkan Kualitas Tata Ruang dan Pemukiman, Ketahanan	Misi 5:



No	Misi RPJPN 2025-2045	Misi RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta 2025-2045	Misi RPJPD Kabupaten Sleman 2025-2045
	Budaya dan Ekologi	Ekologi dan Pembangunan Kebudayaan yang Merespons Dinamika Perubahan dan Tekanan	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Merata, Ramah Lingkungan dan Berkesinambungan
6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Menciptakan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan yang berorientasi pada Pengembangan Kawasan Selatan Sebagai Pintu Gerbang Wilayah	
7	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	
8	Mewujudkan Kekinambungan Pembangunan	Menciptakan Kondisi Pembangunan yang Berkesinambungan Untuk Menjamin Konsistensi dan Keberlanjutan Transformasi Pembangunan	

Sumber: Analisis, 2024



BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD. Arah kebijakan RPJPD menyajikan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok RPJPD.

Tahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang periode 2025-2045 terbagi menjadi 4 (empat) periode, yaitu Tahap I (2025-2029), Tahap II (2030-2034), Tahap III (2035-2039), dan Tahap IV (2040-2045). Setiap periode 5 (lima) tahunan tersebut memiliki arah kebijakan yang diharapkan dapat memberi penekanan fokus pembangunan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan visi RPJPD “Sleman yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan”. Arah kebijakan masing-masing periode pembangunan dimuat pada gambar di bawah.

Periode I (2025 – 2029)	Periode II (2030 – 2034)	Periode III (2035 – 2039)	Periode IV (2040 – 2045)
Menguatkan Potensi Daerah	Memantapkan Potensi Daerah untuk Percepatan Pembangunan	Meningkatkan Daya Saing Daerah pada Tingkat Nasional dan Global	Mewujudkan Sleman Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan

Sumber: Analisis, 2024

Gambar 5. 1. Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045

5.1.1. Periode I (2025-2029): Menguatkan Potensi Daerah

Arah kebijakan Kabupaten Sleman periode I menitikberatkan pada peningkatan kualitas potensi daerah dari semua aspek sumber daya yang ada.

- **Pada Misi 1**, Kabupaten Sleman berupaya menguatkan transformasi tata kelola pemerintahan dan transformasi digital dalam rangka meningkatkan efisiensi, kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Kabupaten Sleman akan mewujudkan kelembagaan serta sumber daya manusia yang tepat fungsi. Tidak lupa peningkatan kapasitas riset inovasi juga dijadikan dasar dalam tahapan awal ini. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang sinergis dan berkesinambungan, terutama dalam mengelola sebagian wilayah Kabupaten Sleman yang tergabung dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta, direncanakan juga penguatan koordinasi dan kerja sama lintas wilayah.
- **Pada Misi 2**, penguatan sumber daya manusia dikuatkan melalui dua jalur yakni jalur penanganan permasalahan sumber daya manusia serta penguatan fondasi dasar transformasi kesehatan dan pendidikan. Penguatan penanganan permasalahan sumber daya manusia dilakukan dengan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dan kesehatan sementara penguatan fondasi dasar transformasi kesehatan dan pendidikan dimulai dengan penguatan kapasitas sosial terkait edukasi dan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia pendidikan dan kesehatan khususnya terkait kesejahteraan, dan pengembangan layanan



penguatan produktivitas masyarakat. Kabupaten Sleman berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kesehatan melalui penguatan keahlian tenaga kesehatan tersertifikasi, dan pengembangan sistem informasi kesehatan berbasis informasi dan teknologi. Kabupaten Sleman juga berupaya untuk mengakselerasi peningkatan standar kuantitas, kualitas, dan distribusi layanan pendidikan dasar-menengah secara inklusif dan merata di Kabupaten Sleman

- **Pada Misi 3,** Kabupaten Sleman akan memperkuat transformasi sosial dan budaya melalui penguatan struktur, ekosistem, implementasi budaya unggul berbasis nilai budaya lokal di segala bidang. Pada periode I, fokus juga berada pada optimalisasi nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat Kabupaten Sleman untuk pembangunan karakter manusia sebagai penggerak modal sosial dalam masyarakat. Pengembangan ketahanan dan kohesivitas sosial juga menjadi salah satu perhatian utama untuk menciptakan kondisi ketertiban dan keamanan umum, salah satunya melalui peningkatan potensi interaksi sosial dengan pengembangan ruang-ruang kehidupan yang bersifat publik.
- **Pada Misi 4,** Kabupaten Sleman akan meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan transformasi ekonomi, antara lain melalui penguatan infrastruktur perekonomian, penguatan perlindungan kesejahteraan, pengembangan tenaga kerja, lapangan pekerjaan dan kesetaraan kerja, dan pengembangan sektor-sektor unggulan. Penguatan infrastruktur berupa pemastian kapasitas dan keterjangkauan dari infrastruktur yang dibutuhkan, termasuk di dalamnya pengembangan infrastruktur digital. Diberikan program-program penurunan tingkat kemiskinan dan penguatan ketahanan keluarga sebagai penguatan jaring dasar perlindungan kesejahteraan. Dalam pengembangan lapangan pekerjaan, penguatan kewirausahaan menjadi fokus utama terutama pada level mikro, kecil, menengah. Pengembangan sektor utama dilakukan dengan perkuatan sektor pertanian, pariwisata dan industri terutama industri yang mengarah pada industri kreatif.
- **Pada Misi 5,** Kabupaten Sleman akan memperkuat fondasi pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan menitikberatkan pada penyediaan sarana dan prasarana yang merata serta penguatan kelembagaan pengelola. Kabupaten Sleman berupaya memenuhi infrastruktur layanan dasar dan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi. Memperkuat fondasi pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan menitikberatkan pada penyediaan sarana dan prasarana yang merata dan efisien guna peningkatan kualitas lingkungan dan disertai dengan penguatan kelembagaan pengelola. Penyediaan sarana-prasarana ini juga dikembangkan dengan menguatkan identitas-identitas sosial serta karakteristik lingkungan setempat untuk lebih jauh mendukung transformasi sosial dan budaya. Dalam rangka menguatkan lingkungan hidup secara langsung, dilaksanakan juga penyusunan dokumen-dokumen rencana mendasar untuk pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

5.1.2.Periode II (2030-2034): Memantapkan Potensi Daerah untuk Percepatan Pembangunan

Arah kebijakan Kabupaten Sleman periode II menitikberatkan pada pemantapan potensi daerah untuk percepatan pembangunan.

- **Pada Misi 1,** Kabupaten Sleman akan memantapkan dan mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan dan proses digitalisasi pemerintahan. Pemantapan digitalisasi dan transformasi tata kelola diutamakan pada pemantapan sumber daya manusia pemerintahan.



Integritas sumber daya manusia pemerintahan juga dikembangkan untuk semakin mendukung transformasi lebih jauh. Proses yang telah dilaksanakan pada periode I dimantapkan pada periode II ini.

- **Pada Misi 2,** Kabupaten Sleman berupaya memantapkan transformasi kesehatan dan transformasi pendidikan. Pada proses ini, pelayanan kesehatan dan pendidikan mulai didasarkan pada sistem permukiman, dimana standar pelayanan akan dikuatkan berbasis sistem regional sehingga setiap regional memiliki kualitas pelayanan minimal yang setara. Kabupaten Sleman berupaya lebih jauh meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kesehatan terutama dengan penekanan pada kompetensi dan pengembangan sistem informasi kesehatan berbasis informasi dan teknologi. Periode II ini juga mencoba menginternalisasikan makna pendidikan sebagai suatu proses pembentukan nilai.
- **Pada Misi 3,** Kabupaten Sleman berupaya memantapkan dan mempercepat transformasi sosial dan budaya. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan serapan dan implementasi budaya unggul berbasis nilai budaya lokal lintas generasi. Pada periode II, fokus juga berada pada memantapkan penerapan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat Kabupaten Sleman untuk percepatan pembangunan. Pada periode II, upaya-upaya lintas bidang pada periode I untuk mewujudkan transformasi sosial budaya terus dilanjutkan.
- **Pada Misi 4,** Kabupaten Sleman akan mengupayakan proses lepas landas dimana angka kemiskinan diharapkan semakin rendah yang diikuti juga dengan ketahanan sosial yang lebih tinggi sebagai bagian dari proses pemantapan transformasi ekonomi. Dalam upaya lebih jauh mempercepat transformasi ekonomi, penguatan potensi ekonomi lokal yang dikombinasikan dengan inovasi dan peningkatan nilai tambah berbasis industri kreatif akan semakin ditekankan. Periode ini juga meningkatkan aspek ketenagakerjaan terutama dari sisi perlindungan dan pengembangan kapasitas tenaga kerja yang diikuti dengan perluasan penciptaan peluang kerja, pengembangan sistem informasi pasar kerja berbasis informasi dan teknologi, dan hubungan *industrial* yang harmonis. Kabupaten Sleman juga akan meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin yang inklusif.
- **Pada Misi 5,** periode 2030-2034, Kabupaten Sleman diarahkan untuk dapat mewujudkan peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pada periode ini, diharapkan fondasi transformasi sudah cukup kuat, sehingga kebijakan lebih banyak diarahkan pada akselerasi penguatan kualitas ekonomi dan ekologi. Arah kebijakan terkait infrastruktur adalah mewujudkan peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Titik berat juga ada pada pemantapan penguatan kelembagaan pengelola dan masyarakat dalam penyediaan layanan pelestarian lingkungan hidup yang aman, berkelanjutan dan inklusif.

5.1.3.Periode III (2035-2039): Meningkatkan Daya Saing Daerah pada Tingkat Nasional dan Global

Arah kebijakan Kabupaten Sleman periode III meningkatkan daya saing daerah.

- **Pada Misi 1,** Kabupaten Sleman akan mengupayakan pematangan transformasi tata kelola pemerintahan dengan lebih jauh meningkatkan integritas dan kapasitas terutama dari sisi pelayanan digital, meningkatkan pelayanan publik yang tangkas dan inovatif serta lebih jauh bekerja sama dalam penanganan isu dan kerja sama regional.



- **Pada Misi 2**, Kabupaten Sleman berupaya mematangkan dan mempercepat transformasi kesehatan dan transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan diharapkan dapat menjadi salah satu modal percepatan transformasi sosial dan terintegrasi dengan transformasi budaya. Transformasi pendidikan diarahkan untuk dapat mengembangkan minat pendidikan lebih tajam dan spesifik dalam persaingan dunia global. Dalam konteks transformasi kesehatan, manajemen kesehatan diarahkan untuk dapat diatur secara regional perkotaan-perdesaan, dimana dalam setiap sistem permukiman perdesaan, setidaknya akan terdapat satu perkotaan yang memiliki pelayanan kesehatan yang berkualitas unggul dan andal dalam melayani satu region, dengan tetap memiliki pelayanan kesehatan mendasar yang andal di tiap satuan permukiman. Transformasi ini terus didukung oleh upaya pemantapan pada periode sebelumnya.
- **Pada Misi 3**, Kabupaten Sleman akan mempercepat dan mematangkan transformasi sosial dan budaya mengembangkan jejaring, utamanya dengan pengupayaan implementasi nilai budaya unggul berbasis lintas generasi dan pembentukan masyarakat yang memiliki kapasitas budaya yang berwawasan global. Transformasi sosial yang bersifat lintas bidang juga terus dikembangkan.
- **Pada Misi 4**, Kabupaten Sleman diarahkan untuk dapat mempercepat dan mematangkan transformasi ekonomi, yaitu dengan memastikan masyarakat memiliki jaring pengaman dari kemiskinan serta memiliki ketahanan sosial dalam perwujudan kesejahteraan. Pengembangan kesejahteraan juga bisa menjamin inklusivitas. Dengan adanya ketahanan dan pengaman ini, harapannya postur ekonomi di Kabupaten Sleman sudah mampu beralih menjadi pengembangan dengan sudut pandang ekonomi hijau. Pengembangan ekonomi hijau yang akan disertai dengan perlindungan kesejahteraan tenaga kerja juga turut lebih jauh menegajawantahkan posisi ekonomi Kabupaten Sleman di tingkat internasional sehingga akan semakin membuka potensi dan peran perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui perwujudan lapangan kerja yang berkeadilan dan menyejahterakan.
- **Pada Misi 5**, difokuskan untuk mewujudkan peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dengan modal perbaikan lingkungan pada periode sebelumnya, diharapkan upaya manajemen jasa lingkungan sudah mulai dapat dilakukan. Pemantapan pemenuhan akses dan kualitas pelestarian lingkungan hidup secara merata di seluruh wilayah yang berkelanjutan dengan penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna (inovasi) serta ekonomi sirkuler. Dari sisi pengembangan sarana dan prasarana, diharapkan terwujud pengembangan yang sudah beralih dari sarana dan prasarana minimal menjadi sarana dan prasarana yang adaptif dan berfokus pada kebutuhan pengembangan masyarakat yang cerdas (*smart infrastructure*).

5.1.4. Periode IV (2040-2045): Mewujudkan Sleman Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan

Arah kebijakan Kabupaten Sleman periode IV adalah mewujudkan Kabupaten Sleman yang sejahtera dan berbudaya.

- **Pada Misi 1**, Kabupaten Sleman akan mencapai pemerintahan yang efektif, tangkas. Inovatif dan adaptif untuk pelayanan publik yang optimal. Perwujudan pemerintahan yang efektif antara lain dicapai melalui digitalisasi yang sudah dimantapkan pada periode-periode sebelumnya. Pemantapan inovasi daerah yang berdaya saing juga menjadi fokus Kabupaten Sleman pada periode IV.



- **Pada Misi 2,** Kabupaten Sleman diharapkan dapat mencapai derajat kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dan merata. Periode ini berupaya memantapkan daya saing pelayanan kesehatan yang inovatif, berkualitas, berkelanjutan, dan *resilien* pada tingkat internasional. Kabupaten Sleman juga berupaya untuk mendayagunakan capaian-optimal pendidikan dasar-menengah yang berkualitas dan merata untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berwawasan global.
- **Pada Misi 3,** Kabupaten Sleman akan mengupayakan tahapan akhir untuk memiliki masyarakat berbudi luhur dan saling menghargai. Arah kebijakan ini dicapai melalui pencapaian kohesivitas masyarakat dan ketahanan sosial yang baik serta upaya inklusivitas dan pertumbuhan sosial masyarakat. Nilai-nilai budaya yang luhur diharapkan sudah mengakar melalui proses pada periode-periode sebelumnya, dengan penekanan pada periode ini untuk mencapai masyarakat yang siap menjadi warga negara dunia global.
- **Pada Misi 4,** Kabupaten Sleman berupaya memastikan bahwa Masyarakat mencapai kondisi yang makmur dan merata. Pemantapan ini melalui proses pemastian tercapainya kesejahteraan sesuai upaya pada periode sebelumnya serta mengembangkan sistem ekonomi yang hijau dan holistik sehingga pembangunan ekonomi akan berorientasi pada perwujudan keseimbangan lingkungan, pembangunan sosial serta sebagai pendukung pembangunan oleh pemerintah.
- **Pada Misi 5,** difokuskan untuk menciptakan sarana prasarana yang tangguh terhadap perubahan iklim, lingkungan hidup berkualitas baik dengan tata kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pengelolaan fungsi lingkungan hidup yang berkualitas.



Tabel 5. 1. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman 2025-2045

NO	VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
			Menguatkan Potensi Daerah	Memantapkan Potensi Daerah untuk Percepatan Pembangunan	Meningkatkan Daya Saing Daerah pada Tingkat Nasional dan Global	Mewujudkan Sleman Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan
1	Sleman yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangkas, Inovatif, dan Akuntabel	Arahan Makro: Penguatan transformasi tata kelola pemerintahan dan transformasi digital	Arahan Makro: Pemantapan dan percepatan transformasi tata kelola pemerintahan dan transformasi digital	Arahan Makro: Pematangan transformasi tata kelola pemerintahan dan transformasi digital	Arahan Makro: Perwujudan tata kelola pemerintahan efektif, tangkas, inovatif dan adaptif
			Penguatan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mendukung layanan publik berbasis teknologi informasi	Percepatan digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi dengan dukungan digital	Pematangan pelayanan publik secara digital dan peningkatan respons terhadap laporan masyarakat	Perwujudan pelayanan publik yang terintegrasi berbasis digital dan responsif
			Penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan sesuai dengan kebutuhan	Pemantapan tata kelola pemerintahan melalui kelembagaan yang kolaboratif menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi	Pematangan tata kelola pemerintahan melalui kelembagaan yang adaptif, profesional dan bebas korupsi	Perwujudan kelembagaan pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, profesional dan bebas korupsi
			Penguatan pengembangan karir aparatur sipil negara daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta dan mekanisme insentif-disinsentif	Peningkatan aparatur sipil negara yang sejahtera, profesional dan berkompeten	Pematangan aparatur sipil negara unggul dan kompetitif melalui manajemen aparatur sipil negara yang profesional	Perwujudan aparatur sipil negara unggul, kompetitif, berintegritas dan bebas korupsi
			Penguatan aspek riset dan inovasi dalam pengembangan daerah	Percepatan aspek riset dan inovasi dalam pengembangan daerah	pematangan aspek riset dan inovasi untuk mendorong daya saing	Perwujudan pemerintahan yang tangkas dan inovatif untuk mendukung daya



NO	VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
					daerah	saing daerah dan
						pembangunan berkelanjutan
			Penguatan regulasi dan tata kelola serta pemetaan aset daerah yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya	Penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah	Optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang menguntungkan	Perwujudan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang menguntungkan dan berkelanjutan
			Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban serta kehidupan demokrasi yang sehat	Peningkatan kerja sama dan sinergi lintas pemerintahan maupun dengan potensi masyarakat untuk mendukung peningkatan keamanan dan ketertiban umum serta mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat	Pematangan peran pemerintah daerah melalui sinergitas antar sektor dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung keamanan dan ketertiban umum serta kehidupan demokrasi yang sehat	Perwujudan kondisi daerah yang aman dan tertib serta kehidupan demokrasi yang sehat
			Penguatan regulasi dan mekanisme untuk meningkatkan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	Pemantapan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Perluasan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	Perwujudan masyarakat sipil yang partisipatif dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
			Pengembangan koordinasi dan kerja sama antarwilayah terutama dalam pengelolaan perkotaan	Perluasan kerja sama antarwilayah terutama dalam pengelolaan perkotaan	Pengelolaan kawasan lintas dengan pelayanan infrastruktur yang unggul menuju daya saing daerah	Pengelolaan kawasan lintas maju dan berkelanjutan dengan pelayanan infrastruktur yang unggul
2		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang	Arahan Makro: Penguatan transformasi kesehatan dan	Arahan Makro: Pemantapan dan percepatan transformasi	Arahan Makro: Perluasan dan pemerataan transformasi kesehatan	Arahan Makro: Perwujudan derajat kesehatan dan pendidikan



NO	VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Unggul	transformasi pendidikan	kesehatan dan transformasi pendidikan	dan transformasi pendidikan	yang berkualitas dan merata
			Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i>	Pemantapan edukasi penurunan <i>stunting</i> dan peningkatan kolaborasi kelembagaan kesehatan dengan lintas sektor	Percepatan dan pematangan pencegahan dan penuntasan <i>stunting</i> dengan mengedepankan peningkatan partisipasi masyarakat yang mandiri serta kolaborasi lintas sektor	Perwujudan zero <i>stunting</i>
			Peningkatan kualitas konsumsi pangan sehat dan gizi seimbang	Pengembangan sarana prasarana jaringan rantai pasok, distribusi dan stabilitas pangan di semua wilayah.	Penguatan profesionalitas dan kredibilitas kelembagaan multisektor dan manajemen pangan untuk kesehatan di semua perkotaan dan perdesaan	Perwujudan status gizi yang baik, merata, berkelanjutan berbasis edukasi dan kemandirian masyarakat untuk mencapai kesehatan sumber daya manusia
			Percepatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Pengembangan sarana prasarana permukiman dan sanitasi terpadu, terintegrasi berbasis kawasan	Penguatan kapasitas manajemen dan kelembagaan dalam pencegahan dan penanganan dampak lingkungan permukiman berbasis masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan	Perwujudan kesehatan lingkungan untuk sumber daya manusia unggul
			Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan	Pengembangan sistem pencegahan dan pengelolaan terhadap wabah dan penyakit menular	Penguatan edukasi dan keberdayaan masyarakat dalam manajemen kesehatan perkotaan dan perdesaan secara partisipatif	Perwujudkan kondisi wilayah perkotaan dan perdesaan yang terbebas dari sumber penyakit menular untuk kesehatan SDM
			Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan	Pemerataan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan	Penguatan kompetensi dan manajemen tenaga kesehatan berbasis digital	Perwujudkan sistem pelayanan kesehatan terpadu terintegrasi berbasis



NO	VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
			universal	kesehatan di wilayah desa dan kota	di wilayah perkotaan dan perdesaan	digital
			Percepatan implementasi wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) yang inklusif	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dengan pengembangan makna dan substansi pendidikan dalam konteks penguasaan nilai dan materi sebagai elemen kehidupan berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literasi, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah) yang inklusif	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik	Perwujudan kurikulum berbasis pemberdayaan masyarakat
			Pemerataan, percepatan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan dasar	Penguatan sarana dan prasarana terkait dengan penyelenggaraan pendidikan secara efisien dan efektif yang inklusif	Pemerataan, penguatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan secara efisien, efektif yang inklusif dan terjangkau serta memenuhi standar aman bencana yang dilayani transportasi khusus yang inklusif	Perwujudan lembaga pendidikan yang berdaya saing dan mampu memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, inklusif dan berwawasan global
			Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan	Penguatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/ insentif khusus guru dan tenaga kependidikan	Pemerataan guru dan tenaga kependidikan yang terdidik dan terampil dengan pengembangan dan pengayaan kemampuan teknologi, inovasi, daya kreasi untuk menumbuhkan produktivitas yang	Perwujudan guru dan tenaga kependidikan yang merata, terdidik, terampil dan sejahtera



NO	VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
					didukung dengan pemberian bantuan/ insentif berbasis kinerja dan inovasi	
			Peningkatan kualitas SDM pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum dengan penanaman nilai, penguatan sosial budaya, etika dan peningkatan kapasitas baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> dalam menunjang ketahanan keluarga	Peningkatan kualitas SDM dengan penanaman nilai, penguatan sosial budaya, etika serta peningkatan kapasitas melalui optimalisasi pendidikan non formal	Penguatan SDM terdidik dan terampil dengan pengembangan dan pengayaan teknologi, inovasi, daya kreasi, untuk menumbuhkan produktivitas.	Perwujudan SDM kreatif, inovatif, produktif dan berwawasan global melalui sistem pendidikan yang terjangkau berkualitas, merata dan berkeadilan.
			Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis implementasi pengembangan budi pekerti luhur	Penguatan makna dan substansi pendidikan dalam konteks penguasaan nilai dan materi sebagai elemen kehidupan	Penguatan integrasi pendidikan pesantren sebagai wadah penanaman ajaran keagamaan, nilai-nilai penguatan etika dan sikap, peningkatan keterampilan dan ajang inovasi daya kreasi dalam lembaga pendidikan yang unggul	Perwujudan lembaga pendidikan sekolah terbuka dan pesantren yang berdaya saing dan mampu memberikan pelayanan berkualitas dan berkeadilan
			Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Penguatan makna dan substansi pendidikan dalam konteks penguasaan nilai dan materi sebagai elemen kehidupan dengan kemampuan digital	Penguatan pembelajaran jarak jauh yang menghasilkan SDM mampu mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi secara beretika, bertanggung jawab dan produktif	Perwujudan SDM beretika, inovatif dan berdaya kreasi yang tinggi dalam meningkatkan produktivitas daya saing global



NO	VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
			Peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan atau bagi yang berprestasi	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan atau bagi yang berprestasi	Penguatan kolaborasi pembiayaan bagi peserta didik khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan atau bagi yang berprestasi atau memiliki peminatan dan bakat khusus	Perwujudan integrasi pembiayaan pendidikan yang kolaboratif bagi peserta didik khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan atau bagi yang berprestasi atau memiliki peminatan dan bakat khusus
3		Menguatkan Sosial Budaya Masyarakat yang Berbudi Luhur dan Saling Menghargai	Arahan Makro: Penguatan transformasi sosial dan budaya	Arahan Makro: Pemantapan dan percepatan transformasi sosial dan budaya	Arahan Makro: Percepatan dan pematangan transformasi sosial dan budaya	Arahan Makro: Masyarakat berbudi luhur dan saling menghargai
			Pengembangan stabilitas dan ketertiban umum melalui peningkatan interaksi sosial baik dalam penyediaan ruang maupun waktu interaksi sosial	Peningkatan ketahanan sosial melalui peningkatan kerukunan dan pengupayaan keterlibatan warga	Pengembangan masyarakat yang memiliki kohesivitas dan ketahanan sosial yang baik	Perwujudan masyarakat dengan ketahanan sosial yang kuat, berbudi luhur dan saling menghargai
			Pengembangan masyarakat beridentitas, berbudaya, dan tanggap bencana	Pengembangan masyarakat yang inklusif dan adaptif	Pengembangan masyarakat beridentitas global yang memiliki karakter lokal	Perwujudan masyarakat berbudi luhur yang inklusif dan adaptif sebagai cerminan kebudayaan istimewa yang berwawasan global
			Penguatan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana secara terintegrasi untuk mempertahankan angka kelahiran	Penurunan risiko utama penyebab kematian untuk mendukung tercapainya penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas	Pengoptimalan bonus demografi agar penduduk usia produktif dapat memberikan manfaat ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan keluarga	Perwujudan tumbuh kembang optimal pada <i>golden age</i> berbasis kemandirian masyarakat secara berkelanjutan
4		Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan	Arahan Makro: Penguatan transformasi ekonomi	Arahan Makro: Pemantapan dan percepatan transformasi ekonomi	Arahan Makro: Percepatan dan pematangan transformasi ekonomi	Arahan Makro: Masyarakat makmur dan merata



NO	VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
			Penguatan jaring pengaman sosial dan upaya pengentasan kemiskinan	Pengembangan pengentasan kemiskinan yang berbasis ketahanan sosial	Pengembangan kesejahteraan yang inklusif	Perwujudan masyarakat sejahtera
			Penguatan pengendalian inflasi daerah	Pemantapan pengendalian inflasi daerah	Percepatan pengendalian inflasi daerah	Perwujudan pengembangan ekonomi wilayah yang berkualitas
			Pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab	Peningkatan ekosistem serta pemanfaatan teknologi dalam pengembangan pariwisata	Pengembangan pariwisata berbasis global dan virtual melalui pengembangan teknologi kepariwisataan	Perwujudan pengembangan pariwisata yang berkualitas
			Penguatan fondasi dan ekosistem sektor ekonomi unggulan dan ekonomi kreatif	Peningkatan ekosistem serta pemanfaatan teknologi dalam pengembangan ekonomi kreatif dan sektor ekonomi unggulan	Peningkatan daya saing dan rantai ekonomi sektor unggulan dan ekonomi kreatif di tingkat global	Perwujudan pengembangan ekonomi kreatif dan sektor ekonomi unggulan yang berkualitas
			Pengembangan dan penguatan ekonomi menengah ke bawah melalui penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lintas sektor	Peningkatan ekosistem serta pemanfaatan teknologi dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	Pemantapan usaha mikro kecil dan menengah yang <i>resilien</i> dan berjejaring lokal-global	Pengembangan ekonomi kerakyatan yang melindungi dan menyejahterakan
			Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan	Pengembangan sistem agribisnis, integrasi pemanfaatan teknologi pertanian dan pemantapan ketahanan pangan	Pemantapan daya saing pertanian di tingkat global	Pengembangan ekonomi kerakyatan yang melindungi dan menyejahterakan
			Peningkatan konektivitas antar wilayah	Peningkatan pergerakan antar wilayah	Pemantapan pergerakan dan arus barang	Perwujudan pemerataan infrastruktur pembangunan
			Pengembangan jaringan dasar telekomunikasi untuk peningkatan	Perluasan jaringan telekomunikasi dengan kapasitas dan keandalan	Pemantapan jaringan telekomunikasi terutama pendukung inovasi	Perwujudan pemerataan infrastruktur teknologi informasi



NO	VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
			pemanfaatan IoT dan AI serta integrasi teknologi pada pengembangan ekonomi	yang prima	teknologi	
			Infrastruktur transportasi dan logistik, ketenagalistrikan dan air yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan	Perluasan jalinan koordinasi dan kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan kawasan termasuk untuk penyediaan infrastruktur lintas wilayah	Pemantapan infrastruktur pendukung industri pengolahan yang berdayasaing global	Perwujudan industri pengolahan yang berdayasaing
			Penguatan landasan ekonomi hijau	Pemantapan ekonomi hijau	Percepatan ekonomi hijau	Perwujudan ekonomi hijau
			Pengembangan lapangan kerja berbasis sektor ekonomi unggul dan pendukungnya	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i>	Stabilisasi dan stimulasi perlindungan kesejahteraan tenaga kerja	Stabilisasi dan stimulasi perlindungan kesejahteraan tenaga kerja
			Penguatan dan pengembangan badan usaha milik daerah (BUMD) pada sektor strategis	Pemberdayaan BUMD sebagai peran serta pemerintah dalam pembangunan sektor strategis	Peningkatan daya saing BUMD pada tataran nasional-internasional	Perwujudan BUMD yang unggul, inovatif dan berkelanjutan
5		Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Merata, Ramah Lingkungan, dan Berkesinambungan	Arahan Makro: Memperkuat fondasi pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan menitikberatkan pada penyediaan sarana dan prasarana yang merata serta penguatan kelembagaan pengelola	Arahan Makro: Mewujudkan peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang berkelanjutan dengan penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna	Arahan Makro: Pemantapan pemenuhan akses dan kualitas pelestarian lingkungan hidup yang terintegrasi dan berkelanjutan secara merata di seluruh wilayah	Arahan Makro: Menciptakan sarana prasarana yang tangguh terhadap perubahan iklim, lingkungan hidup berkualitas baik dengan tata kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pengelolaan fungsi lingkungan hidup yang berkualitas



NO	VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
			Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan basis utama pada kualitas tutupan lahan dan kualitas air	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan basis utama pada kualitas udara	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan basis utama pada kualitas tutupan lahan, kualitas air dan kualitas udara yang berkelanjutan	Perwujudan lingkungan yang <i>sustainable</i> dan tangguh sesuai dengan peradaban ekologis
			Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan	Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dengan pengembangan dan aplikasi teknologi yang efisien	Pengembangan sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan serta pelestarian keanekaragaman hayati yang terintegrasi	Perwujudan kelestarian keanekaragaman hayati dan sumber daya alam
			Pengembangan sarana dan prasarana dengan memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan hidup	Peningkatan sarana dan prasarana dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemulihan jasa lingkungan	Pengembangan sistem pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang terpadu untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Perwujudan sarana dan prasarana yang berkualitas dan berkelanjutan
			Pemerataan penyediaan infrastruktur air minum perpipaan pada kawasan perkotaan	Percepatan pelayanan air minum perpipaan pada kawasan perkotaan	Peningkatan pelayanan air minum perpipaan di seluruh wilayah	Perwujudan permukiman dengan akses air minum layak dan aman di seluruh wilayah
			Pemerataan penyediaan infrastruktur sanitasi	Percepatan peningkatan akses sanitasi layak dengan pengembangan teknologi yang efisien	Integrasi pengelolaan sanitasi dan penguatan kelompok pengelola sanitasi	Perwujudan permukiman dengan sanitasi layak dan aman di seluruh wilayah
			Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis <i>reduce, reuse</i> dan <i>recycle</i> masyarakat	Peningkatan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis <i>reduce, reuse</i> dan <i>recycle</i> Masyarakat dengan pengembangan teknologi yang efisien	Integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan ekonomi sirkuler dan penguatan kelompok masyarakat pengelola sampah	Perwujudan permukiman dengan layanan penuh pengelolaan sampah yang berkelanjutan di seluruh wilayah



NO	VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
			Penyediaan rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau	Pengembangan kawasan hunian yang layak tumbuh dan berkembang	Perwujudan permukiman perkotaan dan perdesaan yang sehat dan berkelanjutan
			Pengembangan sistem keruangan yang efisien	Peningkatan sistem transportasi yang berbasis efisiensi dan kompaktivitas	Pengembangan sistem transportasi yang berbasis efisiensi dan kompaktivitas	Perwujudan sistem transportasi yang terintegrasi, inklusif, sensitif dan <i>resilien</i>
			Penyediaan infrastruktur kota cerdas	Peningkatan infrastruktur kota cerdas	Pengembangan kota cerdas dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	Perwujudan kota cerdas yang efisien dan berkualitas
			Pengembangan kawasan perkotaan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup	Pengembangan kawasan perkotaan yang ramah lingkungan	Pengembangan peran dan identitas kawasan perkotaan yang ramah lingkungan	Perwujudan kawasan perkotaan yang inklusif, sensitif, <i>resilien</i> dan berkelanjutan

Sumber: Analisis, 2024



5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 merupakan rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level *impact* dan bersifat progresif. Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 dirumuskan dari arah pembangunan daerah, arah kebijakan transformasi daerah, dan indikator utama pembangunan (IUP) hasil penyelarasan RPJPD Kabupaten Sleman dengan RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045, sesuai karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

5.2.1.Arah Pembangunan Daerah

Arah pembangunan daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang sesuai karakteristik dan potensi wilayah. Arah pembangunan daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 terperinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5. 2. Arah Pembangunan Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045

No	Arah Pembangunan Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045
1	Transformasi tata kelola yang efektif, tangkas, adaptif, inovatif dan akuntabel melalui transformasi digital
2	Pembangunan desa mandiri dan berkelanjutan
3	Keamanan dan ketertiban yang kondusif
4	Kesehatan berkualitas untuk semua
5	Pendidikan berkualitas dan merata
6	Masyarakat yang berbudaya dan berbudi pekerti luhur
7	Keluarga berkualitas dan kesetaraan gender
8	Produktivitas ekonomi yang tinggi
9	Penurunan angka pengangguran
10	Penguatan sektor yang menyediakan lapangan pekerjaan
11	Kemandirian pangan
12	Perlindungan sosial yang adaptif
13	Lingkungan hidup berkualitas
14	Tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim
15	Ketahanan air

5.2.2.Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan transformasi merupakan gambaran upaya transformasi penurunan dari RPJPN dan RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi daerah. Arah kebijakan transformasi Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

Tabel 5. 3. Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045

No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Tahun 2025-2045
1	Sosial	1) Integrasi dan perluasan edukasi kesehatan yang bersifat preventif-promotif dan perilaku hidup sehat masyarakat
		2) Pengembangan sarana prasarana akses air bersih dan kebersihan lingkungan permukiman di semua wilayah perkotaan dan perdesaan dengan memperhatikan aspek lansia, inklusivitas, dan mitigasi bencana
		3) Pemerataan akses, peningkatan sarana-prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan primer maupun rujukan
		4) Pengembangan ketahanan keluarga terkait kesehatan masyarakat, membudayakan pencegahan penyakit degeneratif ditunjang dengan pelayanan kesehatan <i>geriatri</i>



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Tahun 2025-2045
		<p>5) Perwujudan kualitas kesehatan sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya</p> <p>6) Penguatan kelembagaan, budaya pelayanan, dan manajemen kesehatan yang merata di semua wilayah perkotaan dan perdesaan</p> <p>7) Perwujudan sistem pelayanan kesehatan terpadu terintegrasi berbasis digital</p> <p>8) Pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan</p> <p>9) Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas</p> <p>10) Perwujudan tumbuh kembang optimal pada <i>golden age</i> berbasis kemandirian masyarakat secara berkelanjutan</p> <p>11) Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i></p> <p>12) Peningkatan kualitas pola makan dengan konsumsi pangan sehat dan gizi seimbang</p> <p>13) Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan</p> <p>14) Percepatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)</p> <p>15) Pengembangan sarana prasarana permukiman dan sanitasi terpadu, terintegrasi berbasis kawasan</p> <p>16) Percepatan implementasi wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) yang inklusif</p> <p>17) Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan dasar</p> <p>18) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang berprestasi</p> <p>19) Pemerataan dan penguatan sarana dan prasarana terkait dengan penyelenggaraan pendidikan secara efisien dan efektif yang inklusif</p> <p>20) Penyelenggaraan pendidikan yang merata berkualitas, berkeadilan, berwawasan global, dan berbasis digital yang inklusif</p> <p>21) Peningkatan kualitas <i>soft skill</i> sumber daya manusia melalui pendidikan non formal, untuk pengayaan teknologi, inovasi, dan daya kreasi</p> <p>22) Perwujudan lembaga pendidikan yang berdaya saing dan mampu memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan dan berwawasan global</p> <p>23) Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah) yang inklusif</p> <p>24) Penguatan integrasi pendidikan sebagai wadah penanaman nilai, penguatan etika dan sikap, peningkatan keterampilan dan ajang inovasi, daya kreasi dalam lembaga pendidikan yang unggul</p> <p>25) Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)</p> <p>26) Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik</p> <p>27) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan</p> <p>28) Penguatan kompetensi, profesionalitas dan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis digital yang bersifat tematis, terus-menerus dan bersumber pada peminat peserta didik yang inklusif.</p> <p>29) Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan</p> <p>30) Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas</p> <p>31) Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta</p>



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Tahun 2025-2045
		pengembangan sekolah berbasis implementasi pengembangan budi pekerti luhur
		32) Percepatan dan peningkatan akses, kualitas pelayanan, lingkungan dan iklim belajar yang kondusif dan kualitas hasil belajar yang semakin baik, untuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang inklusif
		33) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum dengan penanaman nilai, penguatan sosial budaya, etika dan peningkatan kapasitas baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> dalam menunjang ketahanan keluarga
		34) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat di wilayah kantong kemiskinan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien
		35) Optimalisasi penyelenggaraan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat
		36) Optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat
		37) Peningkatan kemampuan adaptasi sosial masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial
		38) Pengembangan stabilitas, ketertiban umum, dan kerukunan melalui peningkatan interaksi sosial baik dalam penyediaan ruang maupun waktu interaksi sosial
		39) Peningkatan kapasitas fisik dan sumber daya manusia (SDM) layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial
		40) Reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan/kelurahan untuk percepatan transformasi sosial
		41) Peningkatan derajat kesehatan, kebugaran dan prestasi olahraga masyarakat melalui pembinaan olahraga, dan penyediaan sarana prasarana olahraga yang memadai
		42) Peningkatan kualitas pemuda yang mandiri, berdaya saing, aktif, inovatif dan menjadi pelopor pembangunan
		43) Pengembangan masyarakat beridentitas, berbudi luhur, berbudaya, adaptif, inklusif, dan tanggap bencana
		44) Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
		45) Percepatan pembangunan dan penurunan kemiskinan terutama di wilayah kantong kemiskinan
		46) Perwujudan masyarakat berbudi luhur yang inklusif dan adaptif sebagai cerminan kebudayaan istimewa yang berwawasan global
2	Ekonomi	<p>1) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian, perikanan budidaya, dan peternakan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan <i>water prosperity</i> melalui pengembangan kawasan sentra produksi pertanian</p> <p>2) Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan budi daya, dan peternakan yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i>, modifikasi cuaca, dan lainnya)</p> <p>3) Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian, perikanan budidaya, dan peternakan unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar</p>

No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Tahun 2025-2045
		ekspor/global
		4) Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis di sektor pertanian, perikanan budi daya, dan peternakan
		5) Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani, pembudidaya ikan, peternak guna meningkatkan produktivitasnya melalui teknologi budidaya pertanian
		6) Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian, perikanan, dan peternakan
		7) Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial (irigasi saluran primer, sekunder, dan tersier), bagi upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian, perikanan budidaya, dan peternakan
		8) Revitalisasi balai penyuluhan pertanian (BPP) dan penyediaan penyuluh pendamping lapangan (PPL) yang berkualitas bagi petani, pembudidaya ikan, dan peternak
		9) Mendorong investasi di sektor pertanian, perikanan budidaya, dan peternakan, dan mengembangkan sistem inti plasma
		10) Pengembangan <i>closed loop</i> model pertanian, perikanan budidaya, dan peternakan melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan petani, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market</i> , bank, dan asuransi pertanian
		11) Pengembangan ekonomi agrikultur berbasis keunggulan wilayah
		12) Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik serta infrastruktur penunjang yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan
		13) Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu menuju <i>zero solid waste</i> dan mendukung <i>circular economy</i>
		14) Perluasan gelaran <i>fixed connection</i> dan/atau infrastruktur <i>mobile connection</i> untuk <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet pada seluruh kawasan sesuai prioritas pengembangan wilayah
		15) Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan destinasi wisata
		16) <i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan <i>dignity</i> , sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourism</i> , terutama pada kawasan urban dan suburban
		17) Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, <i>ancillary services</i> , aktivitas, <i>available packages</i>) pada kawasan urban (<i>urban tourism</i>) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif
		18) Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha
		19) Penguatan pengelolaan jalan daerah
		20) Pembangunan wilayah pintu tol Sleman untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: Jogja-Bawen; Jogja-YIA; dan Jogja-Solo
		21) Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang dunia usaha dan dunia industri yang berdaya saing di tataran global
		22) Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau
		23) Peningkatan profesionalitas koperasi
		24) Peningkatan keterkaitan UMK (Usaha Mikro Kecil) pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha
		25) Penguatan proses bisnis UMK (Usaha Mikro Kecil) melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis
		26) Perluasan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Tahun 2025-2045
		antar wilayah maupun kerja sama regional lainnya
		<p>27) Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang produktif dan secara optimal mampu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah</p> <p>28) Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok (ii) peningkatan utilitas dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (pertanian, pariwisata, industri dan perikanan); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i></p> <p>29) Ekosistem digital yang menjangkau semua aspek dan kawasan serta mendukung produktivitas</p> <p>30) Pengembangan industri bersih dan berteknologi tinggi yang berkelanjutan dan berorientasi ekspor</p> <p>31) Mewujudkan kemandirian pangan dan pemantapan kualitas pasokan pangan</p> <p>32) Pengembangan pariwisata bertanggung jawab (mematuhi <i>carrying capacity, sustainable</i>, inklusif)</p> <p>33) Mengembangkan pariwisata yang berimbang antara <i>mass tourism</i> dan <i>quality tourism</i></p> <p>34) Mengembangkan pertumbuhan ekonomi berbasis investasi di semua sektor</p> <p>35) Perluasan kesempatan kerja melalui berbagai pelatihan</p> <p>36) Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dalam rangka peningkatan kapasitas calon tenaga kerja</p> <p>37) Memperkuat <i>link and match</i> dunia pendidikan dan dunia kerja</p>
3	Tata Kelola	<p>1) Identifikasi dan pemetaan regulasi di daerah serta penguatan mekanisme pembentukan regulasi</p> <p>2) Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah</p> <p>3) Peningkatan kualitas regulasi di daerah</p> <p>4) Penguatan regulasi dan mekanisme untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan</p> <p>5) Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan</p> <p>6) Perluasan kualitas partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan</p> <p>7) Pemantapan kualitas partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan</p> <p>8) Penguatan mekanisme dan/atau kelembagaan pengelola respons laporan masyarakat dan pembangunan layanan publik secara digital</p> <p>9) Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respons terhadap laporan masyarakat</p> <p>10) Perluasan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respons terhadap laporan masyarakat</p> <p>11) Pemantapan pelayanan publik secara digital dan responsif</p> <p>12) Penataan kelembagaan dan aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah maupun perkembangan teknologi, sains, manajerial, baik dalam arus lokal, regional, dan global</p>



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Tahun 2025-2045
		13) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas aparatur, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi
		14) Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk yang mendukung kualitas pelaksanaan pemerintahan
		15) Peningkatan pengembangan karir aparatur sipil negara daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i> , dan <i>punishment</i> , termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan aparatur sipil negara daerah berdasarkan capaian kinerja
		16) Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat
		17) Penguatan integritas partai politik
		18) Reformasi birokrasi sampai lini terdepan pemerintahan (kalurahan/kelurahan)
4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	<p>1) Peningkatan kerja sama dan sinergi lintas pemerintahan maupun dengan potensi masyarakat untuk mendukung peningkatan keamanan dan ketertiban umum</p> <p>2) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan regulasi dan tata kelola, intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, intensifikasi pemanfaatan aset daerah, penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional</p> <p>3) Peningkatan kerja sama lintas wilayah dan sinergi lintas pemerintahan maupun dengan potensi masyarakat untuk mendukung peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan</p> <p>4) Penguatan pengendalian inflasi daerah</p> <p>5) Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila dan UUD 45</p> <p>6) Peningkatan keamanan dan penegakan hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat</p>
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<p>1) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan</p> <p>2) Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan</p> <p>3) Peningkatan pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya</p> <p>4) Penguatan inklusi sosial dalam pembangunan</p> <p>5) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan kesetaraan gender</p> <p>6) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang</p> <p>7) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan</p> <p>8) Perwujudan masyarakat berbudi luhur yang inklusif dan adaptif sebagai cerminan kebudayaan istimewa yang berwawasan global</p> <p>9) Penguatan lembaga dan peningkatan kapasitas pelaku budaya melalui pembinaan yang terarah dan berkesinambungan</p> <p>10) Peningkatan pelestarian, pengembangan dan penyebaran</p>



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Tahun 2025-2045
		konten/materi kebudayaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi antara lain melalui digitalisasi
		11) Penguatan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana secara terintegrasi untuk mempertahankan angka kelahiran 12) Penurunan risiko utama penyebab kematian untuk mendukung tercapainya penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas. 13) Pengoptimalan bonus demografi, agar penduduk usia produktif dapat memberikan manfaat ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.
6	Implementasi Transformasi: a. Pembangunan kewilayah-an yang merata dan berkeadilan b. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan c. Kestinambungan pembangunan	1) Pengembangan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dengan kawasan di sekitarnya secara selaras, serasi dan seimbang. 2) Kebijakan pembangunan daerah berdasarkan rencana tata ruang umum dan rencana tata ruang rinci. 3) Pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi yang berkualitas dan berkelanjutan. 4) Pengembangan aksesibilitas prasarana jalan dan jembatan yang disertai dengan manajemen rekayasa lalu lintas yang andal. 5) Pelestarian kawasan yang berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 6) Pengelolaan sampah terpadu melalui strategi pengurangan sampah di tingkat masyarakat dan pengembangan sarana prasarana pengelolaan sampah di tingkat kalurahan dan kabupaten berbasis <i>circular economy</i> . 7) Menciptakan sarana prasarana wilayah yang berkesinambungan melalui pengendalian dan penguatan keselarasan pembangunan infrastruktur antar sektor (misal: sektor pertanian, irigasi, jalan, pariwisata, dan perumahan permukiman). 8) <i>Land banking</i> untuk mendukung rencana pengembangan wilayah sesuai dengan prioritas pembangunan. 9) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten. 10) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional. 11) Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan. 12) Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko

5.2.3. Indikator Utama Pembangunan Daerah

Indikator Utama Pembangunan Daerah (IUP) adalah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi



terhadap tujuan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional jangka panjang. Indikator Utama Pembangunan Daerah (IUP) Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 tersaji sebagai berikut:

Tabel 5. 4. Keterkaitan Misi 1 (Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangkas, Inovatif, dan Akuntabel) dengan Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Sleman 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah/Tujuan Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline (2025)	Target (2045)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Transformasi tata kelola yang efektif, tangkas, adaptif, inovatif dan akuntabel melalui transformasi digital	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	3,5	4,7 - 5,0
		Pembangunan desa mandiri dan berkelanjutan	Persentase desa mandiri (%)	82,56	93
2	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum	Keamanan dan ketertiban yang kondusif	Crime rate (per 100.000 penduduk)	125	110

Tabel 5. 5. Keterkaitan Misi 2 (Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul) dengan Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Sleman 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah/Tujuan Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline (2025)	Target (2045)
3	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang unggul	Kesehatan berkualitas untuk semua	Usia harapan hidup (UHH) (tahun)	75,59	77,5 - 81,5
			Kesehatan ibu dan anak:		
			Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	56,19	34,19
			Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	5 - 4
			Penanganan tuberculosis:		
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	91	100
			Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	86,4	95 - 98
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99	99 - 99,95
		Pendidikan berkualitas dan	Hasil pembelajaran:		



No	Sasaran Pokok	Arah/Tujuan Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline (2025)	Target (2045)
		merata	a. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk - Literasi membaca (%) - Numerasi (%)	86,79 - 90,79 69,48 - 71,48	91 - 93 86 - 88
			b. Harapan lama sekolah (tahun)	16,79 - 16,85	17,69 - 17,83

Tabel 5. 6. Keterkaitan Misi 3 (Menguatkan Sosial Budaya Masyarakat yang Berbudhi Luhur dan Saling Menghargai) dengan Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Sleman 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah/Tujuan Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline (2025)	Target (2045)
4	Meningkatnya kualitas budaya masyarakat	Masyarakat yang berbudaya dan berbudi pekerti luhur	Indeks pembangunan kebudayaan (IPK)	68,22	82,25 - 84,5
		Keluarga berkualitas dan kesetaraan gender	Indeks ketimpangan gender (IKG)	0,118	0,114 - 0,08
			Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	63,71 - 78,71	70 - 85

Tabel 5. 7. Keterkaitan Misi 4 (Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan) dengan Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Sleman 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah/Tujuan Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline (2025)	Target (2045)
5	Terwujudnya daya saing ekonomi yang tinggi	Produktivitas ekonomi yang tinggi	Produk domestik regional bruto per kapita (Rp juta)	57,75 - 61,56	118,87 -144,78
		Penurunan angka pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,08 - 4,14	4,48 - 3,27
		Penguatan sektor yang menyediakan lapangan pekerjaan	Rasio produk domestik regional bruto industri pengolahan (%)	11,59 - 12,93	14,00 - 14,37
			Rasio produk domestik regional bruto penyediaan akomodasi makan dan minum (%)	10,33 - 11,51	16 - 22

No	Sasaran Pokok	Arah/Tujuan Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline (2025)	Target (2045)
			Produktivitas usaha mikro kecil dan menengah, koperasi dan BUMD		

			a. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten/kota (%)	3,24	9,05
			b. Rasio kewirausahaan daerah (%)	4,74 - 5,74	8
			c. Rasio volume usaha koperasi terhadap produk domestik regional bruto (%)	2,39 - 2,55	2,50 - 2,98
			Pembentukan modal tetap bruto (% produk domestik regional bruto)	30,81 - 37,81	33 - 40
			Rasio pajak daerah terhadap produk domestik regional bruto (%)	1,41	1,61
			Total kredit/produk domestik regional bruto (%)	39,55	50,93
		Kemandirian Pangan	Ketahanan pangan: Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>prevalence of undernourishment</i>) (%)	6,41 - 6,22	2,77 - 2
6	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif	Perlindungan sosial yang adaptif	Tingkat kemiskinan (%)	6,98 - 6,79	0,39 - 0,79
			Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten/kota (%)	31	87,17

Tabel 5. 8. Keterkaitan Misi 5 (Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Merata, Ramah Lingkungan dan Berkesinambungan) dengan Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Sleman 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah/Tujuan Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline (2025)	Target (2045)
7	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Lingkungan hidup berkualitas	Kualitas lingkungan hidup		
			a. Indeks kualitas lingkungan hidup	66,96	71,5
			b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	28,66	85
			c. Pengelolaan sampah		
			1) Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	71,32	93,43
			2) Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	85 - 86	90 - 100



No	Sasaran Pokok	Arah/Tujuan Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline (2025)	Target (2045)
			Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan: Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	98	100
		Tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks risiko bencana (IRB)	77 - 73	70 - 66
8	Terwujudnya prasarana dan sarana wilayah yang berintegrasi dan berkualitas	Ketahanan air	Ketahanan Air: Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	25	100



BAB VI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 yang berisi visi, misi, arah kebijakan pembangunan, sasaran pokok pembangunan telah disampaikan dalam dokumen ini. Substansi tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan jangka panjang selama kurun waktu 20 (dua puluh tahun) ke depan. RPJPD juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (lima tahunan) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (tahunan).

Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan Visi *Terwujudnya Sleman yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan*, telah direncanakan melalui dokumen ini. Adapun proses perwujudannya akan sangat membutuhkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat serta sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan.

Segala proses dari perwujudan rencana dalam dokumen ini menjadi tanggung jawab seluruh elemen di Kabupaten Sleman, baik dalam proses implementasi, pengawasan, pengendalian hingga kebutuhan untuk perbaikan dari substansi rencana ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi sebuah landasan keberlanjutan yang nantinya bisa menempatkan Kabupaten Sleman dalam posisi emas pada tahun 2045 nanti.

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

